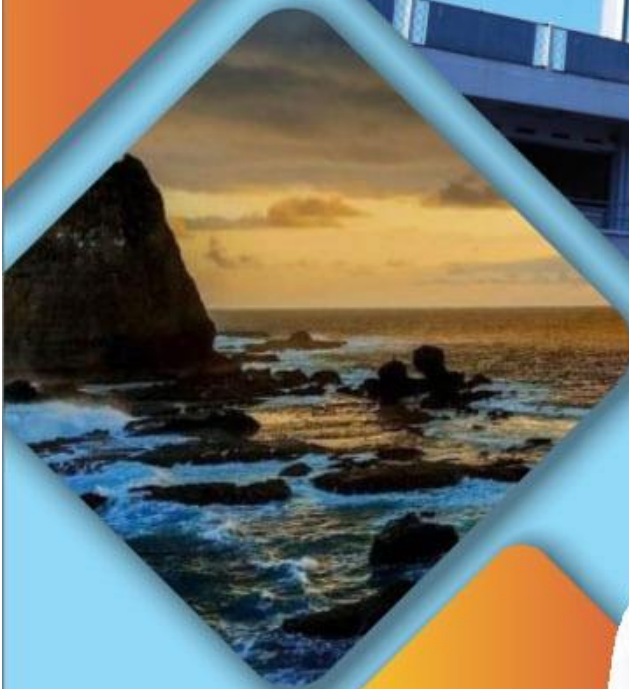




**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
(LKPJ) BUPATI JEMBER
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**





(LKPJ)

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2021**

**KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember.

Penyusunan dan penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2021-2024 tahun pertama yang disampaikan oleh Bupati periode tahun 2021-2024.

Penyampaian LKPJ Bupati Jember Akhir Tahun Anggaran 2021 kepada DPRD, pada dasarnya menginformasikan gambaran kinerja perangkat daerah secara utuh sepanjang Tahun Anggaran 2021 berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati Kepala Daerah



bersama DPRD. Gambaran kinerja tahunan ini merupakan implementasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengakumulasikan ketepatan perencanaan, kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jember, serta optimalisasi dalam pengendalian dan pengawasan seluruh kegiatan, yang ditunjang oleh seluruh stakeholders. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja maupun permasalahan dan hambatan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan tanggung jawab bersama seluruh OPD dibawah koordinasi Kepala Daerah.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan berperan serta dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember selama Tahun Anggaran 2021 kami ucapkan terima kasih, dan semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jember tahun berikutnya senantiasa mendapat kemudahan, perlindungan, kekuatan, petunjuk, dan ridho Allah SWT.

Jember, Maret 2022

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY S, ST , IPU



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1-1
1.1 Dasar Hukum	1-2
1.2 Visi dan Misi	1-4
1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	1-20
1.4 Program Pembangunan Daerah	1-29
1.5 Gambaran Umum Daerah	1-33
1.5.1 Kondisi Geografis	1-33
1.5.2 Gambaran Umum Demografis	1-56
1.5.3 Kondisi Ekonomi	1-59
 BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH	 2-1
2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah	2-2
2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	2-2
2.1.2 Permasalahan dan Solusi	2-15
2.2 Pengelolaan Belanja Daerah	2-16
2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	2-16
2.2.2 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2021	2-21



2.2.3 Permasalahan dan solusi.....	2-22
2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah	2-23
2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah.....	2-23
2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	2-24

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	3-1
3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	3-3
3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-3
3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	3-83
3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	3-224
3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.....	3-262
3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.....	3-303
3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	3-351
3.1.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan	3-359
3.1.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintah Umum.....	3-531
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	3-543
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	3-545

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

DAN PENUGASAN.....	4-1
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan	4-2
4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....	4-5



4.1.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4-5
4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya.....	4-10
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan upaya penyelesaian	4-10
4.2.1 Hambatan/Permasalahan tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya.....	4-10
4.2.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4-10
4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	4-11
4.3.1 Kerjasama Antar Daerah	4-13
4.3.2 Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	4-16
4.3.3 Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah	4-26
4.3.4 Pembinaan Batas Wilayah	4-26
4.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana	4-28
4.3.6 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4-37
BAB V PENUTUP	5-1



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Arah Kebijakan Kabupaten Jember	1-21
Tabel 1.2	Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama	1-33
Tabel 1.3	Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember.....	1-35
Tabel 1.4	Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember.....	1-49
Tabel 1.5	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat	1-37
Tabel 1.6	Kemiringan Lahan Kabupaten Jember.....	1-38
Tabel 1.7	Luas Wilayah (km ²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng.....	1-59
Tabel 1.8	Kawasan Budidaya Kabupaten Jember.....	1-41
Tabel 1.9	Kawasan Lindung Kabupaten Jember.....	1-49
Tabel 1.10	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember	1-51
Tabel 1.11	Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember	1-54
Tabel 1.12	Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021.....	1-57
Tabel 1.13	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2021	1-58
Tabel 1.14	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah).....	1-62
Tabel 1.15	PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah).....	1-63



Tabel 1.16	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 – 2021	1-65
Tabel 1.17	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021.....	1-66
Tabel 1.18	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	1-67
Tabel 1.19	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	1-68
Tabel 1.20	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.....	1-70
Tabel 2.1	Pajak Daerah Kabupaten Jember TA 2021.....	2-4
Tabel 2.2	Retribusi Daerah Kabupaten Jember TA 2021.....	2-5
Tabel 2.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kabupaten Jember TA 2021.....	2-6
Tabel 2.4	Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Jember TA 2021	2-6
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.....	2-8
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-9
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-11
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-11
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.....	2-13
Tabel 2.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021.....	2-14
Tabel 2.11	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-15



Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-21
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021	2-25
Tabel 2.14	Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 – 2021	2-26
Tabel 4.1	Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021 Kabupaten Jember	4-5
Tabel 4.2	Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2016 – 2021	4-31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026	1-8
Gambar 1.2	Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan Kabupaten Jember.....	1-12
Gambar 1.3	Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan.....	1-54
Gambar 1.4	Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016-2020.....	1-57
Gambar 1.5	PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2016-2020 (dalam Miliar Rupiah).....	1-64
Gambar 2.1	Perbandingan Perkembangan Belanja Tidak Langsung terhadap Belanja Langsung APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2016 – 2020	2-27
Gambar 4.1	Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015-2020.....	4-28

1

Pendahuluan

Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tersebut didasarkan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan dan keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 69 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam pasal 71 ayat 2 diamanatkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mewajibkan kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah tahun anggaran berakhir. Pelaporan tersebut merupakan upaya pembentukan keseimbangan (*checks and balances*)



antara dua fungsi penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu fungsi eksekutif (kepala daerah) dan fungsi legislatif (DPRD).

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021, yang merupakan penjabaran tahunan dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026, dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025. Dokumen tersebut memuat rencana pembangunan ke depan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran pada dasarnya merupakan *progress report* atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jember di tahun mendatang.

1.1 Dasar Hukum

Landasan hukum sebagai dasar pijakan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini mengacu dan berpedoman pada :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021.

1.2 Visi dan Misi

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 263 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijaksanaan pembangunan, dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJPD Kabupaten, RPJMD Provinsi, dan RPJM Nasional.

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Sinergis dengan hal tersebut di atas, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten



Jember tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 ini di samping mengacu pada RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dirumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Wis wayahe mbenahi Jember

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/*stunting* yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, *wis wayahe!*

Kolaborasi

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan



baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

Sinergi

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan



kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

Akselerasi

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah.

Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Tiga Pilar Visi Pembangunan Jember 2021-2026



Berdasarkan visi pembangunan di atas, dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun ke depan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutanan, perikanan,



Kategori industri pengolahan, serta Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Kegiatan pertanian *on-farm*, perikanan, dan kegiatan hulu lainnya harus diintegrasikan dengan kegiatan industri pengolahan produk dan prasarana pendukungnya, bahkan dengan pasar sasarnya. Integrasi kegiatan ekonomi hulu-hilir pada Kategori utama penyumbang PDRB diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan melalui produktifitas hasil pertanian dan perikanan yang tinggi, tetapi juga harus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan melalui industri pengolahan dan perdagangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pelaku usahanya.

Kelompok penduduk dengan jumlah populasi yang besar, seperti kelompok penduduk pelajar usia muda, termasuk yang di pesantren, adalah sasaran strategis yang dapat dilibatkan dalam mengembangkan sektor-sektor utama dan potensial penyumbang PDRB di atas. Kelompok yang berisi generasi *baby boomer* dan *millenial* tersebut dapat diberikan pelatihan yang lebih *technology-intensive* untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya dan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi kelompok penduduk yang mendominasi struktur demografi tersebut harus didorong dan difasilitasi agar lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha muda baru, meskipun mulai dengan skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mereka dapat dihimpun dan dilembagakan dalam koperasi pemuda atau koperasi pondok pesantren yang terintegrasi dalam rantai koperasi primer, koperasi produksi, koperasi sekunder, koperasi pembiayaan, dan koperasi jenis lainnya sehingga memiliki kemampuan dan

kapasitas untuk mengakses dan menjalin kerjasama usaha dengan industri *offtaker*.

Misi 1 secara keseluruhan telah memuat pilar pembangunan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Pilar pembangunan ekonomi yang termuat dalam misi ini mencakup antara lain, (1) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur, (3) Berkurangnya Kesenjangan, dan (4) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (*good governance*). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (*civil society*) yang proaktif dan kolaboratif.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik



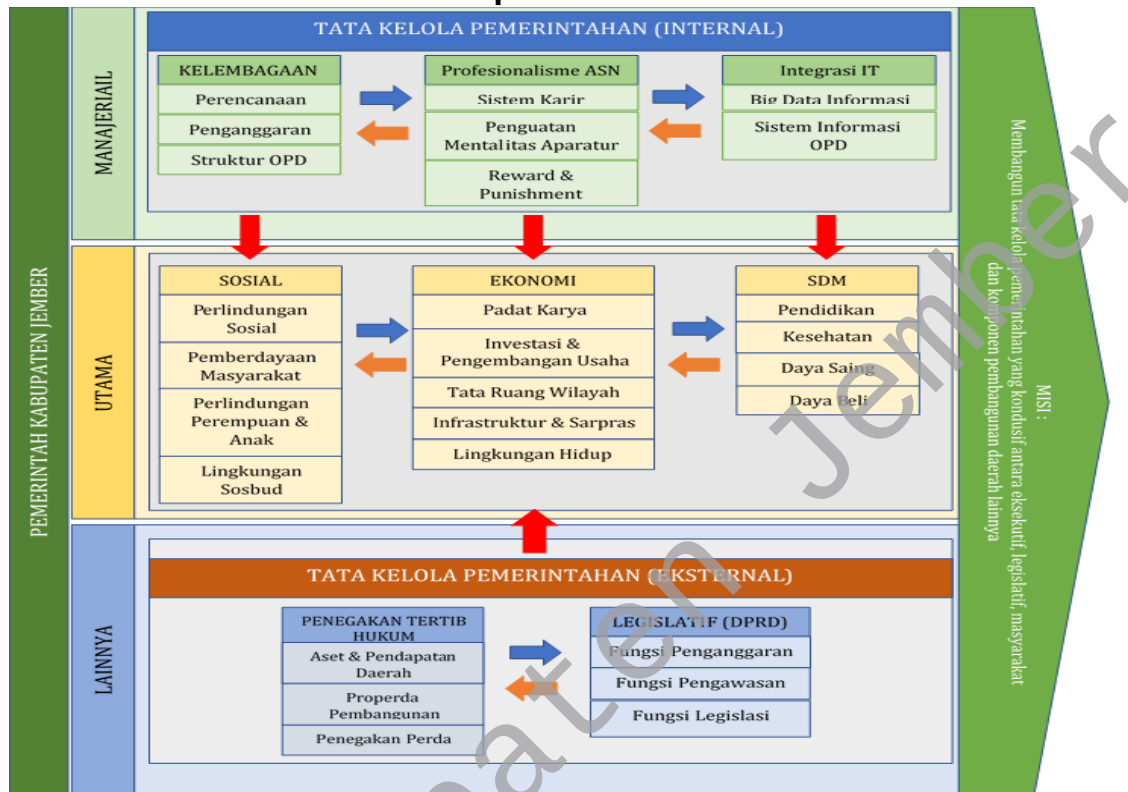
yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran.

Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar program pembangunan yang direncanakan pemerintah daerah dapat dipadukan dengan partisipasi masyarakat luas melalui ormas maupun kelompok masyarakat sipil lainnya sehingga tercipta ketenteraman dan ketertiban umum. Upaya untuk memoderasi agama, menumbuhkan rasa kesatuan berbangsa, dan menghargai kemajemukan yang ada di masyarakat harus terus dilakukan dan disebarluaskan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif juga dicerminkan oleh hubungan yang harmonis antara eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. prinsip sinergi yang diusung dalam RPJMD ini mengharuskan terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif mengacu pada kesesuaian persepsi, gagasan dan arah kebijakan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan nantinya dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jember.

Baik sinergi internal maupun eksternal harus didorong untuk arah tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang partisipatoris, akuntabel, efektif dan efisien. Sinergitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember dapat digambarkan dalam peta bisnis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai keberhasilan Misi 2 ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintah Daerah, dapat digambarkan sinergitas pencapaian Misi 2 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Peta Bisnis Sinergisitas Eksekutif dan Legislatif Pemerintahan
Kabupaten Jember



Pada Gambar 1.2. di atas, dijelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Peran legislatif dalam misi ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember kedepan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk mereaktualisasikan perannya dalam memperkuat pembangunan daerah.

Kerja sama eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Kolaborasi ini dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif dan legislatif pada ranah 3 fungsi legislatif yang memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Hubungan antara eksekutif dan legislatif secara realistis dapat



dikembangkan dengan mengembangkan 3 (tiga) pola hubungan yang harus dilakukan. Ketiga hubungan itu adalah, *pertama*, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi. *Kedua*, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. *Ketiga*, klarifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan. Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (*no-one left behind*). Kemiskinan, baik oleh sebab struktural maupun sebab kultural, ditanggulangi melalui pendekatan berbasis keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga berpenghasilan rendah atau di bawah garis kemiskinan diberikan keterampilan kerja tambahan agar mampu mencari tambahan penghasilan di luar waktu kerjanya. Ibu rumah tangga dan perempuan kepala rumah tangga diberikan pelatihan kerja, akses permodalan dan pasar, serta pendampingan manajemen usaha agar mampu membantu atau menambah penghasilan keluarga. Anak-anak yang telah berusia kerja tapi



menganggur atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, disediakan informasi bursa kerja, dilibatkan dalam kegiatan padat karya, atau diberikan akses menjadi wirausaha. Anak-anak yang masih sekolah diberikan beasiswa siswa miskin.

Masyarakat yang secara kultural terpinggirkan dalam lapangan kerja, seperti perempuan dan masyarakat berkebutuhan khusus, harus diberikan kesempatan yang sama dan setara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak (*decent works*). Pelibatan kelompok utama dalam masyarakat, seperti pondok pesantren dan majelis taklim, dapat meningkatkan efektifitas upaya dan pelebagaan penanggulangan kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jember menjadi salah satu fokus RPJMD Kabupaten Jember 2021-2026. Agenda besar pemerintah daerah adalah mendorong pemerataan kesejahteraan di setiap wilayah sampai ke tingkat desa. Oleh karena itu, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan keluarahan, khususnya terkait dengan penanggulangan kemiskinan, harus diintegrasikan dan diselaraskan dengan perencanaan di tingkat kabupaten. Data penduduk dan keluarga miskin harus dikumpulkan sampai tingkat administrasi wilayah paling rendah menurut nama dan alamat (*by name, by address*). Akses penduduk terhadap berbagai alternatif sumber pangan bergizi dan terjangkau selain beras harus ditingkatkan dan dikendalikan melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH).

Untuk itu, Misi 3 ini sejalan dengan pilar pembangunan sosial dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs). Di dalam pilar pembangunan sosial, kaitannya dengan Misi 3 ini adalah (1) Tanpa Kemiskinan, (2) Tanpa Kelaparan, (3) Kehidupan Sehat dan



Sejahtera, (4) Pendidikan Berkualitas, dan (5) Kesenjangan Gender. Tujuan akhir dari Misi ini adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasis kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.

Untuk menjamin keberlangsungan (*sustainability*) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember.

Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Iklim kemudahan berusaha harus mampu mendorong tumbuh suburnya pendirian usaha mikro dan kecil



dari masyarakat Jember yang selanjutnya dapat diorganisir dalam lembaga usaha koperasi. Pengorganisasian kelompok usaha harus didorong sampai pada tingkat masyarakat akar rumput, termasuk di pesantren-pesantren.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember. Kualitas SDM, terutama pada jenjang penduduk usia 5-18 tahun, sangat penting di masa 7-20 tahun mendatang untuk menopang bonus demografi yang berkualitas dan mencapai surplus rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang memadai dan menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun maupun pendidikan nonformal sehingga angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tantangan proses belajar-mengajar secara daring (*online*) selama pandemi Covid 19 harus menjadi momentum untuk melakukan terobosan meningkatkan angka partisipasi sekolah yang belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan pada pendidikan yang lebih berkualitas juga perlu memperhatikan dan melibatkan keberadaan pendidikan madrasah diniyah yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Jember sehingga cukup signifikan mempengaruhi capaian angka partisipasi sekolah.

Peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan secara umum ditujukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui



penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah *stunting* pada anak, disamping kematian yang disebabkan oleh penyakit. Kualitas kesehatan masyarakat secara umum harus terus ditingkatkan melalui pembinaan keluarga, terutama pada perempuan sejak saat penetapan usia perkawinan dengan mencegah perkawinan dini, pemeriksaan kesehatan selama masa kehamilan, penanganan kesehatan selama persalinan, dan pendampingan kesehatan anak saat balita.

Kesadaran pada pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus disosialisasikan secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas terkecil dan keluarga, seperti kelompok dasa wisma, sekolah, pesantren, atau majelis taklim. Keberadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan yang disediakan sampai tingkat desa, seperti posyandu dan bidan desa harus diperkuat untuk mendekatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas.

Tantangan pandemi Covid 19 yang masih terus menunjukkan kecenderungan naik pada jumlah penduduk yang terpapar harus terus dikendalikan dengan menjaga ketertiban umum melalui penerapan pembatasan sosial dan mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan. Upaya awal dengan melakukan vaksinasi masal harus segera dilaksanakan agar segera tercapai kekebalan komunitas (*herd immunity*). Kekebalan komunitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan yang lain yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara normal.

6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang



disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Konektivitas ekonomi yang merata melalui pembangunan dan penyelenggaraan jalan dapat membuka akses dan meningkatkan mobilitas antar desa dan wilayah yang ada di Kabupaten Jember sehingga dapat memacu kegiatan ekonomi masyarakat di dan antar wilayah, baik antar wilayah utara-selatan, perkotaan-perdesaan, maupun pesisir-pegunungan.

Pemerataan infrastruktur publik, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi bencana melalui penyediaan dan penetapan tempat penyelamatan (*safe haven*) saat kejadian bencana dan jalur-jalur evakuasi yang aman, jelas, dan mudah untuk digunakan sehingga kerugian material, korban jiwa, kerusakan sosial, dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihindari.

Penyediaan infrastruktur publik yang merata harus memperhatikan dan mencakup penyediaan akses yang lebih mudah pada ekosistem lingkungan sekitarnya seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan yang efektif, dan perbaikan kualitas wilayah kumuh (*upgrading slum areas*), tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan.



7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Pengembangan Kategori pariwisata memiliki peran yang strategis dalam membangkitkan potensi ekonomi sektor-sektor yang lain dan usaha kecil menengah (UKM), seperti jasa penginapan, kuliner khas daerah, souvenir khas daerah, *fashion*, transportasi, maupun jasa pemandu wisata (*tour guide*). Rantai nilai ekonomi Kategori pariwisata yang panjang diharapkan dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Jember, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi Kategori pariwisata pada pendapatan asli daerah dan PDRB.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah juga dapat memberikan penguatan pengetahuan pada masyarakat daerah, terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah yang unggul dan luhur di Kabupaten Jember. *Event* olahraga dapat diintegrasikan ke dalam wisata alam seperti lari maraton Jember 10K atau balap sepeda Tour de Jember.

Pengetahuan tentang berbagai nilai unggul dan luhur dari kearifan lokal yang diinternalisasi dengan baik dapat membangkitkan rasa bangga menjadi warga Jember yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi dan modal sosial (*social capital*) dalam pembangunan daerah. Modal sosial ini akan menjadi energi positif bagi upaya membangun citra daerah (*city branding*) Kabupaten Jember. Masyarakat Jember yang bangga dengan kearifan lokal dan kondisi daerahnya akan



menjadi pemasar aktif bagi industri pariwisata di daerah Jember melalui berbagai media sosial secara sukarela.

Disamping nilai-nilai luhur kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan moderat, khususnya Islam, dalam masyarakat Jember harus semakin dikembangkan untuk menjaga sikap toleransi, semangat kebangsaan, dan pemahaman Islam yang rahmatan lilalamin. Upaya yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme beragama dapat dilakukan dengan melibatkan madrasah diniyah di lingkungan pendidikan, majelis taklim di lingkungan masyarakat, dan pondok-pondok pesantren.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Jember menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa kebijakan yang akan mendorong Kategori pariwisata sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti pengembangan inovasi dan produk unggulan Kategori pariwisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, promosi wisata melalui kebijakan *heritage tourism*. Potensi pariwisata yang dimiliki Jember mengedepankan aspek pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan.

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program- program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.



Strategi dan arah kebijakan dirumuskan Pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dalam konteks ini melingkupi perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah dan perencanaan operasional berupa perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan.

Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja. Segala sesuatu yang secara langsung dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci ke dalam masing-masing misi berdasarkan pendekatan urusan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Adapun arah kebijakan merupakan acuan untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap periode waktunya. Penetapan arah kebijakan menjadi fokus yang sesuai dengan pengaturan pada level pelaksanaannya. Sesuai dengan agenda pembangunan tersebut, arah kebijakan dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi di setiap tahunnya sebagai berikut:



Tabel 1.1

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember
2021-2026

Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.	
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming,</i> dengan: - Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan; - Meningkatkan fasilitasi dan memberikan kemudahan perijinan pendirian industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; - Memberikan fasilitasi dan kemudahan perijinan usaha perdagangan pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan berbasis risiko; - Merevitalisasi fungsi gudang rabat untuk meningkatkan harga jual hasil pertanian dan perikanan; dan - Mengembangkan akses pasar pada hasil olahan produk pertanian dan perikanan, termasuk membuat nota kesepahaman (<i>memorandum of understanding</i>, MoU) dengan instansi pemerintah pusat/pemerintah daerah lainnya dan perjanjian kerjasama (PKS).	Mengintegrasikan kegiatan hulu (<i>on-farm</i>) dengan kegiatan hilir (<i>off-farm</i>) untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang ditunjukkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang lebih tinggi.
<i>Wis wayahe Jember Industrial Farming,</i> dengan: - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana pertanian; - Menjaga ketersediaan pupuk secara mandiri; - Meningkatkan produktifitas hasil pertanian; - Meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana perikanan budidaya maupun tangkap, seperti pengadaan <i>coldstorage</i> atau pembangunan pabrik pengalengan ikan; - Meningkatkan produktifitas hasil perikanan, seperti melalui program 1 keluarga 1 kolam ikan.	
Misi 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.	
<i>Wis wayahe Pelayanan Jember Handal,</i> dengan:	Menyelenggarakan Reformasi Birokrasi dengan pada area:



Strategi	Arah Kebijakan
- Meningkatkan kualitas layanan pencegahan gangguan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan keindahan lingkungan; - Memberikan nomor identitas setiap penduduk melalui KTP NIK nasional; - Memberikan kartu keluarga pada setiap keluarga; - Memberikan akte pada setiap kelahiran dan pernikahan; - Memfasilitasi dan memantau penyelenggaraan pelayanan publik melalui pengukuran kepuasan masyarakat; - Melaksanakan penataan organisasi melalui penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, standar kompetensi jabatan, proses bisnis, dan SOP berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang berlaku, termasuk melakukan: • Penyederhanaan struktur organisasi seperti diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi; • Penataan organisasi dan nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menurut Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan • Pembentukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; - Menjaga ketersediaan bahan-bahan pokok dengan harga terjangkau bagi seluruh masyarakat; - Memfasilitasi penyusunan laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah; - Meningkatkan kualitas ketepatan dan penyaluran hibah dan bantuan sosial bagi kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan; - Meningkatkan kualitas komunikasi dan pelibatan DPRD dalam pengawasan, pembentukan dan penetapan peraturan daerah, maupun dalam menyusun dan menetapkan anggaran yang efektif dan efisien bagi pembangunan daerah; - Membina berbagai organisasi masyarakat	- Manajemen Perubahan; - Penataan Peraturan Perundang-Undangan; - Penataan dan Penguatan Organisasi; - Penataan Tata Laksana; - Penataan SDM Aparatur; - Penguatan Pengawasan Internal; - Penguatan Akuntabilitas Kinerja; - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.



Strategi	Arah Kebijakan
untuk menguatkan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah-tengah masyarakat melalui pelibatan pesantren, sekolah diniyah, dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam penerapan manajemen risiko pengelolaan pelaksanaan anggaran untuk mencegah kesalahan dan/atau penyalahgunaan prosedur; - Meningkatkan kualitas SDM Perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan fungsional perencanaan; - Mengembangkan dokumen perencanaan yang berkualitas; - Mengembangkan dan menerapkan hasil litbang untuk inovasi proses penyelenggaraan pemerintahan; - Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang aman dan <i>proper</i> sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; - Memperbaiki pengelolaan seluruh aset atau barang milik daerah; - Mengembangkan ekstensifikasi dan intensifikasi pengumpulan pajak daerah;	
<i>Wis wayahe</i> Jember Satu Data, dengan: - Memfasilitasi terbentuknya basis data pembangunan yang akurat dan tidak tumpang tindih; - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik secara elektronik (<i>e-government</i>); - Membangun Jember <i>Media Centre</i>; - Membangun sistem penilaian kinerja perangkat daerah dan ASN Aparatur berbasis elektronik untuk mendukung pengembangan SDM berbasis kinerja (<i>merit system</i>); - Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM Aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan.	Pemusatan data pembangunan dalam sistem basis data elektronik untuk menjamin keakuratan dan validitas data, dan pemanfaatannya bagi proses perencanaan dan pemantauan pencapaian pembangunan daerah.
Misi 3: Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.	
<i>Wis wayahe</i> Gerakan Desa Jember Berdaya (Gerda Jaya), dengan: - Melakukan pendataan keluarga, warga	Mengidentifikasi data penduduk dan keluarga miskin <i>by nama by address</i> sampai tingkat desa untuk menjamin



Strategi	Arah Kebijakan
miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) <i>by name, by address</i> secara partisipatif dan transparan pada tingkat desa untuk mendukung data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); - Membangun pangkalan data kemiskinan dan program intervensinya; - Memberikan bantuan sosial pada PMKS dan warga miskin dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat maupun perguruan tinggi; - Meningkatkan fasilitasi penataan dan pembangunan desa melalui pengembangan BUMDes dan perbaikan tata kelola pemerintahan desa secara elektronik (<i>smart villages</i>); - Memfasilitasi pemberdayaan desa untuk menjadi desa mandiri dalam penanggulangan kemiskinan dan pembangunan desa. - Mengembangkan alternatif sumber pangan bergizi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama warga miskin, untuk meningkatkan skor pola pangan harapan.	keakuratan penerima bantuan, ketepatan intervensi program, dan jenis pelibatan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.
Misi 4: Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lingkungan yang lestari	
<i>Wis wayahe</i> Jember Tumbuh, dengan - Meningkatkan kualitas dan kemudahan perijinan berusaha (<i>ease-of-doing-business</i>) berbasis risiko bagi calon investor dalam negeri maupun luar negeri; - Mensertifikasi pasar-pasar daerah; - Merevitalisasi atau membentuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) baru; - Memfasilitasi lahirnya wirausaha baru dan bertumbuhkembangnya usaha mikro dan kecil berbasis potensi lokal, seperti pertanian dan perikanan, terutama di pesantren-pesantren melalui strategi <i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya; - Mendorong dan memfasilitasi terbentuknya koperasi bagi pengembangan usaha kecil dan mikro, terutama di kelompok dominasi pesantren - Membina dan memberikan bimbingan teknis pada usaha kecil/mikro dan koperasi agar tumbuh sehat; - Memberikan latihan kerja pada pencari kerja untuk meningkatkan kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi; - Membuka kerjasama penempatan kerja dengan usaha/industri melalui <i>job fair</i>; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian	Mendorong terciptanya iklim investasi yang kompetitif melalui kemudahan perijinan berusaha berbasis risiko dengan tetap mengutamakan keterlibatan usaha kecil, mikro, dan koperasi; kemampuan penyerapan tenaga kerja lokal; serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup.



Strategi	Arah Kebijakan
kualitas air; - Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara; - Optimalisasi penyediaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH).	
Misi 5: Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi	
<i>Wis wayahe</i> SDM Jember Unggul, dengan: - Memperluas akses pendidikan melalui pembangunan prasarana ruang kelas baru atau unit sekolah baru untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, termasuk program kesetaraan dan sekolah inklusif; - Memperluas akses beasiswa bagi siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk meningkatkan harapan lama sekolah; - Meningkatkan kualitas sarana dan fasilitas sekolah; - Meningkatkan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk memperbaiki kesejahteraan GTT dan PTT serta pengadaan Guru Pendamping Khusus; dan - Memperluas hibah dan bantuan sosial pendidikan ke pesantren atau sekolah diniyah (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana kesehatan, termasuk merevitalisasi RSUD atau membangun Jember Healthy Centre; - Melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, terutama pesantren dan majelis taklim (<i>Wis wayahe</i> Pesantren Berdaya); - Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini; - Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran; - Meningkatkan kualitas dan sarana pelayanan pemeriksaan ibu hamil; - Meningkatkan kualitas layanan dan penanganan persalinan; - Meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi balita (Gerakan Masyarakat Jember Peduli Ibu dan Balita atau Gemar Jelita); - Meningkatkan kualitas penanganan pencegahan penyakit menular dan tidak menular; - Meningkatkan kualitas penanganan orang dalam gangguan jiwa; - Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender; - Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan - Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk;	Mendorong dan menciptakan akses seluas-luasnya pada pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember tanpa terkecuali, terutama perempuan, anak-anak, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.



Strategi	Arah Kebijakan
- Meningkatkan kualitas perpustakaan daerah dan pengelolaannya; - Meningkatkan kompetensi tenaga pustakawan melalui diklat perpustakaan;	
Misi 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember	
<i>Wis wayahe</i> Infrastruktur Jember Mantab, dengan: - Meningkatkan kualitas dan memperluas jaringan jalan (dan jembatan) kabupaten untuk membangun konektivitas ekonomi antar wilayah, seperti pembangunan Jember Outer Ring Roads (JORR) dan pengembangan pemanfaatan Jember Sport Garden (JSG); - Meningkatkan kualitas dan ketersediaan drainase; - Memperluas ketersediaan fasilitas penerangan jalan umum; - Meningkatkan kualitas dan luas jaringan irigasi; - Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang; - Meningkatkan akses masyarakat pada rumah layak huni; - <i>Upgrading</i> wilayah kumuh; - Optimalisasi pengelolaan air limbah; - Memperluas akses air bersih dan air layak minum bagi masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan; - Meningkatkan rasio elektrifikasi yang merata di seluruh desa. - Peningkatan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan, termasuk pembangunan dermaga dan peningkatan kelas bandara; - Optimalisasi sarana angkutan umum; - Penertiban lalu lintas melalui ketersediaan dokumen dan uji kir; - Menyediakan prasarana mitigasi bencana seperti jalur evakuasi dan lokasi penyelamatan (<i>safe heaven</i>); - Meningkatkan kesadaran kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana; - Meningkatkan kualitas SDM penanggulangan bencana;	Menyelenggarakan pembangunan yang berkualitas, yang menyeimbangkan antara pertumbuhan dengan pemerataan melalui pembangunan konektivitas ekonomi antar wilayah sehingga dapat mengeliminasi ketimpangan pembangunan.
Misi 7: Pengembangan Potensi Pariwisata dengan Mengedepankan Kearifan Lokal dan Pelestarian Budaya	



Strategi	Arah Kebijakan
<i>Wis wayahe</i> Jember Permata Jawa dengan: - Mengembangkan destinasi wisata, baik wisata alam, wisata budaya, maupun wisata religius; - Mengembangkan kompetensi SDM Pariwisata; - Membangun identitas Kabupaten Jember dengan mengembangkan <i>city branding</i>; - Meningkatkan promosi pariwisata; - Meningkatkan peran Dewan Kebudayaan Jember (DKJ) dalam pengembangan/pemberdayaan <i>heritage tourism</i>; - Merevitalisasi obyek cagar budaya dan kearifan budaya lokal; - Membina organisasi kepemudaan untuk aktif mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan teknologi melalui Jember Creative Centre; - Mengintegrasikan kegiatan kepemudaan dan olahraga untuk menunjang pariwisata, seperti Jember 10K, Tour de Jember, atau <i>sport event</i> yang memanfaatkan Jember Sport Garden (JSG).	Mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang memiliki rantai ekonomi panjang, sehingga melibatkan lebih banyak masyarakat dalam kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan kekayaan alam, budaya, sejarah, dan kearifan lokal lainnya.



PROGRAM UNGGULAN BUPATI & WAKIL BUPATI JEMBER



1.4 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan, maka disusun program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan, berdasarkan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Jember periode tahun 2021-2026. Sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Jember yang lebih sejahtera:

“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”, maka disusun 9 (sembilan) Strategi Unggulan yang merupakan komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2021-2026.

1. Wes Wayahe Jember Satu Data.
 - Penataan Birokrasi
 - Pengembangan Pusat Pemerintahan dan perkantoran
 - Digitalisasi Pelayanan Publik
 - Pelayanan Investasi yang terintegrasi
2. Wes Wayahe SDM Jember Unggul
 - Jember creative center
 - Pembukaan dan pengembangan Destinasi Wisata
 - Pembangunan Gedung Seni Budaya
 - Promosi dan Pemasaran Budaya, Seni dan Pariwisata
3. Wes Wayahe Infrastruktur Jember Mantab
 - Koperasi dan UMKM
 - Revitalisasi Perusahaan Daerah
 - Sertifikasi Pasar
4. Wes Wayahe Jember *Industrial Farming*
 - Smart Village dan BUMdes
 - Sinergi Pemdes dengan arah kebijakan Pemkab



- Desa Maju dan Mandiri
- 5. Wes Wayahe Pesantren Berdaya
 - Wirausahawan pesantren (Kopontren)
- 6. Wes Wayahe Gerda Jaya
 - Satu Keluarga Satu Kolam (2SK)
 - Mandiri Pupuk
 - Coldstorage dan pabrik pengalengan ikan
 - Modernisasi alat tangkap
 - Integrasi produk pertanian dan UMKM
- 7. Wes Wayahe Jember Tumbuh
 - Jember Outier Ring Road (JORR)
 - Transportasi
 - Interkonektivitas wilayah
 - Pembangunan Dermaga dan peningkatan kelas Bandara
 - Optimalisasi JSG
 - Lingkungan Hidup dan Persampahan
- 8. Wes Wayahe Jember Permata Jawa
 - PENDIDIKAN
Perbaikan kesejahteraan GTT dan PTT Beasiswa
Sekolah inklusi, guru pendamping khusus
 - KESEHATAN
Gemar jelita, jember bangga, jember safety center,
Revitalisas RSUD
 - KESEJAHTERAAN
Kemiskinan dan pengangguran
- 9. Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal
 - Jember satu Data
 - Digitalisasi pelayanan public
 - Jember media center



Selanjutnya, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program, wajib menjamin keseimbangan anggaran berdasarkan 3 prioritas yakni:

1. Prioritas Pertama (P1) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas Kedua (P2) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah;
3. Prioritas Ketiga (P3) adalah program yang dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berikutnya adalah merumuskan program prioritas pembangunan daerah. Urgensi lain adalah karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang paling tidak mampu merefleksikan tujuan strategis Bupati terpilih dalam 5 (lima) tahun. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan janji-janji kampanye Bupati terpilih. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar dari janji-janji Bupati terpilih. Janji- janji tersebut kemudian didefinisikan kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Jika bunyi janji Bupati terpilih bersifat sangat mikro dan berada di level output, maka akan diterjemahkan kedalam Kegiatan. Namun, apabila sedikit lebih makro dan berada pada level outcome, maka didefinisikan kedalam program yang kemudian disebut program prioritas. Sedangkan jika jauh lebih makro lagi, dapat diterjemahkan ke dalam Strategi.



Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, disebutkan bahwa setiap strategi yang ada, kaitannya dengan perumusan program wajib menjamin keseimbangan empat perspektif balanced scorecard. Keempat persepektif tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Perspektif masyarakat / layanan adalah perspektif yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
2. Perspektif proses internal adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.
3. Perspektif kelembagaan yaitu perspektif yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.
4. Perspektif keuangan yaitu perspektif yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

1.5 Gambaran Umum Daerah

1.5.1 Kondisi Geografis

A. Letak dan kondisi Geografis

Kabupaten Jember secara geografis berada pada posisi 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan 7°58'06" sampai 8°33'44" Lintang Selatan. Berdasarkan dokumen Kabupaten BPS Kab. Jember, Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km². Wilayah Kabupaten Jember terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah dengan rentang ketinggian berkisar antara 0-500 mdpl.

Kabupaten Jember secara administratif merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan terletak ±200 km dari arah timur Kota Surabaya. Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

Batas Utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
Batas Barat : Kabupaten Lumajang
Batas Timur : Kabupaten Banyuwangi
Batas Selatan : Samudera Indonesia

Tabel 1.2

Pulau-pulau Kecil atau Kepulauan yang Memiliki Nama

No.	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
1	Nusa Barong	7.482,00	Hutan	Suaka Alam	-
2	Gilen	6,25	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
3	Leande/ Bt. Mandi	1,87	Semak Belukar / Rumput	Suaka Alam	-
4	Endokdokan	3,75	Semak Belukar / Rumput	-	-
5	Watuajir	0,89	Batu karang / Rumput	-	-
6	Matikan	7,50	Semak Belukar / Rumput	-	-
7	Sraja	16,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
8	Meran	6,78	Semak Belukar / Rumput	-	-
9	Moestaka	29,89	Semak Belukar / Rumput	-	-



No.	Nama Pulau	Perkiraan Luas (Ha)	Beberapa Penggunaan Tanah Utama	Fungsi Kawasan	Keberadaan Tempat Penting
10	Loe Toeng	42,26	Semak Belukar / Rumput	-	-
11	Karang Bolong	28,98	Semak Belukar / Rumput	-	-
12	Watoepager	1,25	Semak Belukar / Rumput	-	-
13	Pisang	3,91	Semak Belukar / Rumput	-	-
14	Bandealit	33,94	Semak Belukar / Rumput	-	-
15	Singa	11,24	Semak Belukar / Rumput	-	-
16	Merue	8,75	Semak Belukar / Rumput	-	-

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km², dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km². Secara garis besar bagian timur Kabupaten Jember merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Bagian barat laut terdapat Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088m). Bagian selatan wilayah adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Terdapat sekitar 67 pulau-pulau kecil, 16 pulau diantaranya sudah memiliki nama dan 51 pulau lainnya yang belum memiliki nama.

Wilayah administrasi Kabupaten Jember sampai akhir tahun 2021 terdiri dari 31 kecamatan, 248 desa/kelurahan, dan 969 dusun. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah terkecil yaitu 25,614 km² atau sebesar 0,77% sedangkan Kecamatan Tempurejo merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Jember dengan luas wilayah sebesar 536,913 km² atau sebesar 16,24%. Jumlah desa/kelurahan terbanyak dalam satu kecamatan terdapat pada Kecamatan Puger, Kalisat, dan Sukowono, yaitu sebanyak 12 desa/kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan



paling sedikit adalah Kecamatan Kencong dan Sukorambi dengan jumlah masing-masing sebanyak 5 desa/kelurahan.

Tabel 1.3

Luas Kecamatan Beserta Jumlah Desa/Kelurahan Dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah Dusun/ Lingkungan	Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km)	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Kencong	5	24	43,15	65,92	1,85
2.	Gumukmas	8	24	35,34	82,98	2,82
3.	Puger	12	37	29,23	148,99	4,84
4.	Wuluhan	7	25	25,50	137,18	3,89
5.	Ambulu	7	27	22,17	104,56	3,53
6.	Tempurejo	8	29	24,35	524,46	16,24
7.	Silo	9	41	17,44	309,98	9,76
8.	Mayang	7	24	10,76	63,78	1,74
9.	Mumbulsari	7	26	10,83	95,13	2,6
10.	Jenggawah	8	36	12,37	51,02	1,7
11.	Ajung	7	35	9,11	56,61	1,82
12.	Rambipuji	8	42	11,21	52,80	1,65
13.	Balung	8	27	22,00	47,12	1,51
14.	Umbulsari	10	28	29,70	70,52	2,18
15.	Semboro	6	14	28,73	45,43	1,44
16.	Jombang	6	17	41,30	54,30	1,68
17.	Sumberbaru	10	36	34,77	166,37	4,78
18.	Tanggul	8	24	27,61	199,99	6,05
19.	Bangsalsari	11	41	18,58	175,28	4,82
20.	Panti	7	29	7,51	160,71	5,5
21.	Sukorambi	5	16	4,27	60,63	1,37
22.	Arjasa	6	26	7,20	43,75	1,06
23.	Pakusari	7	26	6,39	29,11	0,92
24.	Kalisat	12	48	12,72	53,48	1,59
25.	Ledokombo	10	39	24,05	146,92	3,99
26.	Sumberjambe	9	58	18,12	138,24	3,93
27.	Sukowono	12	27	19,25	44,04	1,52
28.	Jelbuk	6	40	14,00	65,06	2,2
29.	Kaliwates	7	32	3,10	24,94	0,77
30.	Sumbersari	7	33	1,75	37,05	1,1
31.	Patrang	8	38	2,46	36,99	1,13
Jumlah		248	969		3.293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

B. Topografi

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.300 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 meter di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 26 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 501 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut, 6,85% pada ketinggian 1.001 m sampai dengan 2.500 m dan 0,95% pada ketinggian lebih dari 2.500 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter dpl. Sedangkan daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl.

Tabel 1.4
Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember

No.	Ketinggian	Luas	
		Km ²	%
1	0 – 25 meter	591,2	17,95
2	26 – 100 meter	681,68	20,70
3	101 – 500 meter	1243,08	37,75
4	501 – 1000 meter	520,43	15,80
5	1001 – 2500 meter	225,62	6,85
6	> 2.500 meter	31,33	0,95
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 (data diolah))

**Tabel 1.5**Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Ketinggian Tempat

No	Kecamatan	Ketinggian Tempat (mdpl)						Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-25	25-100	100-500	500-1000	1000-2005	>2005	
1	Kencong	65,92	-	-	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,47	1,16	0,34	0,01	-	-	82,98
3	Puger	81,8	45,7	21,49	-	-	-	148,99
4	Wuluhan	87,18	25	25	-	-	-	137,18
5	Ambulu	56,51	38,28	9,77	-	-	-	104,56
6	Tempurejo	17,97	178,12	240,48	85,94	1,95	-	524,46
7	Silo	-	0,39	167,79	137,87	3,93	-	309,98
8	Mayang	-	1,76	60,07	1,95	-	-	63,78
9	Mumbulsari	-	35,94	52,94	6,25	-	-	95,13
10	Jenggawah	-	50,7	0,3	0,02	-	-	51,02
11	Ajung	-	56,61	-	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	-	52,8	-	-	-	-	52,8
13	Balung	25,84	17,97	3,31	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	64,46	6,05	-	-	-	-	70,51
15	Semboro	17,93	19,6	7,9	-	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	24,1	31,64	75,67	15,55	19,42	-	166,38
18	Tanggul	7,08	40,54	64,88	42,19	45,16	0,14	199,99
19	Bangsalsari	6,64	52,15	61,8	17,97	27,34	9,38	175,28
20	Panti	-	7,81	50,78	28,12	61,02	12,98	160,71
21	Sukorambi	-	11,72	24,17	19,27	5,47	-	60,63
22	Arjasa	-	-	33,53	9,67	0,55	-	43,75
23	Pakusari	-	-	29,11	-	-	-	29,11
24	Kalisat	-	-	53,48	-	-	-	53,48
25	Ledokombo	-	-	72,06	44,55	25	5,31	146,92
26	Sumberjambe	-	-	49,96	62,11	23,05	3,12	138,24
27	Sukowono	-	-	44,04	-	-	-	44,04
28	Jeibuk	-	-	32,64	19,29	12,73	0,4	65,06
29	Kaliwates	-	3,69	17,34	3,91	-	-	24,94
30	Sumbersari	-	0,36	11,72	24,97	-	-	37,05
31	Patrang	-	3,69	32,51	0,79	-	-	36,99
	Jumlah	591,20	681,68	1243,08	520,43	225,62	31,33	3293,34

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

Kabupaten Jember merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki bentang alam lengkap hal ini dikarenakan terdapat laut, pesisir, pegunungan, dan gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan

pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) jenis gumuk yang berbeda dari jenis batuan yang terkandung yaitu gumuk batu, gumuk batu piring dan gumuk pasir. Formasi gumuk ini memberikan beberapa manfaat bagi lingkungan sekitar mulai dari ekologi, iklim makro, pemecah angin hingga penyumbang oksigen bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dengan adanya gumuk, temperatur di sekitar gumuk menjadi relatif lebih dingin karena banyaknya jenis tanaman yang terdapat di gumuk sehingga menurunkan temperatur sekitar kawasan.

Jumlah gumuk di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 buah yang sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir. Keberadaan Gumuk tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain: Kecamatan Arjasa, Sumpster, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, Mayang dan Sumberjambe. Lima tahun terakhir jumlah gumuk mengalami penurunan dan kerusakan sampai 11%. Penurunan dan kerusakan gumuk terjadi karena peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan infrastruktur. Gumuk yang dieksploitasi terutama di wilayah Kecamatan Sumpster. Eksploitasi tersebut bisa saja terus meningkat dan akan berdampak besar bagi kerusakan ekosistem makro di Kabupaten Jember.

Tabel 1.6

Kemiringan Lahan Kabupaten Jember

No.	Kelas Lereng	Luas	
		Km ²	%
1	Datar (0 – 2 ⁰)	1205,47	36,60
2	Landai (2 – 15 ⁰)	673,76	20,46
3	Agak curam (15 – 40 ⁰)	384,04	11,66
4	Sangat Curam (> 40 ⁰)	1030,07	31,28
	Jumlah	3293,34	100

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 (data diolah))

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau elevasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0 – 2⁰, sehingga

daerah ini baik untuk kawasan kegiatan pertanian tanaman semusim. Untuk wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40° menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihindarkan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Selebihnya wilayah landai sampai bergelombang, dengan kemiringan antara $2 - 15^\circ$ menempati wilayah 20,46%, yang digunakan untuk usaha pertanian dengan memperhatikan usaha pengawetan tanah dan air. Sedangkan daerah bergelombang dengan kemiringan $15 - 40^\circ$ menempati wilayah 11,66%, daerah tersebut mudah terkena erosi, maka diperlukan usaha pengawetan tanah dan air.

Tabel 1.7
Luas Wilayah (km²) Kecamatan Menurut Klasifikasi Lereng

No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-2°	2°-15°	15°-40°	Di atas 40°	
1	Kencong	65,92	-	-	-	65,92
2	Gumuk Mas	81,56	-	0,75	0,67	82,98
3	Puger	68,6	0,94	24,12	55,34	149
4	Wuluhan	92,23	2,01	4,95	38	137,19
5	Ambulu	82,55	2,09	8,34	11,58	104,56
6	Tempurejo	84,63	33,22	41,13	365,48	524,46
7	Silo	-	89,06	76,81	144,12	309,99
8	Mayang	23,77	15,12	18,71	6,19	63,79
9	Mumbulsari	58,37	15,05	21,71	-	95,13
10	Jenggawah	48,55	2,01	-	0,46	51,02
11	Ajung	56,61	-	-	-	56,61
12	Rambipuji	51,58	1,22	-	-	52,8
13	Balung	47,12	-	-	-	47,12
14	Umbulsari	70,52	-	-	-	70,52
15	Semboro	43,71	1,72	-	-	45,43
16	Jombang	54,3	-	-	-	54,3
17	Sumberbaru	38,44	54,83	37,97	35,13	166,37
18	Tanggul	27,81	45,81	44,24	82,14	200
19	Bangsalsari	54,76	59,62	14,24	46,66	175,28
20	Panti	12,44	36,28	14,83	97,16	160,71
21	Sukorambi	12,94	24,29	2,97	20,43	60,63
22	Arjasa	5,63	13,03	6,98	18,11	43,75
23	Pakusari	26,84	2,27	-	-	29,11
24	Kalisat	8,31	45,03	0,15	-	53,49
25	Ledokombo	3,03	69,75	33,22	40,92	146,92
26	Sumberjambe	10,43	73,5	18,38	35,94	138,25



No	Kecamatan	Kemiringan				Jumlah Luas Wilayah (km ²)
		0-2°	2°-15°	15°- 40°	Di atas 40°	
27	Sukowono	8,98	34,91	0,15	-	44,04
28	Jelbuk	1,02	24,61	9,32	30,11	65,06
29	Kaliwates	22,76	2,18	-	-	24,94
30	Sumbersari	37,05	-	-	-	37,05
31	Patrang	5,03	25,25	5,08	1,64	37
Jumlah		1.205,49	673,80	384,05	1.030,08	3.293,42

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

C. Geologi

Dataran wilayah Kota Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Khusus untuk area gumuk jenis tanah utamanya adalah regosol. Tekstur tanah di gumuk cenderung *sandy clay loam* yaitu tanah alluvial terdampak dari hasil pelapukan batuan vulkanik. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah, dimana tingkat kesuburan tersebut adalah berkisar di atas 90 cm.

D. Hidrologi

Kabupaten Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang bersumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Kondisi hidrologi di Kota Jember sangat dipengaruhi oleh air permukaan tanah dangkal, sumber-sumber mata air dan aliran-aliran sungai yang melintasinya. Sungai yang melintasi Kota Jember adalah Sungai Bedadung.

E. Klimatologi

Karakteristik cuaca dan curah hujan di Kabupaten Jember menunjukkan pola musim penghujan dan musim kemarau tiap tahunnya. Musim kemarau terjadi di bulan Mei – Oktober, sedangkan musim penghujan terjadi di bulan November – April. Sedangkan curah hujan cukup banyak, yakni berkisar antara 1.969 mm sampai 3.394 mm. Kelembapan

rata-rata (*humidity average*) di Kabupaten Jember sebesar 74,25% dengan suhu rata-rata 28,2°C.

F. Penggunaan Lahan

Dominasi penggunaan lahan di wilayah Kota Jember adalah kegiatan pertanian yakni seluas 5.099,283 Ha atau 51,47% dari total luas wilayah kota. Kemudian berturut-turut adalah tanah tegalan seluas 1.477,9 Ha atau 14,92%, perumahan seluas 2.679,655 Ha atau 27,05%, kolam ikan seluas 1,0 Ha atau 0,01 % dan penggunaan tanah lain-lainnya seluas 416,415 Ha atau 4,20%.

G. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Tabel 2.3 menjelaskan secara detail distribusi luas lahan berdasarkan jenis kawasan budidaya.

Tabel 1.8
Kawasan Budidaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi		29.079	1) Kecamatan Puger; 2) Kecamatan Wuluhan; 3) Kecamatan Ambulu; 4) Kecamatan Silo; 5) Kecamatan Mayang; 6) Kecamatan Mumbulsari; 7) Kecamatan Rambipuji; 8) Kecamatan Sumberbaru; 9) Kecamatan Tanggul; 10) Kecamatan Bangsalsari; 11) Kecamatan Panti; 12) Kecamatan Arjasa; 13) Kecamatan Ledokombo; 14) Kecamatan Sumberjambe; 15) Kecamatan Jelbuk; dan 16) Kecamatan Tempurejo.
2	Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat		91.108	Berada di seluruh kecamatan terdiri dari jenis tanaman Jati, Mahoni, Sonokeling, Sengon Laut, Gmelina, Mindi, Bayur, dan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				lain-lain
3	Kawasan Peruntukan Pertanian			
	Kawasan Pertanian Lahan Basah		86.598 Ha Sawah Beririgasi dan 81.081 Ha Lahan Pertanian Pangan	1) Sentra Padi tersebar di seluruh kecamatan. 2) Sentra Jagung tersebar di seluruh kecamatan; 3) Sentra Kedelai : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Balung; Kecamatan Jombang; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Ajung; Kecamatan Kencong; Kecamatan Gumukmas; dan Kecamatan Tanggul. 4) Sentra Kacang Tanah : Kecamatan Jelbug; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Panti; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan 5) Sentra Ubi Jalar : Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono 6) Sentra Ubi Kayu : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Panti; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi
	Kawasan Pertanian Lahan Kering		33.037 Ha Lahan Kering dan 20.522 Ha lahan pertanian berkelanjutan	
	Kawasan Budidaya Holtikultura			1) Sentra Buah Salak : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Semboro 2) Sentra Buah Manggis : Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; kecamatan Sukorambi 3) Sentra Buah Durian : Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbug; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Panti; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Patrang; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Sukorambi 4) Sentra buah Jeruk : Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Kencong



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				5) Sentra Buah Alpukat : Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Patrang
				6) Sentra Buah Belimbing : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Ajung; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Semboro; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kencong
				7) Sentra Buah Duku/Langsar : Kecamatan Patrang; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; dan Kecamatan Panti.
				8) Sentra Buah Rambutan tersebar di seluruh Kecamatan
				9) Sentra buah Mangga : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Kencong; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Kalisat
				10) Sentra Buah Nangka : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari
				11) Sentra Buah Pisang : Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Kalisat; dan Kecamatan Patrang.
				12) Sentra Cabe Rawit : Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Mayang; dan Kecamatan Pakusari.
				13) Sentra Cabe Besar : Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ajung; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Tempurejo
				14) Sentra Kacang Panjang : Kecamatan Ambulu; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Ledokombo
				15) Sentra Tomat : Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Ajung; Kecamatan Panti; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mayang



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				16) Sentra Semangka : Kecamatan Gumukmas dan Kecamatan Puger
4	Kawasan Peruntukan Perkebunan		87.448,71	1) Sentra tembakau Kasturi: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Pakusari; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Arjasa; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Puger; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Kaliwates; dan Kecamatan Ajung. 2) Sentra tembakau Rajang: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Jelbuk; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Mumbulsari Kecamatan Puger; dan Kecamatan Sukowono. 3) Sentra tembakau White Burley: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Puger; Kecamatan Balung; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Mumbulsari. 4) Sentra tembakau na-oogst: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Panti; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Puger; Kecamatan Patrang; Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Ajung; dan Kecamatan Mumbulsari. 5) Sentra tanaman kelapa berada di seluruh Kecamatan 6) Sentra tanaman kapuk berada di seluruh Kecamatan 7) Sentra tanaman lada: Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Silo; Kecamatan Mumbulsari; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Jenggawah; dan Kecamatan Bangsalsari. 8) Sentra tanaman cengkeh: Kecamatan Silo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Panti; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe, dan Kecamatan Sumberbaru. 9) Sentra tanaman karet: Kecamatan



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Mumbulsari; Kecamatan Jenggawah; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Silo; Kecamatan Pantii; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; dan Kecamatan Sumberbaru. 10) Sentra tanaman kakao: Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Pantii; Kecamatan Silo; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Rambipuji; dan Kecamatan Mumbulsari. 11) Sentra tanaman kopi: Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Silo; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Pantii; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Jelbuk; dan Kecamatan Sumberbaru. 12) Sentra tanaman teh berada Perkebunan Gunung Gambir Kecamatan Sumberbaru 13) Sentra tanaman tebu berada di seluruh Kecamatan
5	Kawasan Peruntukan Pernakan			1) Ternak sapi potong berada di seluruh kecamatan. 2) Ternak aspi perah: Kecamatan Arjasa; Kecamatan Silo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Puger; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Patrang; Kecamatan Kaliwates; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Balung 3) Ternak kuda: Kecamatan Kalisat; Kecamatan Tanggul; Kecamatan Bangsalsari; Kecamatan Ledokombo; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberbaru; Kecamatan Jombang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Pakusari; dan Kecamatan Mayang. 4) Ternak kerbau: Kecamatan Jombang; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Puger; Kecamatan Semboro; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Ledokombo; dan Kecamatan Kencong.



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
6	Kawasan peruntukan perikanan			1) Kawasan budidaya kolam air tawar tersebar diseluruh kecamatan 2) Kawasan budidaya air payau meliputi: Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; dan Kecamatan Gumukmas. 3) Kawasan minapadi meliputi: Kecamatan Silo; Kecamatan Mayang; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Kalisat; Kecamatan Sumberjambe; dan Kecamatan Ledokombo. 4) Pengembangan Pelabuhan perikanan pantai berada di Kecamatan Puger 5) Kawasan perikanan tangkap meliputi: Kecamatan Kencong; Kecamatan Puger; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Tempurejo; dan Kecamatan Gumukmas.
7	Kawasan peruntukan pariwisata			1) Daya Tarik Wisata Alam terdiri atas: a) Pantai meliputi: 1. Pantai Watu Ulo, Pantai Seruni dan Pantai Payangan berada di Kecamatan Ambulu; 2. Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3. Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4. Pantai Pancer berada di Kecamatan Puger; 5. Pantai Bandalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6. Pantai Rowo Cangak berada di Kecamatan Tempurejo. b) Air terjun meliputi: 1. Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2. Air terjun Manggis berada di Kecamatan Tanggul; dan 3. Air terjun lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe. 2) Daya Tarik Wisata Budaya meliputi: a. Upacara Larung Saji berada di Kecamatan Puger, Kecamatan Kencong dan Kecamatan Ambulu; b. Tarian Lahbako berada di Kecamatan Patrang; c. Kuda Kencak berada di Kecamatan Tanggul; d. Egrang di Kecamatan Ledokombo; e. Can Macanan Kaduk, Ge jenggean (ta' butaan) dan Pencak Silat Seni di Kecamatan Summersari, Kecamatan Arjasa dan Kecamatan Jelbuk; f. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; g. Janger dan Jaranan di Kecamatan Mumbulsari; h. Makam Turba Condro berada di Kecamatan Kaliwates; i. Makam Habib



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
				Sholeh di Kecamatan Tanggul; j. Makam Kyai Umar di Kecamatan Sukowono; k. Petilasan Sembah Demang di Kecamatan Patrang; l. Tugu Mastrip I dan II berada di Kecamatan Jelbuk; m. Tugu Muhamad Sroedji di Kecamatan Mumbulsari; dan n. <i>Sarchopagus</i> berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa. 3) Daya Tarik Wisata Buatan Manusia meliputi: a. Jember Fashion Carnaval di Kecamatan Sumbersari; b. Taman rekreasi Oleng Sibutong berada di Kecamatan Arjasa; c. Pemandian Patemon berada di Kecamatan Tanggul; d. Pemandian Kebonagung berada di Kecamatan Kaliwates; e. Pemandian Niagara Waterpark dan Pontang Jaya berada di Kecamatan Ambulu; f. Pemandian Tiara Waterpark di kecamatan Sumbersari; g. Wisata Agro Glantangan di Kecamatan Tempurejo; h. Wisata Agro Puslit Kopi dan Kakao di Kecamatan Rambipuji; i. Wisata Agro Gunung Gunitir di Kecamatan Silo; j. Wisata Agro Mumbul Garden di Kecamatan Mumbulsari; k. Rest Area Jubung (di area Perhutani) di Kecamatan Sukorambi; l. Taman Botani Sukorambi di Kecamatan Sukorambi; m. Wisata Agro Kebun teh Gunung Gambir di Kecamatan Sumberbaru; n. Wisata Agro Gunung Pasang di Kecamatan Panti; o. Wisata Rembangan dan Perkebunan Rayap berada di Kecamatan Arjasa; p. Lapangan Golf Glantangan berada di Kecamatan Tempurejo. q. Agro wisata dan loko tour Garahan - silo berada di Kecamatan Silo; dan r. Jember Sport Garden berada di Kecamatan Ajung.
8	Kawasan Peruntukan Industri			1) Kawasan peruntukan industri berada di seluruh kecamatan 2) sentra industri meliputi: Kecamatan Sumbersari; Kecamatan Rambipuji; Kecamatan Panti; Kecamatan Sukorambi; Kecamatan Sukowono; Kecamatan Sumberjambe; Kecamatan Tempurejo; Kecamatan Ambulu; Kecamatan Wuluhan; Kecamatan Balung; Kecamatan Puger; Kecamatan Gumukmas; Kecamatan Umbulsari; Kecamatan Sumberbaru; dan Kecamatan Bangsalsari.



No.	Jenis Kawasan		Luas (Ha)	Letak
9	Kawasan peruntukan Permukiman		47,2	1) Kawasan permukiman perkotaan meliputi seluruh kawasan perkotaan 2) Kawasan permukiman perdesaan meliputi seluruh kawasan perdesaan
10	Kawasan Peruntukan Lainnya			1) Kawasan pertahanan dan keamanan; a. Area latihan militer meliputi: a) Gunung Mayang Komplek di Kecamatan Mayang; b) Kecamatan Ambulu; c) Kecamatan Wuluhan; dan d) Kecamatan Puger b. Perkantoran militer meliputi: a) Komando Distrik Militer (Kodim) 0824 berada di Kecamatan Patrang; b) Brigif 9 Kostrad di Kecamatan Patrang; c) Batalyon Infanteri 515 Kostrad di Kecamatan Tanggul; d) Batalyon Infanteri 509 Kostrad di Kecamatan Sumbersari; e) Batalyon Artileri Medan 8 Kostrad di Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Ambulu; f) Sub Denpom di Kecamatan Sumbersari; dan g) Komando Rayon Militer (Koramil) berada di seluruh kecamatan. c. Perkantoran kepolisian meliputi: a) Kepolisian Resor (Polres) berada di Kecamatan Kaliwates; dan b) Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh kecamatan. d. Sekolah calon bintara (Secaba) terdapat di Kecamatan Sumbersari 2) Kawasan perdagangan dan jasa meliputi a) Kawasan perkotaan PKW; b) Kawasan perkotaan PKLp; c) Kawasan perkotaan PPK. 3) Kawasan pemerintahan meliputi a) Pengembangan kawasan pemerintahan Kabupaten berada di wilayah Kabupaten Jember; b) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan berada di seluruh kecamatan; dan c) Pengembangan kawasan pemerintahan kecamatan akan diatur dalam rencana detail tata ruang. 4) Kawasan sektor informal meliputi di seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Jember

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035



H. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Perencanaan Kawasan lindung Kabupaten Jember tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035. Rencana Kawasan lindung meliputi:

a) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung terdapat seluas 45.139 hektar yang meliputi wilayah: Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Tanggul, Kecamatan Bangsalasari, Kecamatan Panti, Kecamatan Jelbug, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Silo, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Wuluhan, Kecamatan Ambulu, Kecamatan Mayang, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Ledokombo dan Kecamatan Puger.

b) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya adalah Kawasan resapan air yang berada di seluruh kecamatan di Kabupaten Jember. Arahkan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya meliputi rehabilitasi lingkungan dan penanaman pohon lindung dalam kawasan resapan air.

c) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi Kawasan sempadan sungai, Kawasan sekitar waduk, Kawasan ruang terbuka hijau Kawasan perkotaan, Kawasan sempadan pantai dan Kawasan sekitar mata air.

Tabel 1.9
Kawasan Lindung Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan sempadan sungai	1) DAS Jember berada di Desa Andongrejo 2) DAS Curah Sari berada di Desa Andongrejo 3) DAS Sumbing berada di Desa Andongrejo 4) DAS Kumbu berada di Desa Andongrejo 5) DAS Klabang berada di Desa Andongrejo



No.	Jenis Kawasan	Letak
		6) DAS Curah Grembyak berada di Desa Andongrejo 7) DAS Kebonpantai berada di Desa Andongrejo 8) DAS Curah Sumbi berada di Desa Andongrejo 9) DAS Curah Jati berada di Desa Andongrejo 10) DAS Curah Kekeh berada di Desa Andongrejo 11) DAS Curah Nongko Hilir berada di Desa Andongrejo 12) DAS Curah Nongko Hulu berada di Desa Curah Nongko 13) DAS Rowocangak berada di Desa Curah Nongko–Desa Andongrejo 14) DAS Mayang berada di Desa Mayang – Desa Sabrang 15) DAS Gemunting berada di Desa Sumber Rejo 16) DAS Sumber rejo berada di Desa Sumber Rejo 17) DAS Sumber Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 18) DAS Curah Lo berada di Kecamatan Wuluhan 19) DAS Lodong berada di Kecamatan Wuluhan 20) DAS Curah Badeng berada di Kecamatan Wuluhan 21) DAS Badeng Loje Hulu berada di Kecamatan Wuluhan 22) DAS Curah Loje berada di Kecamatan Wuluhan 23) DAS Kuning berada di Kecamatan Wuluhan 24) DAS Sogol berada di Kecamatan Wuluhan 25) DAS Lojejer Hilir berada di Kecamatan Wuluhan 26) DAS Lojejer Tengah berada di Kecamatan Wuluhan 27) DAS Lojejer berada di Kecamatan Wuluhan 28) DAS Banteng Jejer berada di Kecamatan Wuluhan 29) DAS Bedadung berada di Desa Rowosari – Desa Puger Kulon 30) DAS Jatiroto berada di Desa Darungan – Desa Puger Kulon 31) DAS Besini berada di Desa Karang Duren – Desa Mojosari 32) DAS Tanggul berada di Desa Tanggul Kulon – Desa Kepanjen 33) DAS Nusa Barong berada di Desa Puger Kulon
2	Kawasan sekitar waduk	Kawasan sekitar Waduk Antrokan berada di Kecamatan Tanggul; Kawasan sekitar Dam meliputi: 1) Dam Talang, di Kecamatan Jenggawah; 2) Dam Bedadung, di Kecamatan Rambipuji; dan 3) Dam Pondok Waluh, di Kecamatan Kencong;
3	Kawasan RTH Taman dan Hutan Kota	1) Taman Mastrip; 2) Taman depan DPRD; 3) Taman Sukorejo; 4) Taman Tugu Koperasi; 5) Taman Loka Dharma; 6) Taman <i>Double Way</i> GOR; 7) Taman Semanggi; 8) Taman Alun-alun; 9) Taman Batas kota Jubung; 10) GOR PKPSO; 11) Stadion Notohadinegoro; 12) Lapangan Sukorejo Kecamatan Sumbersari; 13) Lapangan Talangsari Kecamatan Kaliwates; 14) Lapangan Mangli Kecamatan Kaliwates; 15) Jember <i>Sport Garden</i> (JSG) di Kecamatan Ajung; 16) RTH Perkotaan Kecamatan Tanggul; 17) RTH Perkotaan Kecamatan Kencong;



No.	Jenis Kawasan	Letak
		18) RTH Perkotaan Kecamatan Balung; 19) RTH Perkotaan Kecamatan Kalisat; 20) RTH Perkotaan Kecamatan Rambipuji; 21) RTH Perkotaan Kecamatan Arjasa; 22) RTH Perkotaan Ambulu; dan 23) RTH Perkotaan Kecamatan Mayang. 24) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jelbuk; 25) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Silo; 26) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Jombang; 27) Taman Batas Kabupaten di Kecamatan Sumberbaru; 28) Hutan Kota di Kecamatan Ajung; 29) Hutan Kota di Kecamatan Patrang; 30) Hutan Kota di Kecamatan Kaliwates; dan 31) Hutan Kota di Kecamatan Sumpalsari.
4	RTH Jalur Hijau	1) Taman Baratan; 2) Taman Pagah; 3) Taman <i>Double Way</i> ; dan 4) Jalur dalam kota.
5	RTH Fungsi Tertentu	1) Taman Makam Pahlawan Kecamatan Patrang; 2) Makam Cukil; 3) Makam Wetan Kantor; 4) Makam Kebonsari; 5) Makam Sukorejo; 6) Makam Kreongan; 7) Makam Non Muslim Kaliwates; dan 8) Makam Gebang.
6	Kawasan Sempadan Pantai	Memanjang dari perbatasan Kabupaten Lumajang sampai ke batas Kabupaten Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kencong – Gumukmas - Wuluhan – Puger -Ambulu – Tempurejo

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

d) Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya yang ada di Kabupaten Jember meliputi : 1) Suaka Margasatwa; 2) Cagar Alam; 3) Taman Nasional; 4) Taman Wisata Alam; dan 5) Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan.

Tabel 1.10

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
1	Kawasan Suaka Margasatwa	4.375,00	1) Kecamatan Panti 2) Kecamatan Bangsalsari



No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
2	Kawasan Cagar Alam	7.654,70	1) Suaka Margasatwa Nusa Barong seluas kurang lebih 7.635,9 hektar di Kecamatan Puger; 2) Cagar Alam Watangan Puger seluas ± 2 Ha di Kecamatan Wuluhan; dan 3) Cagar Alam Curah Manis Sempolan I – VIII seluas kurang lebih 16,8 Ha 4) di Kecamatan Silo.
3	Kawasan Taman Nasional	37.585,00	Taman Nasional Meru Betiri
4	Kawasan Wisata Alam	174,90	Pantai meliputi : 1) Pantai Watu Ulo berada di Kecamatan Ambulu; 2) Pantai Papuma berada di Kecamatan Wuluhan; 3) Pantai Paseban berada di Kecamatan Kencong; 4) Pantai Puger berada di Kecamatan Puger; 5) Pantai Bandalit berada di Kecamatan Tempurejo; dan 6) Pantai Canga'an berada di Kecamatan Tempurejo. Air terjun meliputi : 1) Air terjun Tancak berada di Kecamatan Panti; 2) Air terjun Manggis berada di kecamatan Tanggul; 3) Air terjun Lereng Raung berada di Kecamatan Sumberjambe; 4) Air terjun Pasaran berada di Kecamatan Sumberjambe; 5) Air terjun Antrokan berada di Kecamatan Ledokombo; dan 2) Air terjun Slateng berada di Kecamatan Ledokombo.
5	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan berupa Situs Purbakala		1) Koleksi cagar budaya bergerak Kabupaten Jember; 2) Koleksi Situs Kamal di Arjasa yang terdiri dari Situs Kendal, Klanceng, dan Duplang; 3) Situs Dolmen Sukosari Sukowono terdiri dari Situs Mojo dan Situs Srimo; 4) Situs Seputih Mayang terdiri dari Situs sarchopagus dan Situs Batu Kangkang; 5) Situs Sucopangepok terdiri dari Situs Pakel dan Lengkong; 6) Situs Sukoember terdiri dari Situs Suko; 7) Situs Prasasti Batu Gong di Kecamatan Rambipuji; 8) Situs Prasasti Congapan di Karangbayat Kecamatan Sumberbaru; 9) Situs Candi Deres di Kecamatan Gumukmas; dan 10) Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.
6	Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu pengetahuan berupa Bangunan Cagar Budaya		1) Rumah Dokter Naryo (sebelah Kantor Puslit Kakao); 2) Eks. Kantor PT. Tjipta Niaga; 3) Eks Kantor Pemkab Jember; 4) Gedung GNI Jember; 5) SDK Maria Fatima; 6) Eks Kantor BRI; 7) SMP 1 Jember; 8) Kantor PTPN XII;

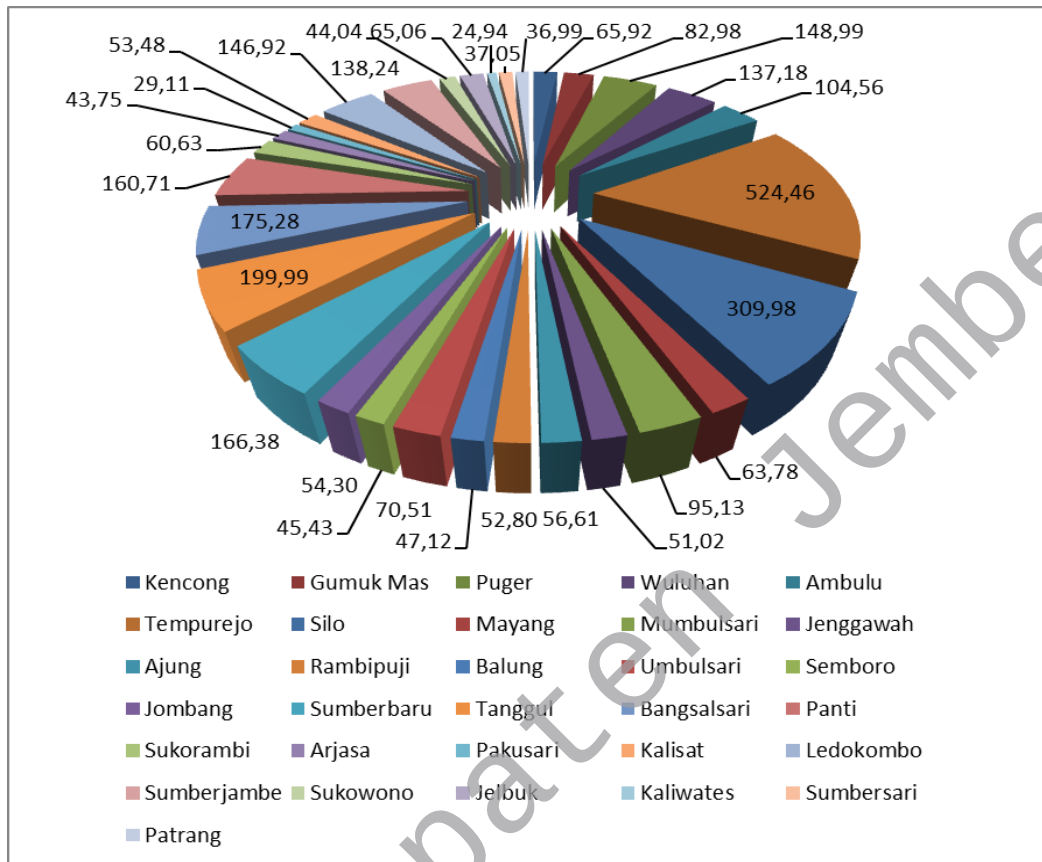


No.	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Letak
			9) Hangar Tembakau PTPN XII; 10) Universitas Tawang Alun; 11) Hotel dan Pemandian Rembangan; 12) Eks. Pabrik Beras Redjoagung Mangli; 13) Masjid Raya Jember; 14) Konter Telisa jalan PB. Sudirman; 15) Toko Nanyang jalan Sultan Agung; 16) Kodim 0824 Jember; 17) Kantor Camat Wuluhan; 18) Water Tourent pasar Tanjung; 19) Pos Militer jalan PB. Sudirman; 20) Stasiun Jember; 21) Perumahan dan Kantor PG Semboro di Kencong; 22) Sekolah Mulo (SMK belakang Pemkab Jember) jalan Kartini; 23) Sekolah Jepang (Yon Armed 8 Jember); 24) Sekolah Tehnik (SMP 10 Jember); 25) Goa Jepang; 26) Lembaga Kemasyarakatan Jember; 27) Rumah Pecinan di jalan Imam Syafii

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan, 972 dusun/lingkungan, 4.146 RW dan 14.215 RT. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 536,91 Km² atau 16,24% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 25,61 Km² atau 0,77%.

Gambar 1.3
Proporsi Luas Wilayah Kabupaten Jember Menurut Kecamatan



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 (data diolah))

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035, kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana. Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Jember secara detail disajikan pada berikut

Tabel 1.11
Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember

No.	Jenis Kawasan	Letak
1	Kawasan rawan tanah longsor	a. Kecamatan Arjasa; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Sukorambi; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul;



No.	Jenis Kawasan	Letak
		f. Kecamatan Sukowono; g. Kecamatan Sumberjambe; h. Kecamatan Silo; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Sumberbaru; k. Kecamatan Panti; l. Kecamatan Rambipuji; m. Kecamatan Mumbulsari. n. Kecamatan Ledokombo; o. Kecamatan Patrang; dan p. Kecamatan Mayang.
2	Kawasan rawan letusan gunung api	a. Kecamatan Sukowono; b. Kecamatan Ledokombo; c. Kecamatan Sumberjambe; d. Kecamatan Silo; e. Kecamatan Kalisat; f. Kecamatan Mayang; g. Kecamatan Jelbuk; h. Kecamatan Arjasa; i. Kecamatan Patrang; j. Kecamatan Sukorambi; k. Kecamatan Tanggul; dan l. Kecamatan Sumberbaru.
	Kawasan rawan angin kencang dan puting beliung	meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan tsunami	a. Kecamatan Kencong; b. Kecamatan Gumukmas; c. Kecamatan Puger; d. Kecamatan Wuluhan; e. Kecamatan Ambulu; dan f. Kecamatan Tempurejo
	Kawasan rawan banjir	a. Kecamatan Panti; b. Kecamatan Tempurejo; c. Kecamatan Kencong; d. Kecamatan Rambipuji; e. Kecamatan Jengawah; dan f. Kecamatan Silo.
	Kawasan rawan gempa bumi	Kawasan rawan gempa bumi meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Jember.
	Kawasan rawan bencana kekeringan	a. Kecamatan Patrang; b. Kecamatan Jelbuk; c. Kecamatan Arjasa; d. Kecamatan Bangsalsari; e. Kecamatan Tanggul; f. Kecamatan Sumberbaru; g. Kecamatan Panti; h. Kecamatan Sumbersari; i. Kecamatan Tempurejo; j. Kecamatan Pakusari; k. Kecamatan Silo; dan l. Kecamatan lainnya sesuai dengan hasil identifikasi

.Dalam perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, perlu ada informasi awal berupa suatu indeks dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan salah satunya adalah dengan menghitung

Indeks Risiko Bencana (IRB). Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di Kabupaten Jember sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 disebutkan bahwa parameter yang digunakan dalam penyusunan IRB diantaranya yaitu:

1. Bahaya (*hazard*) dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupadata frekuensi dan magnitude dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain;
2. Kerentanan (*vulnerability*) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan.

1.5.2 Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data “Kabupaten Jember Dalam Angka 2022” yang dirilis BPS Kab. Jember, proyeksi penduduk Kabupaten Jember pada Tahun 2021 mencapai 2.581.486 jiwa yang terdiri atas 1.288.774 jiwa penduduk laki-laki dan 1.292.712 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember pada Tahun 2021 mencapai 783,85 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 5017,28 jiwa/km² dan terendah berada di Kecamatan Tempurejo sebesar 154,51 jiwa/Km².

Pada Tahun 2021 Penduduk Kabupaten Jember mengalami pertumbuhan sebesar 1,76% dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,88% dan penduduk perempuan sebesar 1,65%. Sedangkan angka rasio jenis kelamin Tahun 2021 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,69.

Tabel 1.12

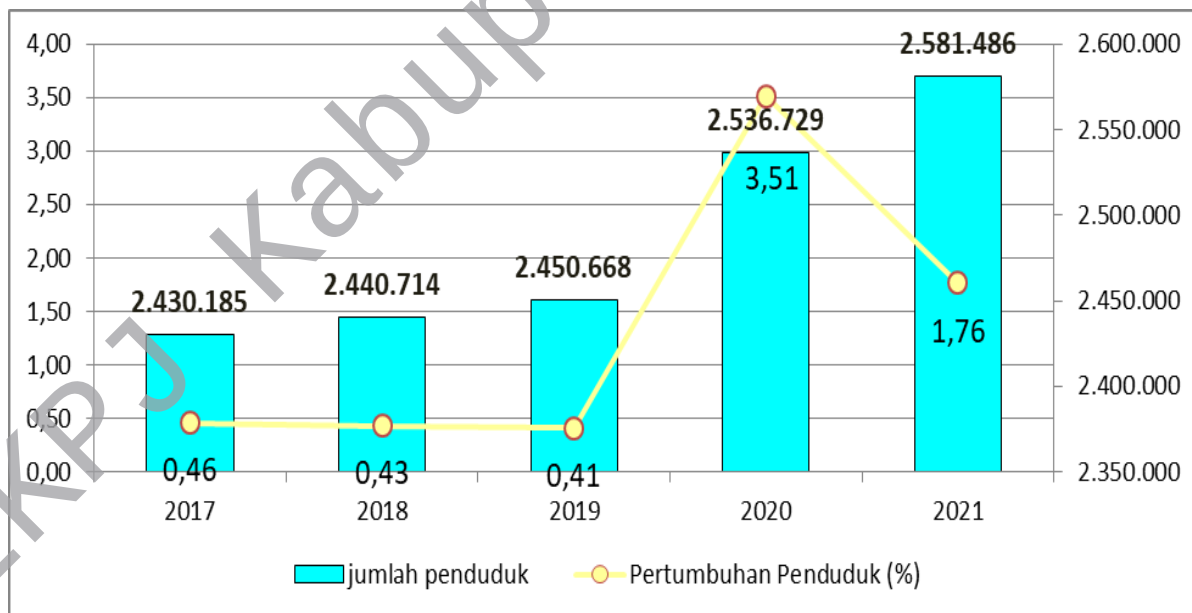
Indikator kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.430.185	2.440.714	2.450.668	2.536.729	2.581.486
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,46	0,43	0,41	3,51	1,76
Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	737,91	741,11	744,13	770,26	783,85
Sex Ratio (L/P) (%)	96,67	96,69	96,68	99,46	99,69
% Penduduk Menurut Kelompok Umur					
0 – 14 tahun (%)	29,14	23,06	22,78	20,86	20,39
15 – 64 tahun (%)	62,16	68,76	68,48	70,35	72,13
> 65 tahun (%)	8,70	8,17	8,74	8,79	9,24

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

Gambar 1.4

Perkembangan Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tahun 2017-2021



**Tabel 1.13**

Jumlah Penduduk, Luas Wlayah dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Jember Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Total	Luas	Kepadatan Penduduk
1	Kencong	72.220	2,80	65,92	1.095,57
2	GumukMas	89.720	3,48	82,98	1.081,22
3	Puger	125.620	4,87	148,99	843,14
4	Wuluhan	126.770	4,91	137,18	924,11
5	Ambulu	118.789	4,60	104,56	1.136,08
6	Tempurejo	81.036	3,14	524,46	154,51
7	Silo	110.646	4,29	309,93	356,95
8	Mayang	51.743	2,00	63,78	811,27
9	Mumbulsari	69.121	2,68	95,13	726,60
10	Jenggawah	90.015	3,49	51,02	1.764,31
11	Ajung	84.070	3,26	56,61	1.485,07
12	Rambipuji	88.138	3,41	52,8	1.669,28
13	Balung	83.489	3,23	47,12	1.771,84
14	Umbulsari	80.181	3,11	70,51	1.137,16
15	Semboro	50.354	1,95	45,43	1.108,39
16	Jombang	56.701	2,20	54,3	1.044,22
17	Sumberbaru	117.119	4,54	166,38	703,92
18	Tanggul	94.505	3,66	199,99	472,55
19	Bangsalsari	126.358	4,89	175,28	720,89
20	Panti	66.375	2,57	160,71	413,01
21	Sukorambi	41.880	1,62	60,63	690,75
22	Arjasa	42.153	1,63	43,75	963,50
23	Pakusari	46.004	1,78	29,11	1.580,35
24	Kalisat	80.117	3,10	53,48	1.498,07
25	Ledokombo	69.751	2,70	146,92	474,75
26	Sumberjambe	63.690	2,47	138,24	460,72
27	Sukowono	61.284	2,37	44,04	1.391,55
28	Jelbuk	32.944	1,28	65,06	506,36
29	Kaliwates	125.131	4,85	24,94	5.017,28
30	Sumbersari	133.442	5,17	37,05	3.601,67
31	Patrang	102.120	3,96	36,99	2.760,75
Jumlah/Total		2.581.486	100	3.293,34	783,85

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 (data diolah))

1.5.3 Kondisi Ekonomi

Sebagai wilayah agraris, Kabupaten Jember memiliki sumberdaya alam yang cukup potensial bagi pengembangan perekonomian wilayah. Sesuai dengan potensi wilayah yang ada, perekonomian Kabupaten Jember masih mengandalkan pada sektor pertanian sebagai basis dan penggerak roda perekonomian wilayah. Pertanian sebagai sektor basis sampai saat ini masih memiliki peran yang dominan dan strategis bagi pembangunan perekonomian baik sebagai : penyedia bahan pangan, penyedia bahan baku industri, bahan ekspor, pendapatan daerah dan masyarakat, menyerap tenaga kerja maupun katub pengamanan bagi masalah-masalah sosial yang timbul.

a. Potensi Unggulan Daerah

Berbagai potensi sumberdaya ekonomi banyak terdapat di Kabupaten Jember, namun tidak semua potensi yang ada merupakan potensi unggulan yang prospektif, sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi diperlukan prioritas penanganannya. Beberapa potensi unggulan yang ada di Kabupaten Jember, diantaranya adalah :

1. Bidang Pertanian

- Sub Bidang Pertanian : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, kol, kacang panjang, durian, alpukat, buah naga, jeruk, mangga, rambutan.
- Sub Bidang Peternakan : unggas (ayam dan itik), sapi kereman, sapi perah dan domba.
- Sub Bidang Perikanan : budidaya ikan (lele, nila, gurami) dan perikanan tangkap (cakalang, tuna).
- Sub Bidang Perkebunan : tembakau, kopi, tebu dan kelapa.

2. Bidang Pariwisata : Hotel dan Pemandian Rembangan, Hotel dan Pemandian Kebon Agung, Pantai Watu Ulo, Tanjung Papuma, Pantai Bandalit, Pantai Puger, Pantai Payangan, Pantai Paseban, Air Terjun Tancak



3. Bidang Pertambangan : Batu gamping, mangan dan pasir
4. Bidang Industri : Berbagai produk industri kecil kerajinan (batik, manik-manik, sangkar burung) dan industri pengolahan

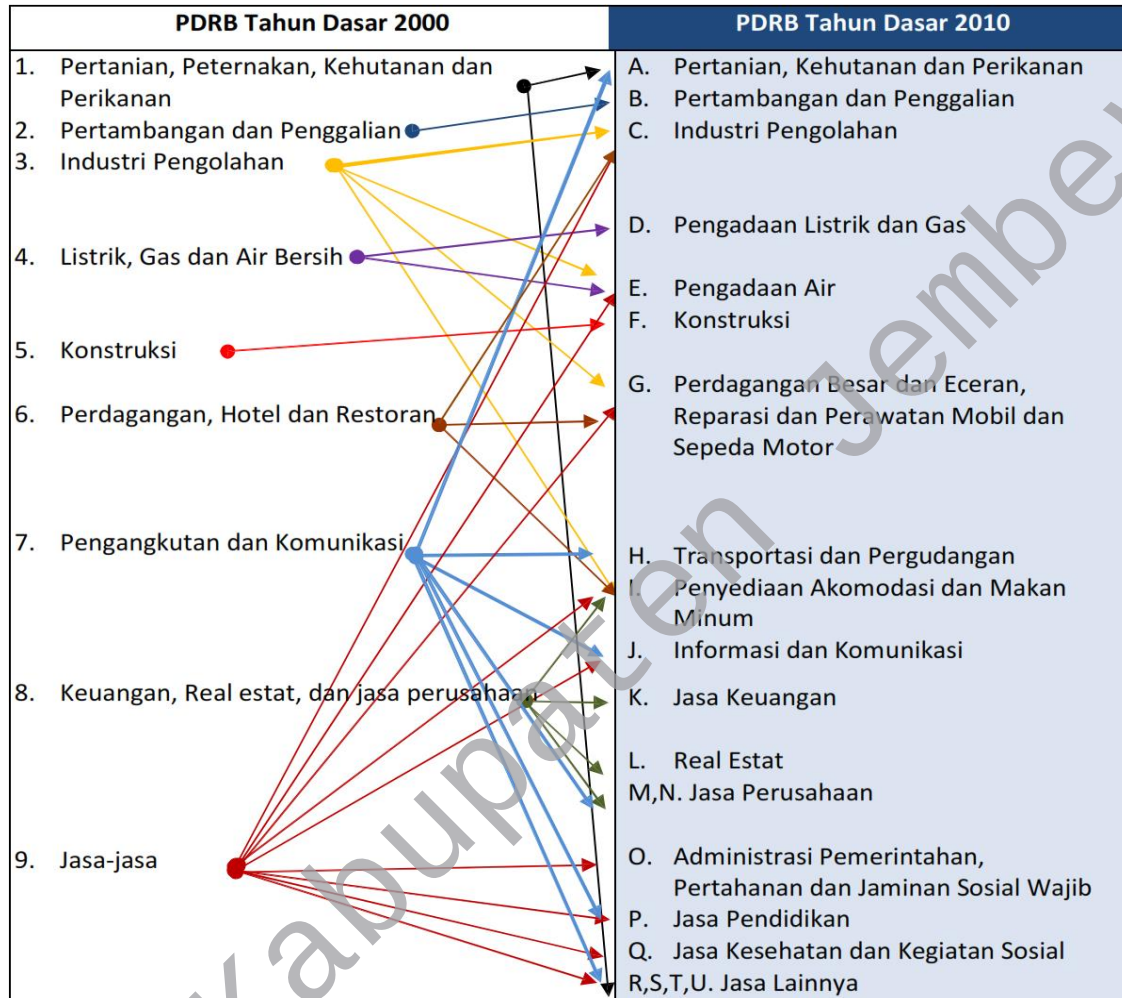
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jember mulai tahun 2014 sudah menggunakan tahun dasar baru, yaitu tahun 2010. Berdasarkan rekomendasi PBB dan menggunakan System National Account tahun 2008. Oleh karenanya penghitungan PDRB tahun 2010 – 2014, dihitung mundur menggunakan tahun dasar 2010.

Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

1. Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;
2. Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
3. Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun;
4. Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
5. Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (Producers Price Index /PPI);
6. Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Gambar 1.5
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha
Tahun Dasar 2000 dan 2010



Sumber : BPS Kab. Jember (PDRB Kabupaten Jember 2015 – 2019)

Perekonomian Kabupaten Jember diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diestimasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. PDRB dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu 1) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun dasar 2010. PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2017-2019 terus menunjukkan peningkatan sementara pada tahun 2020 terjadi penurunan lalu meningkat kembali ditahun 2021 sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.603,76	19.795,46	20.378,61	20.462,57	21.089,46
B	Pertambangan dan Penggalian	2.987,50	3.208,12	3.293,83	3.148,22	3.296,45
C	Industri Pengolahan	13.431,79	14.479,60	15.805,38	15.107,72	17.131,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	32,41	35,31	37,55	37,69	39,1
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	43,83	47,3	51,1	53,66	58,06
F	Konstruksi	5.273,62	5.850,63	6.424,98	6.030,70	6.274,82
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.906,17	9.990,72	10.965,71	10.480,34	11.561,53
H	Transportasi dan Pergudangan	1.161,61	1.283,70	1.409,87	1.333,86	1.440,67
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.571,20	1.751,98	1.963,24	1.737,36	1.851,15
J	Informasi dan Komunikasi	4.149,52	4.489,62	4.971,70	5.489,92	5.936,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.600,34	1.731,59	1.829,73	1.831,39	1.911,28
L	Real Estat	929,5	999,8	1.077,34	1.117,58	1.144,31
M,N	Jasa Perusahaan	238,53	262,82	290,09	282,4	292,75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.335,71	2.565,31	2.736,78	2.777,71	2.759,42
P	Jasa Pendidikan	3.880,49	4.166,19	4.511,39	4.708,69	4.783,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	515,27	568,31	630,02	700,11	701,76
R,S, T,U	Jasa lainnya	728,46	785,64	848,39	740,05	796,78
	Produk Domestik Regional Bruto	67.389,71	72.012,10	77.225,71	76.039,97	81.068,85

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

PDRB ADHB Kabupaten Jember pada tahun 2021 sebesar 81.068,85 miliar Rupiah, mengalami peningkatan sebesar 5.028,88 miliar Rupiah dibandingkan PDRB ADHB Kabupaten Jember tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHB pada tahun 2021 ini didorong oleh empat sektor utama PDRB ADHB yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan



Sepeda Motor; dan Sektor Konstruksi. Faktor pendorong terbesar adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mana pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 26,01 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2021, selanjutnya Sektor Industri Pengolahan yang mana pada tahun 2021 berkontribusi sebesar 21,13 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2021 dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 14,26 persen terhadap perubahan PDRB ADHB tahun 2019.

Tabel 1.14

PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah)

	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.841,70	13.845,12	14.046,58	13.895,89	13.881,23
B	Pertambangan dan Penggalian	2.427,18	2.564,80	2.588,33	2.417,34	2.445,02
C	Industri Pengolahan	10.268,48	10.888,41	11.656,83	10.867,31	11.745,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26,58	27,88	29,32	29,48	30,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	31,45	33,44	35,58	37,02	39,72
F	Konstruksi	3.404,78	3.667,65	3.995,00	3.725,62	3.804,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.344,25	6.875,84	7.410,80	6.990,66	7.569,41
H	Transportasi dan Pergudangan	764,71	822,19	892,77	838,74	902,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.092,51	1.191,21	1.309,02	1.135,42	1.169,97
J	Informasi dan Komunikasi	3.574,30	3.864,89	4.225,31	4.648,80	5.007,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.078,94	1.138,42	1.189,96	1.188,50	1.205,05
L	Real Estat	694,38	739,38	788,62	808,54	824,21
M,N	Jasa Perusahaan	160,82	172,46	185,24	176,38	180,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.699,56	1.816,49	1.872,52	1.830,95	1.829,92
P	Jasa Pendidikan	2.558,47	2.717,99	2.903,62	2.976,29	3.020,51

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020	2021
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	371,95	398,49	429,05	468,93	460,34
R,S,T,U	Jasa lainnya	572,9	605,86	641,49	550,69	573,46
Produk Domestik Regional Bruto		48.912,96	51.370,52	54.200,04	52.586,56	54.688,71

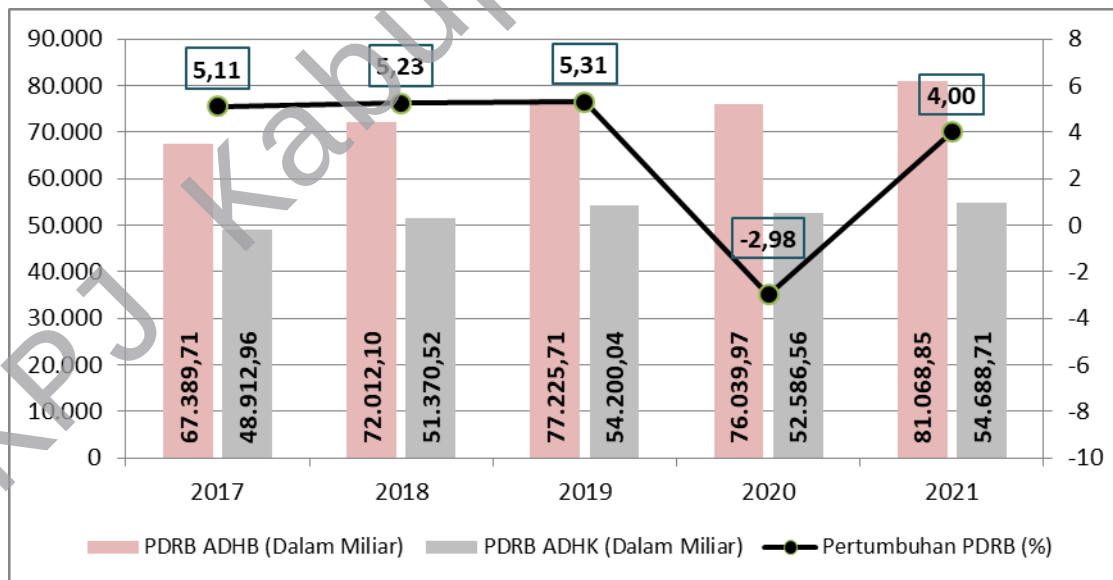
Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)

PDRB ADHK Kabupaten Jember pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan kembali dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 54.688,71 Miliar Rupiah atau meningkat sebesar 2.102,15 Miliar Rupiah.

Indikator lain yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah indikator pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember. Pertumbuhan PDRB memberikan informasi tentang perubahan nilai PDRB ADHK tiap tahun dalam bentuk prosentase. Gambar berikut ini menyajikan pergerakan pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Jember sejak tahun 2017 sampai dengan 2021.

Gambar 1.5

PDRB dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022 (data diolah))

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 bergerak di kisaran 5-6 persen pertahun lalu menurun drastis



pada tahun 2020 lalu meningkat kembali pada tahun 2021. Pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 5,31 persen atau meningkat sebesar 0,08 persen dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan secara drastis hingga mencapai -2,98 persen akibat dampak dari Pandemi Covid-19 selanjutnya mengalami peningkatan kembali hingga mencapai 4,00 persen.

Tabel 1.15

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar PDHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 – 2021

	Lapangan Usaha/Industry	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture,	2,08	0,02	1,46	-1,07	-0,11
B	Pertambangan dan Penggalian	5,69	5,67	0,92	-6,61	1,15
C	Industri Pengolahan	5,71	7,01	6,08	-6,77	8,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,76	4,9	5,18	0,54	2,31
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,49	6,32	6,4	4,06	7,29
F	Konstruksi	7,59	7,72	8,93	-6,74	2,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,75	8,42	7,8	-5,72	8,28
H	Transportasi dan Pergudangan/	7,41	7,52	8,58	-6,05	7,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,02	9,03	9,89	-13,26	3,04
J	Informasi dan Komunikasi	7,72	8,13	9,33	10,02	7,72
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,23	5,51	4,53	4,40	1,39
L	Real Estat	5,39	6,48	6,66	2,53	1,94
M, N	Jasa Perusahaan	6,59	7,41	7,41	-4,78	2,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,7	3,08	3,08	-2,22	-0,06
P	Jasa Pendidikan	5,46	6,83	6,83	2,50	1,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,81	7,67	7,67	9,29	-1,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	4,17	5,88	5,88	-14,15	4,13
	Produk Domestik Regional Bruto	5,11	5,23	5,31	-2,98	4,00

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022)



PDRB Jember atas dasar harga berlaku Tahun 2017 sebesar Rp. 67.476.071,8 juta, Tahun 2018 meningkat menjadi Rp. 72.312.525,6 juta, Tahun 2019 sebesar Rp. 77.225.710 juta, Tahun 2020 sebesar Rp. 76.039.970 juta dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 81.068.850 juta. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, dengan capaian pertumbuhan ekonomi Tahun 2017 sebesar 5,11% dengan nilai sebesar Rp. 48.912.959,80 juta, Tahun 2018 Rp. 51.472.979,10 juta tumbuh sebesar 5,23%, Tahun 2019 sebesar Rp. 54.204.138,7 juta tumbuh sebesar 5,31%, Tahun 2020 sebesar Rp. 52.586.560 juta tumbuh sebesar -2,98% dan pada tahun 2021 sebesar Rp. 54.688.710 juta tumbuh sebesar 4,00%.

Tabel 1.16

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2017 – 2021

Uraian	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
1. PDRB Jember					
ADHB (juta rupiah)	67.476.071,80	72.312.525,60	77.225.710,00	76.039.970,00	81.068.850,00
ADHK (juta rupiah)	48.912.959,80	51.472.979,10	54.204.138,70	52.586.560,00	54.688.710,00
Pertumbuhan PDRB terhadap ADHK (%)	5,11	5,23	5,31	-2,98	4,00
2. PDRB Perkapita					
ADHB (ribu rupiah)	27.765,82	29.627,61	31.512,11	29.975,60	31.403,95
ADHK (ribu rupiah)	20.127,26	21.089,31	22.118,11	20.730,07	21.184,97

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2022(data diolah))



Dalam hal penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 senantiasa dianut prinsip disiplin anggaran penyusunan anggaran daerah agar dapat terjaga kesinambungan dan keterpaduan program-program yang telah direncanakan

Total realisasi APBD Tahun Anggaran 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendapatan : 3.563.361.748.973,24
2. Belanja : 3.731.626.715.976,43
- Surplus/Defisit : 168.264.967.003,19
3. Pembiayaan
- a. Pembiayaan Penerimaan : 735.820.424.967,01
- b. Pembiayaan Pengeluaran : 0
- Pembiayaan Netto : 735.820.424.967,01

c. Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan Tahun 2021

Pendapatan Kabupaten Jember di tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar 96,79 persen dari target Tahun 2021. Anggaran Pendapatan tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.681.432.575.560,00 dan direalisasikan sampai akhir tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 3.563.361.748.973,24. Pendapatan Kabupaten Jember antara lain berasal dari 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Detail Realisasi Pendapatan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 1.17
Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	719.879.915.600,00	635.305.965.623,24	91,63	84.573.949.976,76
1.1.1	Pajak Daerah	226.430.500.000,00	209.903.218.787,00	92,70	16.527.281.213,00
1.1.2	Restribusi Daerah	42.203.813.283,00	31.782.076.707,00	75,30	10.421.736.576,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	6.102.248.169,00	7.064.696.843,75	115,77	(962.448.674,75)



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	dipisahkan				
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	445.143.354.148,00	386.555.973.285,29	86,84	58.587.380.862,71
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.743.316.319.429,00	2.730.526.116.171,00	99,53	12.790.203.258,00
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.562.921.888.000,00	2.443.585.218.417,00	95,34	119.336.669.583,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar daerah	180.394.431.429,00	286.940.897.754,00	159,	(106.546.466.325,00)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	218.236.340.531,00	197.529.667.179,00	90,51	20.706.673.352,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	21.520.681.000,00	3.230.475.179,00	15,01	18.290.205.821,00
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	196.715.659.531,00	194.299.192.000,00	98,77	2.416.467.531,00
Jumlah Pendapatan		3.681.432.575.560,00	3.563.361.748.973,24	96,79	91.763.019.929,62

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

d. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2021

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.18
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.1	BELANJA OPERASI	3.121.862.751.642,00	2.718.701.856.568,55	87,09	403.160.895.073,45
2.1.1	Belanja Pegawai	1.577.664.970.315,00	1.432.378.400.974,85	90,79	145.286.569.340,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.372.321.093.324,00	1.130.710.076.918,70	82,39	241.611.016.405,30
2.1.5	Belanja Hibah	122.337.394.003,00	108.436.785.475,00	88,64	13.900.608.528,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49.539.294.000,00	47.176.593.200,00	95,23	2.362.700.800,00
2.2	BELANJA MODAL	735.350.920.728,00	552.082.443.567,66	75,08	183.268.477.160,34
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.148.581.317,00	1.188.883.260,00	37,76	1.959.698.057,00



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.761.624.080,00	139.204.965.237,00	66,68	69.556.658.843,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.031.978.434,00	41.602.904.348,00	79,96	10.429.074.086,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	401.577.686.473,00	303.139.295.524,66	75,49	98.438.390.948,34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.831.050.424,00	66.946.395.198,00	95,87	2.884.655.226,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	40.357.565.574,00	15.409.789.557,00	38,18	24.947.776.017,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574,00	15.409.789.557,00	38,18	24.947.776.017,00
2.4	BELANJA TRANSFER	519.761.150.084,00	445.432.626.283,22	85,70	74.328.523.800,78
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,00	22.065.196.659,22	100,00	0,78
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	497.695.953.424,00	423.367.429.624,00	85,07	74.328.523.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.417.332.388.028,00	3.731.626.715.976,43	84,48	685.705.672.051,57

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 84,48 persen atau sebesar Rp 3.731.626.715.976,43 dari target anggaran yang sebesar Rp 4.417.332.388.028,00. Berdasarkan angka tersebut, maka anggaran belanja daerah yang tidak terserap adalah sebesar Rp 685.705.672.051,57.

e. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan Tahun 2021

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain



digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 1.19
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	735.899.812.468,00	735.820.424.967,01	99,99	79.387.500,99
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	735.899.812.468,00	735.779.124.967,01	99,98	120.687.500,99
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		735.899.812.468,00	735.820.424.967,01	99,99	79.387.500,99

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 99,99 persen atau dengan selisih lebih sebesar Rp 79.387.500,99. Anggaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 735.899.812.468,00 dan realisasinya sebesar Rp 735.820.424.967,01. Bertambahnya realisasi Pembiayaan Daerah dikarenakan pada pos Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir terdapat tambahan anggaran yang mulanya dianggarkan nol Rupiah namun diakhir periode terdapat penerimaan sebesar Rp 41.300.000,00.

2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Melalui Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah sebagai salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, dalam implementasi arah kebijakan keuangan daerah harus dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan program prioritas.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam proses penganggaran Kabupaten Jember sudah menggunakan SIPD yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Kemendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sudah dilakukan proses migrasi ke Aplikasi Simda Keuangan karena untuk penatausahaan dan pelaporan Pemerintah Kabupaten Jember masih menggunakan sistem aplikasi Simda Keuangan.



Pemerintah Kabupaten Jember berusaha dalam mengelola Keuangan Daerah telah mempedomani peraturan-peraturan perundang-undangan agar seluruh sumberdaya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, efisien dan berkesinambungan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

2.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kinerja pendapatan daerah secara umum diukur dengan kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, utamanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan persentase kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri meliputi penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama PAD yang merupakan indikator kekuatan dan kemandirian Pemerintah Kabupaten Jember dalam memenuhi kebutuhan untuk membiayai kegiatan operasional baik melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. PAD merupakan komponen yang paling memungkinkan untuk dioptimalkan dan terus ditingkatkan penerimaannya, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

2.1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
2. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah secara profesional;



3. Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Peningkatan penerimaan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan);
6. Peningkatan akurasi objek pajak dan data potensi pajak Daerah;
7. Sosialisasi pendapatan asli daerah dan PBB melalui media sosial, dan media cetak;
8. Melakukan operasi secara sinergi kepada penunggak pajak;
9. Monitoring dan penertiban pemasangan reklame;
10. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, OPD Penghasil, dan instansi terkait lainnya;
11. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
12. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
13. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan asset dan keuangan Daerah;
14. Optimalisasi pemungutan piutang PAD;
15. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009;
16. Revisi dan evaluasi Perda/Perbub dalam penyesuaian dasar penetapan tarif Daerah;
17. Penentuan target pendapatan Daerah, agar memperhitungkan potensi riil secara cermat, terukur, rasional serta memiliki kepastian hukum;
18. Pengembangan program/kegiatan berupa data/sistem, standar pengelolaan, keterampilan SDM dan sebagainya dalam pemungutan PBB perkotaan/pedesaan yang akan berdampak nyata terhadap peningkatan pendapatan secara signifikan;



19. Pengkajian sumber-sumber pendapatan daerah;
20. Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
21. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan; dan
22. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Pendapatan Daerah Kabupaten Jember antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

A. Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi menjadi 4 unsur, berikut penjelasannya :

1. Pajak Daerah

Realisasi pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar Rp.209.903.218.787 sedangkan pagu pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.226.430.500.000 Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 92,70 persen

Tabel 2.1 Pajak Daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Pajak Daerah	226.430.500.000	209.903.218.787	92,70	(16.527.281.213)
Jumlah Pajak Daerah		226.430.500.000	209.903.218.787	92,70	(16.527.281.213)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember



2. Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp.31.782.076.707,20 sedangkan pagu pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.42.203.813.283,00 Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 75,30 persen

Tabel 2.2 Retribusi Daerah.

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Retribusi Daerah	42.203.813.283,00	31.782.076.707,20	75,30	(10.421.736.575,80)
Jumlah Retribusi Daerah		42.203.813.283,00	31.782.076.707,20	75,30	(10.421.736.575,80)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah sebesar Rp.7.064.696.843,75 sedangkan pagu pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp.6.102.248.169,00 Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 115,77 persen

**Tabel 2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan**

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.102.248.169,00	7.064.696.843,75	115, 77	962.448.674,75
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		7.064.696.843,75	7.064.696.843,75	115, 77	962.448.674,75

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember

4. Lain-Lain PAD Yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp.386.555.973.285,29 sedangkan pagu pendapatan lain-lain PAD yang Sah Rp.445.143.354.148,00 Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 86,83 persen

Tabel 2.4 lain-lain PAD yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	lain-lain PAD yang Sah	445.143.354.148,00	386.555.973.285,29	86,83	(58.587.380.862,71)
	lain-lain PAD yang Sah	445.143.354.148,00	386.555.973.285,29	86,83	(58.587.380.862,71)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember



Sesuai data diatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari PAD dengan meminimalisir beban yang ditanggung masyarakat, maka kebijakan yang dilakukan adalah:

1. Secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drive thru*. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya,
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Melaksanakan pelayanan, Samsat *Mobile*, layanan SMS, dan pengembangan Samsat *Outlet*;
5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001- 2008;
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT dan Unit Penghasil Lainnya;
7. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
8. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui penyertaan modal daerah, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;



10. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
11. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD Penghasil;
12. Optimalisasi pemungutan piutang PAD; dan
13. Memberi penghargaan kepada Camat dan Kepala Desa yang prosentase realisasi PBB nya tertinggi.

B. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 99,61 persen dari target anggaran Tahun Anggaran 2021. Anggaran Tahun 2021 adalah sebesar Rp.2.743.316.319.429,00 dan realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.2.730.526.116.171,00 Detail Realisasi PAD adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar Rp.2.443.585.218.417,00 sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat dengan pagu sebesar Rp.2.562.921.888.000,00. Berdasarkan hal tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat adalah sebesar 95,34 persen. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat.

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	143.362.963.000,00	204.246.544.878,00	142,47	(60.883.581.878,00)



2.	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.607.489.075.000,00	1.607.489.075.000,00	100,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.320.963.000,00	74.298.097.006,00	76,34	23.022.865.994,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	402.325.979.000,00	319.457.117.333,00	79,40	82.868.861.667,00
5	Dana Desa	312.422.908.000,00	238.094.384.200,00	76,20%	(74.328.523.800,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.562.921.888.000,00	2.443.585.218.417,00	95,34	119.336.669.583,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

a. Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar Rp.204.246.544.878,00, dengan pagu anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.143.362.963.000,00. Berdasarkan data tersebut, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) adalah sebesar 142,47 persen. Berikut disajikan rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) .

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	14.325.234.000,00	29.366.551.564,00	205,00	(15.041.317.564,00)
2	DBH PPh Pasal 21	23.393.970.000,00	39.663.338.708,00	169,55	(16.269.368.708,00)
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	2.494.348.000,00	0,00	~	(2.494.348.000,00)
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	62.283.147.000,00	69.847.645.072,00	112,15	(7.564.498.072,00)



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	36.021.058.000,00	57.368.872.546,00	159,26	(21.347.814.546,00)
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	807.637.000,00	1.087.707.787,00	134,68	(280.070.787,00)
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	27.552.000,00	39.874.676,00	144,73	(12.322.676,00)
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.746.978.000,00	3.388.442.102,00	193,96	(1.641.464.102,00)
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.134.720.000,00	2.126.493.273,00	187,40	(991.773.273,00)
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.128.319.000,00	1.357.619.150,00	120,32	(229.300.150,00)
Jumlah Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		143.362.963.000,00	204.246.544.878,00	142,47	(60.883.581.878,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

Pagu Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar Rp.1.607.489.075.000,00 sedangkan realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.1.607.489.075.000,00. Berdasarkan hal tersebut, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) adalah sebesar 100,00 persen. Berikut disajikan rincian realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) .

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Umum Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	DAU	1.607.489.075.000,00	1.607.489.075.000,00	100,00	0,00
2	Dana Alokasi Umum Tambahan Kelurahan - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum		1.607.489.075.000,00	1.607.489.075.000,00	100,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

c. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.74.298.097.006 dengan Pagu Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 97.320.963.000 atau sebesar 76,34%. Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.319.457.117.333 dengan Pagu Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.402.325.979.000 atau sebesar 79,40%.

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	97.320.963.000,00	74.298.097.006,00	76,34	23.022.865.994,00
	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	9.644.942.000,00	6.999.888.000,00	72,58	2.645.054.000,00
	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.185.951.000,00	1.993.713.634,00	62,58	1.192.237.366,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	240.000.000,00	0,00	~	240.000.000,00
	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Afirmasi-Penyediaan Rumah Khusus	954.731.000,00	905.000.000,00	94,79	49.731.000,00



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	3.847.651.000,00	1.804.351.306,00	46,89	2.043.299.694,00
	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	1.168.500.000,00	782.201.000,00	66,94	386.299.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	485.698.000,00	478.939.000,00	98,61	6.759.000,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	717.399.000,00	710.165.300,00	98,99	7.233.700,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	13.643.031.000,00	13.064.941.947,00	95,76	578.089.053,00
	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	1.714.252.000,00	1.463.472.244,00	85,37	250.779.756,00
	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	1.749.794.000,00	1.749.794.000,00	100,00	0,00
	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	1.489.034.000,00	1.031.631.837,00	69,28	457.402.163,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.059.842.000,00	804.830.500,00	75,94	255.011.500,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	4.363.000.000,00	1.823.349.344,00	41,79	2.539.650.656,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	1.000.000.000,00	988.713.000,00	98,87	11.287.000,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	12.642.332.000,00	8.036.318.594,00	63,57	4.606.013.406,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	38.464.806.000,00	30.778.247.900,00	80,02	7.686.558.100,00
	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	950.000.000,00	882.539.400,00	92,90	67.460.600,00
2	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik LRA	402.325.979.000,00	319.457.117.333,00	79,40	82.868.861.667,00
	DAK Non Fisik-BOP PAUD	42.893.400.000,00	38.041.500.000,00	88,69	4.851.900.000,00
	DAK Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	1.865.000.000,00	1.735.500.000,00	93,06	129.500.000,00
	DAK Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-TPG PNSD	290.084.216.000,00	276.462.364.390,00	95,30	13.621.851.610,00



NO.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	5.071.412.000,00	1.364.384.943,00	26,90	3.707.027.057,00
	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	372.462.000,00	186.231.000,00	50,00	186.231.000,00
	DAK BOP Pendidikan Kesenjangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Dana Pelayanan Pariwisata	0,00	0,00	0,00	0,00
	DAK Non Fisik-PK2UKM	390.304.000,00	0,00	~	390.304.000,00
	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	59.860.798.000,00	0,00	~	59.860.798.000,00
	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	390.887.000,00	390.887.000,00	100,00	0,00
	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	242.500.000,00	121.250.000,00	50,00	121.250.000,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		499.646.942.000,00	393.755.214.339,00	78,81	105.891.727.661,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi pendapatan transfer antar daerah adalah sebesar Rp.286.940.897.754,14 dari target pagu pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp.180.394.431.429,00. Berdasarkan data tersebut. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan transfer antar daerah.

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Transfer Antar Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Pendapatan Bagi Hasil	168.917.893.072,00	277.603.727.254,00	164,34	(108.685.834.182,00)
2	Bantuan Keuangan	11.476.538.357,00	9.337.170.500,00	81,35%	174.999.999,86
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		180.394.431.429,00	286.940.897.754,14	159%	(106.546.466.325,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)



a. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil adalah sebesar Rp.277.603.727.254,00 dari target Anggaran Pendapatan Bagi Hasil sebesar Rp.168.917.893.072,00 Berdasarkan hal tersebut, realisasi Pendapatan Bagi Hasil adalah sebesar 164,34 persen atau Rp.(108.685.834.182,00) dari target anggaran Pendapatan Bagi Hasil. Berikut disajikan rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil.

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Kabupaten Jember
Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	34.621.667.237,00	79.098.279.139,00	228,46	(44.476.611.902,00)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	14.136.282.836,00	36.961.536.725,00	261,47	(22.825.253.889,00)
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	39.340.351.426,00	72.153.459.025,00	183,41	(32.813.107.599,00)
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	80.612.877.000,00	89.015.329.775,00	110,42	(8.402.452.775,00)
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	206.714.573,00	375.122.590,00	181,47	(168.408.017,00)
Jumlah Pendapatan Bagi Hasil		168.917.893.072,00	277.603.727.254,00	164,34	(108.685.834.182,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

b. Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi

Realisasi Bantuan Keuangan adalah sebesar Rp.9.337.170.500 dari target Bantuan Keuangan sebesar Rp.11.476.538.357,00 Berdasarkan hal tersebut, realisasi Bantuan Keuangan adalah sebesar 81,35 persen.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari 1) Pendapatan Hibah; 2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan. Detail Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah secara rinci disajikan dalam tabel berikut. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebesar Rp.197.529.667.179 dari target pagu Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.218.236.340.531 Berdasarkan data tersebut, realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya adalah sebesar 90,51 persen. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat-lainnya.

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
1.	Pendapatan Hibah	21.520.681.000,00	3.231.006.779,00	15,01	18.289.674.221,00
2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	196.715.659.531,00	194.299.510.993,42	98,77	2.416.148.537,58
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		218.236.340.531,00	197.529.667.179,00	90,51	20.706.673.352,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

2.1.2 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan penerimaan daerah, terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dijumpai di lapangan yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan daerah, diantaranya adalah:

1. Kurang optimalnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;



2. Kurang optimalnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya peningkatan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah; dan
3. Adanya pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi semua sektor termasuk didalamnya pencapaian target Pendapatan Daerah.

Secara garis besar, permasalahan dalam pelaksanaan penerimaan daerah adalah belum optimalnya upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah yang disebabkan adanya Pandemi Covid-19. Dengan demikian realisasi pendapatan daerah belum mencapai target yang diharapkan. Solusi yang dapat dilaksanakan guna terus meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui:

1. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
2. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan, penegakan hukum dan penyesuaian regulasi tarif pemungutan;
3. Peningkatan pelayanan pemungutan pendapatan kepada masyarakat melalui pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Informasi; dan
4. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/ nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan.

2.2 Pengelolaan Belanja Daerah

2.2.1 Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/ kota. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang



direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/ kegiatan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 tetap diarahkan untuk mendukung pengurangan kemiskinan, pencapaian target Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan, Penurunan *Stunting* dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang mendukung target-target tersebut di atas diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

1. Pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2016-2021;
2. Pendanaan program dan kegiatan prioritas sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026;
3. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJPN Tahun 2005-2025 dan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2008;
4. Pendukung percepatan Pembangunan Nasional (Inpres No. 1/2010) dan program Pembangunan yang Berkeadilan (Inpres Nomor 3/2010);
5. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program);
6. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru);
7. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jember secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember;
8. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), belanja asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan), Alokasi Dana Desa unsur penghasilan perangkat



desa dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK);

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

1. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan;
2. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan;
3. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total FKB, PBBKB, dan BBNKB sesuai dengan pasal 8 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
4. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (6 urusan Pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, 18 urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan 8 urusan Pemerintahan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai tugas dan fungsi OPD;
5. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 15%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli;
6. Pengalokasian anggaran yang diarahkan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kelurahan, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, dan dana BOS pemerintah;
7. Pengalokasian Alokasi pendanaan kepada desa baik berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN dan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Retribusi dan Pajak Daerah Kepada Desa.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap



organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka pemerintahan daerah akan mengerahkan seluruh alat dan perangkat kebijakan daerah untuk mendukung tercapainya visi dan misi tersebut.

Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, yang meliputi: (1) Perencanaan yang tepat, (2) Penggunaan anggaran pada kebutuhan yang prioritas, (3) Pelaksanaan anggaran yang transparan, hati-hati dan akuntabel, (4) Pengawasan dan pengendalian anggaran yang efektif, (5) Pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang disiplin. Sedangkan arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 adalah pada:

1. Memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, dalam wujud fasilitasi belanja penanganan kemiskinan dan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan serta layanan sosial dasar lainnya;
2. Memperkuat program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
3. Memfasilitasi dan memberikan stimulan pada sektor riil melalui bantuan modal dan pembinaan/pendampingan kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), juga melalui stimulasi pembangunan ekonomi baik disektor produktif maupun sarana dan prasarana wilayah;
4. Melanjutkan proyek-proyek infrastruktur yang strategis dan mempunyai manfaat luas bagi masyarakat;
5. Fasilitasi belanja tak terduga untuk kegiatan mendesak termasuk untuk penanganan bencana;
6. Mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/ Kota.



Kebijakan belanja daerah tersebut diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proposional, efisien dan efektif sesuai kemampuan keuangan daerah.

Kebijakan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan/ hambatan dan tantangan utama, menjawab tantangan yang mendesak dan berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan belanja daerah adalah mengoptimalkan belanja daerah dalam membiayai program-program OPD, lintas OPD dan program-program kewilayahan yang tertuang dalam rencana kerja dan anggaran sesuai dengan target-target pembangunan Tahun Anggaran 2021. Seperti pada tahun – tahun sebelumnya, pada kelompok belanja tidak langsung, kebijakan umum anggaran diarahkan pada:

1. Khusus untuk belanja pegawai, kebijakan belanja daerah ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil berupa pembayaran gaji bulanan, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, dan penyesuaian tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai (TPP). Belanja pegawai juga mencakup gaji Bupati dan Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Belanja Hibah dipergunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
3. Belanja Bantuan Sosial diarahkan pada bantuan keuangan yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat pendampingan maupun bantuan langsung bagi masyarakat kurang mampu yang terdampak resiko sosial;
4. Belanja Bagi Hasil/ Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan bagi hasil dari realisasi pajak dan retribusi daerah;
5. Belanja Tidak Terduga, arah kebijakan belanja untuk jenis belanja ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksikan, diluar kendali pemerintah daerah serta untuk penanganan



kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segera memperoleh penanganan, dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan.

2.2.2 Target dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2021

Dalam rangka merealisasikan arah kebijakan belanja yang telah dirumuskan dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 secara garis besar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut

Tabel 2.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.1	BELANJA OPERASI	3.121.862.751.642,00	2.718.701.856.568,55	87,09	403.160.895.073,45
2.1.1	Belanja Pegawai	1.577.664.970.315,00	1.432.378.400.974,85	90,79	145.286.569.340,15
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.372.321.093.324,00	1.130.710.076.918,70	82,39	241.611.016.405,30
2.1.5	Belanja Hibah	122.337.394.003,00	108.436.785.475,00	88,64	13.900.608.528,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	49.539.294.000,00	47.176.593.200,00	95,23	2.362.700.800,00
2.2	BELANJA MODAL	735.350.920.728,00	552.082.443.567,66	75,08	183.268.477.160,34
2.2.1	Belanja Modal Tanah	3.148.581.317,00	1.188.883.260,00	37,76	1.959.698.057,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	208.761.624.080,00	139.204.965.237,00	66,68	69.556.658.843,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.031.978.434,00	41.602.904.348,00	79,96	10.429.074.086,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	401.577.686.473,00	303.139.295.524,66	75,49	98.438.390.948,34
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	69.831.050.424,00	66.946.395.198,00	95,87	2.884.655.226,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	40.357.565.574,00	15.409.789.557,00	38,18	24.947.776.017,00
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574,00	15.409.789.557,00	38,18	24.947.776.017,00



NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
2.4	BELANJA TRANSFER	519.761.150.084,00	445.432.626.283,22	85,70	74.328.523.800,78
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	22.065.196.660,00	22.065.196.659,22	100,00	0,78
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	497.695.953.424,00	423.367.429.624,00	85,07	74.328.523.800,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		4.417.332.388.028,00	3.731.626.715.976,43	84,48	685.705.672.051,57

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 84,48 persen atau sebesar Rp.3.731.626.715.976,43 dari target anggaran yang sebesar Rp.4.417.332.388.028,00. Berdasarkan angka tersebut, maka anggaran belanja daerah yang tidak terserap adalah sebesar Rp.685.705.672.051,57.

2.2.3 Permasalahan dan solusi

Secara umum tidak terdapat permasalahan yang menonjol dalam pengelolaan belanja daerah meskipun masih ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terealisasi. Permasalahan tersebut dikarenakan oleh

1. OPD belum tertib dalam penyerapan anggaran belanja sesuai jadwal yang telah ditetapkan dalam anggaran kas atau DPA-OPD, sehingga pelaksanaan program/ kegiatan menjadi terlambat atau menumpuk di akhir tahun.
2. Masih ada OPD yang kurang cermat dalam penyusunan rencana program/ kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya, anggaran belanja di OPD tidak dapat diserap secara optimal.
3. Adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi semua sektor, termasuk pelaksanaan program/ kegiatan OPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, permasalahan utama adalah karena kurang optimalnya OPD dalam mengelola anggaran belanja

masing-masing OPD. Berkaitan dengan hal tersebut, solusi yang dapat digunakan adalah:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin kepada OPD agar penyerapan anggaran belanja lebih tepat waktu dan optimal;
2. Meningkatkan pemahaman kepada OPD melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi maupun rapat koordinasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan agar dalam pengelolaan keuangan lebih ekonomis, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3 Pengelolaan Pembiayaan Daerah

2.3.1 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi penerimaan pembiayaan Daerah dan pengeluaran pembiayaan Daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena adanya perbedaan antara jumlah pengeluaran dengan penerimaan sehingga terdapat defisit atau surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran sebelumnya. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan Daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas. Kebijakan yang ditempuh adalah mengoptimalkan Pembiayaan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit melalui penyertaan modal atau investasi pada BUMD. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan pelayanan publik);



2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan Daerah akan menjadi daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; dan
3. Peningkatan ekonomi Daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas perekonomian.

A. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2020;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman Daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
6. Penerimaan piutang Daerah.

d. Pengeluaran Pembiayaan

Sebaliknya jika dalam hal APBD diperkirakan Surplus, maka sisa anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk Pengeluaran Pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan yang antara lain terdiri dari :

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
3. Pembayaran Pokok Utang; dan
4. Pemberian Pinjaman Daerah.

2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dimana dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman



dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah. Pencapaian kinerja keuangan terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

NO	PEMBIAYAAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA LEBIH / (KURANG)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	735.899.812.468,00	735.820.424.967,01	99,99	79.387.500,99
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)	735.899.812.468,00	735.779.124.967,01	99,98	120.687.500,99
3.1.2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir	0,00	41.300.000,00	0,00	41.300.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto		735.899.812.468,00	735.820.424.967,01	99,98	79.387.500,99

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember (sebelum review)

Sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Jember pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 99,98 persen atau dengan selisih lebih sebesar Rp.79.387.500,99. Anggaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp.735.899.812.468,00 dan realisasinya sebesar Rp.735.820.424.967,01. Bertambahnya realisasi Pembiayaan Daerah dikarenakan pada pagu anggaran Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Pengembalian Pokok Dana Bergulir terdapat tambahan anggaran yang mulanya dianggarkan nol Rupiah namun diakhir periode terdapat penerimaan sebesar Rp.41.300.000,00.



Berikut disajikan kerangka fiskal Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Tabel 2.14
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2017 – 2020

URAIAN	TAHUN			
	2017	2018	2019	2020
Pendapatan	3.540.406.991.356,11	3.601.294.429.685,50	3.815.931.626.881,96	3.665.003.964.118,68
Pendapatan Asli Daerah	736.927.109.103,11	609.304.818.610,50	667.598.426.909,96	660.367.909.055,62
Pendapatan Transfer	2.408.256.485.000,00	2.380.522.046.000,00	2.402.647.387.288,00	2.240.229.530.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	395.223.397.253,00	611.467.565.075,00	745.685.812.684,00	764.406.435.063,06
Belanja	4.187.962.514.392,59	4.163.624.940.931,97	3.876.912.578.274,08	4.271.921.483.957,88
Belanja Tidak Langsung	1.974.122.824.305,30	2.049.530.240.244,35	2.000.732.096.702,49	2.673.960.829.952,36
Belanja Langsung	2.213.839.690.087,29	2.114.094.700.687,62	1.876.180.481.571,59	1.597.960.654.005

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
(Sesuai Nomenklatur dalam Permendagri No 13 Th 2006 beserta perubahannya)

Tabel 2.15
Perkembangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021

URAIAN	TAHUN
	2021
Pendapatan	3.681.432.575.560,00
Pendapatan Asli Daerah	719.879.915.600,00
Pendapatan Transfer	2.743.316.319.429,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	218.236.340.531,00
Belanja	4.417.332.388.028,00
Belanja Operasi	3.121.862.751.642,00
Belanja Modal	735.350.920.728,00
Belanja Tidak Terduga	40.357.565.574,00
Belanja Transfer	519.761.150.084,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember
(Sesuai Nomenklatur dalam Permendagri no 77 Tahun 2020)

Belanja daerah diarahkan pada prinsip-prinsip keadilan yang dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang terstruktur dalam APBD dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, fokus, ada komitmen, partisipatif, terobosan, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.



LKPJ Kabupaten Jember



ebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya, pembagian urusan juga mengalami penyesuaian yaitu Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, meliputi bidang urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, Pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, Kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan.

Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi bidang urusan kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi.

Urusan Pemerintahan juga terdiri dari beberapa unsur, yaitu: Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD), Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Penelitian Dan Pengembangan),



Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan (Inspektorat Daerah), Unsur Kewilayahan (Kecamatan) dan Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik).

Berikut adalah Realisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta capaian Indikator Kinerja yang disusun berdasarkan urusan :

LKPJ Kabupaten Jember



3.1 Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Berikut adalah Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2021 yang mencakup Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja yang disusun berdasarkan urusan :

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								
1.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	798.796.7 54.391	72%	749.611.2 82.313			
1.01.01 .2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	226.878.6 00	67%	152.089.1 00			
1.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Diselesaikan	12	226.878.6 00	8	152.089.1 00	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	796.348.8 90.421	96%	747.970.5 05.369			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran Gaji ASN	12	702.045.018.479	11	663.910.178.594	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran tenaga pendidik, tenaga kependidikan (PTT, GTT), dan pengelola anggaran & barang	12	94.303.871.942	12	84.060.326.775	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera merealisasikan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT dengan merevisi kebijakan honor agar lebih sesuai dengan UMK dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.
1.01.01 .2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	240.950.420	67%	152.090.250			
1.01.01 .2.03.0 5				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen Aset/Barang Daerah)	12	240.950.420	8	152.090.250	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	826.544.900	68%	559.422.450			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	19.855.550	12	18.950.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	12	310.725.800	11	288.200.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya anggaran Peralatan Rumah Tangga kantor	12	50.483.950	11	49.614.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12	45.040.600	8	30.292.750	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12	4.630.000	2	700.000	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dan dalam daerah	12	395.809.000	5	171.665.700	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	274.698.000	67%	195.521.474			
1.01.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan tersedianya dokumen dan pengiriman surat dinas	12	9.000.000	7	4.750.000	Sesuai Kebutuhan		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya anggaran Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	12	265.698.0 00	9	190.771.4 74	Sesuai Kebutuhan		
1.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	878.792.0 50	71%	581.653.6 70			
1.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil jabatan	26	59.968.05 0	15	36.023.20 3	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	39	364.522.1 00	17	162.565.1 67	Sesuai Kebutuhan		
1.01.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan tersedianya anggaran Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer	4	107.383.5 00	4	99.470.00 0	Kegiatan Sudah Terlaksana	Kegiatan Sudah Terlaksana	
1.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang diadakan Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	346.918.4 00	10	283.595.3 00	Sesuai Kebutuhan		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		100%	328.750.276.126	85%	317.294.319.251			
1.01.02.2.01				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		100%	180.230.432.365	89%	177.180.727.256			
1.01.02.2.01.02				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah ruang laboratorium komputer beserta perabotnya yang dibangun	13	3.461.730.710	13	3.238.592.310	Kegiatan Sudah Terlaksana		
1.01.02.2.01.04				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang dibangun	26	2.405.558.000	25	2.326.711.117	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.02.2.01.05				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan yang dibangun	39	8.291.305.700	37	8.044.587.070	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.02.2.01.06				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas jamban Sekolah yang dibangun	4	767.160.000	3	666.705.900	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak		
1.01.02.2.01.24				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Prosentase lembaga yang melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)	4	95.624.800	2	53.421.200	Tidak mengirim peserta lomba keluar kota	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02 .2.01.2 5				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah siswa SD yang mengikuti lomba KSN, KO2SN (lomba atletik, karate, pencak silat, bulu tangkis, renang dan senam)	1	190.916.500	1	143.905.000	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.02 .2.01.2 7				Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah bulan tersedianya anggaran bantuan penyelenggaraan pendidikan diniyah dan guru swasta (BPPDGS) = 6 bulan dari 12 bulan yang ditargetkan	12	15.885.900.000	12	15.041.441.250	Kegiatan Sudah Terlaksana		
1.01.02 .2.01.2 9				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bulan tersedianya anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat jenjang SD	12	144.779.843.855	11	143.422.889.909	Kegiatan sudah terlaksana	-	
1.01.02 .2.01.3 0				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemen BOS	12	129.641.000	11	119.589.000	Kegiatan Sudah Terlaksana		
1.01.02 .2.01.0				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang direhabilitasi	100	3.829.964.300	99	3.784.587.500	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.02 .2.01.1 4				Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah mebelair sekolah yang diadakan	3300	392.787.500	2842	338.297.000	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak		
1.01.02 .2.02				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		100%	80.061.028.576	84%	77.595.230.695			
1.01.02 .2.02.1 4				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Di Rehabilitasi	50	1.148.670.000	39	907.438.066	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02 .2.02.1 5				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru yang direhabilitasi	1	258.330.00	1	253.830.00	Kegiatan Sudah Terlaksana		
1.01.02 .2.02.2 4				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Ruang Sarana Prasarana dan utilitas sekolah yang direhabilitasi	4	297.030.00	4	294.365.200	Kegiatan sudah terlaksana	-	
1.01.02 .2.02.3 5				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Yang diadakan	1	382.572.600	1	333.202.800	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak	-	
1.01.02 .2.02.3 7				Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Prosentase Lembaga yang melaksanakan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB)	100	443.061.700	70	309.785.700	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.02 .2.02.3 8				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah bulan tersedianya anggaran Beasiswa dan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	12	25.414.665.600	11	23.792.335.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk beasiswa dengan memperhatikan kriteria seleksi beasiswa yang berdasarkan pada prestasi dan mahasiswa kurang mampu.
1.01.02 .2.02.4 2				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Bulan tersedianya anggaran bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat Jenjang SMP	12	51.935.815.676	12	51.635.601.929	Kegiatan Sudah Terlaksana	Kegiatan Sudah Terlaksana	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02 .2.02.4 3				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah bulan tersedianya anggaran manajemn BOS	9	180.883.0 00	3	68.672.00 0	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.02 .2.03				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		100%	65.285.90 7.328	81%	60.589.84 4.300			
1.01.02 .2.03.0 1				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Guru dan Kepala Sekolah yang di Bangun	1	113.144.6 28	1	91.876.00 0	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak	pagu anggaran menyesuaikan nilai kontrak1	
1.01.02 .2.03.0 2				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana. Prasarana dan Utilitas PAUD	12	171.338.8 00	10	140.928.3 00	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak	Kegiatan Sudah Terlaksana	
1.01.02 .2.03.1 1				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Lomba/Kreatifitas PAUD	488	82.031.10 0	298	49.677.00 0	Karena Pandemi, Peserta Terbatas	kegiatan dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya	
1.01.02 .2.03.1 2				Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah APE PAUD yang diadakan	6	601.800.0 00	5	515.400.0 00	Ada selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak	-	
1.01.02 .2.03.1 5				Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Insentif GTT Satuan PAUD (10 Bulan dari 12 Bulan Yang Ditargetkan)	12	22.252.33 5.300	12	21.718.64 3.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	-	
1.01.02 .2.03.1 8				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tahap Tersedianya Anggaran BOP PAUD	70000	42.000.00 0.000	63700	38.037.30 0.000	Kegiatan Sudah Terlaksana	Kegiatan Sudah Terlaksana	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.02 .2.03.1 9				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Managemen BOP PAUD	6	65.257.50 0	3	36.020.00 0	Sesuai Kebutuhan		
1.01.02 .2.04				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	3.172.907 .857	81%	1.928.517 .000			
1.01.02 .2.04.1 2				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan Hari Anak Nasional	1	24.989.00 0	1	19.357.00 0	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.02 .2.04.1 7				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran BOP NonFormal/Kesetaraan	12	3.086.142 .857	7	1.862.700 .000	Menyesuaikan sisa anggaran di BPKAD	kegiatan dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya	
1.01.02 .2.04.1 8				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bulan Tersedianya Anggaran Managemen BOP PAUD	6	61.776.00 0	5	46.460.00 0	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.04			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN		100%	1.216.717 .540	93%	1.181.379 .450			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.01.04 2.01				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		100%	1.216.717.540	93%	1.181.379.450			
1.01.04 2.01.0 1				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	jumlah pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/kesetaraan yang terpetakan	500	168.444.800	432	145.500.000	Sesuai Kebutuhan	-	
1.01.04 2.01.0 2				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan, peningkatan dan penguatan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	488	1.048.272.740	482	1.035.879.450	Kegiatan sudah terlaksana	Kegiatan sudah terlaksana	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								
1.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	230.148.136.876	100%	213.579.778.741			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	133.466.5 00	100%	92.743.25 0			
1.02.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA dan RAPBD SKPD	4	133.466.5 00	4	92.743.25 0	-	-	
1.02.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	225.514.4 04.076	100%	209.822.2 87.991			
1.02.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	220.791.1 41.276	100	205.739.3 48.912	-	-	
1.02.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	100	4.723.262 .800	100	4.082.939 .079	-	-	
1.02.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.412.859 .800	100%	1.091.078 .366			
1.02.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100	14.977.50 0	100	14.141.00 0	Efisiensi Anggaran	Optimalisasi anggaran tahun 2022	
1.02.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	472.218.5 00	100	422.332.5 00	-	-	
1.02.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Bahan Logistik Kantor yang disediakan	100	53.328.00 0	100	49.536.00 0	-	-	
1.02.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pencetakan Dokumen dan Penggandaan Yang Disediakan	100	136.240.8 00	100	90.068.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 2.06.0 8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase makanan dan minuman yang disediakan	100	251.207.000	100	208.250.000			
1.02.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase rapat-rapat di dalam daerah yang diikuti	100	484.888.000	100	306.750.866			
1.02.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	634.675.000	100%	482.291.334			
1.02.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Perlengkapan Surat-Menyurat yang disediakan	100	30.948.000	100	28.500.000			
1.02.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100	401.250.000	100	269.154.334			
1.02.01 2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100	202.477.000	100	184.637.000	-	-	
1.02.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.452.731.500	100%	2.091.377.800			
1.02.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan yang dilakukan	100	1.261.590.750	100	1.070.401.100	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilakukan	100	399.640.7 50	100	287.027.7 00	-	-	
1.02.01 .2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase rehabilitasi sedang/berat rumah dinas yang dilakukan	100	791.500.0 00	100	733.949.0 00	-	-	
1.02.02			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		100%	285.290.1 82.433	96%	228.642.2 87.098			
1.02.02 .2.01				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	110.212.6 26.567	100%	79.108.85 8.508			
1.02.02 .2.01.0 1				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Persentase pembangunan rumah sakit yang dilaksanakan	0	0	0	0	-	-	
1.02.02 .2.01.1 0				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Yang Telah Dilakukan Rehabilitasi Gedung Puskesmas	50	15.059.61 3.900	50	5.901.227 .970	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 .2.01.1 3				Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Presentase Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dilakukan	100	3.611.761.500	100	3.413.703.000	-	-	
1.02.02 .2.01.1 4				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapatkan alat kesehatan	50	63.273.416.966	50	53.250.980.149	-	-	
1.02.02 .2.01.1 5				Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan Alat Kesehatan dan Pemeliharaannya	52	27.026.000	52	27.026.000	-	-	
1.02.02 .2.01.1 6				Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan Obat dan Perbekalan Kesehatan	51	8.750.587.077	51	2.012.936.200	-	-	
1.02.02 .2.01.1 7				Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Puskesmas dan UPT Labkes PK Alkes yang mendapatkan BMHP dan Bahan Laboratorium	51	19.490.221.124	51	14.502.985.189	-	-	
1.02.02 .2.02				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	163.608.651.366	92%	141.517.503.860			
1.02.02 .2.02.0 1				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap permasalahan Kesehatan Keluarga	12	225.040.000	12	224.821.755	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 .02.0 2				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap permasalahan Kesehatan Keluarga	12	1.416.327.296	12	468.555.000	-	-	
1.02.02 .02.0 3				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap permasalahan Kesehatan Keluarga	12	14.996.000	12	14.930.800	-	-	
1.02.02 .02.0 4				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap permasalahan Kesehatan Keluarga	12	29.992.000	12	29.861.600	-	-	
1.02.02 .02.0 7				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Pembinaan Tenaga Kesehatan terhadap permasalahan Kesehatan Keluarga	12	62.997.000	12	62.723.100	-	-	
1.02.02 .02.1 6				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Frekuensi Pelaksanaan Kebugaran Jasmani yang dilakukan	4	50.816.000	4	50.496.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 2.02.1 7				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas yang memiliki IPAL	40	3.564.213.000	22	2.720.107.038	Penyesuaian dengan perencanaan dokumen IPAL yang sudah ada	Review dokumen perencanaan ipal dan penyediaan anggaran di tahun 2022 untuk pemenuhan sisa Pusekesmas yang belum memiliki IPAL	
1.02.02 2.02.1 9				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Penyehat Tradisional yang dilakukan pembinaan	1516	178.016.500	1425	151.118.500	Belum maksimalnya dukungan Program Yankestrad baik antar Bidang maupun lintas sektor terkait penyelenggaraan griya sehat	Mengoptimalkan SDM yg ada untuk mendukung penyelenggaraa n griya sehat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 2.02.2 5				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Presentase Penanganan Penyakit Menular dan Tidak Menular sesuai Standar	100	14.432.32 8.700	68	13.554.39 9.450	Karena Pelayanan Kesehatan lebih fokus untuk penanganan Covid- 19	harus ada desk triwulan untuk mengevaluasi Puskesmas yang belum mengirimkan laporan dan mengevaluasi ketepatan pengumpulan Data Kesehatan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 2.02.2 6				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase Pelayanan JKN di Puskesmas sesuai standar	100	143.633.9 24.870	100	124.240.4 90.617	-	-	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) agar warga mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan secara berkesinambungan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari APBD Kabupaten atau APBD Provinsi. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.02 .2.03				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi		100%	134.301.500	100%	96.362.500			
1.02.02 .2.03.0 2				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan keterisian data SIK diatas 80%	50	134.301.500	50	96.362.500	-	-	
1.02.02 .2.04				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	11.334.603.000	100%	7.919.562.230			
1.02.02 .2.04.0 3				Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Persentase Skrining kesehatan melalui pusling	48	4.886.449.700	48	1.555.922.500	-	-	
1.02.02 .2.04.0 4				Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi yang dilakukan Pembinaan	80	6.448.153.300	80	6.363.639.730		Realisasi kinerja melebihi target dengan capaian 92% dikarenakan Rumah Sakit terakreditasi di Kabupaten Jember saat ini sudah mencapai 12 Rumah Sakit, tersisa 1 Rumah Sakit yang masih belum terakreditasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan kajian terhadap aset mobil ambulans desa agar peruntukannya bisa lebih optimal efektif dan efisien.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.03			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		100%	53.299.038.600	90%	49.896.913.932			
1.02.03.2.02				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota		100%	53.299.038.600	90%	49.896.913.932			
1.02.03.2.02.02				Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Prosentase Puskesmas yang memiliki 3 dokter (2 dokter umum dan 1 dokter gigi)	100	53.162.216.100	79	49.798.873.932	Masih belum merata distribusi tenaga kesehatan di puskesmas	Mendistribusi ulang dan rekrutmen tenaga kesehatan untuk Puskesmas dengan CSAN, P3	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.03 2.02.0 3				Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase SDM sesuai dengan Kompetensi	100	136.822.5 00	100	98.040.00 0	-	-	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan dan sekaligus segera menyusun program atau formasi untuk penentuannya. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan dan sesuai dengan standart UMK dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyiapkan program untuk pelatihan Tim Uji Kompetensi (UKOM) dan pelaksanaan Uji



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.04			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN		100%	549.819.000	100%	277.715.000			
1.02.04.2.03				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		100%	549.819.000	100%	277.715.000			
1.02.04.2.03.01				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pangan	4	549.819.000	4	277.715.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.05			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN		100%	67.147.99 2.506	100%	41.973.28 0.516			
1.02.05 2.01				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	67.147.99 2.506	100%	41.973.28 0.516			
1.02.05 2.01.0 1				Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Desa Siaga yang dibina	50	67.147.99 2.506	50	41.973.28 0.516	-	Percepatan anggaran dengan melakukan kegiatan kunjungan rumah, pelaksanaan kegiatan dengan proses	
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) BALUNG - BLUD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	73.706.44 7.561	81%	60.364.28 6.131			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 .2.10				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		100%	73.706.44 7.561	81%	60.364.28 6.131			
1.02.01 .2.10.0 1				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100	73.706.44 7.561	81	60.364.28 6.131	Pelaksanaan kegiatan fisik sudah selesai, namun pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan dan kesehatan di RSD Balung yang mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan covid- 19	Mempercepat pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSD Balung yang mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan covid- 19	
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) DR SOEBANDI - BLUD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	225.827.8 76.695	79%	177.721.7 17.194			
1.02.01 .2.10				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		100%	225.827.8 76.695	79%	177.721.7 17.194			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 2.10.0 1				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100	225.827.8 76.695	79	177.721.7 17.194	Pelaksanaan efisiensi RSD dr.Soebandi belanja BLUD sementara menyesuaikan dengan kebutuhan	Pelaksanaan efisiensi tidak menjadikan suatu masalah karena semua kebutuhan sudah terpenuhi dan anggaran BLUD diperoleh dari pelaksanaan pelayanan RSD dr.Soebandi	
1.02.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	RUMAH SAKIT DAERAH (RSD) KALISAT - BLUD		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	40.566.50 4.068	70%	29.030.45 7.115			
1.02.01 2.10				PENINGKATAN PELAYANAN BLUD		100%	40.566.50 4.068	70%	29.030.45 7.115			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.02.01 2.10.0 1				PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD	Terlaksananya kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan kesehatan BLUD	100	40.566.50 4.068	70	29.030.45 7.115	Pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan dan penunjang pelayanan kesehatan di RSDkalisat yang terdiri atas 3 belanja utama (Pegawai, Barang dan Jasa serta Modal), untuk melaksanakan belanja masih menunggu pendapatan BLUD		
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	64.680.54 5.117	78%	52.114.99 4.428			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	38.000.00 0	33%	3.173.513			
1.03.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Lakip dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	3	38.000.00 0	1	3.173.513	Karena Permintaan Penyusunan Lakip dilaksanakan bulan November	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksika n kembali target sesuai kebutuhan	
1.03.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	58.903.54 9.673	100%	47.975.46 6.112			
1.03.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan dibayarkannya Gaji dan Tunjangan kepada ASN	14	54.926.86 9.673	14	44.519.40 9.062	Dinas PU Bina Marga menetapkan anggaran Gaji PNS pada awal Tahun. Seiring berjalannya waktu bulan ke bulan pegawai PNS DPU Bina Marga ada yang Pensiun dan Meninggal Dunia serta Mutasi ke OPD lain.	DPU Bina Marga dalam menetapkan anggaran kedepan akan menghitung secermat mungkin PNS yang akan pensiun . Kecuali yang meninggal dan mutasi keluar dinas	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan yang diverifikasi	600	3.976.680.000	600	3.456.057.050	Sudah Sesuai dengan yang diminta	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	
1.03.01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
1.03.01 2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		0	0	0	Karena Pandemi Covid 19 tidak bisa dilaksanakan	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
1.03.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.526.825.580	92%	1.139.197.429			
1.03.01 2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat kelistrikan dan penerangan bangunan kantor	200	49.859.000	114	28.421.690	Pelaksanaan Penyediaan Komponen instalasi listrik disesuaikan dengan kebutuhan	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya dengan memproyeksikan kembali target sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor penunjang administrasi	41	1.042.759.580	41	870.548.720	Pengadaan barang sudah sesuai (adanya efisiensi dari pagu anggaran di PAPBD)	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Kebutuhan Alat Kantor	12	190.431.500	12	143.235.025	-	-	
1.03.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Dokumen Yg digandakan Dalam Satu Tahun	5400	64.998.500	5201	35.017.994	Penyediaan sudah sesuai dengan yang dibutuhkan	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	
1.03.01 2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam satu tahun	12	6.000.000	12	3.750.000	Sudah dengan kebutuhan	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	
1.03.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan akan rapat koordinasi keluar daerah	12	172.777.000	12	58.224.000	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	223.399.710	50%	220.704.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 .2.07.0 3				Pengadaan Alat Besar	Jumlah Terpenuhi Alat- Alat Besar Kebinamargaan dan SDA	1	0	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena keterbatasan anggaran	Dianggarkan tahun berikutnya sesuai kebutuhan dinas	
1.03.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Terpenuhi Alat- Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	4	223.399.7 10	4	220.704.0 00	-	-	
1.03.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.180.643 .644	100%	522.232.7 54			
1.03.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhi kebutuhan komunikasi, air dan kelistrikan	12	320.400.6 44	12	245.829.7 98	Pelaksanaan kegiatan d disesuaikan dengan kebutuhan.	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksika n kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Terpenuhi Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Dalam Kondisi Baik	12	259.251.000	12	50.194.260	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
1.03.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan sajian makan dan minum pegawai yg disediakan	12	600.992.000	12	226.208.696	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
1.03.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.808.126.510	77%	2.254.220.620			
1.03.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Mobil jabatan yang terpelihara	1	38.942.500	1	30.132.930	Sudah sesuai dengan kebutuhan	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	
1.03.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang terpelihara dalam Satu Tahun	1	635.000.000	1	419.789.038	Sudah sesuai dengan kebutuhan	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.09.0 3				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang dirawat / diperbaiki	53	1.262.739 .500	53	1.001.621 .192	Keterlambatan penganggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
1.03.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat-Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinaamargaan yang dirawat/diperbaiki	9	169.920.0 00	7	107.185.0 00	Keterlambatan pengajuan Pekerjaan karena keterlambatan penganggaran	Akan dianggarkan di tahun berikutnya	
1.03.01 2.09.1 1				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yg dipelihara secara rutin maupun berkala	80	701.524.5 10	4	695.492.4 60	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena keterbatasan anggaran	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksika n kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		100%	44.636.777.565	76%	21.085.278.911			
1.03.02.2.01				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	15.698.286.539	100%	12.400.937.348			
1.03.02.2.01.2.6				Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu yang perlu diperbaiki Jumlah Volume Bronjong yang perlu dipasang untuk penanganan darurat Jumlah Volume Normalisasi yang perlu dikerjakan	100	3.307.998.050	100	1.965.092.376	Kesalahan rekening belanja	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus fokus program antisipasi wilayah yang rawan dan berlangganan banjir.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02 2.01.6 1				Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah I/G/HIPPA yang telah dilakukan pembinaan dan pemberdayaan Jumlah kelembagaan I/G/HIPPA yang telah dibentuk Jumlah legalitas kelembagaan I/G/HIPPA yang telah diterbitkan	100	12.080.642.489	100	10.313.890.046	Salah rekening belanja	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan	
1.03.02 2.01.6 2				Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Permohonan penerbitan Rekomendasi Teknis	75	309.646.000	75	121.954.926	Tidak diserap karena P-APBD menggunakan Perkada	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	
1.03.02 2.02				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	28.938.491.026	62%	8.684.341.563			
1.03.02 2.02.0 1				Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Terpenuhinya Rencana Teknis Untuk Konstruksi Irigasi	3600	1.072.741.200	2454	731.093.170	Tidak diserap karena P-APBD menggunakan Perkada	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02 2.02.1 4				Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang saluran yang direhabilitasi	1553	23.037.875.729	314	4.657.935.620	Pekerjaan fisik konstruksi di PAPBD tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu akibat penganggaran yang terlambat	Dianggarkan pada tahun berikutnya dengan memproyeksikan target dan anggaran sesuai kebutuhan	
1.03.02 2.02.1 5				Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang direhabilitasi	4	2.752.122.162	3	1.828.052.426	Kegiatan tidak terlaksana secara maksimal karena keterbatasan anggaran	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan	
1.03.02 2.02.2 1				Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah lahan daerah irigasi yang dilayani Panjang saluran yang terpelihara	100	1.595.223.800	68	1.084.111.097	SPPD dan lembur tidak terserap secara maksimal karena keterbatasan waktu dan keterlambatan penganggaran dan adanya efisiensi pengadaan	Memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan, mengusulkan rincian yang tdk ada di SIPD	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus fokus program antisipasi wilayah yang rawan dan berlangganan banjir.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.02 2.02.2 2				Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah bendung yang terpelihara Jumlah daerah irigasi yang tersedia air Jumlah dokumen manual DI yang dicetak	100	480.528.135	80	383.149.250	SPPD dan lembur tidak terserap secara maksimal karena keterbatasan waktu	Solusi: memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan, mengusulkan rincian yang tdk ada di SIPD	
1.03.06			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		100%	11.923.575.155	96%	10.339.701.737			
1.03.06 2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	11.923.575.155	96%	10.339.701.737			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.06 2.01.0 5				Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang jaringan drainase dan Dinding Penahan yang dibangun	12762	10.695.469.955	12762	9.208.457.409	-	-	
1.03.06 2.01.0 9				Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Jaringan Drainase yang Perlu Pemeliharaan	18800	1.228.105.200	17317	1.131.244.328	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus fokus program antisipasi wilayah yang rawan dan berlangganan banjir.
1.03.07			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN		100%	430.183.550	62%	268.143.525			
1.03.07 2.01				Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		100%	430.183.550	62%	268.143.525			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.07 2.01.0 4				Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang dilakukan Koordinasi dan Pembinaan	226	430.183.50	141	268.143.525	Tidak diserap karena P-APBD menggunakan Perkada	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
1.03.10			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		100%	346.447.122.947	69%	263.753.776.006			
1.03.10 2.01				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		100%	346.447.122.947	69%	263.753.776.006			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.10 2.01.0 2				Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Terpenuhinya Lahan Untuk Penyelenggaraan Jalan	4000	2.313.833 .817	56	31.814.06 0	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Anggaran tersebut untuk proses pengajuan kembali penetapan lokasi dan ganti rugi tanah yg belum bebas , akan tetapi tidak dapat terealisasi karena ada reviuw trase pada ruas Sidodadi- Sumberejo-Batas Banyuwangi oleh KemenPU, shg utk proses pengajuan penetapan lokasi menunggu hasil reviuw tersebut selesai.	Dianggarkan Kembali Di tahun Berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.10 2.01.0 4				Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Terpenuhinya Data Teknis Kondisi Jalan dan Jembatan	2695	1.852.106 .650	1259	865.578.0 56	Paket Konsultasi Survei Kondisi Jembatan Gagal lelang	Akan dianggarkan kembali di tahun berikutnya dengan memproyeksika n kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan	
1.03.10 2.01.0 5				Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang perlu dilakukan pembangunan dan peningkatan	100230 1	252.714.3 73.333	721207	181.841.0 60.482	Efisiensi Anggaran dan Adanya kegiatan Multiyears	Dianggarkan tahun berikutnya	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.
1.03.10 2.01.1 0				Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Kabupaten yang Perlu Pemeliharaan Secara Berkala	78357	57.395.65 2.020	74376	54.479.97 8.609	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.10 .2.01.1 1				Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan kabupaten yang perlu dilakukan pemeliharaan rutin	10000	9.671.914.000	6600	6.382.864.890	Efisiensi Anggaran	Dianggarkan lagi ditahun berikutnya	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.
1.03.10 .2.01.1 8				Rehabilitasi Jembatan	Jumlah jembatan yang direhab	27	15.695.345.004	27	14.242.728.974	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.
1.03.10 .2.01.1 9				Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah jembatan yang dipelihara secara rutin	80	6.803.898.123	80	5.909.750.935	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	61.661.24 4.226	100%	57.362.60 6.196			
1.03.01 .2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	169.976.0 00	100%	142.305.4 23			
1.03.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah data perencanaan yang terupdate	5	159.640.0 00	5	137.844.9 69	-	-	
1.03.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	4	10.336.00 0	4	4.460.454	-	-	
1.03.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.647.249 .981	100%	7.446.097 .809			
1.03.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan yang terbayarkan gaji dan tunjangan ASN	14	7.618.974 .981	14	7.420.451 .842	-	-	
1.03.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen yang terselesaikan	1	11.105.00 0	1	10.932.88 1	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.02.0 8				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen yang terselesaikan	4	17.170.000	4	14.713.086	-	-	
1.03.01 2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	16.552.800	100%	7.158.000			
1.03.01 2.03.0 6				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah dokumen yang terselesaikan	2	16.552.800	2	7.158.000	-	-	
1.03.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	996.465.610	100%	778.257.759			
1.03.01 2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan instalasi listrik /penerangan kantor	1	31.972.050	1	21.347.131	-	-	
1.03.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terpenuhi	1	784.591.400	1	669.368.679	-	-	
1.03.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah peralatan dan kebutuhan logistik yang tersedia	1	45.128.050	1	40.315.646	-	-	
1.03.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang terselesaikan	1	32.362.110	1	23.555.103	-	-	
1.03.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12	102.412.000	12	23.671.200	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	51.029.41 7.335	100%	47.392.85 2.100			
1.03.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola dalam tahun anggaran berjalan	12	29.355.10 0	12	21.442.76 3	-	-	
1.03.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	12	47.617.67 9.735	12	44.702.76 3.964	-	-	
1.03.01 2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	1	111.665.2 00	1	86.476.76 7	-	-	
1.03.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia	12	3.270.717 .300	12	2.582.168 .606	-	-	
1.03.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.801.582 .500	100%	1.595.935 .105			
1.03.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	1	33.538.10 0	1	28.683.96 3	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan mobil jabatan	1	1.350.530 .200	1	1.159.146 .331	-	-	
1.03.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan gedung kantor yang dilakukan secara rutin/berkala	2	300.212.2 00	2	295.784.9 11	-	-	
1.03.01 2.09.1 1				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit pemeliharaan taman yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2	117.302.0 00	2	112.319.9 00	-	-	
1.03.03			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		100%	14.454.33 8.250	100%	14.124.57 3.855			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.03 .2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		100%	14.454.338.250	100%	14.124.573.855			
1.03.03 .2.01.0 4				Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang terbangun	16	9.439.509.300	16	9.345.410.771	-	-	
1.03.03 .2.01.1 1				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Jumlah pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	3	870.129.250	3	835.618.115	-	-	
1.03.03 .2.01.1 9				Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah sarana dan prasarana air bersih yang diperluas	19	4.144.699.700	19	3.943.544.969	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.05			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		100%	19.648.760.198	100%	19.060.550.700			
1.03.05.2.01				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	19.648.760.198	100%	19.060.550.700			
1.03.05.2.01.06				Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah lokasi yang terbangun jamban dan MCK	22	17.089.645.298	22	16.774.236.780	-	-	
1.03.05.2.01.15				Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	jumlah Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan	5	2.559.114.900	5	2.286.313.920	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.08			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		100%	8.781.427.226	97%	6.430.841.204			
1.03.08.2.01				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung		100%	8.781.427.226	97%	6.430.841.204			
1.03.08.2.01.01				Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah rekomtek IMB yang diterbitkan	850	802.739.850	830	513.650.043	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.08 .2.01.0 2				Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan gedung yang terselesaikan	25	1.509.505 .948	23	989.462.7 44	-	-	
1.03.08 .2.01.1 3				Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan gedung negara yg terpelihara	8	6.409.181 .428	8	4.927.728 .417	-	-	
1.03.12			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG		100%	2.870.468 .290	100%	2.462.102 .114			
1.03.12 .2.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	2.511.108 .520	100%	2.333.401 .081			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.03.12 .2.02.0 1				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen yang disusun	1	1.377.279 .870	1	1.290.357 .247	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera merealisasikan Peraturan Daerah tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).
1.03.12 .2.02.0 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Tersusnya materi teknis RDTR perkotaan Kab Jember	1	1.133.828 .650	1	1.043.043 .834	-	-	
1.03.12 .2.03				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	84.740.90 0	100%	29.793.65 5			
1.03.12 .2.03.0 1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah informasi tata ruang yang diterbitkan	284	84.740.90 0	284	29.793.65 5	-	-	
1.03.12 .2.04				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		100%	274.618.8 70	100%	98.907.37 8			
1.03.12 .2.04.0 4				Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi terhadap ITR yang diterbitkan	21	274.618.8 70	21	98.907.37 8	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1.04.03			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		100%	5.432.774 .050	99%	4.431.281 .916			
1.04.03 .2.01				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman		100%	284.610.2 00	100%	181.931.6 63			
1.04.03 .2.01.0 1				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah perumahan MBR yang dikembangkan prasarana sarana umum	15	284.610.2 00	15	181.931.6 63	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.03 .2.02				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100%	291.993.8 50	100%	18.756.69 8			
1.04.03 .2.02.0 5				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas kawasan kumuh (ha)	70	291.993.8 50	70	18.756.69 8	-	-	
1.04.03 .2.03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha		100%	4.856.170 .000	98%	4.230.593 .555			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.03 2.03.0 2				Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	jumlah RTLH yang terbangun	185	4.856.170 .000	182	4.230.593 .555	-	-	1. Program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) harus tetap dijalankan dengan penentuan sasaran dan pendataan harus mengoptimalkan fungsi Tim fasilitator Lapangan (TFL), RW/RT, dan pemerintahan desa, serta membubarkan keberadaan tim yang pembentukannya tidak diatur dalam ketentuan dan menjadikan inefisiensi anggaran. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menerbitkan ketentuan pedoman, juklak, juknis untuk pelaksanaan program RTLH.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.05			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		100%	73.609.937.850	100%	60.968.972.853			
1.04.05.2.01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		100%	73.609.937.850	100%	60.968.972.853			
1.04.05.2.01.02				Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	prosentase penyediaan dan pemeliharaan prasarana sarana dan utilitas umum	95	73.609.937.850	95	60.968.972.853	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.02			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		100%	120.000.000	0%	0			
1.04.02.2.03				PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA		100%	120.000.000	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.04.02 2.03.0 5				Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana yang terbangun	5	120.000.000	0	0	Kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena pada tahun 2021 tidak ada keadaan darurat	Kegiatan akan dilaksanakan dan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target sesuai dengan kebutuhan	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN CIPTA KARYA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.10.10			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100%	1.107.971.070	100%	1.021.697.887			
2.10.10.2.01				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.107.971.070	100%	1.021.697.887			
2.10.10.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya fasilitasi pemataan tanah dan penerbitan sertifikat	11376	1.107.971.070	11376	1.021.697.887	-	-	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	16.816.50 4.560	100%	14.838.74 9.304			
1.05.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	2.185.000	100%	0			
1.05.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2	736.000	2	0	Anggaran tidak digunakan	kegiatan tetap dilaksanakan	
1.05.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang terselesaikan	2	483.000	2	0	-	-	
1.05.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA yang terselesaikan	2	483.000	2	0	Anggaran tidak digunakan	kegiatan tetap dilaksanakan	
1.05.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang terselesaikan (LAKIP OPD,LAKIP Individu Pejabat Struktural dan LAKIP (Staff)	3	483.000	3	0	-	-	
1.05.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	12.333.87 1.110	100%	10.688.09 5.850			
1.05.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12	12.300.87 6.110	12	10.655.11 4.850	tidak ada masalah dalam pelaksanaannya	kegiatan dilaksanakan tanpa ada kendala	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tertibnya Administrasi Keuangan yang diselesaikan	12	32.995.000	12	32.981.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	379.606.500	100%	245.104.875			
1.05.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas	168	379.606.500	168	245.104.875	tidak ada masalah	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	282.627.600	100%	243.738.502			
1.05.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pembayaran Komponen Listrik / Penerangan Kantor	12	5.169.500	12	2.664.000	tidak ada masalah	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pembayaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16	103.936.000	16	101.137.500	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah yang dibutuhkan	12	3.860.000	12	2.664.500	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	12	69.680.000	12	51.370.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	Kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah alat tulis kantor yang dibutuhkan	12	12.032.100	12	8.143.600	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	Kegiatan telah dilaksanakan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pembayaran untuk kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang dilaksanakan Jumlah pembayaran untuk kebutuhan rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah yang dilaksanakan	12	87.950.000	12	77.758.902	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.577.772.850	100%	3.508.484.279			
1.05.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran untuk Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	14.897.240	12	12.741.329	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tertibnya Administrasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	33.274.074	12	16.798.500	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran honorarium roolstat, Banpol PP dan TBO Damkar Jumlah pembayaran petugas kebersihan rumah dinas Jumlah Pembayaran uang lembur Satpol PP dan kebutuhan operasional kantor	115	3.529.601.536	115	3.478.944.450	kegiatan termasuk wajib dan mengikat, tapi tidak dilaksanakan	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	240.441.500	100%	153.325.798			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran untuk kebutuhan BBM dan Pelumas, Service, Penggantian suku cadang dan STNK	16107	13.965.000	16107	13.642.248	kegiatan tidak termasuk wajib dan mengikat	Kegiatan tetap dilaksanakan	
1.05.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran untuk kebutuhan BBM dan Pelumas, Service, Penggantian suku cadang dan STNK	13970	226.476.500	13970	139.683.550	kegiatan tidak termasuk wajib dan mengikat	Kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	778.587.700	82%	361.788.250			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.02 .2.01				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	462.796.200	69%	228.409.000			
1.05.02 .2.01.0 1				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Aparat Satpol PP yang melakukan pengamanan dan penjagaan atas Pejabat dan Asset Pemkab	3200	177.912.000	2648	155.897.000	tidak ada masalah dalam pelaksanaannya	Kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02 .2.01.0 3				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional yang dilaksanakan	11	218.574.500	2	37.340.000	adanya pandemi covid - 19	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02 .2.01.0 4				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satuan keamanan lingkungan di masyarakat yang terbentuk	150	41.961.700	110	20.320.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.02 .2.01.0 5				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah Peserta Latihan Korsi yang dilaksanakan	125	24.348.000	125	14.852.000	tidak ada masalah dalam pelaksanaannya	kegiatan telah dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.02 .2.02				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		100%	315.791.500	100%	133.379.250			
1.05.02 .2.02.0 1				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah masyarakat peserta penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi Jumlah tokoh masyarakat peserta sosialisasi Perda Kabupaten Jember	90	70.142.500	90	34.206.250	adanya pandemi covid - 19	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan mematuhi anjuran pemerintah terkait pandemi covid-19	
1.05.02 .2.02.0 2				Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus/lokasi potensi pelanggaran Perda yang terpantau dan terinventarisasi	125	52.098.000	125	28.228.000	adanya pandemi covid - 19	Kegiatan tetap dilaksanakan dengan mematuhi anjuran pemerintah terkait pandemi covid-19	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan harus segera merealisasikan penataan PKL guna menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang asri terutama di kawasan kampus.
1.05.02 .2.02.0 3				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah kasus/lokasi potensi pelanggaran Perda yang tertangani	125	193.551.000	125	70.945.000	adanya pandemi covid - 19	Kegiatan tetap dilaksanakan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	0	0%	0			
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	0	0%	0			
1.05.03.2.02.02				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Linmas yang mendapat pelatihan cara awal menginformasikan potensi bencana alam kepada masyarakat	496	0	0	0	adanya pandemi covid - 19	mematuhi anjuran pemerintah terkait pandemi covid- 19	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		100%	640.051.900	100%	558.105.503			
1.05.04.2.01				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	640.051.900	100%	558.105.503			
1.05.04.2.01.01				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Pemadam yang melakukan Penanganan Kebakaran yang dilaporkan oleh masyarakat	16107	473.721.400	16107	411.863.000	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	Kegiatan telah dilaksanakan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.04 2.01.0 2				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Sarpras dan Jumlah Kendaraan Operasional yang dapat digunakan secara maksimal Jumlah Pengadaan Sarpras dan Jumlah Kendaraan Operasional yang dapat digunakan secara maksimal	19	166.330.500	19	146.242.503	tidak ada kendala dalam pelaksanaannya	Kegiatan telah dilaksanakan	
1.05.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	8.345.221.371	81%	1.995.533.377			
1.05.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	40.085.099	100%	26.706.000			
1.05.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra	1	7.919.799	1	4.878.000	-	-	
1.05.01 2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1	8.047.700	1	6.487.000	-	-	
1.05.01 2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan	1	8.053.200	1	5.847.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA	1	8.012.400	1	6.547.000	-	-	
1.05.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perb	1	8.052.000	1	2.947.000	-	-	
1.05.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.094.345 .572	38%	54.614.00 0			
1.05.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	50	6.027.822 .972	0	0			
1.05.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah Honor Pengelola Keuangan	1	48.800.00 0	1	48.140.00 0	-	-	
1.05.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1	4.744.600	0	0	anggaran seharusnya diserap awal tahun	kegiatan perlu dievaluasi	
1.05.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	Jumlah Dokumen	4	12.978.00 0	2	6.474.000	-	-	
1.05.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	929.380.0 00	100%	893.940.0 00			
1.05.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah ASN yg mendapat pakaian	60	49.400.00 0	60	47.190.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 2.05.0 5				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yg di Evaluasi	1	879.980.0 00	1	846.750.0 00	-	-	
1.05.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	572.299.2 00	94%	498.699.6 47			
1.05.01 2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah tersedianya dana utk penerangan kantor	1	18.966.00 0	1	6.016.000	-	-	
1.05.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Tersedianya Peralatan Kantor	1	38.072.00 0	1	33.495.50 0	-	-	
1.05.01 2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya dana untuk penyediaan Peralatan RT	12	55.894.00 0	11	52.234.00 0	-	-	
1.05.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ketersediaan Mamin Kegiatan	12	165.792.0 00	12	128.590.7 50	-	-	
1.05.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Profil BPBD yang di cetak	12	39.999.20 0	9	29.200.00 0	-	-	
1.05.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Ketersediaan Dana Utk SPPD Luar Daerah	1	253.576.0 00	1	249.163.3 97	-	-	
1.05.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	139.804.0 00	78%	91.395.27 7			
1.05.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dana untuk jasa surat menyurat	12	12.160.00 0	6	5.186.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Dana untuk jasa Telisa	12	103.644.0 00	10	62.209.27 7	-	-	
1.05.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan kantor	1	24.000.00 0	1	24.000.00 0	-	-	
1.05.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	569.307.5 00	75%	430.178.4 53			
1.05.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan	1	77.359.00 0	1	49.810.89 0	kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan ada 9 unit	kendaraan dinas yang mendapatkan perawatan ada 9 unit	
1.05.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Ops yg di rawat	1	365.974.5 00	1	352.090.7 43	-	-	
1.05.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yg dipelihara	12	50.974.50 0	12	28.276.82 0	-	-	
1.05.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang di rawat	1	74.999.50 0	0	0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		100%	7.607.673.296	70%	2.131.032.715			
1.05.03.2.01				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		100%	314.820.052	50%	110.427.500			
1.05.03.2.01.01				Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kajian yang dilaksanakan	1	199.880.052	0	0	-	-	
1.05.03.2.01.02				Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Rambu dan Informasi yg terpasang dan Jml Iklan Layanan Masyarakat	12	114.940.000	12	110.427.500	-	-	
1.05.03.2.02				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	1.335.530.794	63%	601.218.100			
1.05.03.2.02.01				Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	1	89.998.830	0	0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03 2.02.0 2				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisas	12	0	0	0	-	-	
1.05.03 2.02.0 3				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Srpras yg tersedia	12	151.947.00	10	81.898.00	-	-	
1.05.03 2.02.0 4				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah APD	1	107.234.964	1	101.475.00	-	-	
1.05.03 2.02.0 6				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang terbentuk	12	233.179.400	7	199.513.100	-	-	
1.05.03 2.02.0 7				Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yg di rehab rekon	1	548.191.000	1	179.132.000	-	-	
1.05.03 2.02.0 8				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah TRC yang bersertifikat	10	204.979.600	10	39.200.000	-	-	
1.05.03 2.03				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	5.957.322.450	100%	1.419.387.115			
1.05.03 2.03.0 2				Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Lapor bulan respon cepat darurat	12	180.000.000	12	7.400.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.05.03 2.03.0 4				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan logistik	12	696.104.250	12	198.120.000	-	-	
1.05.03 2.03.0 6				Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Lapor Bulan Respon Cepat Bencana Non Alam	12	5.081.218.200	12	1.213.867.115	-	-	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								
1.06.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	5.521.706.290	83%	4.850.085.989			
1.06.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	19.000.000	99%	19.000.000			
1.06.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Survey dan Monitoring Rumah Pemondokan di Kab Jember	100	19.000.000	99	19.000.000	Nihil	Nihil	
1.06.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.652.552.460	90%	2.604.836.586			
1.06.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji ASN	100	2.652.552.460	90	2.604.836.586	Merupakan kegiatan rutin OPD	Nihil	
1.06.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	96.936.191	83%	76.602.850			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	100	47.322.600	83	37.554.400	Merupakan kegiatan rutin OPD	terlaksana kegiatan penambahan daya	
1.06.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga	100	5.727.000	78	5.147.500	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Cetak Penggandaan	100	41.886.591	77	32.025.950	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan Perundang-Undangan	100	2.000.000	93	1.875.000	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.205.102.639	81%	1.922.816.133			
1.06.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	3.000.000	98	2.970.000	Nihil	Nihil	
1.06.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan Pembayaran Tagihan Air Listrik Telpun	100	233.730.139	55	131.625.066	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan, Gaji Non ASN, ATK, Makan Minum Rapat Kegiatan, SPPD Luar dan Dalam Daerah	100	1.968.372.500	89	1.788.221.067	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	548.115.000	80%	226.830.420			
1.06.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Oprasional	100	46.557.000	91	43.077.720	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Pemeliharaan Mobil Jabatan	100	485.824.000	35	168.573.700	Merupakan kegiatan rutin OPD	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Peralatan Kantor	2	15.094.500	2	14.595.000	dikasanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.01 2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemenuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	28	639.500	26	584.000	Nihil	Nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.02			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		100%	156.909.400	97%	155.975.000			
1.06.02 2.03				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota		100%	156.909.400	97%	155.975.000			
1.06.02 2.03.0 1				Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Pembinaan PSKS dalam Tugas dan Fungsinya	100	156.909.400	97	155.975.000	merupakan kegiatan untuk peningkatan PSKS tugas dan fungsi Pilar	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.04			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		100%	2.045.446.800	84%	1.595.514.398			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.04 2.01				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		100%	1.687.078.800	82%	1.300.077.398			
1.06.04 2.01.0 5				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	0	173	1.533.100.800	122	1.148.661.036	merupakan kegiatan rutin untuk pelayanan bagi klien gelandangan pengemis yang ada di rawat di Liposos	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.04 2.01.0 6				Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Gepeng, Disabilitas, ODHA, NAPZA dan Lansia Miskin	12	143.830.000	9	141.680.908	mempersiapkan data Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Gepeng, Disabilitas, ODHA, NAPZA dan Lansia Miskin	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih serius dalam penanganan dan kepedulian terhadap disabilitas dengan mengimplementasikan secara maksimal pelaksanaan perda disabilitas serta peraturan bupati terkait disabilitas.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.04 2.01.1 0				Pemberian Layanan Kedaruratan	0	12	10.148.000	12	9.735.454	mempersiapkan data bagi PMKS yang membutuhkan layanan kedaruratan	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.04 2.02				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial		100%	358.368.000	88%	295.437.000			
1.06.04 2.02.0 3				Penyediaan Permakanan	Kegiatan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kab Jember	21	116.380.000	19	93.735.000	merupakan kegiatan untuk penyaluran bantuan sosial	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.
1.06.04 2.02.1 4				Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Peningkatan Kerjasama dan Sosialisasi Penguatan LKSA dan Lembaga Lainnya	7	241.988.000	6	201.702.000	Peningkatan Kerjasama dan Sosialisasi Penguatan LKSA dan Lembaga Lainnya	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.05			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		100%	261.226.500	82%	228.421.362			
1.06.05.2.01				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		100%	135.006.500	67%	103.331.362			
1.06.05.2.01.03				Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Pelayanan dan Bantuan Sosial bagi Anak PMKS	3	135.006.500	2	103.331.362	menyusun data dan Bantuan Sosial bagi Anak PMKS	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.05.2.02				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	126.220.000	97%	125.090.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.05 2.02.0 2				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Verivali Data KPM di Kab Jember	59	126.220.0 00	57	125.090.0 00	dilaksanakan efisiensi	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menjalankan pendataan dan updating data kemiskinan daerah secara berkala (6 bulan sekali) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus transparan dan berbasis kebutuhan dan data dalam pemberian saran dan prasarana terkait pemberdayaan warga miskin serta penyanggah masalah kesejahteraan sosial.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.06			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		100%	6.282.597 .500	89%	2.018.118 .580			
1.06.06 .2.01				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		100%	6.282.597 .500	89%	2.018.118 .580			
1.06.06 .2.01.0 4				Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	0	1131	6.282.597 .500	1012	2.018.118 .580	dilaksanakan pada saat terjadinya bencana yang ada dikabupaten jember	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	
1.06.07			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		100%	42.864.30 0	100%	29.489.10 8			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
1.06.07 2.01				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota		100%	42.864.30 0	100%	29.489.10 8			
1.06.07 2.01.0 2				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Sarana Prasarana TMP Kab Jember	2	42.864.30 0	2	29.489.10 8	merupakan kegiatan rutin perawatan Taman Makam pahlawan di Kabupaten Jember	dilaksanakan sesuai arahan dan kebijakan pimpinan	

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINAS TENAGA KERJA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA								
2.07.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.046.382 .377	95%	1.858.394 .604			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	32.450.80 0	100%	29.633.85 0			
2.07.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan dokumen perencanaan lainnya; RKA dan RAPBD SKPD ; DPA SKPD	60	32.450.80 0	60	29.633.85 0	Kegiatan Pembuatan Dokumen Bertambah	Dokumen dibuat sesuai kebutuhan	
2.07.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.218.852 .053	95%	1.141.513 .329			
2.07.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Presentase pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan	100	1.103.612 .053	100	1.042.373 .329	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	100	115.240.0 00	90	99.140.00 0	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	158.660.6 00	90%	142.082.5 90			
2.07.01 2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	5.247.000	11	5.244.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Presentase penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu Dinas Presentase tersedianya alat tulis kantor Prsentase tersedianya bahan kebersihan	12	92.656.50 0	11	80.616.09 0	Kegiatan Banyak Terjadi	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12	13.111.100	11	13.031.500	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase tersedianya bahan bacaan dan literatur	12	3.000.000	9	3.000.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah; Persentase Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	12	44.046.000	12	40.191.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	115.398.500	100%	104.670.000			
2.07.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	115.398.500	12	104.670.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	295.377.424	97%	239.841.965			
2.07.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase terkirimnya surat	12	2.658.000	12	2.573.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12	52.799.424	11	32.983.407	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	12	239.920.000	12	204.285.558	Kegiatan Berjalan Lancar	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	225.643.000	98%	200.652.870			
2.07.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terpeliharanya Mobil Jabatan	12	51.517.500	12	30.113.960	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12	33.958.000	12	32.658.910	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	12	21.167.500	12	19.070.000	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Terlaksananya Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	12	119.000.000	11	118.810.000	Membutuhkan Finishing	Finishing Renovasi	
2.07.03			MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		100%	676.742.000	92%	462.506.500			
2.07.03 .2.01				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi		100%	599.801.500	100%	426.427.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.03 2.01.0 1				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	60	599.801.500	60	426.427.000	Jumlah Pencari Kerja Yang Tidak Memiliki Keterampilan Melebihi Target Pelatihan	Pelatihan Jahit bertambah 20 orang lagi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri kreatif dan digital dalam rangka untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran.
2.07.03 2.02				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		100%	76.940.500	84%	36.079.500			
2.07.03 2.02.0 1				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta		25	76.940.500	21	36.079.500	Kegiatan Berjalan Lancar	-	
2.07.04			MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		100%	1.253.100.820	100%	293.897.000			
2.07.04 2.01				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota		100%	196.013.000	100%	184.736.500			
2.07.04 2.01.0 5				Perluasan Kesempatan Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	30	196.013.000	30	184.736.500	Kegiatan Berjalan Lancar	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.04 .2.03				Pengelolaan Informasi Pasar Kerja		100%	0	0%	0			
2.07.04 .2.04				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.057.087 .820	100%	109.160.5 00			
2.07.04 .2.04.0 1				Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Persentase Terlaksananya Pembinaan, Perlindungan, dan Penanganan TKI	50	1.057.087 .820	50	109.160.5 00	Perekrutan Tenaga Kerja Lokal	Perekrutan sebanyak 14 orang	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran yang berkerja di luar negeri serta menjamin perlindungan baik pada pekerja migran maupun keluarganya
2.07.05			MENINGKATKAN PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		100%	353.129.6 00	67%	288.135.6 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.05 2.01				Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	26.807.70 0	100%	20.745.10 0			
2.07.05 2.01.0 3				Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Persentase Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Syarat Kerja di Perusahaan Persentase Terlaksananya Pembahasan UMK	1	26.807.70 0	1	20.745.10 0	Kegiatan Berjalan Lancar Di Akhir Tahun	-	
2.07.05 2.02				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota		100%	326.321.9 00	50%	267.390.5 00			
2.07.05 2.02.0 3				Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Persentase Terlaksananya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	40	0	0	0	Kegiatan Tidak Didukung Anggaran	Perlunya Dukungan Anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.07.05 2.02.0 4				Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan oleh berbagai elemen masyarakat tentang pelaksanaan Upah Minimum serta Peraturan Ketenagakerjaan lainnya	40	326.321.9 00	40	267.390.5 00	Kegiatan Berjalan Lancar	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan tripartit dalam rangka untuk mencegah dan mengatasi persoalan perburuhan di Jember.
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.08.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	9.362.020 .870	63%	7.010.267 .888			
2.08.01 2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	7.402.600	86%	6.355.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan 2016-2021 (RKA, DPA, Renstra, Renja dll) 100%	100	7.402.600	86	6.355.500	Selesai	Kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun 2021	
2.08.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	6.309.295 .085	79%	5.082.825 .833			
2.08.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan pegawai	100	5.935.859 .285	81	4.792.414 .833	Selesai	sisa gaji, tunjangan dan tpp	
2.08.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pembayaran gaji, honor dan lembur 100%	100	373.435.8 00	77	290.411.0 00	Selesai	sisa honor dan lembur asn dan non asn	
2.08.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	383.516.8 00	92%	354.653.0 16			
2.08.01 .2.05.0 4				Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase kapasitas kinerja aparatur 100%	100	383.516.8 00	92	354.653.0 16	Selesai	sisa anggaran	
2.08.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.004.139 .800	49%	1.211.830 .552			
2.08.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan kebutuhan perlengkapan kerja kantor OPD dan UPTD Kecamatan	100	1.837.583 .800	62	1.136.952 .400	tidak masalah	sisa anggaran	
2.08.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100	53.624.00 0	35	18.658.52 0	Selesai	sisa anggaran	
2.08.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Biaya perjalanan dinas 100%	100	112.932.0 00	50	56.219.63 2	Selesai	sisa anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	405.043.0 85	50%	233.486.9 15			
2.08.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya pembayaran telepon, listrik, internet dan air 100%	100	322.574.0 85	64	204.501.9 15	Selesai	sis anggaran	
2.08.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase perbaikan peralatan kebutuhan kantor dan lapangan 100%	100	82.469.00 0	35	28.985.00 0	Selesai	sis anggaran	
2.08.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	252.623.5 00	59%	121.116.0 72			
2.08.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	100	38.442.00 0	51	19.671.98 5		sis anggaran	
2.08.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas	100	152.245.5 00	27	40.604.08 7	Selesai	sis anggaran	
2.08.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pemeliharaan gedung kantor 100%	80	61.936.00 0	80	60.840.00 0	Persentase Pemeliharaan gedung kantor 100%	Persentase Pemeliharaan gedung kantor 100%	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.02			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		100%	376.106.600	97%	373.025.500			
2.08.02.2.01				Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	101.923.600	97%	101.073.600			
2.08.02.2.01.03				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Tercapainya kebijakan PUG dan PPRG di OPD	100	89.533.600	100	89.533.600	Selesai	selesai	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencanaanaan program, serta anggaran.
2.08.02.2.01.04				Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Persentase kegiatan PD yang responsif gender 100%	100	12.390.000	93	11.540.000	Selesai	sis anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.02 2.02				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	274.183.00	99%	271.951.900			
2.08.02 2.02.0 1				Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	bimbingan teknis sekolah perempuan dan operasional kegiatan dharma wanita	100	274.183.00	99	271.951.900	Selesai	sisa anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender di setiap OPD baik untuk pendataan, perencanaan program, serta anggaran.
2.08.03			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN		100%	196.406.00	95%	118.946.00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.03 .2.02				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	56.730.00 0	100%	56.730.00 0			
2.08.03 .2.02.0 1				Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga	0	0	0	0		PAPBD PADA KEGIATAN LAIN	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencanaan program, serta anggaran.
2.08.03 .2.02.0 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase layanan pecegahan kekerasan terhadap perempuan terpenuhi	100	56.730.00 0	100	56.730.00 0	Selesai	selesai	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.03 .2.01				PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN LINGKUP DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	139.676.0 00	90%	62.216.00 0			
2.08.03 .2.01.0 1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	50	139.676.0 00	45	62.216.00 0	Klim sudah terpenuhi oleh bpjs	klim sudah terpenuhi	
2.08.07			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		100%	422.406.8 00	69%	233.638.5 00			
2.08.07 .2.01				Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%	68.801.00 0	28%	14.900.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.08.07 2.01.0 1				Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Pembentukan dan pembinaan perlindungan anan terpadu berbasis masyarakat (PATBM) sebanyak 100 anak	80	68.801.00 0	22	14.900.00 0	Selesai	sisang anggaran	
2.08.07 2.02				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	353.605.8 00	90%	218.738.5 00			
2.08.07 2.02.0 4				Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak sebesar tingkat ke 5	100	142.658.8 00	83	118.046.5 00	Selesai	sisang anggaran	
2.08.07 2.02.0 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Prosentase pendampingan anak korban kekerasan terpenuhi	50	210.947.0 00	48	100.692.0 00	Selesai	klim sudah terpenuhi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PEMBERDAYA AN PEREMPUAN, PERLINDUNGA N ANAK DAN KELUARGA BERENCANA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
2.14.02			MENINGKATKA N KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK		100%	604.233.0 00	61%	365.978.3 00			
2.14.02 .02				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		100%	604.233.0 00	61%	365.978.3 00			
2.14.02 .02.0 2				Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100	604.233.0 00	61	365.978.3 00	Selesai	sisa anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.03			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		100%	7.003.748.400	53%	3.866.514.600			
2.14.03.2.02				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		100%	1.895.919.400	63%	1.177.589.600			
2.14.03.2.02.01				Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Kegiatan untuk PPKBD/Sub PPKBD se kabupaten Jember	100	1.895.919.400	63	1.177.589.600	Selesai	sisa anggaran	
2.14.03.2.03				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.073.669.000	56%	2.276.315.000			
2.14.03.2.03.08				Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	persentase pemakaian kontrasepsi MKJP di Kabupaten Jember meningkat	100	4.073.669.000	56	2.276.315.000	Klim sudah terpenuhi oleh bpjs	sisa anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.03 2.04				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		100%	1.034.160.000	40%	412.610.000			
2.14.03 2.04.03				Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah pembinaan pada petugas KB dan Kader KB di Kampung KB	100	1.034.160.000	40	412.610.000	Selesai	siswa anggaran	
2.14.04			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		100%	531.073.000	93%	466.466.000			
2.14.04 2.01				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		100%	531.073.000	93%	466.466.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.14.04 2.01.0 1				Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pembinaan kelompok KKBPK di Kabupaten Jember	100	438.960.0 00	85	374.555.0 00	Selesai	sis anggaran	
2.14.04 2.01.0 7				Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Promosi dan edukasi KKBPK kepada masyarakat	100	92.113.00 0	100	91.911.00 0	Selesai	sis anggaran	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.09.02			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN		100%	685.698.000	100%	663.590.500			
2.09.02.2.01				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	685.698.000	100%	663.590.500			
2.09.02.2.01.01				Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Yang di Bangun	1	685.698.000	1	663.590.500	-	-	
2.09.03			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		100%	240.000.000	50%	93.793.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.09.03 .2.01				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		100%	100.000.000	100%	93.793.000			
2.09.03 .2.01.0 4				Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Stock dan Harga Pangan	4	100.000.000	4	93.793.000	-	-	
2.09.03 .2.04				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		100%	140.000.000	0%	0			
2.09.03 .2.04.0 2				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok penerima bantuan P2L	2	140.000.000	0	0	-	-	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	9.571.286 .961	100%	7.206.676 .300			
3.27.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	65.175.50 0	100%	54.297.62 1			
3.27.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang di susun	3	32.762.40 0	3	23.414.80 0	-	-	
3.27.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang di susun	2	17.428.10 0	2	17.013.82 1	-	-	
3.27.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang disusun	1	14.985.00 0	1	13.869.00 0	-	-	
3.27.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	7.959.886 .127	100%	5.793.273 .593			
3.27.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	12	7.682.816 .027	12	5.557.241 .315	-	-	
3.27.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarnya Honorarium Pengelola Keuangan OPD selama 10 Bulan	10	264.720.6 00	10	224.026.2 78	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang di susun	3	12.349.50 0	3	12.006.00 0	-	-	
3.27.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	250.401.5 66	100%	224.580.4 15			
3.27.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik yang disediakan selama 1 tahun	1	5.774.000	1	5.774.000	-	-	
3.27.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	147.274.6 00	1	145.937.1 65	-	-	
3.27.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase ketersediaan bahan logistik kantor selama 1 tahun	100	90.652.96 6	100	66.598.45 0	-	-	
3.27.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1	6.700.000	1	6.270.800	-	-	
3.27.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	89.939.20 0	100%	89.840.00 0			
3.27.01 .2.07.0 5				PENGADAAN MEBEL	Jumlah Paket bebelur yang diadakan	1	89.939.20 0	1	89.840.00 0	-	-	
3.27.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.093.258 .568	100%	973.683.9 01			
3.27.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa listrik, air dan komunikasi	12	146.099.9 84	12	87.033.90 1	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .208.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan ketersediaan tenaga pendukung operasional kantor	12	947.158.584	12	886.650.000	-	-	
3.27.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	112.626.000	100%	71.000.770			
3.27.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dirawat	1	27.767.000	1	21.856.845	-	-	
3.27.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah mobil operasional yang dirawat	2	74.524.000	2	39.086.425	-	-	
3.27.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang di rawat selama 1 tahun	24	10.335.000	24	10.057.500	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.02			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100%	2.792.669.267	100%	2.653.931.587			
3.27.02.2.02				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		100%	1.739.605.067	100%	1.680.430.587			
3.27.02.2.02.02				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Ternak yang di tingkatkan kualitasnya di UPT Pembibitan Ternak	50	1.739.605.067	50	1.680.430.587	-	-	
3.27.02.2.03				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	466.975.000	100%	457.987.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.02 .2.03.0 1				Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah kontes ternak yang dilaksanakan	1	466.975.000	1	457.987.000	-	-	
3.27.02 .2.05				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	586.089.200	100%	515.514.000			
3.27.02 .2.05.0 1				Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Bulan Pendampingan Kelompok peternak	7	31.936.000	7	18.820.000	-	-	
3.27.02 .2.05.0 5				Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Bulan Validasi kelompok peternak	500	554.153.200	500	496.694.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.04			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		100%	965.473.200	80%	844.441.884			
3.27.04.2.01				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	340.104.500	100%	257.245.050			
3.27.04.2.01.01				Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah ternak yang diperiksa dan diobati secara gratis	30000	340.104.500	30000	257.245.050	-	-	
3.27.04.2.03				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	533.136.600	50%	507.272.450			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.04 .2.03.0 1				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Sample yang diamati	24	31.793.00 0	24	25.642.28 0	-	-	
3.27.04 .2.03.0 2				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah kecamatan sasaran survailance penyakit ternak	31	501.343.6 00	31	481.630.1 70	-	-	
3.27.04 .2.04				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner		100%	92.232.10 0	100%	79.924.38 4			
3.27.04 .2.04.0 1				Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan Yang Di Dampingi	12	62.252.50 0	12	57.748.50 0	-	-	
3.27.04 .2.04.0 2				Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan dalam 1 tahun	4	29.979.60 0	4	22.175.88 4	-	-	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
2.11.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	23.057.91 9.115	66%	21.161.41 5.711			
2.11.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah paket penyusunan Renstra, RKPD dan Dokumen perencanaan lainnya	1	0	0	0	adanya pergeseran anggaran (refocusing), dan anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menjadi 0	akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan target minimal sama dengan tahun 2021	
2.11.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	22.002.49 4.740	75%	20.250.28 1.994			
2.11.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	14	21.839.09 4.740	14	20.185.37 5.144	Nihil	Nihil	
2.11.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah orang yang memenuhi kebutuhan administrasi dan operasional rutin kantor	12	163.400.0 00	6	64.906.85 0	Dilaksanakan Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, perlu keteoatan dalam proses administrasi	
2.11.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100.478.1 00	75%	64.906.85 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen listrik	12	2.863.000	3	980.000	Terkendala proses administrasi	perlu nya perencanaan anggaran yang tepat dan akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan target minimal sama dengan tahun 2021	
2.11.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan tersedianya bahan logistik kantor	12	69.545.100	12	37.248.850	Dilaksanakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor di triwulan 2	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
2.11.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	13	28.070.000	13	26.678.000	Dilaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telah dilaksanakan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
2.11.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	0	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	758.722.275	83%	732.060.867			
2.11.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.276.000	6	1.210.000	Dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat di triwulan 4	Telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
2.11.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa listrik, telepon dan internet	12	71.997.775	12	45.402.367	Dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik di triwulan 4, berupa pembayaran tagihan listrik dan telepon	Telah dilaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.11.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan untuk memenuhi tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	26	685.448.500	26	685.448.500	-	-	
2.11.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	196.224.000	50%	114.166.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional secara rutin/ berkala	17	86.383.00 0	17	55.124.00 0	Dilaksanakan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatandi triwulan 2 sebanyak 17 kendaraan	Telah dilaksanakan sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
2.11.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	1	109.841.0 00	0	59.042.00 0	adanya pergeseran anggaran (refocusing), dan anggaran padaSub kegiatan Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, sehingga kegiatan pemeliharaan gedung kantor tidak dapat dilaksanakan	akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan target minimal sama dengan tahun 2021, diperlukan perencanaan anggaran yang tepat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.02			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	578.328.000	67%	492.486.000			
2.11.02.2.01				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		100%	171.258.000	100%	133.234.000			
2.11.02.2.01.01				Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen lingkungan hidup	1	171.258.000	1	133.234.000	Dilaksanakan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup)	Telah dilaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota (dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup)	
2.11.02.2.02				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		100%	407.070.000	50%	359.252.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.02 .2.02.0 1				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	1	0	0	0	adanya pergeseran anggaran (refocusing), dan anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menjadi 0	Perlunya perencanaan anggaran yang tepat Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan target minimal sama dengan tahun 2021	
2.11.02 .2.02.0 2				Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	1	407.070.0 00	1	359.252.0 00	-	-	
2.11.03			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	280.356.5 00	33%	229.796.9 90			
2.11.03 .2.01				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	263.380.5 00	50%	213.686.4 90			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.03 .2.01.0 1				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah titik pantau Air Ibadan air Jumlah titik pantau Air limbah industri Jumlah titik pantau emisi udara Jumlah titik pantau udara ambient	18	250.523.500	18	200.934.490	-	-	
2.11.03 .2.01.0 2				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang perubahan iklim	125	12.857.000	0	12.752.000	Dilaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (pembinaan yang bersifat bukan sosialisasi di Desa Dukuh Dempok Kecamatan Wuluhan terkait dengan Program Kampung Proklam)	Telah dilaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, namun perlunya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target indikator	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.03 .2.03				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100%	16.976.00 0	0%	16.110.50 0			
2.11.03 .2.03.0 4				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah bibit tanaman yang di tanam di sumber mata air	4000	16.976.00 0	0	16.110.50 0	adanya pergeseran anggaran (refocusing) namun Dilaksanakan Sub Kegiatan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi (survey sumber mata air di Umbulsari, Badean dan Puger	Telah dilaksanakan Sub Kegiatan Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi , namun perlunya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target indikator	
2.11.05			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		100%	24.755.50 0	68%	18.325.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.05 .2.01				Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	24.755.50 0	68%	18.325.00 0			
2.11.05 .2.01.0 2				Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah b3	50	24.755.50 0	34	18.325.00 0	Dilaksanakan Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Verifikasi Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 pada 20 perusahaan) , kegiatan belum memenuhi target sebanyak 50 perusahaan	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 , namun perlunya perencanaan penganggaran yang tepat untuk mencapai target indikator	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.06			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		100%	46.304.000	100%	46.304.000			
2.11.06.2.01				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	46.304.000	100%	46.304.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.06 2.01.0 1				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Perusahaan yang memiliki dokumen PPLH	150	46.304.00 0	150	46.304.00 0	Dilaksanakan Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH, Jumlah perusahaan yang memiliki dokumen PPLH sebanyak 182 perusahaan yang artinya melebihi target yaitu 150 perusahaan, dikarenakan meningkatnya kesadaran pengusaha memiliki dokumen PPLH	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.09			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		100%	240.473.500	100%	225.471.500			
2.11.09.2.01				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	240.473.500	100%	225.471.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.09 2.01.0 1				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah buku IKPLHD Jumlah sekolah Adiwiyata	1	240.473.500	1	225.471.500	DilaksanakanSub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pembinaan sekolah adiwiyata SD dan SMP sebanyak 170 sekolah, serta penyusunan Dokumen IKPLHD sebanyak 1 dokumen	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.10			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		100%	9.211.500	14%	9.211.500			
2.11.10.2.01				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	9.211.500	14%	9.211.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.10 2.01.0 1				Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Kumulatif pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ perusakan lingkungan hidup yang yang di tindak lanjuti	90	9.211.500	13	9.211.500	Dilaksanakan Sub kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, Jumlah pengaduan masyarakat terhadap masalah lingkungan yang terjadi di wilayah sedikit	Telah dilaksanakan Sub kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	
2.11.11			MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		100%	12.314.281.395	30%	11.656.302.354			
2.11.11 2.01				Pengelolaan Sampah		100%	12.314.281.395	30%	11.656.302.354			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.11 .2.01.0 1				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan daerah pengelolaan persampahan	1	0	0	0	Setelah P-APBD ada pergeseran anggaran (refocusing) sehingga anggaran pada sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah menjadi 0. tetapi menjelang akhir tahun penyusunan Jakstrada tetap disusun dengan pendampingan langsung dari Kementerian terkait hingga dokumen Jakstrada tersusun.	Akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan memproyeksikan kembali target dan anggaran sesuai dengan kebutuhan.	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.11 2.01.0 3				Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	1. Jumlah kumulatif ketersediaan TPST 3R dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat 2. Peningkatan kelas/tipe TPA 3. Jumlah Tempat Pengelolaan sampah yang memanfaatkan gas metan 4. Persentase sampah tertangani 5. Jumlah wilayah yang terakses pelayanan sampah 6. Jumlah penambahan armada arm roll	100	12.314.281.395	90	11.656.302.354	Keterbatasan Prasarana Dan Sarana Serta Personal Tanaga Pengelolaan Persampahan Baik Itu Yang Ada Di Tpa Maupun pada sarana dan prasarana pengelolaan sampah lainnya, pada triwulan 4 (pembayaran honor tenaga kebersihan; bahan BBM kendaraan operasional; Pembangunan Bak Lindi; Tanah urug TPA Pakusari))	Memaksimalkan Pemanfaatan Sarana Yang Ada Walaupun Pada Akhirnya Berimplikasi Pada Efektivitas Penggunaan Anggaran Karena Dengan Pemanfaatan Sarana Yang Sudah Tua Maka Diperlukan Juga Anggaran Pemeliharaan Yang Relatif Besar. Pada Sisi Lain Guna Mengoptimalkan Manfaat Program Yang Dilaksanakan Juga Diperlukan Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah. Perlu perencanaan awal yang lebih tepat dan disesuaikan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.11.11 2.01.0 4				Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan bank sampah	200	0	0	0	adanya pergeseran anggaran (refocusing), dan anggaran pada sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah menjadi 0	akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan target minimal sama dengan tahun 2021	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
2.12.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	15.284.352.949	99%	12.157.852.877			
2.12.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	267.427.000	100%	228.632.900			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya buku dokumen perencanaan	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	
2.12.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Buku Dokumen Perencanaan	0	0	0	0	Anggaran pada Sub Kegiatan ini digeser pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk pembelian Material E-ktp	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	
2.12.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perubahan RKA-SKPD	100	267.427.000	100	228.632.900	Masih ada Efisiensi Anggaran	Sudah terpenuhi kebutuhan buku agregat Semester I dan II	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun perda kabupaten layak anak untuk mewujudkan Jember menjadi kabupaten layak anak.
2.12.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.837.144.112	100%	2.420.798.884			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01 .02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	14	3.555.530 .112	14	2.163.464 .884	Jumlah pejabat yang ada di dispenduk ada yang pensiun dan juga dimutasi ke OPD lain	Sudah terlaksana pembayaran TPP sesuai jumlah pegawai	
2.12.01 .02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran tenaga pendukung administrasi dan operasional kantor	100	281.614.0 00	100	257.334.0 00			
2.12.01 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	1.124.989 .500	100%	1.026.798 .320			
2.12.01 .05.1 0				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai	100	905.782.0 00	100	837.271.8 20			
2.12.01 .06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	5.941.952 .480	100%	4.792.301 .356			
2.12.01 .06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	100	5.010.000	100	4.994.000			
2.12.01 .06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100	5.167.076 .680	100	4.018.647 .469	Masih terdapat Efisiensi anggaran tinggi	Sudah terpenuhi pengadaan Ribbon/tinta KTP el dan KIA	
2.12.01 .06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat-rapat dan kegiatan	100	177.382.0 00	100	176.980.7 82			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	100	70.133.800	100	70.000.000			
2.12.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, peraturan perundang-undangan yang tersedia	100	6.500.000	100	6.125.000			
2.12.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah	100	335.710.000	100	335.570.097			Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelayanan ADMINDUK mudah, cepat dan gratis.
2.12.01 .2.06.0 7				Penyediaan Bahan / Material	Jumlah jenis ATK	100	180.140.000	100	179.984.008			
2.12.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.252.515.307	100%	2.175.869.565			
2.12.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Benda-benda Pos	100	108.174.400	100	70.540.000	Masih ada Efisiensi Anggaran	Sudah terpenuhi kebutuhan benda-benda Pos dan Pengiriman Surat-surat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya telepon,air,listrik,internet dan TV kabel	100	250.720.2 07	100	230.371.5 65			
2.12.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan kantor	100	79.217.70 0	100	70.776.00 0	kondisi kendaraan yang mengalami rusak parah belum semua bisa dianggarkan	Sudah terpenuhi pemeliharaan kendaraan dispendukcapil	
2.12.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran tenaga pendukung administrasi dan operasional kantor	100	1.814.403 .000	100	1.804.182 .000			
2.12.01 .2.09 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	563.988.7 50	92%	527.164.8 52			
2.12.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	100	38.705.50 0	89	34.292.10 1	kondisi kendaraan yang mengalami rusak parah belum semua bisa dianggarkan	Sudah terpenuhi pemeliharaan kendaraan Mobil Jabatan	
2.12.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	100	156.733.2 50	80	124.772.7 51	kondisi kendaraan yang mengalami rusak parah belum semua bisa dianggarkan	Sudah terpenuhi pemeliharaan kendaraan operasional	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.01 2.09.0 8				Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pemanfaatan Data dan Dokumen yang tersedia	100	327.400.000	100	327.400.000			Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan untuk mempercepat pelayanan ADMINDUK
2.12.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	41.150.000	100	40.700.000			
2.12.01 2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	1.296.335.800	100%	986.287.000			
2.12.01 2.07.0 2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	100	1.296.335.800	100	986.287.000	Masih terdapat Efisiensi anggaran tinggi	Sudah terpenuhi pengadaan Mobil Keliling Pelayanan Adminduk 1 unit	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		100%	0	0%	0			
2.12.02.2.01				Pelayanan Pendaftaran Penduduk		100%	0	0%	0			
2.12.02.2.01.02				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan Dokumen Adminduk (KK, KTP- el, dan KIA)	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	
2.12.02.2.02				Penataan Pendaftaran Penduduk		100%	0	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.02 2.02.0 2				Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah diterbitkannya Kartu Identitas Anak 0 sampai 17 tahun	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	
2.12.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		100%	349.806.000	100%	312.040.800			
2.12.03 2.01				Pelayanan Pencatatan Sipil		100%	49.986.000	100%	48.670.800			
2.12.03 2.01.0 1				Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan)	100	49.986.000	100	48.670.800			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.03 .2.02				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		100%	299.820.0 00	100%	263.370.0 00			
2.12.03 .2.02.0 6				Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Diterbitkan Penetapan Itsbat Nikah bagi peserta Itsbat dan Buku Nikah Peserta Itsbat	100	299.820.0 00	100	263.370.0 00	Sesuai BNBA bahwa terjadi peserta ada yang meninggal dan ada juga yang sudah cerai, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan	Sudah terpenuhi pelaksanaan Itsbat Nikah sejumlah 78 pasangan	
2.12.03 .2.02.0 8				Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Sosialisasi Pencatatan Sipil yang terlaksana	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak di gunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		100%	0	0%	0			
2.12.04.2.01				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		100%	0	0%	0			
2.12.04.2.01.01				Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data kependudukan terpilah	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.04 .2.03				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		100%	0	0%	0			
2.12.04 .2.03.0 3				Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang dilakukan	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak di gunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	
2.12.04 .2.03.0 5				Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Pengelolaan Sosialisasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak di gunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		100%	0	0%	0			
2.12.05.2.01				Penyusunan Profil Kependudukan		100%	0	0%	0			
2.12.05.2.01.01				Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Data kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak digunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.12.05 2.01.0 2				Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil Kependudukan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	Untuk Sub Kegiatan ini tidak di gunakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)	Sub Kegiatan ini masih akan digunakan pada tahun berikutnya	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka mewujudkan program satu data
2.12.01 2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang bersertifikat	100	219.207.5 00	100	189.526.5 00	Masih terdapat Efisiensi anggaran	Sudah terpenuhi pelaksanaan BIMTEK	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
2.13.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	6.959.130 .640	100%	4.927.232 .612			
2.13.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang tersaji	2	0	2	0	-	anggaran telah dialihkan, dokumen perencanaan telah tersaji	
2.13.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.511.558 .320	100%	3.736.584 .611			
2.13.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai ASN	28	4.659.184 .320	28	2.931.000 .891	-	-	
2.13.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah aparatur pengelola keuangan, barang, dan administrasi	35	852.374.5 00	35	805.583.7 20	-	-	
2.13.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	507.990.3 00	100%	344.017.5 25			
2.13.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan komponen listrik kantor	12	7.143.000	12	7.143.000	-	-	
2.13.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	112.163.0 00	12	107.401.8 00	-	-	
2.13.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya bahan kebersihan kantor	12	31.843.00 0	12	30.820.00 0	-	-	
2.13.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	12	30.893.30 0	12	29.948.32 5	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi antar instansi terkait	100	325.948.000	100	168.704.400	-	Perjalanan dinas luar kota menyesuaikan undangan dan kegiatan	
2.13.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	701.545.520	100%	655.175.775			
2.13.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan listrik, air dan telepon kantor	12	60.173.520	12	50.558.225	-	-	
2.13.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan ketersediaan alat tulis kantor Jumlah bulan ketersediaan jasa kebersihan kantor Jumlah bulan ketersediaan makanan dan minuman untuk aparatur	100	641.372.000	100	604.617.550	-	-	
2.13.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	238.036.000	100%	191.454.701			
2.13.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan	1	33.985.000	1	30.161.822	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	21	115.467.0 00	21	81.739.47 9	-	-	
2.13.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah ketersediaan perawatan/service untuk sarpras peralatan dan perlengkapan kantor	100	88.584.00 0	100	79.553.40 0	-	-	
2.13.04			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		100%	4.995.999 .992	80%	4.821.947 .165			
2.13.04 2.01				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		100%	4.995.999 .992	80%	4.821.947 .165			
2.13.04 2.01.0 4				Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Perbup tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	1	219.420.5 00	1	199.255.0 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04 .2.01.0 5				Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur desa yang dilatih pengenalan dan pemahaman tupoksi pemerintahan	100	2.017.302.092	100	1.973.088.665	kegiatan bimtek sekdes telah dilaksanakan, tapi untuk kegiatan Suspim Kades tidak dapat dilaksanakan karena kegiatan Pilkades ditunda	Suspim Kades tidak dapat dilaksanakan pada tahu 2021 karena waktu yang terlalu mepet di akhir tahun 2021	
2.13.04 .2.01.0 7				Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Perbup DD, ADD, BGH	3	608.572.000	3	592.671.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan undang-undang tentang Desa termasuk pengalokasian anggaran penanganan Covid-19.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.04 2.01.0 8				Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa Terbentuk dalam pengawasan	226	168.570.000	226	157.970.000	Kegiatan berjalan sesuai penganggaran dan anggaran	Kegiatan berjalan sesuai penganggaran dan anggaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka untuk peningkatan PAD desa dan menstimulus perekonomian masyarakat desa
2.13.04 2.01.0 9				Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa	59	1.982.135.400	0	1.898.962.500	Pelaksanaan dilanjutkan di TW IV dengan waktu yang pendek, dan masih memantau perkembangan lebih lanjut untuk diperbolehkan atau tidaknya Pilkades dilaksanakan	Pilkades dilaksanakan lebih padat menyesuaikan waktu yang ada, dan tetap memantau perkembangan lebih lanjut	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengalokasikan anggaran pilkades dalam APBD dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT		100%	3.545.164 .650	52%	3.004.737 .320			
2.13.05 .2.01				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	3.545.164 .650	52%	3.004.737 .320			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05 .2.01.0 2				Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terselenggaranya event TMMD	1	0	0	0	kegiatan TMMD sudah selesai, APBD baru ditetapkan di bulan April	tidak melaksanakan kegiatan TMMD dan anggaran akan dialihkan ke kegiatan lain	
2.13.05 .2.01.0 3				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Desa yang menerima pendampingan Jumlah ketua RT/RW Jumlah nominasi Desa/Kelurahan Jumlah pengurus kader Posyandu yang dibina	100	1.489.884 .000	25	1.366.178 .020	RT/RW dicairkan bulan Oktober- November	menunggu SK Bupati Kegiatan Pendampingan Desa, BPJSTK ketua RT/RW bulan Desember belum dicairkan karena belum habis bulan November	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.13.05 .2.01.0 4				Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah event BBRGM Jumlah event Jatim Puspa Jumlah kecamatan penguatan kapasitas kelembagaan TP-PKK	100	1.504.505.850	34	1.145.183.500	BKK Provinsi proses pelaksanaan dan LPJ, TP-PKK pelaksanaan kegiatan dan administrasi	BKK Provinsi tahap LPJ kegiatan, TP-PKK proses administrasi dan melaksanakan kegiatan bulan Oktober-Desember	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa mandiri sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain di kabupaten Jember.
2.13.05 .2.01.0 5				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa pendampingan dan pelestarian aset simpan pinjam perempuan (SPP) kegiatan PDPM Jumlah revitalisasi pasar desa	100	503.909.600	100	465.356.600	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa mandiri sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain di kabupaten Jember.
2.13.05 .2.01.0 6				Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah kelompok yang dibina untuk mengikuti gelar TTG	10	46.865.200	10	28.019.200	-	-	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	20.389.65 1.877	92%	17.532.48 2.303			
2.15.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	137.953.0 00	93%	122.276.9 50			
2.15.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan	100	64.711.00 0	90	51.677.00 0	-	-	
2.15.01 .2.01.0 7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase tersusunnya dokumen pelaporan	100	73.242.00 0	95	70.599.95 0	-	-	
2.15.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.873.90 8.107	93%	11.700.39 8.165			
2.15.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase tersedia kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan	100	9.808.684 .107	100	7.708.706 .165	-	-	
2.15.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	prosentase tesedianya kebutuhan penunjang operasional kantor	100	4.029.600 .000	100	3.963.000 .000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Prosentase tersusunnya dokumen akuntabilitas keuangan	100	35.624.00 0	80	28.692.00 0	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksika n kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 .2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	1.935.331 .000	100%	1.935.331 .000			
2.15.01 .2.04.0 7				Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Prosentase terbayarnya kewajiban kepada pihak terkait	100	1.935.331 .000	100	1.935.331 .000	-	-	
2.15.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	182.900.0 00	100%	181.079.5 00			
2.15.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan	454	182.900.0 00	454	181.079.5 00	Pekerjaan sesuai rencana angkas	-	
2.15.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.175.785 .800	86%	930.574.4 82			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01 2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	7.422.000	85	6.148.500	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	293.583.300	90	293.583.300	-	-	
2.15.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	4.152.500	80	4.152.500	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	732.428.000	95	518.433.999	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	138.200.000	80	108.256.183	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.240.165.820	100%	1.234.854.500			
2.15.01 .2.07.0 2				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang diadakan	6	888.000.000	6	887.004.000	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	
2.15.01 .2.07.1 1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana terbangun	1	352.165.820	1	347.850.500	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	
2.15.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.089.703.500	90%	906.455.856			
2.15.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	721.790.000	100	555.057.883	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	367.913.500	80	351.397.973	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	753.904.650	88%	521.511.850			
2.15.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	669.352.150	80	449.430.850	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	prosentase tersedianya kebutuhan dasar operasional OPD	100	34.552.50 0	85	22.581.00 0	Pelaksanaan kegiatan d disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksika n kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang direhabilitasi	1	50.000.00 0	1	49.500.00 0	-	-	
2.15.02			MENYEDIAKAN INFRASTRUKT UR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKT IF KEBENCANAA N.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		100%	7.864.215 .800	89%	7.359.895 .636			
2.15.02 .2.01				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota		100%	200.400.0 00	100%	97.090.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .2.01.0 2				Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi	30	200.400.00	30	97.090.000	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan kembali penataan lalu lintas jalan terutama pada wilayah-wilayah yang rawan kemacetan serta menumbuhkan kesadaran berlalu lintas.
2.15.02 .2.02				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota		100%	2.165.343.100	81%	1.895.099.556			
2.15.02 .2.02.0 1				Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah RPPJ	50	262.152.000	49	227.404.750	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	
2.15.02 .2.02.0 2				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rambu-rambu Lalu-lintas	1111	474.388.600	394	468.698.100	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .02.0 3				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Prosentase prasarana jalan yang direhabilitasi	98	998.008.5 00	95	987.484.7 01	-	-	
2.15.02 .02.0 4				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Prosentase perlengkapan jalan yang dipelihara	100	430.794.0 00	95	211.512.0 05	-	-	
2.15.02 .03				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		100%	152.700.0 00	80%	141.733.0 00			
2.15.02 .03.0 3				Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi terminal	485260 00	152.700.0 00	390045 00	141.733.0 00	Pelaksanaan kegiatan d disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksika n kembali target sesuai capaian tahun ini pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02 .04				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		100%	4.150.960 .000	94%	4.131.005 .000			
2.15.02 .04.0 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah PAD dari retribusi Parkir	100	4.150.960 .000	94	4.131.005 .000	-	-	
2.15.02 .05				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		100%	353.117.8 00	100%	344.987.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .2.05.0 1				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor	112386 0000	215.800.8 00	112386 0000	208.844.5 00	Pada TW IV Kinerja mencapai Rp. 524.426.500,- karena adanya program bebas denda bagi kendaraan wajib uji	Kinerja secara keseluruhan melebihi target sebesar Rp 2.212.287.400,- atau 198%- sehingga akan memproyeksikan kembali target sesuai capaian kinerja tahun ini	
2.15.02 .2.05.0 7				Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi pengujian kendaraan bermotor	11	137.317.0 00	11	136.142.5 00	-	-	
2.15.02 .2.06 6				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota		100%	468.718.0 00	83%	415.739.2 80			
2.15.02 .2.06.0 4				Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah operasi penegakkan hukum	90	411.080.0 00	90	369.989.2 80	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .2.06.0 5				Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat	12	57.638.00 0	8	45.750.00 0	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksi n kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	
2.15.02 .2.07				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		100%	7.850.000	100%	6.250.000			
2.15.02 .2.07.0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah dokumen Andalalin	1	7.850.000	1	6.250.000	Pekerjaan sesuai rencana angkas	Dilaksanakan sesuai KAK	
2.15.02 .2.08				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		100%	100.956.0 00	100%	98.704.00 0			
2.15.02 .2.08.0 4				Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pemilihan	40	100.956.0 00	40	98.704.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .2.09				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	106.373.400	70%	99.748.800			
2.15.02 .2.09.0 1				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah angkutan umum	322	106.373.400	225	99.748.800	Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku transportasi umum konvensional akibat dari berkembangnya sistem transportasi online.
2.15.02 .2.14				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	157.797.500	100%	129.539.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.02 .2.14.0 2				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengusaha angkutan	40	157.797.5 00	40	129.539.0 00	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	
2.15.04			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN		100%	777.261.5 00	2%	641.463.1 50			
2.15.04 .2.01				Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter		100%	777.261.5 00	2%	641.463.1 50			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.04 2.01.0 1				Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah penumpang datang dan berangkat	4320	777.261.500	68	641.463.150	Kegiatan penerbangan di Bandara Notohadinegoro Jember di cancel karena Pandemi Covid-19	Akan memproyeksikan kembali target sesuai kebutuhan pada tahun berikutnya beserta kebutuhan anggarannya serta sedang direncanakan untuk kegiatan penerbangan kargo	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keberlanjutan operasional bandara dengan melakukan langkah-langkah inovasi guna meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan udara. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjalin kembali komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Angkasa Pura dan PTPNXII dalam rangka perluasan dan peningkatan layanan bandara.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.15.05			MENYEDIAKAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG BERKUALITAS DAN MERATA SERTA BERPERSPEKTIF KEBENCANAAN.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		100%	140.614.800	100%	121.632.000			
2.15.05 2.02				Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	140.614.800	100%	121.632.000			
2.15.05 2.02.02				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta penyuluhan	15	140.614.800	15	121.632.000	Sesuai kebutuhan	Dilaksanakan sesuai KAK	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
2.16.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	7.047.783 .748	100%	3.983.483 .813			
2.16.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.287.766 .428	100%	2.755.254 .349			
2.16.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase tingkat pemenuhan kebutuhan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	4.365.326 .428	100	2.266.076 .349	-	-	
2.16.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase tingkat pemenuhan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	922.440.0 00	100	489.178.0 00	-	-	
2.16.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	638.327.5 00	100%	500.968.4 00			
2.16.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	122.714.5 00	100	77.578.80 0	-	-	
2.16.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	409.757.5 00	100	342.733.6 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100	3.457.000	100	2.145.700	-	-	
2.16.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor	100	34.473.50 0	100	28.648.30 0	-	-	
2.16.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	20.645.00 0	100	19.112.00 0	-	-	
2.16.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	100	47.280.00 0	100	30.750.00 0	-	-	
2.16.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	937.662.8 20	100%	641.423.0 27			
2.16.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa surat- menyurat	100	10.350.00 0	100	9.600.000	-	-	
2.16.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100	169.284.3 20	100	128.472.5 19	-	-	
2.16.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan perbaikan peralatan kerja	100	36.171.00 0	100	21.234.48 8	-	-	
2.16.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat pemenuhan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100	721.857.5 00	100	482.116.0 20	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	184.027.000	100%	85.838.037			
2.16.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat pemeliharaan mobil jabatan	100	49.577.500	100	25.831.102	-	-	
2.16.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan & pemeliharaan sarana & prasarana kendaraan dinas	100	91.949.500	100	21.707.935	-	-	
2.16.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase tingkat pemeliharaan gedung kantor	100	42.500.000	100	38.299.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		100%	7.649.056.564	79%	7.245.871.606			
2.16.02.2.01				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	7.649.056.564	79%	7.245.871.606			
2.16.02.2.01.01				Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah kajian bidang Komunikasi dan Informasi	3	7.469.564	0	0	Pada tahun ini tidak membuat kajian	Anggaran dialihkan ke kegiatan yang lain	
2.16.02.2.01.02				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat	100	71.150.000	100	64.210.000	Jumlah pengaduan masyarakat 287	Jumlah pengaduan masyarakat 287	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.02 .2.01.0 3				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap kegiatan pembangunan	35	341.900.00	9	321.890.00	-	-	
2.16.02 .2.01.0 4				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Persentase jumlah diseminasi informasi; Jumlah dokumentasi kegiatan Pemkab	92	607.590.00	87	600.815.500	-	-	
2.16.02 .2.01.0 5				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah berita melalui media online	100	90.444.000	100	90.080.000	-	-	
2.16.02 .2.01.0 6				Pelayanan Informasi Publik	Jumlah PPID pembantu di tiap OPD	70	256.820.000	70	220.780.000	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera meningkatkan manajemen keterbukaan informasi publik dengan ditunjang sistem informasi digital.
2.16.02 .2.01.0 7				Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama dengan media massa, baik media cetak, elektronik maupun online	10	5.252.021.500	10	5.151.888.106	-	-	
2.16.02 .2.01.1 0				Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase terlaksananya monitoring terhadap sarana telekomunikasi	30	730.561.500	30	545.208.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.02 .2.01.1 2				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	180	291.100.000	170	251.000.000	-	-	
2.16.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		100%	45.126.794.900	72%	13.028.764.794			
2.16.03 .2.01				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	6.441.900.600	100%	685.880.050			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.03 2.01.0 3				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya computer mainframe sebagai induk dari seluruh aplikasi di masing2 OPD menuju Jember Satu Data	70	6.441.900.600	70	685.880.050	-	-	
2.16.03 2.02				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	38.684.894.300	65%	12.342.884.744			
2.16.03 2.02.0 3				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan dan keamanan pada system aplikasi dan software	100	283.866.400	100	279.352.080	-	-	
2.16.03 2.02.0 7				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Terselenggaranya pengadaan software/aplikasi system informasi pelayanan public berbasis IT	100	800.000.000	30	217.500.000	2 OPD yang mengajukan pembuatan aplikasi dengan pihak ketiga	Aplikasi sederhana yang bisa dikerjakan oleh Tim Programmer Diskominfo sejumlah 7 Aplikasi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan percepatan dan langkah-langkah untuk implementasi E-Government terutama dalam mendukung pelayanan.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.16.03 2.02.0 9				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terselenggaranya pengadaan software/aplikasi system informasi pelayanan public berbasis IT	100	4.508.784 .000	30	4.027.626 .389	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan percepatan dan langkah-langkah untuk implementasi E-Government terutama dalam mendukung pelayanan.
2.16.03 2.02.1 0				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase sosialisasi, pembinaan dan pengumpulan data sumber komunikasi dan informasi	70	33.092.24 3.900	70	7.818.406 .275	-	-	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.20.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		100%	44.115.000	50%	14.745.000			
2.20.02.01				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		100%	44.115.000	50%	14.745.000			
2.20.02.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase dokumen kajian bidang statistik yang terpenuhi	70	21.270.000	0	3.275.000	Pada tahun ini tidak membuat kajian	Anggaran dialihkan ke kegiatan yang lain	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.20.02 .2.01.0 2				Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah peserta sosialisasi/bimtek statistik	50	22.845.00 0	50	11.470.00 0	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera menjalin kerjasama dengan pihak terkait penyediaan data dan informasi publik, salah satunya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam rangka mewujudkan program satu data.
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.21.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		100%	98.310.400	75%	94.525.000			
2.21.02.2.01				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	98.310.400	75%	94.525.000			
2.21.02.2.01.02				Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat-alat untuk pengolahan data/persandian	2	20.000.000	1	19.525.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.21.02 .2.01.0 3				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Persentase pemeliharaan dan pengamanan terhadap hardware system informasi	100	78.310.400	100	75.000.000	-	-	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
2.17.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	5.503.554.288	88%	4.586.120.079			
2.17.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	18.695.500	100%	18.634.500			
2.17.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	4	674.500	4	664.500	Pengesahan APBD yang mengalami kendala	Terpenuhinya dokumen perencanaan	
2.17.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	2	9.579.000	2	9.579.000	Pengesahan APBD mengalami kendala	Terpenuhi dokumen RKA-SKPD	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD yang dikerjakan tepat waktu	2	915.000	2	915.000	Pengesahan PABD yang mengalami kendala	Terpenuhi dokumen RKA Perubahan	
2.17.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikerjakan tepat waktu	4	2.422.500	4	2.422.500	Pengesahan APBD mengalami kendala	Terpenuhi dokumen DPA-SKPD	
2.17.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang dikerjakan tepat waktu	4	2.422.500	4	2.386.500	Pengesahan PABD yang mengalami kendala	Percepatan pengesahan PABD	
2.17.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dihasilkan	2	1.513.500	2	1.498.500	Pengesahan PABD yang mengalami kendala	Percepatan pengesahan PABD	
2.17.01 .2.01.0 7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen pemcaanaan/laporan perencanaan yang selesaikan	100	1.168.500	100	1.168.500	Pengesahan PABD yang mengalami kendala	Percepatan pengesahan PABD	
2.17.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.766.205 .738	73%	3.041.405 .015			
2.17.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji PNS	12	3.617.287 .338	12	2.908.101 .115	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase penyediaan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor berupa honor PNS	100	146.436.4 00	90	132.946.4 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan akhir tahun yang dihasilkan	100	357.500	100	357.500	Realisasi anggaran sesuai dengan pagu	Realisasi anggaran sesuai dengan pagu	
2.17.01 .02.0 8				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah berkas yang dihasilkan terkait penyusunan pelaporan dan analisis realisasi anggaran	4	2.124.500	0	0	Pagu dialihkan ke kegiatan lain	Pagu dialihkan ke kegiatan lain	
2.17.01 .05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	124.729.8 00	86%	119.261.9 00			
2.17.01 .05.0 1				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tupoksinya	100	116.729.8 00	97	113.261.9 00	Masih ada belanja yang belum terrealisasi	Belanja untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasana kantor pendukung kegiatan aparatur lebih baik lagi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase meningkatkan SDM aparatur Persentase peningkatan kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tupoksinya; Persentase terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas pegawai; Persentase pengadaanPengadaan Pakaian Kerja Lapangan/Pakaian Korpri/Pakaian Olah Raga/Pakaian Khusus Hari- Hari Tertentu bagi pegawai; Persentase peningkatan kapasitas kinerja SKPD; Persentase meningkatnya SDM aparatur	100	8.000.000	75	6.000.000	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena kondisi pandemi sehingga mempengaruhi terhadap kegiatan ke luar daerah	Terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	785.862.2 50	89%	638.054.8 37			
2.17.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	4.210.000	99	4.175.000	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	306.159.4 00	99	305.916.2 00	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan rumah tangga untuk kantor	100	66.328.75 0	97	64.209.50 0	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	19.616.10 0	96	18.925.00 0	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan cetakan dan penggandaan	100	1.250.000	80	1.000.000	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase belanja perjalanan dinas luar daerah yang dikerjakan	100	388.298.0 00	63	243.829.1 37	Dampak pandemi covid 19 mempengaruhi perjalanan dinas ke luar daerah dan berkurangnya undangan rapat secara tatap muka	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	1.572.500	56%	883.500			
2.17.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pengadaan kebutuhan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Komputer dll	100	1.572.500	56	883.500	Belanja sesuai dengan harga yang dibutuhkan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	301.524.5 00	91%	277.573.7 37			
2.17.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase kelancaran proses surat menyurat; Persentase kelancaran pelaksanaan rutin kantor ; Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor; Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan kantor; Persentase penyediaan kebutuhan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor; Persentase jasa kebersihan kantor	100	4.530.000	86	3.871.000	Masih adanya belanja yang belum terealisasi	Belanja sesuai dengan kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase kelancaran proses surat menyurat; Persentase kelancaran pelaksanaan rutin kantor ; Persentase penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor; Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan kantor; Persentase penyediaan kebutuhan tenaga pendukung kelancaran operasional kantor; Persentase jasa kebersihan kantor	100	73.434.00 0	86	63.141.23 7	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena kelebihan pagu dalam penghitungan awal	Menghitung awal pagu menyesuaikan dengan kebutuhan dalam tiap bulan per tahun	
2.17.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor menunjang operasional kantor	100	39.260.50 0	98	38.281.50 0	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena menyesuaikan dengan kebutuhan	Perencanaan awal kebutuhan awal lebih lengkap	
2.17.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penyediaan jasa pelayanan kantor menunjang operasional kantor berupa honorarium non PNS	100	184.300.0 00	94	172.280.0 00	Teralisasi sesuai dengan kebutuhan	Teralisasi sesuai dengan kebutuhan	
2.17.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	504.964.0 00	87%	490.306.5 90			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas kantor Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas kantor; Persentase penyediaan operasional kedinasan; Persentase kebutuhan pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer kantor; Persentase terpeliharanya gedung / bangunan kantor; Persentase terpeliharanya taman kantor	100	89.122.50 0	92	82.033.24 0	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas kantor; Persentase penyediaan operasional kedinasan; Persentase kebutuhan pemeliharaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer kantor; Persentase terpeliharanya gedung / bangunan kantor; Persentase terpeliharanya taman kantor	100	12.584.50 0	56	7.027.850	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penyediaan pemeliharaan peralatan kantor lainnya	100	57.254.50 0	99	56.851.50 0	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeiharaan/rehabilitasi gedung kantor	100	346.002.5 00	100	344.394.0 00	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	
2.17.04			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI		100%	109.106.5 00	68%	74.588.50 0			
2.17.04 .2.01				Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	109.106.5 00	68%	74.588.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.04 .2.01.0 2				Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan Koperasi	100	109.106.5 00	68	74.588.50 0	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena adanya pandemi misalnya SPPD dalam daerah/luar	Adanya perencanaan awal yang dibutuhkan saat pandemi covid	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi
2.17.05			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN		100%	390.304.0 00	36%	320.540.9 60			
2.17.05 .2.01				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	390.304.0 00	36%	320.540.9 60			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.05 .2.01.0 1				Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah peserta Bimtek Pemasaran Hasil Usaha, Bimtek Akuntansi Dasar serta Bimtek Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia	230	390.304.000	83	320.540.960	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena adanya pandemi misalnya SPPD dalam daerah/luar	Adanya perencanaan awal yang dibutuhkan saat pandemi covid	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi
2.17.06			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI		100%	156.109.400	92%	144.832.900			
2.17.06 .2.01				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	156.109.400	92%	144.832.900			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.06 .2.01.0 1				Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi/Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi pendampingan dan penyusunan laporan keuangan	100	156.109.400	92	144.832.900	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena adanya pandemi misalnya SPPD dalam daerah/luar	Adanya perencanaan awal yang dibutuhkan saat pandemi covid	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru yang terdampak pandemi Covid - 19
2.17.07			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)		100%	1.376.620.500	55%	1.245.939.056			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.07 .2.01				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		100%	1.376.620 .500	55%	1.245.939 .056			
2.17.07 .2.01.0 3				Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UM yang sudah terfasilitasi Izin Usaha Mikronya	1000	54.326.70 0	68	36.868.00 0	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena adanya pandemi misalnya SPPD dalam daerah/luar	Adanya perencanaan awal yang dibutuhkan saat pandemi covid	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru yang terdampak pandemi Covid - 19



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.07 2.01.0 4				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Koperasi dan UM yang mendapatkan Pelatihan sektor makanan, minuman dan handycraft	40	68.852.00 0	27	46.897.00 0	Masih adanya belanja yang belum terealisasi karena adanya pandemi misalnya SPPD dalam daerah/luar	Adanya perencanaan awal yang dibutuhkan saat pandemi covid	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru yang terdampak pandemi Covid - 19
2.17.07 2.01.0 5				Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase penyediaan sarana prasarana untuk PLUT	100	1.253.441 .800	92	1.162.174 .056	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera memfungsikan bangunan dan menetapkan pengelolaan Pusat Layanan Usaha KUMKM (PLUT KUMKM).



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.08			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		100%	235.945.500	99%	233.920.500			
2.17.08.2.01				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		100%	235.945.500	99%	233.920.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.17.08 .2.01.0 1				Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Usaha Mikro yang mengikuti Bimtek dan mendapatkan Fasilitasi PIRT	100	235.945.5 00	99	233.920.5 00	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Sudah terealisasi sesuai kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru yang terdampak pandemi Covid - 19
2.10.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		100%	23.061.70 0	99%	22.985.60 0			
2.10.02 .2.01				Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	23.061.70 0	99%	22.985.60 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.10.02 2.01.0 1				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Izin Lokasi Yang Terlayani	100	23.061.70 0	99	22.985.60 0	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan fungsi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) agar terwujud kemudahan perijinan dengan menyederhakan pelayanan perijinan
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								
2.18.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.207.702 .670	83%	2.769.824 .401			
2.18.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.350.751 .173	84%	2.077.096 .346			
2.18.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	100	1.824.509 .173	73	1.578.809 .346	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pemenuhan administrasi dan operasionalisasi rutin kantor/kedinasan	100	526.242.000	95	498.287.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	353.517.000	90%	262.630.830			
2.18.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100	15.356.500	67	10.346.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik
2.18.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100	168.852.500	98	79.500.080	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat dan konsultasi dalam daerah	100	39.313.000	99	39.213.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.06.0 7				Penyediaan Bahan/Material	0	100	134.995.000	96	133.571.750		Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	215.566.215	67%	179.653.725			
2.18.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	100	7.152.007	100	7.150.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa telepon, website, air dan listrik yang digunakan	100	21.199.280	10	1.551.225	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik
2.18.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100	187.214.928	91	170.952.500	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik
2.18.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	282.868.282	90%	250.443.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	100	46.186.00 0	83	30.801.50 0	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	100	38.310.50 0	94	36.165.50 0	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.18.01 .2.09.1 1				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100	198.371.7 82	93	183.476.5 00	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.03			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		100%	65.721.200	99%	65.201.200			
2.18.03.2.01				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	65.721.200	99%	65.201.200			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.03 2.01.0 2				Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi Promosi	100	65.721.20 0	99	65.201.20 0	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali keberadaan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) dan membuat regulasi tentang CSR.
2.18.04			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		100%	643.084.8 06	99%	638.205.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.04 .2.01				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		100%	643.084.806	99%	638.205.000			
2.18.04 .2.01.0 1				Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah bulan dalam kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan SKPD	100	643.084.806	99	638.205.000	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan fungsi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) agar terwujud kemudahan perijinan dengan menyederhakan pelayanan perijinan



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.18.05			MENINGKATKAN INVESTASI DAN USAHA MIKRO DAERAH BERBASIS POTENSI LOKAL YANG BERDAMPAK PADA PENYERAPAN TENAGA KERJA.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		100%	20.605.600	100%	20.605.600			
2.18.05.2.01				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	20.605.600	100%	20.605.600			
2.18.05.2.01.01				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah pelaksanaan koordinasi antar lembaga	100	20.605.600	100	20.605.600	Kegiatan dilaksanakan dengan lancar tidak ada kendala	Perlu ditingkatkan penggunaan anggaran yang tepat sasaran	
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	8.335.872 .998	97%	5.087.782 .741			
2.19.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	58.495.50 0	100%	58.495.50 0			
2.19.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	2	19.498.50 0	2	19.498.50 0	-		
2.19.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan RAPBD SKPD yang disusun	8	16.000.00 0	8	16.000.00 0	-		
2.19.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA dan DPPA SKPD yang disusun	2	8.500.000	2	8.500.000	-	-	
2.19.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2	14.497.00 0	2	14.497.00 0	-		
2.19.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.995.601 .198	100%	3.194.980 .652			
2.19.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12	5.225.829 .198	12	2.492.065 .952	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran penunjang administrasi dan operasional rutin/ kedinasan	12	760.176.0 00	12	702.914.7 00	-	-	
2.19.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	9.596.000	1	0	-	-	
2.19.01 .2.06.0 7				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan penyediaan bahan/material	12	387.482.4 00	12	385.964.0 22	-	-	
2.19.01 .2.06.1 1				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berdasarkan Elektronik pada SKPD	Persentase pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD yang didukung	100	65.000.00 0	70	0	Sub kegiatan baru tidak dapat dilaksanakan dengan Perkada	Mengoptimalkan kinerja tanpa anggaran	
2.19.01 .2.07.0 5				Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebeleur yang dilaksanakan	2	82.398.50 0	2	80.217.50 0	-	-	
2.19.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	925.341.8 00	93%	805.802.6 88			
2.19.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	12	25.000.00 0	12	24.998.01 4	-	-	
2.19.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan logistik kantor	12	48.008.10 0	12	47.854.88 6	-	-	
2.19.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah material cetak dan penggandaan yang disediakan	2500	35.095.80 0	2260	35.036.73 6	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01 .2.06.0 8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya anggaran rapat dan perjalanan dinas ke luar daerah	12	364.755.500	12	311.949.030	Pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan 4	Mengoptimalkan kinerja sesuai anggaran	
2.19.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	425.068.200	100%	411.975.681			
2.19.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin yang Dilaksanakan	5	342.669.700	5	331.758.181	Pelaksanaan kegiatan menumpuk di triwulan 4	Mengoptimalkan kinerja sesuai anggaran	
2.19.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	781.390.800	94%	530.933.998			
2.19.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan penyediaan jasa surat menyurat	12	14.988.000	11	1.057.000	-	-	
2.19.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	89.992.800	12	22.596.726	-	-	
2.19.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan/ dipelihara	12	128.200.000	10	57.530.272	-	-	
2.19.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	13	548.210.000	13	449.750.000	-	-	
2.19.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	149.975.500	100%	144.089.722			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat	7	149.975.5 00	7	144.089.7 22	-	-	
2.19.02			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN		100%	1.184.822 .200	74%	630.923.7 00			
2.19.02 2.01				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		100%	1.184.822 .200	74%	630.923.7 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.02 .2.01.0 1				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda yang mengikuti Pemilihan Pemuda Pelopor	50	55.602.700	35	33.587.200	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.02 .2.01.0 9				Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah siswa yang mengikuti seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	1000	984.219.500	715	597.336.500	Kegiatan sudah terlaksana pada triwulan 2 dan 3	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.02 .2.01.0 2				Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	50	45.000.000	39	0	Payung hukum P-APBD berbentuk Perkada	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.02 .2.01.0 8				Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	50	100.000.000	38	0	Payung hukum P-APBD berbentuk Perkada	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.03			MENGEMBANGKANKAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAAGAN		100%	8.694.593.880	73%	3.170.084.009			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.03 .2.01				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		100%	182.125.000	100%	176.834.150			
2.19.03 .2.01.0 3				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah cabor yang mendapatkan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	30	182.125.000	30	176.834.150	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.03 .2.02				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	1.631.438.020	90%	824.126.100			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.03 2.02.0 1				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kompetisi olahraga yang diselenggarakan	6	1.136.846.500	6	710.800.100	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM	Mengoptimalkan kinerja	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kembali kejayaan dan prestasi olahraga ditingkat regional maupun nasional 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan anggaran dan program pembinaan prestasi untuk cabang olahraga potensial guna membantu promosi daerah.
2.19.03 2.02.0 3				Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah atlet lansia, difabel dan olahraga rekreasi yang mengikuti kegiatan olahraga	250	494.591.520	200	113.326.000	Kegiatan sudah terlaksana pada triwulan III	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.03 2.03				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi		100%	5.775.680.250	92%	2.169.123.759			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.03 .2.03.0 1				Seleksi Atlet Daerah	Jumlah atlet dan atlet pelajar yang mengikuti seleksi olahraga	600	836.940.200	600	488.024.459	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM (652 atlet)	Mengoptimalkan kinerja (652 atlet)	
2.19.03 .2.03.0 2				Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah cabor yang mengikuti pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga	1000	4.538.740.050	872	1.296.697.550	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.03 .2.03.0 4				Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah atlet, pelatih dan insan olahraga lainnya yang diberi penghargaan oleh pemerintah daerah	300	400.000.000	270	384.401.750	Pelaksanaan kegiatan kurang optimal karena PPKM	Melaksanakan kegiatan dengan menerapkan proses ketat	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan reward dan fasilitas untuk atlet berprestasi baik regional maupun nasional
2.19.03 .2.05				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		100%	1.105.350.610	13%	0			
2.19.03 .2.05.0 1				Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah kegiatan olahraga rekreasi/ masyarakat yang diselenggarakan	2	995.350.610	0	0	Dibatalkannya pelaksanaan kegiatan akibat pandemi covid-19	Mengoptimalkan kinerja	
2.19.03 .2.05.0 5				Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah bulan pelaksanaan senam kesegaran jasmani bagi karyawan dan masyarakat	12	110.000.000	3	0	Dibatalkannya pelaksanaan kegiatan akibat pandemi covid-19	Mengoptimalkan kinerja	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.19.04			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN		100%	957.412.0 00	100%	361.341.0 00			
2.19.04 .2.01				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		100%	957.412.0 00	100%	361.341.0 00			
2.19.04 .2.01.0 5				Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan	4	957.412.0 00	4	361.341.0 00	Kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan karena PPKM	Melaksanakan kegiatan dengan menerapkan proses ketat	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								
2.22.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	40.522.00 0	100%	38.307.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.22.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	40.522.00 0	100%	38.307.00 0			
2.22.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	40.522.00 0	12	38.307.00 0	-	-	
2.22.02			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		100%	971.060.0 00	100%	951.950.5 00			
2.22.02 .2.02				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	971.060.0 00	100%	951.950.5 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.22.02 .2.02.0 1				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Budaya dan Tradisi Lokal yang dibina Berhasil serta Even Kesenian Bertaraf Regional, Nasional dan Internasional	10	971.060.0 00	10	951.950.5 00	-	-	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jember. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk merealisasikan pembangunan fasilitas berupa gedung atau arena pertunjukan seni dan budaya. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.22.05			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA		100%	319.630.0 00	100%	319.505.0 00			
2.22.05 .2.02				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		100%	319.630.0 00	100%	319.505.0 00			
2.22.05 .2.02.0 1				Pelindungan Cagar Budaya	Prosentase bangunan cagar budaya yang dipugar	12	284.630.0 00	12	284.605.0 00	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merealisasikan museum daerah untuk mengumpulkan, merawat dan mengamankan benda•benda bersejarah sekaligus sebagai sarana wisata edukasi



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.22.05 .2.02.0 2				Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dikembangkan	440	35.000.000	440	34.900.000	-	-	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								
3.26.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	6.470.828.196	63%	6.474.223.453			
3.26.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.908.907.106	75%	3.651.857.545			
3.26.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan Tunjangan ASN	12	4.908.907.106	9	3.651.857.545	Alokasi tambahan penghasilan ASN yang seharusnya pada PAPBD 2021 bisa dilakukan pergeseran untuk kegiatan yang memerlukan , tidak diperbolehkan dilakukan pergeseran.	Merealisasikan sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	931.660.1 00	63%	563.138.5 22			
3.26.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	537.221.0 00	8	339.223.5 00	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai yang direncanakan, sisa anggaran berupa efisiensi.	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12	163.107.5 00	3	39.609.50 0	Logistik kantor diperuntukkan untuk makanan- minuman rapat dan makanan-minuman tamu, dikeluarkan keitka ada tamu dan rapat.	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	34.196.60 0	9	24.190.20 0	Dipergunakan untuk cetak karcis wisata/pencairan sesuai permintaan dari 4 (wisata) karena situasi dan kondisi.	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	197.135.000	10	160.115.322	Efisiensi	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.333.527.490	67%	2.139.702.646			
3.26.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	2.424.000	4	750.000	Kebutuhan surat menyurat menyesuaikan kebutuhannya	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa telp, listrik dan air,	12	322.407.490	8	201.852.646	Realisasi penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sesuai tagihan	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan	12	2.008.696.000	12	1.937.100.000	-	-	
3.26.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	296.733.500	54%	119.524.740			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah jenis Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan dan Kendaraan Dinas / Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	278.982.500	7	111.518.240	Realisasi pajak kendaraan dan PBB sesuai tagihan. Realisasi pemeliharaan kendaraan Dinas sesuai permohonan.	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12	17.751.000	6	8.006.500	Realisasi pemeliharaan peralatan mesin lain nya , sesuai dengan permohonan .	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
3.26.02			MENGEMBANGKANKAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		100%	272.000.000	100%	271.775.000			
3.26.02 2.03				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		100%	272.000.000	100%	271.775.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.02 2.03.0 3				Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya event pariwisata	1	256.000.0 00	1	255.775.0 00	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong terbentuknya desa wisata di beberapa desa yang potensial untuk menambah jumlah dan variasi destinasi wisata.
3.26.02 2.03.0 4				Pengadaan/Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	terlaksananya pengadaan/pemeliharaan/reh abilitasi sarana dan prasarana Pengembangan Destinasi Wisata Religi	1	16.000.00 0	1	16.000.00 0	-	-	
3.26.03			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		100%	524.454.0 00	100%	485.124.6 90			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.03 .2.01				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		100%	524.454.0 00	100%	485.124.6 90			
3.26.03 .2.01.0 2				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Partisipasi event pariwisata nasional	2	248.954.0 00	2	244.743.6 90	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan promosi dan perbaikan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.03 .2.01.0 4				Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya famtrip dengan Media Nasional	1	275.500.0 00	1	240.381.0 00	Efisiensi dan tidak terlaksankannya kegiatan beberapa kegiatan dikarenakan Kondisi pandemi	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lembagabiro perjalanan, pengelola destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.26.05			MENGEMBANG KAN PARIWISATA DAERAH YANG TERINTEGRASI DENGAN PELESTARIAN KEARIFAN BUDAYA LOKAL.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF		100%	635.091.0 00	100%	616.315.0 00			
3.26.05 .2.01				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		100%	425.571.0 00	100%	407.995.0 00			
3.26.05 .2.01.0 2				Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Average length of stay (LoS) wisatawan	12	425.571.0 00	12	407.995.0 00	-	-	
3.26.05 .2.02				Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif		100%	209.520.0 00	100%	208.320.0 00			
3.26.05 .2.02.0 1				Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan / bimtek SDM ekonomi kreatif	12	168.900.0 00	12	168.175.0 00	-	-	
3.26.05 .2.02.0 3				Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Standarisasi usaha dan sertifikasi bidang ekonomi kreatif	50	40.620.00 0	50	40.145.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								
2.23.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	4.912.935 .870	93%	4.413.322 .561			
2.23.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.061.174 .610	93%	2.644.672 .067			
2.23.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan ketersediaan Gaji dan tunjangan	12	2.919.294 .610	12	2.509.202 .067	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pendukung administrasi dan operasional yang tersedia	15	141.880.0 00	13	135.470.0 00	Menyesuaikan pejabat pengelola keuangan yang ada	Menghitung kembali anggaran sesuai dengan pejabat pengelola keuangan yang ada	
2.23.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	15.840.00 0	100%	15.487.50 0			
2.23.01 .2.05.0 5				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah kegiatan monev dan penilaian kinerja pegawai yang dilaksanakan	24	15.840.00 0	24	15.487.50 0	Nihil	Nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	254.526.2 50	91%	239.914.9 52			
2.23.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang disediakan	13	18.022.50 0	9	15.506.00 0	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan logistik kantor yang disediakan	3	117.684.2 50	3	111.433.2 50	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	6	16.317.50 0	6	15.008.90 0	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan yang diikuti	80	102.502.0 00	77	97.966.80 2	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	211.786.4 00	100%	190.739.1 80			
2.23.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan alat kantor, alat rumah tangga dan komputer	18	211.786.4 00	18	190.739.1 80	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	984.780.8 60	98%	978.104.7 02			
2.23.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bahan pendukung administrasi surat menyurat yang dibutuhkan	2	2.577.000	2	2.400.000	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersediaan listrik, air dan telpon	12	137.531.0 00	12	133.388.7 24	Nihil	Nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyedia jasa pelayanan umum yang tersedia	40	844.672.860	38	842.315.978	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	384.827.750	89%	344.404.160			
2.23.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	2	74.140.750	2	60.555.840	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang akan dilakukan pemeliharaan rutin/berkala	15	143.012.000	15	120.914.820	Nihil	Nihil	
2.23.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dirawat atau dipelihara	100	38.565.000	54	36.543.500	Menyesuaikan peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan	Menghitung kembali rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin	
2.23.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara/ direhab	1	129.110.000	1	126.390.000	Nihil	Nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.02			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		100%	974.139.000	57%	959.663.200			
2.23.02.2.01				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	677.274.000	54%	674.429.200			
2.23.02.2.01.04				Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan sekolah dan pesantren	21961	274.380.000	1950	272.479.000	Pelaksanaan di Sekolah masih dalam pembatasan kegiatan tatap muka sehingga sekolah membagi kegiatan antara offline dan online yang menyebabkan siswa yang masuk terbatas	Mempromosikan dan menginformasikan layanan online perpustakaan yang disediakan seperti website dan e-book	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.02 .2.01.0 9				Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan koleksi perpustakaan daerah yang ditingkatkan	3221	402.894.00	3221	401.950.200	Jumlah bahan koleksi perpustakaan daerah yang ditingkatkan 3600	Jumlah bahan koleksi perpustakaan daerah yang ditingkatkan 3600	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).
2.23.02 .2.02				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	296.865.00	60%	285.234.00			
2.23.02 .2.02.0 1				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah pengunjung perpustakaan masyarakat pedesaan	21961	20.000.000	4400	20.000.000	Pembatasan kegiatan masyarakat pada pusat keramaian sehingga pelayanan gelar pustaka kurang maksimal	Mempromosikan dan menginformasikan layanan online perpustakaan yang disediakan seperti website dan e-book	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.23.02 2.02.04				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan promosi perpustakaan yang diselenggarakan	10	276.865.00	10	265.234.00	Nihil	Nihil	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								
2.24.02			MENINGKATKAN KESETARAAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		100%	304.885.500	90%	293.830.600			
2.24.02 2.01				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		100%	107.300.000	82%	106.905.600			
2.24.02 2.01.01				Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah kegiatan layanan dan pengelolaan arsip dinamis	17	107.300.000	14	106.905.600	Menyesuaikan kegiatan dengan waktu yang ada	Merencanakan kembali kegiatan sesuai jadwal	
2.24.02 2.02				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota		100%	35.000.000	100%	34.900.000			
2.24.02 2.02.02				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah kegiatan layanan dan pengelolaan arsip statis	1	35.000.000	1	34.900.000	Nihil	Nihil	
2.24.02 2.03				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		100%	162.585.500	89%	152.025.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
2.24.02 .2.03.0 2				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan yang dibutuhkan	9	162.585.5 00	8	152.025.0 00	Nihil	Nihil	

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Urusan Pilihan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS PERIKANAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								
3.25.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	5.378.135 .687	88%	3.928.253 .226			
3.25.01 .2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	13.053.50 0	100%	5.480.900			
3.25.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	2	2.486.000	2	1.687.500	NIHIL	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1	2.649.500	1	1.385.000	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	1	2.649.500	1	1.443.400	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	1	1.979.500	1	0	Menggunakan sarana yang tersedia	Efisiensi	
3.25.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	1	1.979.500	1	965.000	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun	1	1.309.500	1	0	Menggunakan sarana yang tersedia	Efisiensi	
3.25.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.599.907 .387	100%	3.376.342 .461			
3.25.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14	3.621.375 .068	14	2.527.900 .061	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya tenaga pendukung administrasi dan operasional kantor yang tersedia selama 1 tahun	12	976.199.8 19	12	846.792.4 00	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	1	2.332.500	1	1.650.000	NIHIL	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01 .2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	3.453.600	100%	0			
3.25.01 .2.03.0 6				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase cakupan barang milik daerah yang dikelola penatausahaannya	100	3.453.600	100	0	Menggunakan sarana yang sudah ada	Efisiensi	
3.25.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	374.290.2 00	68%	281.733.0 90			
3.25.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	10.093.00 0	1	3.204.200	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	139.397.1 00	1	118.497.4 50	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun	1	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan selama 1 tahun	1	92.332.10 0	1	43.545.25 0	Kegiatan rapat atau pertemuan berkurang karena adanya pemberlakuan PPKM Pandemi Covid19	Efisiensi	
3.25.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan selama 1 tahun	1	27.140.00 0	1	25.940.00 0	NIHIL	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama 1 tahun	12	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD selama 1 tahun	12	105.328.000	9	90.546.190	Menyesuaikan undangan dan kebutuhan dinas dalam daerah	sesuai kebutuhan	
3.25.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	27.985.500	100%	26.620.000			
3.25.01 .2.07.0 5				Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	5	27.985.500	5	26.620.000	NIHIL	NIHIL	
3.25.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	84.259.000	80%	62.891.398			
3.25.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola selama 1 tahun	1500	4.353.000	1260	3.685.000	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	79.906.000	9	59.206.398	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	275.186.500	95%	175.185.377			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpelihara dan siap pakai	1	33.232.500	1	15.060.390	Belum ditunjuk pejabat definitif (Plt Kepala Dinas merangkap unit kerja lain)	Efisiensi	
3.25.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang terpelihara dan siap pakai	3	119.363.000	3	61.742.487	Berkurangnya kegiatan karena adanya pemberlakuan PPKM Pandemi covid19	Efisiensi	
3.25.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara dan siap pakai	35	50.117.000	30	41.250.000	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhab dan siap pakai	2	52.003.000	2	51.219.000	NIHIL	Efisiensi	
3.25.01 .2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhab dan siap pakai	17	20.471.000	15	5.913.500	NIHIL	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.03			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		100%	141.300.000	50%	139.155.000			
3.25.03.2.01				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100%	101.600.000	0%	99.855.000			
3.25.03.2.01.01				Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah laporan data produksi perikanan tangkap di Laut dan PUD	1	1.600.000	0	0	P-APBD	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.03 .2.01.0 2				Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha yang diadakan	0	100.000.000	0	99.855.000	NIHIL	Efisiensi	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan
3.25.03 .2.02				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	14.700.000	50%	14.700.000			
3.25.03 .2.02.0 1				Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Cakupan kelompok nelayan yang terakses pelayanan pembinaan dan pelatihan (%)	32	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.03 .2.02.0 2				Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan (KUB) yang dibentuk	10	14.700.000	10	14.700.000	Kegiatan terealisasi sesuai target	NIHIL	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.03 .2.03				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		100%	21.000.00 0	100%	20.600.00 0			
3.25.03 .2.03.0 1				Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pelaksanaan Lelang di TPI	0	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.03 .2.03.0 2				Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Prosentase nelayan yang melakukan lelang di TPI	70	21.000.00 0	70	20.600.00 0	NIHIL	Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memanfaatkan keberadaan TPI (tempat pelelangan ikan) dan Cold Storage milik daerah untuk menjaga stabilitas harga basil tangkapan nelayan.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.03 .2.06				Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.000.000	100%	4.000.000			
3.25.03 .2.06.0 1				Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah SOP Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan yang diterbitkan	0	4.000.000	0	4.000.000	Kegiatan terealisasi sesuai target	NIHIL	
3.25.04			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		100%	1.540.226 .580	78%	1.105.357 .800			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.04 2.02				Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil		100%	3.350.000	0%	3.350.000			
3.25.04 2.02.0 2				Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang dibentuk	5	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.04 2.02.0 4				Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang dilaksanakan	0	3.350.000	0	3.350.000	Kegiatan terealisasi sesuai target	NIHIL	
3.25.04 2.04				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		100%	1.536.876 .580	98%	1.102.007 .800			
3.25.04 2.04.0 1				Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan data produksi perikanan budidaya	1	100.000.0 00	1	99.700.00 0	NIHIL	Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember
3.25.04 2.04.0 2				Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Produksi Benih unggul yang disediakan	750000 00	626.417.0 00	678000 00	564.402.4 00	NIHIL	Efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.04 .2.04.0 3				Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan yang diserahkan kepada masyarakat	14	806.968.180	14	434.414.000	NIHIL	Efisiensi	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pelaku usaha di bidang perikanan air tawar.
3.25.04 .2.04.0 4				Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kelompok pembudidaya yang mendapat kegiatan monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	20	3.491.400	20	3.491.400	Kegiatan terealisasi sesuai target	NIHIL	
3.25.05			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		100%	224.608.500	100%	49.443.025			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.05 .2.01				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		100%	224.608.500	100%	49.443.025			
3.25.05 .2.01.0 1				Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan kegiatan IUU Fishing, destruktif pada usaha perikanan tangkap di wilayah sungai	1	224.608.500	1	49.443.025	Harga SSH terlalu tinggi	Efisiensi	
3.25.06			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		100%	69.410.600	67%	68.225.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.06 .2.01				Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil		100%	0	0%	0			
3.25.06 .2.01.0 1				Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	0	0	0	P-APBD	P-APBD	
3.25.06 .2.02				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		100%	16.005.00 0	100%	16.005.00 0			
3.25.06 .2.02.0 1				Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase UKM dan Poklaksar perikanan yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan produk olahan perikanan	100	16.005.00 0	100	16.005.00 0	Kegiatan terrealisasi sesuai target	NIHIL	
3.25.06 .2.03				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		100%	53.405.60 0	100%	52.220.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.25.06 2.03.0 1				Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produksi olahan perikanan yang dihasilkan UPI	5192	53.405.600	5192	52.220.000	Kegiatan terealisasi sesuai target	Efisiensi	
3.27.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	27.233.249.510	23%	22.352.223.033			
3.27.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	124.115.200	1%	73.149.980			
3.27.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	tersedianya dokumen	100	37.000.000	1	26.029.980	SPPD tidak terserap	akan melaksanakan kegiatan di Tingkat Prov dan Pusat	
3.27.01 2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	38.125.000	1	12.422.000	-		
3.27.01 2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	16.890.200	0	12.300.000	Nilai paguFotocopy dan jilid lebih besar dari harga realisasi	ada perubahan di DPA	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	100	12.000.00 0	1	7.268.000	-		
3.27.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	100	7.200.000	1	4.165.000	Harga pagu fotocopy dan jilid lebih besar dari realisasi	Perbaikan harga pagu di anggaran tahun depan	
3.27.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	12.900.00 0	1	10.965.00 0	harga pagu fotocopi dan jilid lebih besar dari realisasi	ada perubahan SSH di DPA tahun mendatang	
3.27.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	24.372.31 0.802	1%	20.016.76 5.714			
3.27.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	23.492.14 3.002	1	19.462.66 2.664	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	
3.27.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100	852.827.6 00	1	533.006.8 00	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	9.304.200	1	7.182.000	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	
3.27.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	18.036.000	1	13.914.250	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	
3.27.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	998.895.300	1%	810.341.800			
3.27.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	9.983.000	1	7.344.000	harga pagu komponen lebih tinggi daripada realisasi	akan dilakukan perbaikan di tahun mendatang	
3.27.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	575.794.500	1	511.726.370	Harga pagu laptop lebih besar dari realisasi	akan dilakukan perbaikan tahun 2022	
3.27.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	132.633.900	1	73.000.000	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran akan lebih tepat dan terencana	
3.27.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	260.177.500	1	207.122.430	Harga pagu Atk lebih besar dari realisasi	akan dilakukan perbaikan harga di tahun 2022	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	100	20.306.400	1	11.149.000	arga pagu lebih besar dari realisasi	akan dilakukan perbaikan tahun 2022	
3.27.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	0	0%	0			
3.27.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	100	0	0	0	salah input sub kegiatan	akan lebih hati-hati dalam penginputan SIPD	
3.27.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	743.157.808	100%	650.386.149			
3.27.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	4.500.000	1	4.150.000	-		
3.27.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa yang difasilitasi	1	97.199.904	1	80.755.850	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	
3.27.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	641.457.904	1	565.480.299	-		
3.27.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	994.770.400	67%	801.579.390			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	267.077.900	1	135.870.160	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	
3.27.01 .2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	648.820.500	1	624.809.230	-	-	
3.27.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat mesin yang dipelihara	1	78.872.000	0	40.900.000			
3.27.02			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		100%	27.918.322.300	25%	19.927.819.050			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.02 .2.01				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian		100%	27.918.32 2.300	25%	19.927.81 9.050			
3.27.02 .2.01.0 1				Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	190	25.044.40 9.500	1	18.804.55 5.050	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran akan lebih tepat dan terencana	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (Alsintan) 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong kelompok tani atau GAPOKTAN untuk memiliki dan mengembangkan sektor hilir yaitu penggilingan dan pengemasan hasil panen



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.02 .2.01.0 2				Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	tercukupinya kebutuhan pupuk untuk petani	2	2.873.912 .800	1	1.123.264 .000	gudang pengering tembakau tidak dapat dilaksanakan	akan dilaksanakan dilakukan tahun depan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus menjamin ketersediaan pupuk sepanjang tahun dan menjaga stabilitas harga panen
3.27.03			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		100%	28.416.22 5.228	19%	27.548.17 2.165			
3.27.03 .2.01				Pengembangan Prasarana Pertanian		100%	2.559.896 .600	50%	2.020.781 .700			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03 .2.01.0 2				Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1	623.349.8 00	1	600.000.0 00	-	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun lahan kebijakan penetapan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03 .2.01.0 3				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Terwujudnya pengawasan penggunaan sarana pertanian	2	1.936.546 .800	2	1.420.781 .700	-		Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun lahan kebijakan penetapan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri
3.27.03 .2.02				Pembangunan Prasarana Pertanian		100%	25.856.32 8.628	100%	25.527.39 0.465			
3.27.03 .2.02.0 1				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terpenuhinya kebutuhan air bagi petani	89	17.117.01 5.016	89	17.002.41 3.351	-	-	
3.27.03 .2.02.0 3				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	lancarnya transportasi hasil pertanian	57	8.119.529 .612	57	7.942.220 .052	-	-	
3.27.03 .2.02.0 8				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	jumlah gedung penyuluhan yang direhab	10	569.784.0 00	10	532.922.0 62	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.03 .2.02.0 9				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10	50.000.000	1	49.835.000	-	-	
3.27.05			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		100%	1.636.505.000	1%	712.073.550			
3.27.05 .2.01				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		100%	1.636.505.000	1%	712.073.550			
3.27.05 .2.01.0 1				Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terwujudnya pengendalian OPT	100	950.819.000	1	712.073.550	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran lebih tepat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.05 .2.01.0 5				Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terpenuhinya buruh tani untuk mengikuti asuransi	10000	685.686.0 00	0	0	quota di jember tidak ada alokasi dari pusat	ditunda sampai tahun 2022 dan mengajukan quota di tahun 2022	
3.27.06			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		100%	100.000.0 00	0%	38.400.00 0			
3.27.06 .2.01				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.000.0 00	0%	38.400.00 0			
3.27.06 .2.01.0 3				Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	1	100.000.0 00	0	38.400.00 0	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran akan lebih tepat dan terencana	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.07			MENINGKATKAN KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERATA ANTAR WILAYAH DAN MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		100%	4.521.952.650	1%	2.745.979.400			
3.27.07.2.01				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		100%	4.521.952.650	1%	2.745.979.400			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.07 .2.01.0 1				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Prosentase Kelembagaan penyuluhan yang meningkat kapasitasnya	100	1.247.552.050	1	739.421.900	Pembelanjaan bibit kelapa tidak dapat dilaksanakan	penganggaran lebih tepat dan terencana di tahun 2022	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus hadir dan melakukan pendampingan kepada petani melalui kelompok tani untuk melakukan langkah-langkah peningkatan produktifitas petani menuju petani sejahtera 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan
3.27.07 .2.01.0 2				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Prosentase Kelembagaan Petani Yang Meningkat kapasitasnya	100	432.000.000	0	0	SPPD tidak terserap	kan dilakukan perbaikan di tahun 2022	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.07 .2.01.0 3				Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana yang tersedia	100	1.236.199 .200	1	994.034.5 00	Kelebihan pagu anggaran	penganggaran akan lebih tepat dan terencana di tahun mendatang	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan edukasi dan pendampingan lebih intensif untuk mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk bersubsidi sekalius meningkatkan kesadaran penggunaan pupuk organik



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.27.07 2.01.0 5				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya sekolah lapang bagi kelompok tani	100	1.606.201.400	1	1.012.523.000	demonstrasi alat harus memakai transplanter tapi batal karena ada pandemi	-	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus hadir dan melakukan pendampingan kepada petani melalui kelompok tani untuk melakukan langkah-langkah peningkatan produktifitas petani menuju petani sejahtera
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								
3.30.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	34.875.221.986	100%	16.181.809.121			
3.30.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	24.996.800	100%	13.471.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah keg Penyusunan Renstra, RKPD dan Dok perencanaan lainnya	1	24.996.80 0	1	13.471.00 0	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	13.843.24 0.612	100%	7.440.596 .817			
3.30.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12	13.742.04 2.820	12	7.367.046 .817	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	101.197.7 92	1	73.550.00 0	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	15.344.16 2.198	100%	3.916.092 .750			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01 2.05.1 0				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	15.344.16 2.198	1	3.916.092 .750	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	663.372.300	100%	531.206.518			
3.30.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	1	5.978.000	1	3.154.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya penyediaan bahan logistik kantor	12	272.934.300	12	219.087.674	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	1	202.000.000	1	191.419.495	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pengadaan rapat- rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	182.460.000	12	117.545.349	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	4.081.660.186	100%	3.908.513.340			
3.30.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1	3.072.000	1	3.060.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		12	604.790.850	12	485.101.135	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	1	29.995.500	1	9.535.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12	3.443.801.836	12	3.410.817.205	sudah dilaksanakan (teralisasi 15)	dilaksanakan tepat waktu (teralisasi 15)	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	917.789.890	100%	371.928.696			
3.30.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	1	61.004.500	1	26.594.720	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	1	713.320.500	1	229.601.726	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	1	43.025.500	1	17.148.250	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1	100.439.390	1	98.584.000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.03			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		100%	2.004.538.194	100%	1.715.096.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.03 .2.01				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		100%	2.004.538 .194	100%	1.715.096 .500			
3.30.03 .2.01.0 1				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	0	1	191.671.0 00	1	164.312.5 00	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan terbentuknya BUMD Pasar guna mewujudkan manajemen pengelolaan pasar lebih profesional sekaligus sebagai penambah PAD



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.03 .2.01.0 2				Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan Pasar	2	1.812.867 .194	2	1.550.784 .000	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan terbentuknya BUMD Pasar guna mewujudkan manajemen pengelolaan pasar lebih profesional sekaligus sebagai penambah PAD
3.30.04			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100%	645.199.3 95	89%	212.045.0 35			
3.30.04 .2.01				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		100%	127.885.3 95	100%	65.187.33 5			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.04 .2.01.0 3				Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Operasionalisasi Gudang untuk Sistem Resi Gudang	100	127.885.3 95	100	65.187.33 5	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.04 .2.02				Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		100%	417.314.0 00	100%	144.720.2 00			
3.30.04 .2.02.0 2				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah bulan pelaksanaan survey harga dan stok barang pada pasar	12	141.506.0 00	12	52.917.60 0	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.04 .2.02.0 3				Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi diselenggarakannya pasar murah	100	275.808.0 00	100	91.802.60 0	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.30.04 .2.03				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	100.000.0 00	55%	2.137.500			
3.30.04 .2.03.0 3				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan peredaran barang dan jasa yg tidak sesuai ketentuan	11	100.000.0 00	6	2.137.500	karena adanya pembatasan mobilitas	dianggarkan tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.05			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		100%	56.450.000	100%	12.067.200			
3.30.05 .2.01				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		100%	56.450.000	100%	12.067.200			
3.30.05 .2.01.0 6				Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	0	9	56.450.000	9	12.067.200	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program sinergi pemasaran produk UMKM dengan pasar berjaringan



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.06			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		100%	450.092.100	100%	123.365.984			
3.30.06.2.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		100%	450.092.100	100%	123.365.984			
3.30.06.2.01.01				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah UTP yang melakukan Tera/Tera ulang selama satu tahun	100	450.092.100	100	123.365.984	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								
3.31.02			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		100%	1.464.254.500	100%	512.191.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.31.02 .2.01				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		100%	1.464.254 .500	100%	512.191.0 00			
3.31.02 .2.01.0 2				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	1	250.198.5 00	1	175.553.0 00	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.
3.31.02 .2.01.0 4				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	1	999.975.5 00	1	196.955.5 00	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.31.02 2.01.0 5				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah WUB Baru yang mengikuti Bimtek Kemampuan Teknologi Industri	4	214.080.500	4	139.682.500	sudah dilaksanakan	dilaksanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.

3.1.4 Pelaksanaan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN HUKUM		SEKRETARIAT DAERAH								
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1.517.869.000	85%	1.215.548.197			
4.01.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	42.688.000	77%	32.445.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya dokumen RKA SKPD	100	10.672.00 0	99	10.128.00 0	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD	100	10.672.00 0	61	6.548.000	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen DPA	100	10.672.00 0	52	5.573.000	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya dokumen perubahan DPA	100	10.672.00 0	96	10.196.00 0	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	639.593.5 00	85%	504.974.6 55			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya kebutuhan ASN, honor pengelola keuangan dan honor non ASN	100	639.593.5 00	85	504.974.6 55	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	835.587.5 00	96%	678.128.5 42			
4.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor guna menunjang kebutuhan ASN	100	431.450.0 00	97	417.274.4 00	sudah selesai	pekerjaan sudah diselesaikan	
4.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terciptanya kebersihan ruangan kantor	100	22.814.50 0	98	22.284.03 1	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah	100	381.323.0 00	93	238.570.1 11	tidak terserap semua	melakukan percepatan dalam realisasi serta efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	2.656.608.000	84%	1.769.039.000			
4.01.02.2.03				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum		100%	2.656.608.000	84%	1.769.039.000			
4.01.02.2.03.01				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terbentuknya produk hukum daerah, Perda, Perbup dan Kepbup	100	785.513.000	74	385.984.900	tidak terserap semua	efisiensi	
4.01.02.2.03.03				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terwujudnya Produk hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, lembaran daerah	100	132.100.000	82	96.450.000	tidak ada	percepatan dalam penyerapan anggaran serta efisiensi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02 .2.03.0 2				Fasilitasi Bantuan Hukum	Bantuan hukum masyarakat miskin, penyelesaian perkara dan buku penyuluhan hukum	100	1.738.995.000	97	1.286.604.100	belum melakukan verval ke penerima bankum	percepatan dalam penyerapan anggaran serta efisiensi	
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN PEMBANGUNAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.016.782.336	80%	2.434.439.345			
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	739.131.000	88%	587.395.404			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pengelolaan Keuangan	12	585.361.000	9	475.032.381	kurang maksimalnya dalam pelaksanaan kegiatan terutama pada mamir yang tidak dilaksanakan	perlunya untuk lebih memperhatikan dan lebih teliti dalam melaksanakan kegiatan	
4.01.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Penyampaian Laporan Bulanan (TEPRA)	12	153.770.000	12	112.363.023	Kurang nya untuk mengadakan Evaluasi pada OPD	Perlunya untuk mengadakan Evaluasi pada OPD	
4.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	85.460.000	50%	28.930.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	1	0	0	0	Anggaran dialihkan ke Badan Kepegawaian	Anggaran dialihkan ke Badan Kepegawaian	
4.01.01 .2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis	2	85.460.00 0	2	28.930.00 0	Persiapan penyelenggaraan Bimtek kurang memadai dikarenakan Pandemi Covid 19	Jika Pandemi Covid 19 sudah normal maka penyelenggaraa n Bimtek akan berjalan dengan semestinya	
4.01.01 .2.06 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	1.613.270 .040	75%	1.425.615 .897			
4.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	1.207.756 .400	12	1.133.749 .727	-	-	
4.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan-bahan lainnya, Belanja Alat Tulis Kantor, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Bahan Perabotan dan Alat Listrik	4	201.133.6 40	4	148.352.2 70	Ada beberapa Item Belanja yang melebihi pagu	lebih teliti dan memperhatikan harga belanja yang akan di laksanakan	
4.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Belanja Cetak dan Penggandaan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten dan OPD	12	203.100.0 00	12	143.513.9 00	kurang nya koordinasi yang akan di belanjakan	koordinasi belanja pada permintaan yang terkait	
4.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Bahan bacaan Majalah/Koran	1	1.280.000	0	0	Belanja Majalah/Koran dari Bagian Protokol	Tahun depan akan di hapus	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	512.826.7 96	100%	351.345.0 22			
4.01.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Belanja Benda Pos	12	2.625.000	12	2.550.000	-	-	
4.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Telepon dan Internet	12	37.300.00 0	12	29.811.06 4	Penggantian Sewa Internet	Pengalihan Sewa Internet	
4.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12	80.024.96 0	12	50.741.00 0	Lebihnya Realisasi Anggaran terhadap pagu anggaran	perlunya perencanaan penganggaran yang efisien	
4.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan umum dan Pembayaran Non ASN	12	392.876.8 36	12	268.242.9 58	Penyerapan Makanan dan Minuman Jamuan Tamuh maupun Rapat yang di sebabkan karena Covid 19	perencanaan tahun depan anggaran yang efisien	
4.01.01 .2.09				Penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	66.094.50 0	75%	41.153.02 2			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan	4	27.285.00 0	4	26.351.03 7	-	-	
4.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Servis Kendaraan Operasional	32	38.809.50 0	16	14.801.98 5	Kurangnya memperhatikan kendaraan yang dibawa oleh pegawai untuk melakukan servis rutin	Melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang dibawa oleh pegawai	
4.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	2.555.224 .000	83%	2.208.537 .996			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.03 .2.02				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan		100%	531.350.0 00	100%	474.277.6 80			
4.01.03 .2.02.0 1				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Penyusunan Buku Pedum, Standar Satuan Harga dan ASB	3	531.350.0 00	3	474.277.6 80	Perencanaan Cetak Buku terjadi kelebihan anggaran maka terjadi realisasi anggaran	Terjadi sisa anggaran yang cukup banyak pada realisasi anggaran	
4.01.03 .2.03				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		100%	2.023.874 .000	75%	1.734.260 .316			
4.01.03 .2.03.0 1				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pembayaran Honorarium Tim dan POKJA UKPBJ	12	1.452.844 .000	9	1.292.196 .000	Cetak dokumen UKPBJ menggunakan softcopy	Realisasi Anggaran (sisa anggaran) pada cetak dokumen UKPBJ	
4.01.03 .2.03.0 2				Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Pembayaran Honorarium Tim LPSE	12	571.030.0 00	9	442.064.3 16	Pelaksanaan dimulai triwulan II	percepatan pelaksanaan pada LPSE	
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN KESEJAHTER AAN RAKYAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1.303.977 .600	77%	855.491.4 17			
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	266.160.0 00	83%	234.920.0 00			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya pengelola keuangan dan barang	12	266.160.0 00	10	234.920.0 00	Adanya keterlambatan administrasi keuangan	Sudah terlaksana dengan baik	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	953.132.1 00	74%	592.359.7 00			
4.01.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya kebutuhan peralatan inventaris kantor dan perlengkapan kantor	100	206.446.9 00	66	136.700.0 00	Pencairan menyesuaikan kebutuhan kantor	Pencairan dilakukan sesuai kebutuhan	
4.01.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat dan bahan kebersihan Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	100	250.659.0 00	66	84.454.00 0	Pencairan menyesuaikan kebutuhan kantor	Pencairan dilakukan sesuai kebutuhan	
4.01.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya kebutuhan barang cetakan	100	17.549.20 0	74	6.725.000	Pencairan menyesuaikan kebutuhan kantor	Pencairan dilakukan sesuai kebutuhan	
4.01.01 2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	prosentasi rapat dan koordinasi yang diikuti tersedianya makanan dan minuman	100	478.477.0 00	90	364.480.7 00	-	-	
4.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	31.340.00 0	78%	14.804.50 0			
4.01.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya jasa surat menyurat selama satu tahun	100	18.140.00 0	75	5.833.000	Adanya keterlambatan administrasi keuangan	Sudah terlaksana dengan baik	
4.01.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Telepon dan Internet selama Satu Tahun	100	13.200.00 0	80	8.971.500	Adanya keterlambatan administrasi keuangan	Sudah terlaksana dengan baik	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	53.345.50 0	80%	13.407.21 7			
4.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	perawatan kendaraan dalam setahun	100	20.252.00 0	80	9.077.217	Adanya keterlambatan administrasi keuangan	Sudah terlaksana dengan baik	
4.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya alat kantor, rumah tangga dan komputer layak pakai	0	33.093.50 0	75	4.330.000	Pencairan menyesuaikan kebutuhan kantor	Pencairan dilakukan sesuai kebutuhan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	25.754.805.500	89%	22.669.970.500			
4.01.02.2.02				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	24.107.668.300	91%	21.354.026.700			
4.01.02.2.02.01				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Penyelenggaraan acara PHBI Penyelenggaraan kegiatan keagamaan di masyarakat Persentase Jamaah calon haji berangkat ke embarkasi Persentase jamaah haji pulang ke Kab. Jember	100	2.102.763.300	80	595.283.500	Ada beberapa kegiatan tidak terlaksana (Haji dan Manaqib karna pandemi Covid-19)	Melaksanakan kegiatan lainnya dengan pembatasan peserta dan patuhi prokes penecegahan covid-19	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02 .2.02.0 2				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan acara keagamaan	100	20.711.66 5.000	95	19.467.57 2.200	-	-	
4.01.02 .2.02.0 3				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Penyelenggaraan acara PHBI	100	1.293.240 .000	99	1.291.171 .000	-	-	
4.01.02 .2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah		100%	1.647.137 .200	80%	1.315.943 .800			
4.01.02 .2.04.0 1				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Acara seleksi MTQ Tingkat Kabupaten Partisipasi Kabupaten Jember pada MTQ Tingkat Provinsi	100	1.647.137 .200	80	1.315.943 .800	Kegiatan terlaksana pada kondisi pandemi Covid-19	Melaksanakan kegiatan dengan mematuhi proses pencegahan covid-19	
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN ORGANISASI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	852.296.6 29	76%	754.606.6 14			
4.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	24.868.00 0	100%	24.868.00 0			
4.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah PD yang mendapatkan pendampingan implementasi RB	72	12.434.00 0	72	12.434.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah pd yang mendapatkan pendampingan implementasi rb	72	12.434.000	72	12.434.000			
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	36.335.000	100%	36.333.000			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	12	36.335.000	12	36.333.000	-	-	
4.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
4.01.01 .2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek Implementasi Per UU	2	0	0	0	Anggaran tersebut dialihkan ke Sub Bagian lain	Kegiatan tidak terlaksana	
4.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	81.821.159	92%	77.744.650			
4.01.01 .2.06.0 7				Penyediaan Bahan/Material	jumlah penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	12	81.821.159	11	77.744.650	-	-	
4.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	24.754.970	92%	24.752.500			
4.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	administrasi dan operasional rutin kantor	12	24.754.970	11	24.752.500	-	-	
4.01.01 .2.13				Penataan Organisasi		100%	684.517.500	70%	590.908.464			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.13.0 1				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	jumlah pd yang telah menyusun anjab abk dan evjab sesuai pedoman	65	266.924.00	62	239.526.14	-	-	
4.01.01 .2.13.0 2				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	jumlah perangkat daerah yang di monev	10	232.599.500	9	205.745.500	-	-	
4.01.01 .2.13.0 3				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	jumlah dokumen yang tersusun	72	184.994.000	69	145.636.850	Belum Optimalnya Kinerja OPD dengan SDM yang baru	Dilaksanakannya a Desk terkait Kinerja OPD	
4.01.01 .2.13.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	jumlah dokumen laporan yang disusun	3	0	0	0			
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	5.109.919.702	90%	4.569.520.106			
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	500.120.000	100%	364.933.360			
4.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah macam ATK yang dibeli Jumlah materai yang dibeli Jumlah pegawai yang menerima honor dan lembur	100	500.120.000	100	364.933.360	-	-	
4.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	586.324.300	100%	513.705.820			
4.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	100	101.943.000	100	101.684.500	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah macam peralatan dan bahan kebersihan yang dibeli Jumlah rapat yang diadakan	100	294.770.500	100	237.966.520	-	-	
4.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah macam barang cetak dan penggandaan yang dibeli	100	165.640.800	100	154.355.800	-	-	
4.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah nama media cetak yang dibeli	100	23.970.000	100	19.699.000	-	-	
4.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	48.002.002	100%	46.000.000			
4.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Pemakaian telpon dan internet	100	48.002.002	100	46.000.000	-	-	
4.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	172.552.000	62%	163.173.792			
4.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Dinas Kabag yang Dirawat	100	37.477.000	95	37.477.000	-	-	
4.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	100	115.865.500	0	109.620.292	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	100	19.209.50 0	90	16.076.50 0	-	-	
4.01.01 .2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	3.802.921 .400	100%	3.481.707 .134			
4.01.01 .2.14.0 1				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Kegiatan yang mendapat Pelayanan Keprotokolan jumlah koordinasi dalam daerah jumlah rakor luar daerah yang diikuti	100	1.639.337 .500	100	1.318.123 .234	-	-	
4.01.01 .2.14.0 3				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah kegiatan bupati dan wakil bupati yang didokumentasikan melalui foto, video, buku, majalah dan media luar ruang (baliho, spanduk, x-banner dll)	100	2.163.583 .900	100	2.163.583 .900	-	-	
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN UMUM		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	90.912.29 7.675	83%	57.279.74 5.195			
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	22.393.88 5.753	100%	17.779.93 3.982			
4.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	100	19.664.40 0.753	100	15.645.89 7.440	Tidak Ada		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase biaya kebutuhan penunjang administrasi dan ops rutin kedinasan	100	2.729.485 .000	100	2.134.036 .542	Tidak ada		
4.01.01 .2.03				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	97.500.00 0	0%	0			
4.01.01 .2.03.0 2				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Prosentase Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100	97.500.00 0	0	0	Tidak Adanya Kerjasama dengan Pihak Asuransi	Mengharap Adanya Kerjasama	
4.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	725.350.0 00	95%	707.278.2 23			
4.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase biaya kebutuhan pakaian dinas OPD	100	725.350.0 00	95	707.278.2 23	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	21.667.72 4.595	79%	15.849.17 0.939			
4.01.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Prosentase biaya kebutuhan listrik dan penerangan kantor	100	184.990.0 00	100	184.961.5 83	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	7.002.624 .200	95	5.804.191 .490	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Prosentase Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100	603.746.1 00	70	167.118.8 47	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase Kebutuhan Bahan Pokok/Logistik	100	3.648.498 .145	100	3.446.316 .702	Tidak Ada		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prosentase biaya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100	925.214.400	70	270.145.531	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	12.000.000	0	0	Tidak Belanggan Surat Kabar/Majalah	Meningkatkan Kebutuhan Informasi Lewat Media Cetak	
4.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi	100	5.137.173.000	100	2.063.192.266	Tidak Ada		
4.01.01 .2.06.0 8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prosentase Kebutuhan Memfasilitasi Kunjungan Tamu	100	4.153.478.750	100	3.913.244.520	Tidak Ada		
4.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	13.801.769.160	74%	5.140.506.174			
4.01.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase Pelayanan Jasa Persuratan	100	387.491.500	80	133.663.706	Tidak Ada		
4.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Prosentase biaya jasa komunikasi, air dan listrik	100	2.717.987.160	100	2.124.210.484	Tidak Ada		
4.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	8.883.290.500	95	1.146.577.128	Tidak Ada		
4.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100	1.813.000.000	100	1.736.054.856	Tidak Ada		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	27.845.52 1.900	93%	15.281.98 4.661			
4.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase perawatan rutin/berkala mobil jabatan	100	1.204.920 .500	85	463.240.2 61	Tidak Ada		
4.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase perawatan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	1.774.862 .500	100	1.074.186 .311	Tidak Ada		
4.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Prosentase Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	675.487.0 00	95	213.751.3 77	Tidak Ada		
4.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase perawatan rumah jabatan/rumah dinas	100	24.064.64 5.400	95	13.475.28 8.025	Tidak Ada		
4.01.01 .2.09.0 5				Pemeliharaan Mebel	0	100	125.606.5 00	90	55.518.68 7	Tidak Ada		
4.01.01 .2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	2.803.474 .427	93%	1.531.815 .765			
4.01.01 .2.11.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	100	906.224.4 27	100	144.786.2 56	Tidak Ada		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.11.0 2				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Kebutuhan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	772.250.000	80	317.762.299	Tidak Ada		
4.01.01 .2.11.0 4				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase Kebutuhan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	1.125.000.000	100	1.069.267.210	Tidak Ada		
4.01.01 .2.12				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100%	1.577.071.840	90%	989.055.451			
4.01.01 .2.12.0 1				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	100	974.891.500	90	611.334.567	Tidak Ada		
4.01.01 .2.12.0 2				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Prosentase Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	100	602.180.340	90	377.720.884	Tidak Ada		
3.30.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		100%	193.297.500	73%	95.536.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
3.30.04 .2.03				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		100%	193.297.5 00	73%	95.536.50 0			
3.30.04 .2.03.0 3				Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pendistribusian pupuk bersubsidi	100	193.297.5 00	73	95.536.50 0	Perjalanan dinas dan rapat tidak semua dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya pandemi	Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring	
3.30.07			MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERBASIS POTENSI WILAYAH.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		100%	2.504.079 .500	100%	1.090.664 .200			
3.30.07 .2.01				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		100%	2.504.079 .500	100%	1.090.664 .200			
3.30.07 .2.01.0 1				Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pameran yang diikuti	4	2.504.079 .500	4	1.090.664 .200	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	340.599.000	85%	223.233.000			
4.01.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	23.638.500	100%	11.761.000			
4.01.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase tersajinya dokumen perencanaan Bagian Perekonomian dan SDA	5	17.330.000	5	9.030.000	Tidak ada masalah	Kegiatan dilaksanakan	
4.01.01.2.01.06				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	6	6.308.500	6	2.731.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	257.549.000	82%	169.610.500			
4.01.01.2.02.02				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Prosentase tertibnya pengadministrasian keuangan dan barang	100	257.549.000	82	169.610.500	Perjalanan dinas dan rapat tidak semua dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya pandemi	Beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring	
4.01.01.2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	5.000.000	100%	5.000.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	100	5.000.000	100	5.000.000	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	14.221.500	79%	11.240.500			
4.01.01 2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Prosentase terlaksananya kegiatan surat menyurat	100	14.221.500	79	11.240.500	Kebutuhan benda pos lebih sedikit dari perencanaan	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
4.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	40.190.000	68%	25.621.000			
4.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas operasional/lapangan	100	19.680.000	38	5.403.500	Tidak semua kendaraan dinas/operasional membutuhkan perawatan/ganti suku cadang	Hanya merealisasikan sesuai kebutuhan	
4.01.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya komputer, printer dan AC	100	20.510.000	98	20.217.500	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100%	25.501.276.778	59%	19.060.565.900			
4.01.03.2.01				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian		100%	971.284.000	52%	283.038.900			
4.01.03.2.01.01				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Prosentase terlaksananya koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	100	445.315.000	46	182.570.900	Perjalanan dinas dan rapat tidak semua dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya pandemi	Kegiatan dilaksanakan secara daring	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.03 .2.01.0 2				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai Prosentase dan terlaksananya rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah	100	500.729.0 00	19	77.113.00 0	Perjalanan dinas dan rapat tidak semua dapat dilaksanakan sehubungan dengan adanya pandemi	Kegiatan dilaksanakan secara daring	
4.01.03 .2.01.0 3				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Prosentase terlaksananya penagihan kredit mikro dan kecil	100	25.240.00 0	92	23.355.00 0	Tidak ada masalah	Kegiatan telah dilaksanakan	
4.01.03 .2.04				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam		100%	24.529.99 2.778	78%	18.777.52 7.000			
4.01.03 .2.04.0 1				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Prosentase terlaksananya ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai	100	24.529.99 2.778	78	18.777.52 7.000	Pelaksanaan penyaluran BLT	Data penerima BLT diverifikasi oleh Kecamatan dan Dispendukc apil	
4.02	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		SEKRETARIAT DPRD								
4.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	41.971.15 8.560	98%	37.025.67 7.777			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	142.452.800	100%	103.729.750			
4.02.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan OPD yang sistematis, akurat dan tepat waktu	3	40.900.800	3	33.541.850			
4.02.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	2	24.138.000	2	23.387.700			
4.02.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	0	1	24.138.000	1	16.047.750			
4.02.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	2	29.138.000	2	15.973.500			
4.02.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	1	24.138.000	1	14.778.950			
4.02.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.008.034.949	100%	3.777.239.639			
4.02.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	12	4.520.490.449	12	3.357.219.759			
4.02.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	12	487.544.500	12	420.019.880			
4.02.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	4.861.719.743	96%	2.773.299.570			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	12	150.135.500	12	121.396.000			
4.02.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	14	4.178.490.643	11	2.340.595.750	masih ada proses lelang	penyesuaian perencanaan di masa mendatang	
4.02.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	2	111.271.000	12	19.573.270			
4.02.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan dokumen kebutuhan kantor	12	193.875.000	12	171.827.500			
4.02.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	0	3876	20.799.600	3876	18.386.000			
4.02.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kunjungan kerja/rapat koordinasi/konsultasi SKPD ke luar daerah	12	207.148.000	12	101.521.050			
4.02.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.498.429.210	100%	980.315.206			
4.02.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyerat	0	12	67.330.000	12	26.264.000			
4.02.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	12	992.899.210	12	550.949.526			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	12	438.200.000	12	403.101.680			
4.02.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	2.940.150.171	100%	2.329.963.160			
4.02.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	9	498.114.500	9	371.773.290			
4.02.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	15	299.608.800	15	180.735.370			
4.02.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	12	523.188.460	12	325.153.300			
4.02.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1	1.619.238.411	1	1.452.301.200			
4.02.01 .2.09.0 5				Pemeliharaan Mebel	0	0	0	0	0			
4.02.01 .2.15				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		100%	27.360.303.887	91%	26.948.258.452			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.01 .2.15.0 1				Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	0	12	26.423.35 3.887	12	26.150.36 0.952			
4.02.01 .2.15.0 2				Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	0	250	786.950.0 00	250	683.897.5 00			
4.02.01 .2.15.0 3				Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	0	50	150.000.0 00	36	114.000.0 00			
4.02.01 .2.16				Layanan Administrasi DPRD		100%	160.067.8 00	100%	112.872.0 00			
4.02.01 .2.16.0 3				Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	0	12	160.067.8 00	12	112.872.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		100%	16.208.780.200	98%	11.761.917.233			
4.02.02.2.01				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	686.961.900	92%	266.403.140			
4.02.02.2.01.01				Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersusunnya Propemperda tahun berikutnya	2	56.046.400	2	35.858.210			
4.02.02.2.01.02				Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	0	5	243.629.500	5	89.222.370			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02 .2.01.0 4				Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersusunnya Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	4	387.286.0 00	3	141.322.5 60			
4.02.02 .2.02				Pembahasan Kebijakan Anggaran		100%	180.098.6 00	100%	155.528.8 50			
4.02.02 .2.02.0 2				Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	0	1	47.850.00 0	1	36.444.50 0			
4.02.02 .2.02.0 4				Pembahasan APBD Perubahan	0	1	65.294.00 0	1	54.969.50 0			
4.02.02 .2.02.0 6				Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	0	1	66.954.60 0	1	64.114.85 0			
4.02.02 .2.02.0 1				Pembahasan KUA dan PPAS	0	0	0	0	0			
4.02.02 .2.02.0 3				Pembahasan APBD	0	0	0	0	0			
4.02.02 .2.03				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		100%	488.521.4 00	100%	322.106.4 50			
4.02.02 .2.03.0 1				Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum oleh DPRD	12	74.992.00 0	12	61.561.75 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02 .2.03.0 2				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur oleh DPRD	12	73.948.00 0	12	21.240.00 0			
4.02.02 .2.03.0 3				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	0	12	73.528.80 0	12	50.364.75 0			
4.02.02 .2.03.0 4				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	0	12	73.234.00 0	12	27.404.10 0			
4.02.02 .2.03.0 5				Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	0	12	21.469.60 0	12	13.824.60 0			
4.02.02 .2.03.0 6				Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	1	20.563.00 0	1	19.868.50 0			
4.02.02 .2.03.0 7				Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	12	61.389.00 0	12	43.197.00 0			
4.02.02 .2.03.0 8				Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	0	1	89.397.00 0	1	84.645.75 0			
4.02.02 .2.04				Peningkatan Kapasitas DPRD		100%	629.743.3 00	100%	530.232.5 30			
4.02.02 .2.04.0 3				Publikasi dan Dokumentasi Dewan	0	12	156.349.5 00	12	84.147.08 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02 .2.04.0 4				Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	0	24	181.284.0 00	24	180.961.5 00			
4.02.02 .2.04.0 5				Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	0	42	213.999.8 00	42	212.733.4 50			
4.02.02 .2.04.0 6				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	0	12	53.336.00 0	12	39.740.20 0			
4.02.02 .2.04.0 7				Penyusunan Program Kerja DPRD	0	1	24.774.00 0	1	12.650.30 0			
4.02.02 .2.05				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		100%	1.511.768 .200	89%	1.225.746 .450			
4.02.02 .2.05.0 1				Kunjungan Kerja dalam Daerah	0	12	88.955.00 0	12	57.920.00 0			
4.02.02 .2.05.0 2				Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	0	1	77.864.00 0	1	23.738.25 0			
4.02.02 .2.05.0 3				Pelaksanaan Reses	0	3	1.344.949 .200	2	1.144.088 .200			
4.02.02 .2.06				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		100%	90.541.80 0	100%	5.534.730			
4.02.02 .2.06.0 1				Penyusunan Kode Etik DPRD	0	1	73.652.00 0	1	5.534.730			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.02.02 .2.06.0 2				Pengawasan Kode Etik DPRD	0	12	16.889.80 0	12	0	pengawasan dilaksanakan apabila ada pelanggaran terhadap kode etik dprd	penyesuaian perencanaan di masa mendatang	
4.02.02 .2.08				Fasilitasi Tugas DPRD		100%	12.621.14 5.000	100%	9.256.365 .083			
4.02.02 .2.08.0 1				Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	0	12	12.621.14 5.000	12	9.256.365 .083			
4.01.01	SEKRETARIAT DAERAH	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1.245.623 .775	91%	1.099.234 .088			
4.01.01 .2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	97.614.50 0	100%	88.282.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana strategis Bagian Tata Pemerintahan	1	54.199.00 0	1	46.397.00 0	Perda Renstra Kab.Jember baru disahkan pada bulan November 2021	Mempercepat penyusunan Renstra Berdasarkan dokumen RPJMD Kab Jember 2021- 2026	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indicator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	1	43.415.50 0	1	41.885.50 0	penyusunan APBD 2022 dimulai bulan Oktober	mempercepat penyusunan APBD 2022 melalui dokumen RKA OPD	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indicator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.
4.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	413.780.0 75	100%	384.461.0 81			
4.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan tersedianya anggaran tenaga penunjang administrasi dan operasional kantor Jumlah bulan tersedianya makanan/minuman rapat / karyawan Bagian Tata Pemerintahan	12	413.780.0 75	12	384.461.0 81			
4.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	437.354.7 00	100%	419.626.0 07			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersediannya perlengkapan kantor bagian tata pemerintahan	15	199.515.0 00	15	187.475.2 73	Keterbatasan barang dari penyedia	diversifikasi pilihan penyedia barang	
4.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya anggaran penggandaan dan barang cetakan	12	21.300.00 0	12	20.550.00 0			
4.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya anggaran perjalanan dinas luar daerah	2	185.064.0 00	12	184.970.2 34	Jadwal kegiatan terkendala pandemi	percepatan SPJ dan realisasi keuangan	
4.01.01 .2.06.0 8				kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan terfasilitasinya kunjungan tamu di Jember	12	31.475.70 0	12	26.630.50 0	menyesuaikan jumlah kunjungan tamu	memyesuaikan jumlah kunjungan tamu dan mempercepat spj serta pencairan keuangan	
4.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	55.010.00 0	100%	26.680.00 0			
4.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Bagian Tata Pemerintahan	15	55.010.00 0	15	26.680.00 0	Percepatan peng SPJ an	mempercepat SPJ dan adm keuangan	
4.01.01 .2.13				Penataan Organisasi		100%	196.647.5 00	100%	152.753.5 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.01 2.13.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen LPPD Kabupaten Jember Tahun 2020 sesuai Pedoman Kemendagri RI	1	196.647.5 00	1	152.753.5 00	Kecepatan peng SPJ an Kegiatan	mempercepat SPJ dan adm keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status Disclaimer menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.
4.01.01 2.14				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	45.217.00 0	50%	27.431.00 0			
4.01.01 2.14.0 2				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah olahraga integrasi Forkopimda yang dilaksanakan	45	0	0	0	Tidak dilaksanakan	pergeseran anggaran dan refocusing anggaran	
4.01.01 2.14.0 3				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah dokumen Memori Sertijab Bupati yang tersusun	1	45.217.00 0	1	27.431.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	1.571.622.500	100%	1.224.472.615			
4.01.02.2.01				Administrasi Tata Pemerintahan		100%	775.938.500	100%	713.395.398			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02 .2.01.0 1				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi kinerja kelurahan yang dilaksanakan Jumlah pelaksanaan inspeksi mendadak	2	74.720.00 0	2	62.305.00 0	SPJ perlu dipercepat	mempercepat SPJ dan adm keuangan	1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib meningkatkan clean government sebagaimana dijanjikan dalam RPJMD dengan kuantitas OPD yang sudah menjalankan Zona Integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani.
4.01.02 .2.01.0 2				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah laporan survey, pemetaan dan batas daerah yang terinventarisir	3	472.073.5 00	3	455.995.4 10			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02 .2.01.0 3				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	% Peningkatan kualitas pelaksanaan PATEN % Penyelenggaraan peringatan HUT RI dan Hari Jadi Provinsi di Kabupaten Jember	100	229.145.0 00	100	195.094.9 88	jadwal kegiatan mundur	mempercepat SPJ dan adm keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib meningkatkan clean government sebagaimana dijanjikan dalam RPJMD dengan kuantitas OPD yang sudah menjalankan Zona Integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani.
4.01.02 .2.04				Fasilitasi Kerjasama Daerah		100%	795.684.0 00	100%	511.077.2 17			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
4.01.02 2.04.0 1				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	% Penyusunan naskah kesepakatan dan perjanjian kerjasama yang terselesaikan	100	795.684.000	100	511.077.217	SPJ perlu dipercepat	mempercepat SPJ dan adm keuangan	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih profesional dan mampu menjalin kerjasama baik vertikal maupun horisontal.

3.1.5 Pelaksanaan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan		Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01	PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		PERENCANAAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	7.512.289 .594	88%	5.365.896 .986			
5.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	163.744.4 00	80%	101.398.5 00			
5.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	2	39.628.40 0	2	24.502.00 0			
5.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	2	57.506.00 0	2	33.135.50 0			
5.01.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	1	24.272.00 0	1	22.093.00 0			
5.01.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	2	22.614.00 0	0	0	DPA Bappeda TA 2022 ditetapkan lewat Tahun Anggaran 2021, sehingga tidak dilakukan pencairan anggaran	Penyusunan DPA Bappeda dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan	
5.01.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan Bappeda yang telah disusun	1	24.724.00 0	1	21.668.00 0			
5.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	4.941.579 .965	63%	3.633.992 .153			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan bagi PNS	14	4.679.673.965	14	3.439.312.153	Dialokasikan untuk pembayaran Gaaji dan tunjangan ASN	Gaji dan TPP dibayarkan pada tiap bulannya	
5.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	17	710.000	1	0	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulangan COVID-19	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulanga n COVID-19	
5.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pemenuhan penunjang administrasi dan operasional kantor	12	201.200.000	10	194.680.000	Dialokasikan untuk pembayaran honor pejabat penatausahaan	Honor pejabat penatausahaan dibayarkan pada tiap bulan	
5.01.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	0	29.996.000	0	0	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulangan COVID-19	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulanga n COVID-19	
5.01.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan prognosis yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman	0	30.000.000	0	0	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulangan COVID-19	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulanga n COVID-19	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	71.265.50 0	70%	36.520.00 0			
5.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase tingkat pemenuhan ketersediaan pakaian seragam olah raga dan pakaian seragam korpri	100	37.924.50 0	100	34.250.00 0			
5.01.01 .2.05.0 9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur Bappeda yang mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan	5	33.341.00 0	2	2.270.000	Rendahnya animo ASN Bappeda untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan karena keterbatasan waktu dan peningkatan beban kerja	Secara aktif mencari informasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi	
5.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	454.159.0 00	100%	284.447.0 73			
5.01.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	1	24.994.50 0	1	9.968.500			
5.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor Jumlah paket penyediaan peralatan bahan kebersihan	1	71.246.50 0	1	55.800.20 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan cetakan dan penggandaan dokumen	100	88.982.000	100	58.504.000			
5.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	18.000.000	12	6.252.000			
5.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket pemenuhan perjalanan dinas ASN	1	250.936.000	1	153.922.373			
5.01.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	505.899.400	100%	372.803.600			
5.01.01 .2.07.0 5				Pengadaan Mebel	Jumlah paket penyediaan mebeleur	1	77.749.500	1	38.767.300			
5.01.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket tersedianya peralatan alat kantor, alat rumah tangga, komputer, dll Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	428.149.900	100	334.036.300			
5.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	926.633.829	100%	686.564.585			
5.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran untuk kebutuhan listrik, air, internet dan telekomunikasi	12	128.301.329	12	34.513.225			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01 2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan peringatan dan upacara hari besar nasional	0	25.005.000	0	0	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulangan COVID-19	Anggaran sub kegiatan ini direfocusing untuk penganggaran penanggulan COVID-19	
5.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah ketersediaan makanan dan minuman Jumlah pembayaran honor tenaga pendukung kelancaran operasional kantor	13	773.327.500	13	652.051.360	Dilalokasikan untuk pembayaran honor tenaga NON ASN tiap bulannya	Segera dilakukan proses pencairan anggaran tiap bulan untuk pembayaran honor NON ASN	
5.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	444.007.500	100%	250.171.075			
5.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan mobil jabatan	100	42.173.000	100	32.539.475			
5.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional	100	263.965.000	100	119.350.100			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan rutin alat kantor, alat rumah tangga dan komputer	1	77.687.50 0	1	42.055.00 0			
5.01.01 .2.09.1 1				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya pendukung gedung kantor Persentase tingkat pemenuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	100	60.182.00 0	100	56.226.50 0			
5.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH		100%	3.172.015 .400	86%	1.772.276 .100			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02 .2.01				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		100%	2.255.481 .200	100%	1.173.711 .800			
5.01.02 .2.01.0 1				Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Persentase rencana FGD yang telah dilaksanakan	0	207.029.2 30	0	0	di PAK (Hapus)	di PAK (Hapus)	
5.01.02 .2.01.0 3				Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka penyusunan RPJMD Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD	2	131.211.0 00	2	16.866.00 0	Tidak dapat mencairkan anggaran untuk pelaksanaan forum konsultasi publik, karena dilakukan secara daring dan masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Anggaran dikembalikan ke daerah	
5.01.02 .2.01.0 4				Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka penyusunan RPJMD Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPD	2	114.226.5 00	2	17.400.00 0	Tidak dapat mencairkan anggaran untuk pelaksanaan forum perangkat daerah, karena dilakukan secara daring dan masih dalam kondisi pandemi COVID-19	Anggaran dikembalikan ke daerah	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02 .2.01.0 5				Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan dalam rangka penyusunan RPJMD Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPd	2	330.076.7 00	2	77.226.30 0	Dialokasikan untuk pencairan anggaran Honor	Dialokasikan untuk pencairan anggaran Honor	
5.01.02 .2.01.0 6				Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RKPd	32	184.170.6 00	32	15.250.00 0			
5.01.02 .2.01.0 7				Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rancangan KUA/PPAS APBD/Perubahan APBD yang dihasilkan Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RKPd/Perubahan RKPd terhadap pedoman Persentase kesesuaian tahapan penyusunan RPJMD Kabupaten Jember terhadap pedoman	100	1.288.767 .170	100	1.046.969 .500			
5.01.02 .2.02				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	223.564.5 00	50%	136.929.6 00			
5.01.02 .2.02.0 1				Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD yang telah memiliki data SIPD lengkap dan update	100	72.290.00 0	100	45.718.70 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02 .2.02.0 3				Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah buku profil daerah yang disusun	150	151.274.5 00	0	91.210.90 0		Secara keseluruhan tidak ada permasalahan yang dihadapi, kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dimana sudah 100% untuk pembuatan Website Profil (untuk realisasi buku yang seharusnya 150 Buku dialihkan ke pembuatan website profil)	
5.01.02 .2.03				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	692.969.7 00	90%	461.634.7 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.02 2.03.0 3				Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Laporan Monitoring SDGs Persentase Laporan Pemerintah Daerah dan/atau atasan yang difasilitasi Persentase PD yang telah melakukan pelaporan pengendalian dan evaluasi sesuai pedoman Persentase PD yang telah menyusun dan mengumpulkan LKPJ PD	100	692.969.7 00	90	461.634.7 00			
5.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100%	3.049.967 .000	100%	1.682.663 .161			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.01				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	1.209.092 .500	100%	413.559.2 40			
5.01.03 .2.01.0 3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah PD mitra bidang pemerintahan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	14	206.850.0 00	14	47.531.70 0	Pelaksanaan Monitoring hanya melibatkan 14 OPD dengan waktu hanya 8 hari perlaporan semester dan pelaksanaan FGD Review Monitoring hanya dilakukan 2 jam perOPD	Kedepan akan dtambahkan monitoring di 31 Kecamatan dengan menambah jadwal movev	
5.01.03 .2.01.0 4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang Pemerintahan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	183.307.5 00	100	145.378.7 50	Pandemi Covid 19 masih berjalan sehingga rakor dengan pemerintah provinsi dan pusat masih menggunakan daring	Diharapkan kedepan covid 19 sudah berakhir sehingga pelaksanaan rakor dengan Pemerintah pusat, provinsi dan mitra kerja OPD dapat dilaksanakan melalui Luring	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 2.01.0 7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah PD mitra bidang kependudukan yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD mitra bidang pembangunan sumber daya manusia yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD mitra bidang pembangunan sumber daya manusia yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	13	247.799.00	13	48.856.290	Pelaksanaan Monitoring hanya melibatkan 14 OPD dengan waktu hanya 8 hari perlaporan semester dan pelaksanaan FGD Review Monitoring hanya dilakukan 2 jam perOPD	Kedepan akan dtambahkan monitoring di 31 Kecamatan dengan menambah jadwal monev	
5.01.03 2.01.0 8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang kependudukan yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Persentase kebijakan pemerintah atasan Bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	571.136.00	100	171.792.500	Pandemi Covid 19 masih berjalan sehingga rakor dengan pemerintah provinsi dan pusat masih menggunakan daring	Diharapkan kedepan covid 19 sudah berakhir sehingga pelaksanaan rakor dengan Pemerintah pusat, provinsi dan mitra kerja OPD dapat dilaksanakan melalui Luring	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.02				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		100%	911.185.000	100%	659.383.850			
5.01.03 .2.02.0 3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah PD Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Industri yang dimonitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang telah di Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan	100	150.420.000	100	86.058.300	Faktor pada keterlambatan penyerapan anggaran a. Faktor perencanaan anggaran terutapa pada pengadaan barang dan jasa b. Hambatan regulasi dan birokrasi pemerintahan c. Faktor kondisi kerja d. Faktor SDM ASN e. Pengaruh Kegiatan keuangan dan pencairan anggaran pemerintah	1. Meningkatkan Kualitas kegiatan perencanaan anggaran 2. Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi 3. meningkatkan kualitas SDM ASN	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.02.0 4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Persentase Kebijakan Pemerintah Atasan Bidang Industri Peragangan, Koperasi, dan Pengembangan Dunia Usaha yang di Fasilitasi dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan Persentase Kebijakan Pemerintah Atasan Bidang Pengembangan Investasi, Pariwisata dan Kebudayaan yang difasilitasi dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan	100	423.237.5 00	100	379.103.5 50	a. Program dan kegiatan baru pada OPD dan dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut membutuhkan penyesuaian b. Terdapat dokumen pelaksanaan anggaran yang amsih mmebutuhkan proses revisi c. Perubahan alokasi belanja	1. Meningkatkan Kualitas kegiatan perencanaan anggaran 2. Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi 3. meningkatkan kualitas SDM ASN	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.02.0 7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah PD Bidang Pertanian dan Pangan yang telah di Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan	3	145.425.0 00	3	78.419.45 0	a. Program dan kegiatan baru pada OPD dan dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut membutuhkan penyesuaian b. Terdapat dokumen pelaksanaan anggaran yang amsih mmebutuhkan proses revisi c. Perubahan alokasi belanja	1. Meningkatkan Kualitas kegiatan perencanaan anggaran 2. Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi 3. meningkatkan kualitas SDM ASN	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.02.0 8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Persentase Kebijakan Pemerintah Atasan Bidang Pertanian dan Pangan yang difasilitasi dalam Rangka Pencapaian Target Pembangunan	100	192.102.5 00	100	115.802.5 50	a. Program dan kegiatan baru pada OPD dan dalam pelaksanaannya program dan kegiatan tersebut membutuhkan penyesuaian b. Terdapat dokumen pelaksanaan anggaran yang amsih mmebutuhkan proses revisi c. Perubahan alokasi belanja	1. Meningkatkan Kualitas kegiatan perencanaan anggaran 2. Penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi 3. meningkatkan kualitas SDM ASN	
5.01.03 .2.03				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100%	929.689.5 00	100%	609.720.0 71			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 2.03.0 2				Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Daerah Irigasi atau DI yang Mendapatkan Pemberdayaan GHIPPA Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	9	439.730.0 00	9	269.793.4 64			
5.01.03 2.03.0 3				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah PD bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Jumlah PD bidang transportasi yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	5	92.716.00 0	5	46.132.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.01.03 .2.03.0 4				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang perumahan permukiman, sanitasi dan air bersih yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang transportasi yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	195.382.000	100	163.298.349			
5.01.03 .2.03.0 7				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah PD bidang pengembangan lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang di Monitoring dan evaluasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	2	60.823.000	2	12.973.800			
5.01.03 .2.03.0 8				Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Persentase kebijakan pemerintah atasan bidang lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang difasilitasi dalam rangka pencapaian target pembangunan	100	141.038.500	100	117.521.958			
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.05.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100%	15.922.358.888	100%	15.414.856.500			
5.05.02.2.02				Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan		100%	2.265.199.610	100%	2.241.526.000			
5.05.02.2.02.05				Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	513.997.134	100	512.136.400	--	--	
5.05.02.2.02.10				Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	1.751.202.476	100	1.729.389.600	--	--	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.05.02 .2.03				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		100%	13.657.15 9.278	100%	13.173.33 0.500			
5.05.02 .2.03.0 2				Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	1.615.480 .500	100	1.509.930 .100			
5.05.02 .2.03.0 3				Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	557.900.0 00	100	539.008.6 00	--	--	
5.05.02 .2.03.0 4				Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	2.897.104 .708	100	2.569.478 .400	--	--	
5.05.02 .2.03.0 5				Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	1.353.263 .500	100	1.348.206 .200	--	--	
5.05.02 .2.03.0 7				Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	304.043.0 00	100	299.989.4 00	--	--	
5.05.02 .2.03.0 9				Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	2.158.106 .002	100	2.149.604 .300	--	--	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.05.02 .2.03.1 0				Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	547.689.000	100	546.512.800	--	--	
5.05.02 .2.03.1 2				Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Persentase Rencana Kajian Bidang Pembangunan Daerah yang dilaksanakan	100	4.223.572.568	100	4.210.600.700	--	--	
5.02	KEUANGAN	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH - SKPD		KEUANGAN								
5.02.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	165.380.294.031	99%	165.379.847.031			
5.02.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	291.833.800	100%	291.833.800			
5.02.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, RKPD, Dan Dokumen Perencanaan Lainnya	4	17.061.000	4	17.061.000	-	-	
5.02.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD & PPKD yang sesuai ketentuan	1	76.337.000	1	76.337.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.01.0 3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	54.247.300	1	54.247.300	-	-	
5.02.01 .2.01.0 4				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang terselesaikan	1	16.611.000	1	16.611.000	-	-	
5.02.01 .2.01.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD yang terselesaikan	1	23.991.000	1	23.991.000	-	-	
5.02.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Kinerja OPD	3	103.586.500	3	103.586.500	-	-	
5.02.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	160.302.402.331	100%	160.302.402.331			
5.02.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan dalam mencukupi Gaji, dan asuransi ASN	12	160.302.402.331	12	160.302.402.331	-	-	
5.02.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	127.900.000	100%	127.900.000			
5.02.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah karyawan yang dipenuhi kebutuhan pakaian dinas guna menunjang disiplin sumber daya aparatur	70	127.900.000	70	127.900.000	-	-	
5.02.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	551.096.620	100%	550.649.620			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Dalam mengganti alat listrik kantor yang kurang baik	12	17.886.000	12	17.439.000	-	-	
5.02.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan dalam memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai	12	250.893.120	12	250.893.120	-	-	
5.02.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Cetak Penggandaan	10	59.987.500	10	59.987.500	-	-	
5.02.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan dalam mengikuti Rapat Rapat Koordinasi dan Kebutuhan Konsultasi Ke Luar Daerah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	12	222.330.000	12	222.330.000	-	-	
5.02.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	400.000.000	89%	400.000.000			
5.02.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Belanja Modal	46	400.000.000	41	400.000.000	-	-	
5.02.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	3.269.650.280	100%	3.269.650.280			
5.02.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan dalam mencukupi kebutuhan jasa surat menyurat	12	9.984.000	12	9.984.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan dalam memenuhi Kebutuhan Internet, Telpon dan Faksimili serta Sumber Daya Air dan Listrik yang memadai sebagai sarana pendukung operasional kantor	12	206.400.0 00	12	206.400.0 00	-	-	
5.02.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan dalam memenuhi jasa perlengkapan Peralatan, perbaikan dan pemenuhan perlengkapan Bahan Kebersihan kantor	12	623.998.8 60	12	623.998.8 60	-	-	
5.02.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Bulan dalam mencukupi kebutuhangaji Non PNS, Honorarium Pengelola Keuangan, Jaminan Ketenagakerjaan Non PNS, dll	12	2.429.267 .420	12	2.429.267 .420	-	-	
5.02.01 .2.09 1				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	437.411.0 00	93%	437.411.0 00			
5.02.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan dengan keadaan baik	1	38.800.00 0	1	38.800.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional kantor yang terpelihara dengan baik	37	398.611.0 00	32	398.611.0 00	Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai output yang dihasilkan	Kegiatan akan dilaksanakan secara berkala dan tertib	
5.02.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0			
5.02.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	567.442.2 14.730	94%	567.337.0 85.980			
5.02.02 .2.01				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100%	4.344.837 .000	91%	4.295.247 .000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02 .2.01.0 3				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Buku RKA SKPD OPD yang sesuai ketentuan	72	353.500.00	72	303.910.00	-	-	
5.02.02 .2.01.0 4				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Buku RKA SKPD Perubahan OPD yang sesuai ketentuan	72	343.786.00	72	343.786.00	-	-	
5.02.02 .2.01.0 5				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Buku RKA SKPD Perubahan OPD yang sesuai ketentuan	72	251.000.00	72	251.000.00	-	-	
5.02.02 .2.01.0 6				Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Buku DPA- SKPD OPD yang sesuai ketentuan	72	251.000.00	72	251.000.00	-	--	
5.02.02 .2.01.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Buku Penjabaran APBD yang sesuai aturan yang berlaku	1	350.670.00	1	350.670.00	-	-	
5.02.02 .2.01.0 8				Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Buku Penetapan APBD yang sesuai aturan yang berlaku	1	375.270.00	100	375.270.00	-	-	
5.02.02 .2.01.0 9				Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Buku aturan tentang regulasi kebijakan bidang anggaran yang sesuai aturan	1	374.463.00	1	374.463.00			
5.02.02 .2.01.1 0				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Persentase realisasi pendapatan yang valid	100	79.038.000	100	79.038.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02 .2.01.1 1				Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Persentase Perencanaan Belanja Daerah sesuai Porsi Anggaran	100	234.170.0 00	100	234.170.0 00			
5.02.02 .2.01.1 2				Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan		0	0	0	0	-	-	
5.02.02 .2.01.1 3				Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melakukan penganggaran sesuai dengan aturan yang berlaku	72	1.296.874 .000	72	1.296.874 .000	-	-	
5.02.02 .2.01.0 1				Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA PPAS yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tepat waktu	1	435.066.0 00	1	435.066.0 00	-	-	
5.02.02 .2.02				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100%	1.893.055 .500	95%	1.837.516 .750			
5.02.02 .2.02.0 5				Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Persentase pengajuan dokumen Pencairan PPKD sesuai aturan	100	427.507.5 00	80	427.507.5 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02 .02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah pengajuan dokumen Pencairan SKPD sesuai aturan	5	9.180.000	5	9.180.000	-	-	
5.02.02 .02.0 9				Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Persentase pengajuan dokumen Pencairan PPKD sesuai aturan	100	1.234.213.000	100	1.234.213.000	-	-	
5.02.02 .02.1 1				Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan dalam melayani perbendaharaan dan gaji kepada SKPD se-Kabupaten Jember	12	222.155.000	12	166.616.250			
5.02.02 .03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	2.556.493.400	100%	2.556.493.400			
5.02.02 .03.0 3				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Data Laporan dan Realisasi Anggaran OPD Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Prognosis	1	479.800.000	1	479.800.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02 .2.03.0 4				Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Data Laporan OPD dan BLUD Kabupaten Jember	75	1.113.305.400	75	1.113.305.400	-	-	
5.02.02 .2.03.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020	2	73.006.000	2	73.006.000	-	-	
5.02.02 .2.03.0 9				Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan akuntansi Pemerintah yang terbitkan	1	167.370.000	1	167.370.000	-	-	
5.02.02 .2.03.1 0				Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	1	283.009.000	1	283.009.000	-	-	
5.02.02 .2.03.1 1				Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan OPD yang bina	72	440.003.000	72	440.003.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02 .2.04				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100%	558.647.8 28.830	90%	558.647.8 28.830			
5.02.02 .2.04.0 8				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Desa yang menerima penyaluran DD ,ADD, serta jaminan kesehatan perangkat desa se Kab.Jember	226	496.225.0 66.596	226	496.225.0 66.596	-	-	
5.02.02 .2.04.0 9				Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase penanganan kedaruratan secara baik	100	40.357.56 5.574	70	40.357.56 5.574			
5.02.02 .2.04.1 0				Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang mendapat penyaluran Dana Bagi Hasil yang sesuai dengan aturan yang berlaku	226	22.065.19 6.660	226	22.065.19 6.660			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		100%	16.080.787.906	95%	15.058.241.142			
5.02.03.2.01				Pengelolaan Barang Milik Daerah		100%	16.080.787.906	95%	15.058.241.142			
5.02.03.2.01.02				Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan daftar kebutuhan Barang Milik Daerah/Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan daftar kebutuhan Barang Milik Daerah	2	34.562.000	2	34.562.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.03 .2.01.0 3				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah OPD yang menyusun Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Barang Milik daerah	72	118.250.500	72	118.250.500	-	-	
5.02.03 .2.01.0 4				Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Perbup Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5	106.724.000	3	106.724.000	-	-	
5.02.03 .2.01.0 5				Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terawat	100	82.099.500	100	82.099.500	-	-	
5.02.03 .2.01.0 6				Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Kondisi BMD Pemkab. Jember	1	293.950.500	1	293.950.500	-	-	
5.02.03 .2.01.0 7				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Sertifikat Tanah Aset yang sudah diterbitkan	1000	7.612.632.300	700	7.612.632.300	-	-	
5.02.03 .2.01.0 8				Penilaian Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang dapat dinilai untuk Tujuan tertentu	100	9.736.500	100	9.736.500	-	-	
5.02.03 .2.01.0 9				Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam keadaan baik dan sesuai ketentuan	100	110.324.500	100	110.324.500	-	-	
5.02.03 .2.01.1 0				Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Brang Milik daerah yang bergerak ataupun yang tidak bergerak terawat secara baik	100	6.641.644.406	100	5.623.497.642	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.03 .2.01.1 1				Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen OPD Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai data yang ada dibidang Aset	72	67.056.00 0	72	67.056.00 0	-	-	
5.02.03 .2.01.1 2				Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1	961.300.2 00	1	961.300.2 00	-	-	
5.02.03 .2.01.1 3				Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Sosialisasi pengelolaan BMD	2	34.418.00 0	2	34.418.00 0	-	-	
5.02.03 .2.01.0 1				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Harga Barang Milik Daerah yang diterbitkan	4	8.089.500	4	3.689.500	-	-	
5.02.01	KEUANGAN	BADAN PENDAPATAN DAERAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	20.166.39 7.732	100%	4.453.605 .264			
5.02.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.040.000	100%	7.340.000			
5.02.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	13	8.040.000	13	7.340.000	-	-	
5.02.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	15.328.74 2.940	100%	870.174.1 22			
5.02.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan hak keuangan ASN lainnya	100	13.587.16 6.276	100	0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100	1.741.576 .664	100	870.174.1 22	-	-	
5.02.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	2.656.073 .600	100%	1.889.865 .546			
5.02.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana / prasarana penerangan kantor	100	35.054.00 0	100	10.619.50 0	-	-	
5.02.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	1.463.664 .500	100	1.160.612 .500	-	-	
5.02.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	100	576.299.5 00	100	398.692.4 50	-	-	
5.02.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100	431.195.6 00	100	265.192.5 00	-	-	
5.02.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat / koordinasi dan konsultasi SKPD	100	149.860.0 00	100	54.748.59 6	-	-	
5.02.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	689.910.0 00	100%	516.365.4 71			
5.02.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana surat menyurat	100	6.800.000	100	5.600.000	-	-	
5.02.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi komunikasi dan listrik	100	683.110.0 00	100	510.765.4 71	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.483.631 .192	100%	1.169.860 .125			
5.02.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan jabatan	100	75.017.50 0	100	30.333.80 0	-	-	
5.02.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional	100	427.644.5 00	100	347.600.8 50	-	-	
5.02.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan perawatan peralatan dan mesin	100	331.735.2 50	100	157.323.8 75	-	-	
5.02.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor	100	649.233.9 42	100	634.601.6 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		100%	94.204.000	100%	92.884.000			
5.02.02.2.03				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100%	94.204.000	100%	92.884.000			
5.02.02.2.03.03				Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan pelaporan keuangan	20	94.204.000	20	92.884.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		100%	7.005.829.000	100%	5.873.991.099			
5.02.04.2.01				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah		100%	7.005.829.000	100%	5.873.991.099			
5.02.04.2.01.04				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah	100	1.017.623.000	100	792.950.000	-	-	
5.02.04.2.01.05				Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah obyek PBBP2 hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	3000	1.042.613.000	3000	691.330.000	-	-	
5.02.04.2.01.06				Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Prosentase validitas data base pajak daerah	100	125.600.000	100	108.600.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.02.04 .2.01.0 7				Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek PBBP2 hasil pelaksanaan pemetaan dan survey obyek dan subyek pajak	300000	441.005.700	300000	310.540.000	-	-	
5.02.04 .2.01.0 8				Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah SPPT yang diterbitkan	105000	134.218.800	105000	104.366.000	-	-	
5.02.04 .2.01.0 9				Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	877467	572.720.500	877467	541.837.200	-	-	
5.02.04 .2.01.1 0				Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Obyek BPHTB yang diverifikasi	14250	92.160.000	14250	88.960.000	-	-	
5.02.04 .2.01.1 1				Penagihan Pajak Daerah	prosentase realisasi penerimaan pajak daerah	100	202.896.000	100	135.670.600	-	-	
5.02.04 .2.01.1 2				Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SK penyelesaian permasalahan pajak daerah yang diterbitkan	4357	125.440.000	4357	33.600.000	-	-	
5.02.04 .2.01.1 3				Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Kelurahan hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	22	3.025.856.000	22	2.956.057.299	-	-	
5.02.04 .2.01.1 4				Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD	4	225.696.000	4	110.080.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03	KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANG AN SDM		KEPEGAWAIAN								
5.03.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	71.848.705.643	88%	54.506.837.364			
5.03.01.2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	54.235.500	100%	42.188.100			
5.03.01.2.01.01				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen renstra dan renja	30	12.887.500	30	12.864.700	kegiatan sdh selesai	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01.2.01.02				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD	24	14.124.500	24	9.177.700	kegiatan sdh selesai	-	
5.03.01.2.01.03				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dokumen perubahan RKA SKPD	24	5.415.500	24	5.343.500	kegiatan sdh selesai	-	
5.03.01.2.01.04				Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	dokumen DPA SKPD	24	4.253.000	24	4.241.800	kegiatan sdh selesai	-	
5.03.01.2.01.05				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen perubahan DPA SKPD	24	5.570.000	24	5.472.400	kegiatan sdh selesai	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan LAKIP ,LKPJ,dan LPPD	30	11.985.000	30	5.088.000	kegiatan sdh selesai	-	
5.03.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	69.616.449.118	88%	53.589.537.181			
5.03.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	67.971.776.718	12	53.183.031.264	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penunjang Pelaksana Administrasi dan Operasional Kantor	12	1.638.359.900	12	401.464.917	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	1	2.894.800	1	2.361.000	kegiatan dibuat pada triwulan 4	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.02.0 7				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	tersusunnya laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran SKPD	2	3.417.700	1	2.680.000	kegiatan dibuat di triwulan 3 & 4	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	126.000.000	0%	0			
5.03.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas pegawai	100	126.000.000	0	0	tidak dilaksanakan	dilaksanakan tahun 2022	
5.03.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	799.314.400	96%	98.879.370			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat pemenuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100	9.998.000	100	8.070.000	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	178.410.500	10	8.870.000	kegiatan dilaksanakan di triwulan 4	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih	2	577.906.000	12	58.423.060	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	persentasi tingkat pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100	32.999.900	100	23.516.310	masih dalam proses	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	898.630.625	100%	645.520.771			
5.03.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa surat menyurat	100	5.000.000	100	2.300.000	masih dalam proses	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	100	625.630.625	100	405.220.771	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Upah Tenaga Kerja Non PNS	12	268.000.000	12	238.000.000	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	354.076.000	75%	130.711.942			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya pemeliharaan mobil jabatan	12	53.985.500	12	24.033.575	masih dalam proses	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin tersedianya pemeliharaan kendaran dinas / operasional	12	150.792.000	12	56.892.367	masih dalam proses	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin	12	119.298.500	12	49.786.000	masih dalam proses	Mempercepat proses pencairan	
5.03.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor	12	30.000.000	0	0	tidak dilaksanakan	dilaksanakan tahun 2022	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100%	15.380.523.400	71%	5.266.111.248			
5.03.02.2.01				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		100%	5.906.929.600	75%	3.286.550.023			
5.03.02.2.01.02				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	persentase pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kompetensi dengan formasi	95	4.352.662.600	95	2.615.443.514	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02.2.01.06				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat pengabdian dan pensiun	100	433.000.000	100	147.674.801	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02 .2.01.0 8				Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	tercapainya pemetaan data base organisasi profesi ASN	75	464.333.0 00	0	0	tidak dilaksanakan	dilaksanakan tahun 2022	
5.03.02 .2.01.1 0				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	persentase ketersediaan data pegawai yang valid dan up date	100	656.934.0 00	100	523.431.7 08	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.02				Mutasi dan Promosi ASN		100%	3.244.760 .600	100%	1.015.028 .360			
5.03.02 .2.02.0 1				Pengelolaan Mutasi ASN	jumlah SK pemindahan jabatan ASN yang terselesaikan	100	482.715.6 00	100	189.591.1 00	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
5.03.02 .2.02.0 2				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan KGB	12	1.462.647 .000	12	438.433.6 80	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02 .2.02.0 3				Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya sidang Baperjakat dan pelantikan,	100	1.299.398.000	100	387.003.580	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5.03.02 .2.03				Pengembangan Kompetensi ASN		100%	4.817.781.200	15%	757.960.434			
5.03.02 .2.03.0 2				Pengelolaan Assessment Center	jumlah ASN yang telah mengikuti Asesment	230	3.564.188.000	81	560.365.434	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.03.0 3				Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	terselenggaranya uji kompetensi bagi jabatan fungsional Tersusunnya kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi bagi ASN	200	997.256.200	50	197.595.000	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.03.0 7				Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	0	30	181.792.000	0	0	tidak dilaksanakan	dilaksanakan tahun 2022	
5.03.02 .2.03.1 2				Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	40	74.545.000	0	0	tidak dilaksanakan	dilaksanakan tahun 2022	
5.03.02 .2.04				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		100%	1.411.052.000	100%	206.572.431			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.03.02 .2.04.0 2				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah OPD yang dievaluasi dan dimonitoring	72	500.600.0 00	72	124.120.0 00	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.04.0 4				Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase ASN yang sudah melaporkan LHKPN , jumlah PNS penerima penghargaan Satyalancana Karya satya dan Dokumen 9 KGB,Karpeg,dan Karsu)	100	200.000.0 00	100	38.636.35 6	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.04.0 7				Pembinaan Disiplin ASN	prosentase kasus pelanggaran disiplin yang ditindak lanjuti	100	409.935.0 00	100	24.618.57 5	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.03.02 .2.04.0 9				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	persentase PNS dan PPPK yang mengajukan Permohonan ijin perceraian dan pengaduan rumah tangga lainnya	100	300.517.0 00	100	19.197.50 0	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	BADAN KEPEGAWAIA N DAN PENGEMBANG AN SDM		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.04.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		100%	7.892.930.000	63%	4.375.354.892			
5.04.02.2.01				Pengembangan Kompetensi Teknis		100%	2.100.000.000	70%	13.755.500			
5.04.02.2.01.03				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah AS yang telah memperoleh pengembangan kompetensi	620	2.100.000.000	436	13.755.500	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
5.04.02 .2.02				Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		100%	5.792.930 .000	55%	4.361.599 .392			
5.04.02 .2.02.0 7				Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	jumlah ASN yang telah emmeroleh pengembangan kompetensi manejerial dan fungsional	700	5.792.930 .000	384	4.361.599 .392	masih dalam proses	merencanakan tepat waktu	

3.1.6 Pelaksanaan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT		INSPEKTORAT DAERAH								
6.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	7.077.873 .838	91%	6.321.190 .125			
6.01.01 .2.01				Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	58.038.40 0	100%	38.001.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	3	17.552.00 0	3	17.531.00 0	-	-	
6.01.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	4	2.340.400	4	0			
6.01.01 .2.01.0 7				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	69	38.146.00 0	69	20.470.00 0	-	-	
6.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	5.217.591 .539	100%	4.729.254 .484			
6.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan	14	4.882.891 .539	14	4.412.283 .884			
6.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Administrasi Pengelola Keuangan	12	334.700.0 00	12	316.970.6 00	-	-	
6.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah		100%	106.580.0 00	50%	85.729.68 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01 .2.05.0 9				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Dikirim Untuk Mengikuti Diklat	60	0	0	0	Anggaran ditiadakan di karenakan sudah ada di BPKPSDM dan Pada Tahun ini masih belum mengirimkan SDM untuk di diklatkan karena belum ada penjadwalan dengan BPKP	Tahun 2022 akan diadakan diklat Kompetensi	
6.01.01 .2.05.1 1				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang dilaksanakan	4	106.580.0 00	4	85.729.68 0	-	-	
6.01.01 .2.06 06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	653.258.3 00	100%	574.591.9 09			
6.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	10.882.20 0	12	10.448.00 0	-	-	
6.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Kebersihan, Alat Rumah Tangga Lainnya, Makanan dan Minuman, ATK	4	228.268.0 00	4	220.661.1 95			
6.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang tersedia	1	34.850.10 0	1	33.360.57 0	-	-	
6.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	0	134	13.680.00 0	134	7.939.215	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat untuk koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	84	328.550.00	84	269.422.929	-	-	
6.01.01 .2.06.0 8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan tersedianya fasilitas tamu	12	37.028.000	12	32.760.000	-	-	
6.01.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	827.874.400	100%	758.742.000			
6.01.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	30	827.874.400	30	758.742.000	-	-	
6.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	42.192.749	75%	15.636.913			
6.01.01 .2.08.0 1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Surat yang Terkirim	150	21.000.000	38	379.000	-	-	
6.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Rekening Telepon	12	3.692.749	12	1.257.913	-	-	
6.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa kebersihan kantor	12	17.500.000	12	14.000.000	-	-	
6.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	172.338.450	100%	119.234.139			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan	12	36.705.95 0	12	24.037.46 6	-	-	
6.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	12	99.449.00 0	12	62.527.67 3	-	-	
6.01.01 .2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	36.183.50 0	12	32.669.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		100%	746.742.000	100%	389.039.280			
6.01.02.2.01				Penyelenggaraan Pengawasan Internal		100%	352.220.000	100%	146.337.560			
6.01.02.2.01.01				Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan yang diterima Obrik	1	9.520.000	1	9.304.960	-	-	
6.01.02.2.01.02				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Pengawasan Keuangan yang diterima Obrik	6	10.240.000	6	9.329.600	-	-	
6.01.02.2.01.07				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan Monev atas pemeriksaan BPK RI dan APIP yang terselsaikan	8	0	8	0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.02 .2.01.0 3				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan hasil reviu Kinerja diterima OPD/Obrik	4	83.995.00 0	4	54.363.00 0	-	-	
6.01.02 .2.01.0 4				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan hasil reviu Keuangan diterima OPD/Obrik	9	49.895.00 0	9	45.500.00 0	-	-	
6.01.02 .2.01.0 5				Pengawasan Desa	Jumlah LHP Pengawasan desa yang diterima Obrik	226	198.570.0 00	226	27.840.00 0	-	-	
6.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		100%	394.522.0 00	100%	242.701.7 20			
6.01.02 .2.02.0 1				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan hasil pemantauan kerugian daerah terselesaikan	4	111.040.0 00	4	0	anggaran dialihkan pada sub kegiatan yang lain	-	
6.01.02 .2.02.0 2				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan Tujuan tertentu	70	283.482.0 00	70	242.701.7 20	terbatasnya jumlah SDM baik secara kualitatif maupun kuantitatif	mengusulkan tambahan SDM ke dinas terkait dan mengikutkan diklat baik diklat yang kompetensi umum maupun kompetensi khusus	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		100%	470.640.000	67%	409.892.400			
6.01.03.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	5.520.000	33%	3.964.800			
6.01.03.2.01.01				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen kebijakan teknis Pengawasan yang diterbitkan/disusun	3	5.520.000	2	3.964.800			
6.01.03.2.01.02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusnya Dokumen SOP di Bidang Fasilitasi Pengawasan	20	0	0	0	-	-	
6.01.03.2.02				Pendampingan dan Asistensi		100%	465.120.000	83%	405.927.600			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
6.01.03 .2.02.0 1				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pendampingan dan Asistensi yang diterima obrik	4	208.040.0 00	4	203.069.6 00	-	-	
6.01.03 .2.02.0 2				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi yang diterima Obrik	10	3.350.000	10	0	Keterbatasan SDM	mengusulkan penambahan SDM	
6.01.03 .2.02.0 3				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah laporan laporan progres pencegahan korupsi	6	253.730.0 00	6	202.858.0 00	-	-	
6.01.03 .2.02.0 4				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil pendampingan	3	0	1	0	-	-	

3.1.7 Pelaksanaan Unsur Kewilayahan

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Unsur Kewilayahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01	KECAMATAN	KECAMATAN AJUNG		KECAMATAN								
7.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.278.921 .270	99%	2.273.484 .267			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	123.900.000	100%	123.900.000			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	3.940.000	100	3.940.000	-	-	
7.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	119.960.000	99	119.960.000	-	-	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.949.174.220	100%	1.949.174.220			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN	100	1.949.174.220	100	1.949.174.220	mendekati masa akhir tahun anggaran	memaksimalkan penyerapan anggaran	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	81.529.000	99%	76.091.999			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	17.470.000	99	12.033.000	-	-	
7.01.01 .2.06.0 3				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100	28.459.000	99	28.458.999	-	-	
7.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Bahan Logistik Kantor	100	18.300.000	99	18.300.000	masa tansisi pandemi covid 19	adanya upaya peningkatan kinerja	
7.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan	100	230.000	99	230.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya kebutuhan rapat koordinasi di Tingkat Kecamatan	100	17.070.00 0	99	17.070.00 0	-	-	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	75.057.80 0	100%	75.057.79 9			
7.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik	100	41.028.80 0	100	41.028.80 0	-	-	
7.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Jasa Peralatan dan perlengkapan kantor	100	13.039.00 0	99	13.038.99 9	-	-	
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100	20.990.00 0	100	20.990.00 0	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	49.260.25 0	99%	49.260.24 9			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Operasional dan Dinas Jabatan	100	49.260.25 0	99	49.260.24 9	-	-	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	883.638.900	100%	883.638.900			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	881.546.900	100%	881.546.900			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya kebutuhan kegiatan aparatur ditingkat kecamatan	100	881.546.900	100	881.546.900	-	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	2.092.000	99%	2.092.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya efektifitas pelayan kepada masyarakat	100	2.092.000	99	2.092.000	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	70.380.000	99%	70.380.000			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	49.560.000	99%	49.560.000			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	49.560.000	99	49.560.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	20.820.00 0	99%	20.820.00 0			
7.01.03 .2.05.0 2				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penganan Covid-19 di Tingkat Kecamatan	100	20.820.00 0	99	20.820.00 0	-	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	182.550.0 00	99%	182.550.0 00			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	182.550.0 00	99%	182.550.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya kebutuhan Penegak Peraturan	100	182.550.000	99	182.550.000	-	-	
7.01.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	1.100.000	0%	0			
7.01.05 .2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	1.100.000	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05 2.01.0 1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tercapainya Pelaksanaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional	100	1.100.000	0	0	Anggaran dialihkan ke program Covid 19	Tahun depan diupayakan dianggarkan kembali kembali	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN KALISAT		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.314.446 .000	98%	3.030.636 .442			
7.01.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	4.592.000	93%	4.397.000			
7.01.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	100	4.592.000	93	4.397.000	Ketersediaan anggaran kegiatan tidak ada	Akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya	
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.927.530 .500	100%	2.686.300 .942			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.768.300 .500	100	2.527.365 .942	-	-	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase jumlah pemenuhan operasional rutin kantor	100	159.230.0 00	100	158.935.0 00	-	-	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	241.498.5 00	100%	202.591.4 77			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase jumlah pemenuhan operasional rutin kantor	100	241.498.5 00	100	202.591.4 77	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	140.825.0 00	97%	137.347.0 23			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	24.000.00 0	100	23.353.80 2	-	-	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	20.775.00 0	100	18.196.22 1	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	100	96.050.00 0	90	95.797.00 0	Pelaksanaan kegiatan sudah selesai	Percepatan proses pencairan anggaran	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	758.125.000	93%	758.080.000			
7.01.02 2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	757.855.000	100%	757.810.000			
7.01.02 2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan	100	757.855.000	100	757.810.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	270.000	85%	270.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	100	270.000	85	270.000	Ketersediaan anggaran tidak ada	Akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	48.931.800	95%	47.429.709			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	48.931.800	95%	47.429.709			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	3.630.000	100	3.219.900	Pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana	evaluasi untuk kegiatan tahun berikutnya	
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	45.301.800	90	44.209.809	Ketersediaan anggaran kegiatan tidak ada	Akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	325.683.500	100%	308.713.003			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	325.683.5 00	100%	308.713.0 03			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terselenggaraanya koordinasi ketertiban dan keamanan umum	100	325.683.5 00	100	308.713.0 03	Ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena PPKM	Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan Prokes	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN KALIWATES		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	10.066.28 7.745	78%	7.038.833 .160			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.620.221 .891	83%	5.888.087 .869			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN	100	8.452.901 .891	67	5.721.885 .869	Anggaran melebihi kebutuhan	Realisasi menyesuaikan dengan jumlah ASN	
7.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Aparatur Pengelola Keuangan	100	167.320.0 00	99	166.202.0 00	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	-	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	169.159.0 00	90%	157.725.6 00			
7.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pembelian ,Alat Listrik Dan Bahan Dan Alat Kebersihan Kantor	100	169.159.0 00	90	157.725.6 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	135.423.500	97%	132.591.750			
7.01.01 2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kerja yang memadai	100	135.423.500	97	132.591.750	-	-	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	854.426.104	76%	653.138.385			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional	100	854.426.104	76	653.138.385	Adanya Pandemi Covid 19	Kegiatan menyesuaikan situasi	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	287.057.250	68%	207.289.556			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	100	44.552.750	80	35.775.402	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	Kegiatan menyesuaikan situasi	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat atau dipelihara	100	84.612.000	56	47.681.654	Adanya Pandemi Covid 19	Kegiatan menyesuaikan situasi	
7.01.01 2.09.0 6				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dirawat atau dipelihara	100	51.472.500	39	20.435.500	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	Kegiatan menyesuaikan situasi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Bangunan Gedung Kantor yang dipelihara	100	106.420.0 00	97	103.397.0 00	-	-	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	3.046.966 .000	88%	2.934.622 .920			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	3.017.148 .000	96%	2.910.656 .520			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Ketua RT dan RW yang dibina Jumlah Peserta Rapat dengan Muspika,Dinas Instansi Sektoral Dan Tokoh Masyarakat	100	3.017.148.000	96	2.910.656.520	-	-	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	29.818.000	80%	23.966.400			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Adminduk serta Pelayanan Umum yang diproses	100	29.818.000	80	23.966.400	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	Kegiatan menyesuaikan situasi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	319.421.000	38%	240.048.850			
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	319.421.000	38%	240.048.850			
7.01.03.2.02.02				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan	100	0	0	0	Refocusing Anggaran	Dialihkan ke Dinas Cipta Karya	
7.01.03.2.02.03				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan PKK yang dilaksanakan Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Peserta Pringatan Hari Besar Islam Dan Senam Bersama	100	319.421.000	75	240.048.850	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	Kegiatan menyesuaikan situasi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	385.745.300	56%	202.952.800			
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	385.745.300	56%	202.952.800			
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi PPKM Mikro Jumlah Linmas yang dibina Jumlah Pelaksanaan Trantibum	100	385.745.300	56	202.952.800	Akumulasi dari Triwulan sebelumnya	Kegiatan menyesuaikan situasi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN KENCONG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.975.064 .458	79%	1.760.548 .999			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.232.265 .458	96%	1.595.631 .699			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan ASN	100	2.232.545 .458	100	1.511.981 .699	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya Belanja Honor Penanggung Jawab Pengelola Keuangan	100	90.720.00 0	92	83.650.00 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	6.400.800	95%	6.075.000			
7.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya Pakaian Dinas yang layak bagi Aparatur Negara	100	6.400.800	95	6.075.000	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	44.073.00 0	77%	24.790.00 0			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan rutin kantor	100	44.073.00 0	77	24.790.00 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	38.676.00 0	100%	38.490.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi kebutuhan peralatan kerja	100	38.676.00 0	100	38.490.00 0			
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	519.309.6 00	82%	59.539.70 0			
7.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tenaga pendukung operasional rutin kantor	100	19.799.60 0	73	14.345.20 0	Sesuai Kebutuhan	Nihil	
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhi kebutuhan rutin kantor ATK, Jasa Tenaga Pelayanan Umum	100	499.510.0 00	90	45.194.50 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	43.339.60 0	55%	36.022.60 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhi kebutuhan pemeliharaan mobil jabatan	100	26.028.50 0	87	22.589.00 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhi pemeliharaan kendaraan dinas operasional yang layak	100	17.311.10 0	78	13.433.60 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya gedung pelayanan umum dan aula pkk yang aman dan layak	100	0	0	0	Refocusing anggaran	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	791.800.000	100%	789.600.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	787.000.000	99%	784.800.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi di tingkat kecamatan	100	787.000.000	99	784.800.000	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	4.800.000	100%	4.800.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya honorarium operator SIM PATEN dan E-KTP	100	4.800.000	100	4.800.000	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	87.962.500	70%	60.404.500			
7.01.03 .2.01				Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	58.408.000	66%	37.150.000			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya rapat musrenbang tingkat kecamatan	100	4.990.000	69	3.450.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	0	100	53.418.00 0	63	33.700.00 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.03 2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	29.554.50 0	79%	23.254.50 0			
7.01.03 2.05.0 4				Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penangan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terpenuhinya penangan kesehatan masyarakat terhadap bahaya covid-19	100	29.554.50 0	79	23.254.50 0	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	265.225.0 00	98%	234.025.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	265.225.0 00	98%	234.025.0 00			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya kegiatan ketertiban dan keamanan umum	100	265.225.0 00	98	234.025.0 00	Sesuai Anggaran Kas	Nihil	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN LEDOKOMBO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.198.638 .829	98%	1.853.923 .149			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.026.885 .340	100%	1.691.632 .862			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersediannya Gaji PNS	14	1.904.445 .340	14	1.569.192 .862	nihil	nihil	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terselenggaranya dan tercapainya pelaporan secara rutin	100	122.440.0 00	100	122.440.0 00	nihil	nihil	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	93.072.48 9	100%	92.070.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terciptanya Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang lebih baik	100	93.072.489	100	92.070.500	nihil	nihil	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	74.117.000	95%	65.655.787			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	31.473.000	86	26.957.637	nihil	nihil	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	14.521.000	100	11.700.750	nihil	nihil	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	100	28.123.000	100	26.997.400			
7.01.01 2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	4.564.000	100%	4.564.000			
7.01.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	100	4.564.000	100	4.564.000	nihil	nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	682.800.000	100%	682.600.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	682.800.000	100%	682.600.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam Pelayanan Publik.	100	682.800.000	100	682.600.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	32.900.000	100%	32.795.000			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	32.900.000	100%	32.795.000			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbang tingkat Kecamatan	100	2.200.000	100	2.100.000			
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Pembinaan PKK , AKI, AKB dan Pencegahan Stunting	100	30.700.000	100	30.695.000	nihil	nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	238.347.750	100%	234.769.000			
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	238.347.750	100%	234.769.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05 .2.01.0 1				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Tersedianya Tenaga Ketentraman dan Ketertiban Umum dilingkungan Kecamatan	100	238.347.7 50	100	234.769.0 00	nihil	nihil	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN MAYANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.334.606 .380	67%	1.881.536 .953			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.074.985 .100	85%	1.689.984 .103			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya gaji PNS dn ASN	100	1.981.505 .100	81	1.607.984 .103	Sesuai dengan perencanaan	Sesuai dengan perencanaan	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pegawai yang menerima manfaat	100	93.480.00 0	88	82.000.00 0	Sesuai dengan Perencanaan	Sesuai dengan Perencanaan	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	91.524.50 0	98%	89.900.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100	91.524.50 0	98	89.900.00 0	Sudah sesuai dengan perencanaan	Sudah sesuai dengan perencanaan	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	132.782.7 80	76%	82.937.85 0			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Administrasi dan Operasional Rutin Kantor tiap bulannya	100	132.782.7 80	76	82.937.85 0	efisiensi anggaran dalam kegiatan pengadaan barang dan perjalanan dinas karena PPKM Mikro	Kegiatan Rapat dan koordinasi melalui zoom metting	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	35.314.00 0	48%	18.715.00 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemeliharaan yang dilaksanakan	100	22.379.50 0	49	11.854.50 0	Sudah sesuai dengan perencanaan karena dalam kondisi pandemi maka mobilitasnya berkurang	Menyesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Porsentase pemeliharaan yang dilaksanakan	100	10.973.00 0	45	4.910.000	Menyesuaikan perkembangan situasi dan konidis di lapangan karena dalam kondisi pandemi	Mobilitas di lapangan d disesuaikan dengan kebutuhan yang ada karena dalam kondisi pandemi	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rumah Dinas Camat	100	1.961.500	99	1.950.500	Sesuai dengan perencanaan, adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan pengadaan barang	Sesuai dengan perencanaan, adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan pengadaan barang	
7.01.01 2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemeliharaan yang dilaksanakan	100	0	0	0	Pengurangan Plafon anggaran di Perangkat Daerah	Melakukan pengurangan kegiatan dengan skala prioritas	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	569.968.000	75%	554.110.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	552.000.000	99%	545.100.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tercapainya Pembinaan RT dan RW	100	552.000.000	99	545.100.000	Sudah sesuai dengan perencanaan	Sudah sesuai dengan perencanaan	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	17.968.000	50%	9.010.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum kecamatan mayang	100	17.968.000	50	9.010.000	operator data mengundurkan diri	tidak di cairkan karena operator data mengundurkan diri	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	217.325.000	30%	7.975.000			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	217.325.000	30%	7.975.000			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemenuhan penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan	100	4.355.000	55	2.375.000	Sudah sesuai dengan perencanaan karena dalam kondisi pandemi	Sudah sesuai dengan perencanaan karena dalam kondisi pandemi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase kegiatan pemberdayaan masyarakat perempuan	100	212.970.0 00	4	5.600.000	Tidak adanya keminatan dari rekanan/penyedia jasa/pihak jasa ke tiga dikarenakan Harga barang di DPA belum termasuk Nilai pajak pembelian barang	Tidak di lakukan pengadaan barang karena Anggaran nya kurang	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	275.971.0 00	88%	242.155.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	275.971.0 00	88%	242.155.0 00			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100	275.971.0 00	88	242.155.0 00	Sesuai dengan perencanaan, adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan pengadaan barang	Sesuai dengan perencanaan, adanya efisiensi anggaran dalam kegiatan pengadaan barang	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN MUMBULSARI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.975.118 .552	94%	1.036.047 .242			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	0	0			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.002.724 .352	100%	132.500.0 00			
7.01.01 .2.02.0 2				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Tugas ASN	100	2.002.724 .352	100	132.500.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.04				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		100%	45.428.00 0	97%	44.033.00 0			
7.01.01 .2.04.0 3				Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100	45.428.00 0	97	44.033.00 0			
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	859.616.7 00	100%	819.571.0 66			
7.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100	34.352.80 0	100	20.978.56 6			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	100	825.263.9 00	100	798.592.5 00			
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	67.349.50 0	83%	39.943.17 6			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	100	50.150.00 0	100	28.658.67 6			
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas Camat	100	17.199.50 0	66	11.284.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.11				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 .2.11.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0	0	0	0	0			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	57.993.800	50%	37.778.200			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	0	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi tingkat kecamatan yang dilaksanakan dalam satu tahun	100	0	0	0			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	57.993.80 0	100%	37.778.20 0			
7.01.02 .2.02.0 1				Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	0	0	10.000.00 0	0	0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	100	47.993.80 0	100	37.778.20 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	225.388.500	10%	20.137.500			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	149.717.000	4%	2.500.000			
7.01.03.2.01.02				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Persentase kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	114.724.000	0	0			
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan PKK)	100	34.993.000	7	2.500.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	75.671.500	23%	17.637.500			
7.01.03 2.05.0 2				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	75.671.500	23	17.637.500			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	170.996.000	0%	0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	170.996.000	0%	0			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	100	170.996.000	0	0			
7.01.06			MENGENTASKAN KEMISKINAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SOSIAL DASAR LAINNYA.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		100%	30.045.200	13%	3.840.000			
7.01.06 2.01				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		100%	30.045.200	13%	3.840.000			
7.01.06 2.01.1 1				Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kegiatan bidang ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100	30.045.200	13	3.840.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN PAKUSARI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.468.895 .806	100%	2.046.367 .569			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	293.695.5 36	100%	284.823.9 10			
7.01.01 .2.01.0 2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Pemenuhan dasar Operasional Kantor	100	293.695.5 36	100	284.823.9 10	-	-	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.085.325 .970	100%	1.680.012 .159			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	2.085.325 .970	100	1.680.012 .159	-	-	
7.01.01 .2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	34.058.30 0	100%	28.531.50 0			
7.01.01 .2.07.1 1				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prosentase terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan gedung PKK dan Rumah Dinas dengan baik	100	34.058.30 0	100	28.531.50 0	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	55.816.00 0	100%	53.000.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Dinas Jabatan dengan baik	100	33.920.00 0	100	31.664.00 0	-	-	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan Baik	100	21.896.00 0	100	21.336.00 0	-	-	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	34.054.96 4	67%	24.367.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	4.127.464	0%	0			
7.01.02 .2.01.0 1				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemeliharaan kepala Desa dengan baik	0	4.127.464	0	0	Kegiatan Salah input	Penggeseran Kegiatan pada waktu PAK	
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	prosentse terfasilitasinya kegiatan Pembinaan Perangkat Desa	100	0	0	0	salah program	Menunggu PAK	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	6.927.500	100%	6.000.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terlaksananya Pelayanan Umum di Kec Pakusari dengan baik	100	6.927.500	100	6.000.000	-	-	
7.01.02 .2.03				Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		100%	23.000.000	100%	18.367.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 2.03.0 1				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0	100	23.000.000	100	18.367.500	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	544.195.575	80%	538.308.500			
7.01.03 2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	530.195.575	100%	524.808.500			
7.01.03 2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase terlaksananya Kegiatan Musrenbangdes dan Musrenbang Tk. Kecamatan dengan baik	100	19.380.075	100	14.750.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 2				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terfasiliasinya honorRT RW se wilayah kecamatan Pakusari	100	466.800.000	100	466.800.000	-	-	
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terfasilitasinya Kegiatan Musrenbang Tingkat kecamatan dengan baik dan Terfasilitasinya Kegiatan Pertemuan Rutin PKK Tingkat Kecamatan dengan baik	100	44.015.500	100	43.258.500	-	-	
7.01.03 2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	0	0%	0			
7.01.03 2.02.0 3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	100	0	0	0	Salah Input Program	Penggeseran Program Kegiatan pada waktu PAK	
7.01.03 2.05				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		100%	14.000.000	100%	13.500.000			
7.01.03 2.05.0 2				Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan dan Penanggulangan Covid 19 di wilayah kec Pakusari	100	14.000.000	100	13.500.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	273.951.400	100%	271.810.000			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	273.951.400	100%	271.810.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosidentase rekomendasi hasil koordinasi pemerintahan. pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan wilayah kecamatan Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur pada Kantor Kecamatan Pakusari	100	273.951.400	100	271.810.000	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN PATRANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	11.093.173.849	94%	7.823.292.170			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	25.920.000	100%	10.589.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1) Tersedianya Honorarium pengelolaan keuangan barang dan jasa, serta peralatan dan Perlengkapan kantor yang memadai; 2) Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur Yang Baik	2	17.070.00 0	2	7.830.000	penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan adanya belanja jasa yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan anggaran	di tahun berikutnya akan lebih merencanakan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada	
7.01.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersusun	2	8.850.000	2	2.759.000	penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan adanya belanja jasa yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan anggaran	di tahun berikutnya akan lebih merencanakan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	9.251.962 .085	100%	6.544.893 .162			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah bulan pemenuhan gaji ASN	14	9.230.268 .085	14	6.528.503 .162	Tidak adanya masalah dalam sub kegiatan ini	penyerapan anggaran akan selalu d disesuaikan dengan jumlah pegawai	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen yang tersusun	2	21.694.00 0	2	16.390.00 0	penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan adanya belanja jasa yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan anggaran	di tahun berikutnya akan lebih merencanakan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	439.867.8 00	78%	273.942.6 00			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	prosentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	427.647.0 00	98	267.318.5 00	Tidak adanya masalah dalam sub kegiatan ini	akan dilakukan penyerapan yang sesuai anggaran kas setelah adanya penetapan APBD	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Prosentase pemenuhan kebutuhan kantor	100	12.220.800	57	6.624.100	peyerapan sudah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan	di tahun anggaran ke depannya akan lebih disesuaikan	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.311.937.964	91%	942.003.408			
7.01.01 2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan air, listrik dan telepon	12	75.452.064	12	71.672.608	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	prosentase pemenuhan dasar operasional kantor	100	1.236.485.900	81	870.330.800	penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan adanya belanja barang yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan anggaran	di tahun berikutnya akan lebih merencanakan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	63.486.000	100%	51.864.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil Jabatan yang dipakai	1	32.306.00 0	1	21.110.00 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara	10	31.180.00 0	10	30.754.00 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	2.204.741 .600	99%	2.061.081 .920			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	2.118.762 .000	98%	2.049.081 .920			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi dan pembinaan	100	2.118.762 .000	98	2.049.081 .920	NIHIL	NIHIL	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	85.979.60 0	100%	12.000.00 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen adminduk serta pelayanan umum yang diproses	12000	85.979.60 0	12000	12.000.00 0	Penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan penganggaran pada akhir tahun dan kegiatannya bersamaan dengan kegiatan dispenduk	ke depannya perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan akan lebih d disesuaikan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	3.317.769.100	30%	242.782.400			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	44.219.400	0%	0			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi PMKS	9	44.219.400	0	0	tidak adanya pelaksanaan kegiatan dikarenakan terlambatnya penetapan APBD	NIHIL	
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	3.273.549.700	45%	242.782.400			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.02.0 2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana di masyarakat	800	2.934.660.500	0	0	tidak adanya pelaksanaan dikarenakan tidak ada JUKNIS terkait pelaksanaan kegiatan	NIHIL	
7.01.03 .2.02.0 3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah rapat koordinasi dan pembinaan seksi PMKS	100	338.889.200	90	242.782.400	penyerapan anggaran tidak bisa maksimal dikarenakan adanya belanja jasa yang tidak bisa dilaksanakan dikarenakan tidak sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan anggaran	di tahun berikutnya akan lebih merencanakan anggaran yang sesuai dengan regulasi yang ada	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	449.650.400	83%	330.392.000			
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		100%	449.650.400	83%	330.392.000			
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	prosentasepemuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi	100	449.650.400	83	330.392.000	ada beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kondisi pandemi covid-19	di tahun berikutnya akan lebih disesuaikan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN PUGER		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.706.362 .421	74%	2.156.610 .213			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.655.815 .921	87%	2.120.669 .213			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran gaji dan tunjangan PNS	100	2.487.121 .961	78	1.960.388 .213	-	-	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	belanja ATK, Honor Petugas kebersihan Pembayaran, Honor Pengelola Keuangan Pembayaran Jasa Perawatan Peralatan Kantor, Pembayaran Listrik, Penggandaan	100	168.693.9 60	95	160.281.0 00	-	-	
7.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	13.800.00 0	0%	0			
7.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya seragam pakaian dan kelengkapannya	100	13.800.00 0	0	0	Refocusing	Anggaran dialihkan untuk Penanganan Covid -19 Kabupaten	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	36.746.50 0	98%	35.941.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	JUmlah Mobil Jabatan Yang di rawat / dipelihara	100	15.159.75 0	99	15.110.00 0	-	-	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	JUmlah Mobil Oprasional Yang di rawat	100	21.586.75 0	96	20.831.00 0	-	-	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	1.135.300 .500	99%	1.133.727 .500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.069.976 .000	99%	1.068.590 .000			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Rakorcam	100	1.069.976 .000	99	1.068.590 .000	-	-	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	65.324.50 0	99%	65.137.50 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	belanja ATK, Honor Petugas Paten, belanja Modal	100	65.324.50 0	99	65.137.50 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	37.715.500	81%	31.207.500			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	37.715.500	81%	31.207.500			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Musrenbangdes	100	4.928.000	79	3.920.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberian Bantuan Makanan Tambahan (PMT) dalam rangka Penanganan AKI, AKB, STUNTING, dan Rapat penanganan Covid -19 serta Pembayaran honor Full Timer	100	32.787.50 0	83	27.287.50 0	-	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	310.800.000	95%	295.800.000			
7.01.04 2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		100%	310.800.000	95%	295.800.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.04.0 1				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terciptanya Ketertiban dan Keamanan di Wilayah Kecamatan Puger	100	310.800.000	95	295.800.000	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN AMBULU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.524.747.290	82%	1.966.205.175			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.337.245.890	100%	1.792.514.375			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100	2.250.535.890	100	1.706.404.375	Nihil	-	
7.01.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terbayarnya Honor pengelola Keuangan, Barang dan Jasa .	100	86.710.000	100	86.110.000	Nihil	-	
7.01.01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	162.026.400	100%	149.983.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Kebutuhan Penunjang Operasional Rutin Kantor ATK, Alat Listrik, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, cetak dan Penggandaan	100	162.026.400	100	149.983.000	Nihil	-	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	25.475.000	63%	23.707.800			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Mobil Jabatan yang dirawat atau dipelihara	100	18.079.000	100	17.127.500	Nihil	-	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas / Operasional yang dirawat atau dipelihara	100	7.396.000	90	6.580.300	Nihil	-	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dirawat atau dipelihara	2	0	0	0	Terjadi kesalahan Kode Rekening	DIANGGARKAN TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	1.080.028.000	100%	1.079.960.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.034.795.000	99%	1.034.775.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rapat Koordinasi dan Monev DD, ADD, BGH Seksi Pemerintahan	100	1.034.795.000	99	1.034.775.000	Nihil	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	45.233.000	100%	45.185.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Warga Masyarakat yang bisa terfasilitasi dalam pengurusan surat menyurat	100	45.233.00 0	100	45.185.00 0	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	48.242.00 0	50%	47.210.00 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	48.242.00 0	50%	47.210.00 0			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan	1	0	0	0	Adanya Perubahan Anggaran PAPBD	Dianggarkan di Tahun Anggaran Berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Kegiatan PMKS dan PKK yang dilaksanakan	100	48.242.00 0	100	47.210.00 0	Nihil	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	164.244.0 00	100%	164.220.0 00			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	164.244.0 00	100%	164.220.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah bulan terlaksananya patroli trantibum, pembayaran honorarium Banpol PP , Upacara HUT RI	100	164.244.000	100	164.220.000	Nihil	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN RAMBIPUJI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.456.278.726	100%	2.032.186.843			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.226.288.625	100%	1.804.418.333			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN dalam 1 Tahun Anggaran	12	2.141.578.625	12	1.719.708.333	Adanya Perubahan Anggaran PAPBD	Akan dianggarkan Tahun Anggaran berikutnya	
7.01.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Presentase Honorarium Penanggungjawab Keuangan	90	84.710.000	90	84.710.000	-	-	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	161.800.351	100%	160.067.510			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya Honor pengelola Keuangan, Barang dan Jasa serta Kebutuhan Penunjang Operasional Rutin Kanto ATK, Alat Listrik, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak Penggandaan dan Belanja Peralatan dan Mesin	12	161.800.351	12	160.067.510	Adanya Perubahan Anggaran PAPBD	Memaksimalkan penyerapan Anggaran	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	68.189.750	100%	67.701.000			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara/dirawat	100	30.310.500	100	29.899.000	-	-	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara/dirawat	100	20.039.250	100	19.962.000	Koordinasi dengan pihak terkait	Memaksimalkan kegiatan	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara/dirawat	2	17.840.000	2	17.840.000	sudah terserap di triwulan III	sudah terserap di triwulan III	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	844.500.00	55%	844.140.00			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	806.100.00	100%	805.740.00			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemenuhan Honorarium RT RW, Monitoring DD, ADD dan BGH ke Desa Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Pembinaan di Tingkat Kecamatan	12	806.100.00	12	805.740.00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	38.400.00 0	10%	38.400.00 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Jenis dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses/dilayani	12000	38.400.00 0	1200	38.400.00 0	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	54.610.00 0	100%	54.610.00 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	54.610.00 0	100%	54.610.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang yang dilaksanakan	0	0	0	0	Adanya Perubahan Anggaran PAPBD	Akan dianggarkan Tahun Anggaran berikutnya	
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan PMKS dan PKK yang dilaksanakan	12	54.610.00 0	12	54.610.00 0	Adanya Perubahan Anggaran PAPBD	Penyerapan lebih dimaksimalkan	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	256.980.0 00	100%	256.980.0 00			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	256.980.0 00	100%	256.980.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksanayan Jumlah bulan pembayaran honorarium Banpol PP , Koordinasi Penanganan Covid - 19 dan Tanggap Bencana Patroli Trantibum, Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum di Wilayah Kecamatan	12	256.980.000	12	256.980.000	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SEMBORO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.519.216.374	100%	2.225.339.480			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan	0	0	0	0	Adanya pengurangan anggaran yang mengakibatkan peniadaan lembur	Akan dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya jika anggaran memenuhi.	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.01.0 6				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	0	0	0	0	Adanya pengurangan anggaran yang mengakibatkan peniadaan lembur	Akan dianggarkan kembali untuk tahun berikutnya jika anggaran memenuhi.	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.222.034 .374	100%	1.955.769 .314			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN Kec. Semboro	12	2.150.194 .374	12	1.886.959 .314	Beberapa rapel kekurangan gaji ASN belum direalisasikan.	Rapel kekurangan gaji ASN akan direalisasikan pada tahun berikutnya	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Alat Tulis Kantor Honorarium pengelola keuangan Lembur Makanan dan minuman rapat	100	71.840.00 0	100	68.810.00 0	Peniadaan anggaran belanja lembur	Akan dianggarkan lagi pada tahun beikutnya	
7.01.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	0	0	0	0	Peniadaan anggaran belanja lembur	Akan dianggarkan lagi pada tahun berikutnya	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	152.575.4 00	100%	136.444.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Personal Komputer/Laptop, Printer, dan Peralatan Komputer lainnya	16	152.575.4 00	16	136.444.0 00	Penyesuaian spesifikasi laptop sesuai dengan spesifikasi yang terdapat di IPD	Mencari spesifikasi dasar yang sama dengan spesifikasi yang terdata di SIPD.	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	85.508.60 0	100%	80.011.93 9			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	ATK Honorarium non PNS Pemeliharaan peralatan kantor	100	85.508.60 0	100	80.011.93 9	Adanya penyesuaian besaran honorarium Non ASN	Dilakukan penyesuaian dengan menggeser anggaran kegiatan lain	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	59.098.00 0	100%	53.114.22 7			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan dinas	1	34.026.00 0	1	29.764.22 7	Adanya pengurangan anggaran belanja	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional yang mendapatkan pemeliharaan	1	14.872.00 0	1	13.150.00 0	Adanya pengurangan anggaran belanja	Dilakukan penyesuaian dengan menggeser anggaran kegiatan lain	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase Luas Pengecatan gedung kantor	100	10.200.00 0	100	10.200.00 0	Pengecatan pagar kantor yang sebelumnya direncanakan triwulan III bergeser di triwulan IV karena ada penambahan anggaran pemeliharaan	dilaksanakan sesuai perubahan anggaran	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	561.477.500	100%	560.270.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	536.900.000	100%	535.790.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Honorarium RT dan RW dan penyelenggaraan Rapat Koordinasi tingkat Kecamatan	100	536.900.00	100	535.790.00	Pandemi covid-19 mengakibatkan rapat koordinasi dihadiri undangan yang terbatas	Rapat koordinasi tingkat kecamatan tetap dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	24.577.500	100%	24.480.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Honorarium non PNS Lembur PNS dan Non PNS	12	24.577.500	12	24.480.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	91.570.000	100%	77.969.000			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	91.570.000	100%	77.969.000			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang tingkat kecamatan yang dilaksanakan	1	2.840.000	1	2.300.000	-	-	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pertemuan Rutin PKK Sosialisasi dan Sosialisasi	12	88.730.000	12	75.669.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	284.900.000	100%	284.900.000			
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	284.900.000	100%	284.900.000			
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Honorarium Pol PP Pelaksanaan HBN	12	284.900.000	12	284.900.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SILO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.417.298 .583	100%	2.071.406 .915			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.286.258 .208	100%	1.950.215 .903			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tambahan Tunjangan PNS	100	2.141.144 .308	100	1.805.103 .003	-	-	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya kebutuhan Administrasi Perkantoran dan terbayarnya Honorarium Pegawai Non PNS	100	145.113.9 00	100	145.112.9 00	PAPBD yang agak terlambat	Banyak pekerjaan dilakukan di akhir tahun	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	74.341.00 0	100%	67.280.00 0			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	74.341.00 0	100	67.280.00 0	PAPBD yang agak terlambat	Banyak pekerjaan dilakukan di akhir tahun	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	25.926.87 5	100%	24.624.01 2			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya kebutuhan belanja Listrik dan Rapat Koordinasi Kecamatan Silo	12	25.926.87 5	12	24.624.01 2	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Penyesuaian jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	30.772.50 0	100%	29.287.00 0			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Camat	1	21.019.00 0	1	20.162.00 0	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional kecamatan	1	9.753.500	1	9.125.000	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	990.975.000	100%	990.975.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	990.000.000	100%	990.000.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terbayarnya Honor RT RW se Kecamatan Silo	12	990.000.000	12	990.000.000	-	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	975.000	100%	975.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan pelayanan kepada masyarakat	100	975.000	100	975.000	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	58.075.000	100%	42.238.500			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	33.435.000	100%	32.000.000			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terselenggaranya Kegiatan Penurunan AKI AKB dan Stunting di Kecamatan Silo	100	33.435.000	100	32.000.000	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	
7.01.03 .2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	24.640.000	100%	10.238.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.02.0 3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Kegiatan PKK Kecamatan	10	24.640.00 0	10	10.238.50 0	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	314.167.00	50%	239.327.50			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	239.837.00	100%	239.327.50			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbayarnya honorarium Banpol PP dan terlaksananya Kegiatan Pencegahan Pandemi Covid 19	100	239.837.000	100	239.327.500	Pengurangan Anggaran pada PAPBD	Pengurangan jumlah kegiatan	
7.01.04 2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		100%	74.330.000	0%	0			
7.01.04 2.04.0 1				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	0	100	74.330.000	0	0			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SUKORAMBI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.818.549.493	81%	2.080.682.169			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.226.457.957	81%	1.530.800.871			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	2.208.471.957	72	1.514.428.871	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	persentase pemenuhan dasar operasional kantor	100	17.986.00 0	90	16.372.00 0	Tidak semua anggaran bisa terserap	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	540.066.5 36	99%	520.967.4 17			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	pemenuhan dasar operasional kantor	100	540.066.5 36	99	520.967.4 17	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	52.025.00 0	72%	28.913.88 1			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tetap dalam kondisi baik	100	20.853.50 0	99	19.688.88 1	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas jabatan tetap dalam kondisi baik	100	31.171.50 0	45	9.225.000	Tidak semua anggaran bisa terserap	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	487.300.000	92%	481.811.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	464.700.000	95%	464.461.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintah yang terfasilitasi	100	464.700.000	95	464.461.000	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	22.600.000	88%	17.350.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan umum kantor kecamatan	100	22.600.00 0	88	17.350.00 0	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	64.667.50 0	87%	56.152.00 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	64.667.50 0	87%	56.152.00 0			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	persentase pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	33.300.00 0	74	25.125.00 0	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase pemenuhan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial yang terfasilitasi	100	31.367.50 0	100	31.027.00 0	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	348.361.500	85%	283.256.000			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	348.361.500	85%	283.256.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	persentase pemenuhan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum yang terfasilitasi terlaksana peringatan upacara hari-hari besar nasional	100	348.361.500	85	283.256.000	(-)	Sudah Sesuai Dengan Anggaran Kas	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SUKOWONO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.807.303.150	98%	2.177.448.593			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.569.106.600	100%	1.961.917.193			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terpenuhinya hak dan kewajiban ASN	14	2.478.626.600	14	1.893.597.193	--	--	
7.01.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan Sukowono	100	90.480.000	100	68.320.000	--	--	
7.01.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	67.208.000	100%	66.039.900			
7.01.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prosentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	100	67.208.000	100	66.039.900	--	--	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	133.636.800	90%	113.328.300			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Jumlah Pemenuhan jasa pelayanan umum Kantor	100	133.636.8 00	90	113.328.3 00	--	--	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	37.351.75 0	100%	36.163.20 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase pemeliharaan mobil jabatan dengan baik	100	21.593.25 0	100	21.185.50 0	--	--	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terpenuhinya pemeliharaan untuk kendaraan operasional kantor	100	15.758.50 0	100	14.977.70 0	--	--	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	702.200.000	100%	692.600.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	654.000.000	100%	644.400.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya hak untuk RT dan RW tingkat Kecamatan	12	654.000.000	12	644.400.000	--	--	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	48.200.000	100%	48.200.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terpenuhinya administrasi kependudukan di Kecamatan Sukowono	100	48.200.000	100	48.200.000	--	--	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	107.131.000	100%	105.721.450			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	107.131.000	100%	105.721.450			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase terlaksananya Musrenbang tk Kecamatan	100	3.300.000	100	3.300.000	--	--	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terpenuhinya program kegiatan pemberdayaan masyarakat	100	103.831.0 00	100	102.421.4 50	--	--	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	262.300.0 00	100%	262.097.0 00			
7.01.04 2.02				Kordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	262.300.0 00	100%	262.097.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terpenuhinya program kegiatan ketertiban dan keamanan wilayah kecamatan Sukowono	100	262.300.000	100	262.097.000	--	--	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SUMBERBARU		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.444.154.479	99%	2.042.695.837			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	3.743.000	100%	3.743.000			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan Dokumen Perencanaan Lainnya yang disusun	4	3.743.000	4	3.743.000	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target	-	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.013.396.229	100%	1.646.735.796			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji PNS	14	2.013.396.229	14	1.646.735.796	-	-	
7.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	30.440.000	95%	25.975.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor	100	30.440.00 0	95	25.975.00 0	Dalam Proses	Kegiatan Sudah Dilaksanakan	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	323.591.0 00	95%	306.756.0 41			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase Pemenuhan Dasar Operasional Kantor	100	323.591.0 00	95	306.756.0 41	Kegiatan sudah dilaksanakan sesuai target	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	72.984.25 0	100%	59.486.00 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Layak Pakai	1	29.067.00 0	1	26.761.00 0	-	-	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang Layak pakai	1	22.832.25 0	1	17.675.00 0	masih belum mencapai target	sebagai bahan pertimbangan penganggaran tahun berikutnya	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dirawat	6	21.085.00 0	6	15.050.00 0	dalam proses	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	951.862.400	100%	945.060.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	930.902.400	100%	924.100.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rakor Tingkat Kecamatan	4	930.902.400	4	924.100.000	dikarenakan masih pandemi kegiatan di laksanakan kuran	apabila ada hal hal yang penting disampaikan lewat dari	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	20.960.00 0	100%	20.960.00 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan Umum yang diproses	10000	20.960.00 0	9996	20.960.00 0	Dalam Proses	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	42.066.60 0	100%	38.008.80 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	42.066.60 0	100%	38.008.80 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos (Musrenbang dan Kegiatan)	1	2.833.800	1	2.618.000	-	-	
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Rakor Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Kesos (musrenbang dan kegiatan PKK)	8	39.232.800	8	35.390.800	-	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	281.480.000	100%	280.790.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		100%	281.480.0 00	100%	280.790.0 00			
7.01.04 .2.04.0 1				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Bulan terlaksananya pengamanan ketertiban umum	12	281.480.0 00	12	280.790.0 00	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SUMBERJAMB E		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.672.437 .330	100%	1.810.489 .297			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.354.592 .830	100%	1.525.787 .121			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayarnya gaji dan tunjangan PNS	14	2.264.642 .830	14	1.449.429 .621	Mutasi pegawai mempengaruhi realisasi TPP hanya 62%	Penggangan khusus TPP akan lebih komprehensif	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase pemenuhan Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor /Kedinasan	100	89.950.00 0	100	76.357.50 0	-	-	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	121.096.9 00	100%	115.189.5 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan kantor	9	121.096.9 00	9	115.189.5 00	-	-	
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	136.029.6 00	100%	112.879.9 51			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rutin kantor	12	136.029.6 00	12	112.879.9 51	-	-	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	60.718.00 0	100%	56.632.72 5			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan yang terpelihara	1	30.397.00 0	1	27.120.00 0	-	-	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang terpelihara	2	30.321.00 0	2	29.512.72 5	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	742.536.000	89%	691.864.100			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	704.516.000	80%	655.480.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Rekomendasi hasil koordinasi tingkat kecamatan	120	704.516.0 00	96	655.480.0 00	Partisipasi pemerintahan desa dalam koordinasi pelaksanaan program kegiatan di desa kurang	Mendorong pemerintahan desa agar berperan aktif dalam mengungkapka n permasalahan, usulan, saran dalam rapat koordinasi	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	38.020.00 0	97%	36.384.10 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat tertib administrasi kependudukan	100	38.020.00 0	97	36.384.10 0	Masih ada penduduk Kecamatan Sumberjambe yang belum mempunyai KTP	Mensosialisasik an terus menerus kepada penduduk khusus remaja yang sudah wajib KTP untuk membuat KTP	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	337.265.500	93%	132.157.000			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	337.265.500	93%	132.157.000			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah usulan dari masyarakat yang ditampung dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100	9.050.000	90	8.390.000	-	-	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan untuk perempuan yang dilaksanakan	24	328.215.500	23	123.767.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	188.384.500	100%	188.384.500			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	188.384.500	100%	188.384.500			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Satlinmas Desa yang dibina	120	188.384.500	120	188.384.500	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN SUMBERSARI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	10.399.55 7.781	100%	10.399.37 7.781			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	14.418.00 0	100%	14.418.00 0			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tercukupinya Jumlah Dokumen Perencana yang disusun	100	14.418.00 0	100	14.418.00 0			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.988.632 .581	100%	8.988.452 .581			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji ASN dan Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan selama 14 Bulan	14	8.979.872 .581	14	8.979.872 .581	-	-	
7.01.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tercukupinya Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	100	8.760.000	100	8.580.000			
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	1.121.949 .700	100%	1.121.949 .700			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Oprasional Rutin Kantor / Kedinasan serta Peralatan / Inventaris Kantor dan Barang Persediaan yg didistribusikan	100	1.121.949 .700	100	1.121.949 .700	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	274.557.5 00	100%	274.557.5 00			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Dinas Jabatan	100	31.812.00 0	100	31.812.00 0	-	-	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Operasioanal Kantor	100	71.473.00 0	100	71.473.00 0	-	-	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharaan Bangunan Gedung Kantor	100	171.272.5 00	100	171.272.5 00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	3.143.855.000	100%	3.143.855.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	2.743.174.000	100%	2.743.174.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kegiatan Rakor Rutin, Serta Pembinaan RT/RW dan Aparatus Kelurahan Yang di bina	100	2.743.174.000	100	2.743.174.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	400.681.000	100%	400.681.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Jumlah Pelayanan Administrasi Kependudukan Dan Pelayanan Umum yg Di proses	100	400.681.000	100	400.681.000	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	2.780.869.500	36%	2.780.869.500			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	69.820.000	4%	69.820.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	25	69.820.000	1	69.820.000	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid	Dianggarkan tahun depan	
7.01.03 .2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		100%	2.711.049.500	52%	2.711.049.500			
7.01.03 .2.02.0 2				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	0	25	2.411.275.000	1	2.411.275.000	Tidak terlaksana karena Pandemi Covid	Dianggarkan tahun depan	
7.01.03 .2.02.0 3				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Di adakanya musrenbang anatar kelurahan dan kecamatan serta rakor / kegiatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (PKK) AKI/AKB Stunting yang difasilitasi	100	299.774.500	100	299.774.500	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	506.803.500	100%	506.803.500			
7.01.04.2.04				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah		100%	506.803.500	100%	506.803.500			
7.01.04.2.04.01				Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pembinaan personil petugas menjaga pengamanan lingkungan LINMAS serta koordinasi tanggap darurat bencana	100	506.803.500	100	506.803.500	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	114.120.000	100%	114.120.000			
7.01.05.2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	114.120.000	100%	114.120.000			
7.01.05.2.01.08				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rakor rutin yang dilaksanakan serta pembinaan RT/RW	100	114.120.000	100	114.120.000	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN TANGGUL		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.118.928.641	83%	2.785.966.956			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	7.328.000	100%	6.002.000			
7.01.01 2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	terselesaikannya dokumen perencanaan dan keuangan	100	7.328.000	100	6.002.000	Kegiatan sudah dilaksanakan	-	
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.909.093 .541	100%	2.599.359 .998			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya anggaran gaji asn	100	2.798.673 .541	100	2.490.699 .998	-	-	
7.01.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	tersedianya honor asn dan non asn dalam 1 tahun	100	110.420.0 00	100	108.660.0 00	-	-	
7.01.01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas ASN	100	0	0	0	Anggaran untuk belanja pakaian dinas di recofusing	-	
7.01.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	4.152.400	50%	3.143.000			
7.01.01 2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang memadai	100	0	0	0	Anggaran di recofusing	-	
7.01.01 2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak /banner dan penggandaan (fotocopy)	100	4.152.400	100	3.143.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	120.298.7 00	100%	104.314.4 58			
7.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi listrik dan wifi, dalam satu tahun	100	34.798.20 0	100	27.839.65 8	-	-	
7.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan alat rumah tangga	100	9.117.000	100	8.638.000	-	-	
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya alat tulis kantor, jasa kebersihan, makan minum pegawai dalam satu tahun	100	76.383.50 0	100	67.836.80 0	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	78.056.00 0	100%	73.147.50 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tersedianya jasa pemeliharaan dan bbm mobil dinas	100	37.408.50 0	100	34.838.50 0	-	-	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersediannya pemeliharaan rutin dan bbm mobil operasional	100	17.050.00 0	100	16.999.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tersedianya biaya pemeliharaan / rehabilitas gedung kantor dan bangunan lainnya	100	23.597.50 0	100	21.310.00 0	Nihil	Nihil	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	766.960.00	100%	762.400.00			
7.01.02 2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	751.120.00	100%	750.400.00			
7.01.02 2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya rakor tingkat kecamatan dan Honor RT/RW Kecamatan Tanggul	100	751.120.00	100	750.400.00	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	15.840.000	100%	12.000.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	persentase terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat	100	15.840.000	100	12.000.000	kegiatan Perjalanan dinas tetap dilaksanakan, tetapi tidak di SPJkan karena tidak sesuai dengan ketentuan	Belanja Perjalanan Dinas tidak di SPJkan	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	39.960.000	100%	34.353.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	39.960.00 0	100%	34.353.00 0			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terlaksananya kegiatan musrenbang	100	2.860.000	100	2.275.000	-	-	
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terlaksananya pertemuan rutin pkk dan pokja tingkat kecamatan, tersedianya honor Full timer dan pembelian bahan lainnya untuk pengulangan Covid 19	100	37.100.00 0	100	32.078.00 0	-	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	312.560.00	100%	312.200.00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	312.560.0 00	100%	312.200.0 00			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	tersedianya honor banpol dan kegiatan mobiling polpp	100	312.560.0 00	100	312.200.0 00	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN TEMPUREJO		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	1.926.306 .799	98%	1.543.299 .777			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.715.853 .965	99%	1.338.243 .403			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	100	1.640.473 .965	98	1.262.863 .403	Karena Anggaran Tambah Penghasilan Pegawai (TPP) lebih besar dibanding jumlah ASN yang ada, kelebihan sebesar Rp 348.424.000,00	Tahun depan d disesuaikan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase penyediaan honor pengelola keuangan, barang dan jasa kebutuhan penunjang administrasi dan operasional rutin kantor	100	75.380.000	100	75.380.000	-	-	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	164.909.334	98%	161.351.996			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Kebutuhan Kantor Kecamatan	100	164.909.334	98	161.351.996	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	45.543.500	97%	43.704.378			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Operasional mobil jabatan Camat	100	31.768.500	98	30.967.437	-	-	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Biaya Operasional Kendaraan Patroli dan roda dua	100	13.775.000	95	12.736.941	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	739.940.000	100%	739.610.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	667.260.000	100%	666.930.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Penyerapan Bantuan Keuangan Desa dan Terpenuhinya Pembinaan RT dan RW	100	667.260.000	100	666.930.000	-	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	72.680.000	100%	72.680.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Peran serta masyarakat dalam Peningkatan Pelayanan Umum	100	72.680.00 0	100	72.680.00 0	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	14.520.00 0	97%	14.140.00 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	14.520.00 0	97%	14.140.00 0			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase Penyerapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100	2.420.000	95	2.310.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Penyerapan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	100	12.100.00 0	98	11.830.00 0	-	-	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	310.381.5 00	100%	309.683.0 00			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	310.381.5 00	100%	309.683.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya honorarium banpol PP dan tanggap darurat bencana serta terpenuhinya mamin peringatan HUT RI	100	310.381.500	100	309.683.000	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN ARJASA		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.609.363.233	100%	2.567.539.181			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.389.824.805	100%	2.389.824.805			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhinya Gaji PNS dan TPP PNS Kec Arjasa	100	2.389.824.805	100	2.389.824.805	-	Kinerja ASN meningkat	
7.01.01 2.07				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	0	0%	0			
7.01.01 2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	137.580.428	100%	118.278.876			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	100	137.580.428	100	118.278.876	-	kinerja ASN meningkat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	51.229.00 0	100%	44.785.50 0			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	100	34.199.00 0	100	28.890.50 0	-	kinerja ASN meningkat	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	terpenuhinya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	100	17.030.00 0	100	15.895.00 0	-	kinerja ASN meningkat	
7.01.01 .2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	0	0	0	0	PAK	kinerja ASN meningkat	
7.01.01 .2.06				ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH		100%	30.729.00 0	100%	14.650.00 0			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	30.729.00 0	100	14.650.00 0	-	kinerja ASN meningkat	
7.01.01 .2.06.0 7				Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya pembuatan taman	0	0	0	0	PAK	kinerja ASN meningkat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	378.000.000	100%	378.000.000			
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	0	0%	0			
7.01.02.2.01				KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN		100%	378.000.000	100%	378.000.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terpenuhinya HONOR RT/RW	100	378.000.000	100	378.000.000		kinerja ASN meningkat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	85.933.000	100%	61.633.000			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	85.933.000	100%	61.633.000			
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	penurunan AKI,AKB,Stunting, covid 19, dan terbantunya dampak bencana	100	81.980.000	100	57.680.000	-	kinerja ASN meningkat	
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Kegiatan Musrenbang Kecamatan	100	3.953.000	100	3.953.000	-	Kinerja ASN meningkat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	234.421.000	100%	230.970.000			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	234.421.000	100%	230.970.000			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terbayarnya Honor Banpol PP	100	234.421.000	100	230.970.000	-	kinerja ASN meningkat	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN UMBULSARI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.280.273 .887	100%	2.235.337 .679			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.989.427 .239	100%	1.944.491 .031			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	terpenuhi gaji PNS dan TPP Kec. Umbulsari	14	2.989.427 .239	14	1.944.491 .031	kinerja sudah sesuai target tapi kelebihan anggaran sebesar Rp. 1.044.936.208	Berusaha memaksimalkan kinerja dan penyediaan anggaran di tahun berikutnya	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	95.284.15 2	100%	95.284.15 2			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya jasa Pelayanan Umum Kantor	100	95.284.15 2	100	95.284.15 2	-	-	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	128.154.4 96	100%	128.154.4 96			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100	104.604.9 96	100	104.604.9 96	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	23.549.50 0	100	23.549.50 0	-	-	
7.01.01 .2.09.1 0				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran	kegiatan tidak ada	
7.01.01 .2.07				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		100%	67.408.00 0	100%	67.408.00 0			
7.01.01 .2.07.0 6				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpenuhinya peralatan kantor	100	67.408.00 0	100	67.408.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	0	0%	0			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	0	0%	0			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional kantor	100	0	0	0	Tidak Ada Anggaran	kegiatan tidak ada	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	147.488.000	100%	32.701.200			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	147.488.000	100%	32.701.200			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	0	0	0	0	Tidak Ada Anggaran	berusaha memaksimalkan kinerja	
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	terpenuhinya penurunan AKI ,AKB, Stunting,COVID 19 dan bencana Alam	100	147.488.000	100	32.701.200	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	293.943.000	100%	293.943.000			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	293.943.000	100%	293.943.000			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terpenuhinya honor pol pp	100	293.943.000	100	293.943.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN WULUHAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.411.362 .167	100%	2.144.153 .221			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.090.782 .667	100%	1.839.636 .240			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100	2.011.202 .667	100	1.761.066 .240	Tidak ada masalah	Membuat laporan akhir	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhinya honor penatausahaan perangkat daerah kecamatan Wuluhan	100	79.580.00 0	100	78.570.00 0	Tidak ada masalah	Membuat laporan akhir	
7.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	37.450.00 0	100%	35.998.25 0			
7.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terpenuhinya kebutuhan mendasar untuk bekerja (seragam) pegawai di kantor kecamatan Wuluhan	100	37.450.00 0	100	35.998.25 0	Tidak ada masalah sudah dilaksanakan	Membuat laporan akhir	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	191.340.5 00	100%	180.375.9 81			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan kantor	100	191.340.5 00	100	180.375.9 81	Tidak ada masalah	Membuat laporan akhir	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	91.789.00 0	100%	88.142.75 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya kendaraan perorangan dinas yang terpelihara dengan baik	100	34.238.50 0	100	32.661.25 0	Usia kendaraan sudah tua	Perawatan harus lebih sering dilakukan	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya pemeliharaan kendaraan operasional dengan baik	100	32.050.50 0	100	30.036.50 0	Usia kendaraan sudah tua, 16 tahun	Perawatan harus lebih sering dilakukan	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya pemeliharaan gedung kantor dengan baik	100	25.500.00 0	100	25.445.00 0	Beberapa bangunan sudah waktunya dilakukan bongkar atap, sementara anggaran yang ada minim	Pemeliharaan dilakukan secukupnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	1.044.271.500	100%	1.044.271.500			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.009.200.000	100%	1.009.200.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terpenuhinya honor RT/RW	100	1.009.200.000	100	1.009.200.000	Tidak ada masalah	Membuat laporan akhir	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	35.071.500	100%	35.071.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Wuluhan	100	35.071.500	100	35.071.500	Tidak ada masalah	Membuat laporan akhir	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	339.689.500	100%	330.534.600			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	339.689.500	100%	330.534.600			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	100	339.689.500	100	330.534.600	Banyak kegiatan verifikasi yang mendadak dan waktunya singkat	Kegiatan - kegiatan harus di rencanakan dengan baik	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	207.200.000	100%	207.200.000			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	207.200.000	100%	207.200.000			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan patroli di wilayah kecamatan Wuluhan	12	207.200.000	12	207.200.000	Tidak ada	Membuat laporan akhir	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN PANTI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	3.552.881 .959	97%	3.210.428 .607			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	8.737.000	94%	3.756.000			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan dan operasional perangkat daerah	100	8.737.000	94	3.756.000	Kegiatan tidak maksimal karena kondisi pandemi Covid 19	Anggaran di alihkan pada kegiatan lain di PAPBD	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.651.661 .241	96%	2.324.999 .956			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100	2.549.011 .241	97	2.228.499 .956	Kegiatan tidak maksimal karena adanya mutasi dan Pensiun ASN	-	
7.01.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan	100	102.650.0 00	94	96.500.00 0	-	-	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	795.782.7 18	99%	787.508.9 26			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (ATK) yang diadakan Jumlah pengadaan yang disediakan Jumlah peralatan komponen instalasi listrik yang diadakan Persentase jumlah kegiatan yang membutuhkan makanan dan minuman Persentase jumlah tenaga/petugas kebersihan yang mendapatkan honorarium jasa Persentase penyediaan jasa listrik Persentase peralatan kerja yang diperbaiki Tenaga kebersihan kantor dan pengadaan alat dan bahan pembersih	100	795.782.718	99	787.508.926	-	-	
7.01.01 2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	96.701.000	98%	94.163.725			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat pemeliharaan rutin	100	33.129.000	99	32.229.810	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	10.973.00 0	98	10.553.41 5	-	-	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	100	52.599.00 0	98	51.380.50 0	-	-	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	25.229.50 0	96%	19.198.50 0			
7.01.02 2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	25.229.50 0	96%	19.198.50 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengadaan Alat Tulis Kantor	100	25.229.50 0	96	19.198.50 0	Kegiatan tidak maksimal karena adanya mutasi dan Pensiun ASN	Anggaran di alihkan pada kegiatan lain di PAPBD	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	98.783.00 0	100%	98.173.00 0			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	98.783.00 0	100%	98.173.00 0			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan dan kesehatan masyarakat	100	98.783.00 0	100	98.173.00 0	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	229.874.000	79%	220.145.000			
7.01.04.2.01				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%	22.674.000	57%	12.945.000			
7.01.04.2.01.01				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan ketertiban lingkungan dan tanggap bencana	100	22.674.000	57	12.945.000	Kegiatan tidak maksimal karena kondisi pandemi Covid 19	Anggaran di alihkan pada kegiatan lain di PAPBD	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	207.200.0 00	100%	207.200.0 00			
7.01.04 .2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase kegiatan ketertiban dan keamanan lingkungan Prosentase peningkatan disiplin aparatur	100	207.200.0 00	100	207.200.0 00	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN BALUNG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.520.690 .848	97%	2.251.091 .263			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.200.363 .898	100%	1.940.142 .211			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil	14	2.082.373 .898	14	1.826.052 .211	Nihil		
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah bulan pembayaran honorarium PNS	12	117.990.0 00	12	114.090.0 00	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan	sisa anggaran karena pengurangan penerima honor jasa pelayanan umum	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	7.349.500	100%	7.225.000			
7.01.01 .2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prosentase Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Perangkat Daerah	100	7.349.500	100	7.225.000			
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	104.884.5 00	100%	103.900.0 00			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpenuhi	11	104.884.5 00	11	103.900.0 00			
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	153.419.2 00	100%	150.773.5 00			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pemenuhan kebutuhan ATK, alat listrik, materai, peralatan kebersihan, dokumentasi dan dekorasi, pembayaran jasa kebersihan kantor, listrik, telepon, air, cetak dan penggandaan	12	153.419.2 00	12	150.773.5 00	Kebutuhan belanja sesuai yang dibutuhkan	Sisa anggaran karena efisiensi	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	54.673.75 0	90%	49.050.55 2			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dirawat atau dipelihara	100	25.641.00 0	97	24.916.43 0	Nihil	Sisa anggaran adalah sisa belanja perpanjang STNK	
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas / Operasional yang dirawat atau dipelihara	100	29.032.75 0	83	24.134.12 2	Kurangnya persyaratan untuk pelaksanaan kegiatan	Mencukupi persyaratan secara tepat waktu	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	597.374.8 00	28%	593.955.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	567.599.8 00	18%	566.255.0 00			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi seksi pemerintahan	569	567.599.8 00	100	566.255.0 00	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan	Nihil	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	29.775.00 0	39%	27.700.00 0			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen pelayanan administrasi kependudukan serta pelayanan umum yang di Proses	16000	29.775.00 0	6255	27.700.00 0	Karena adanya pandemi covid 19	Mengikuti prosedur prokes	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	87.965.000	86%	45.484.900			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	87.965.000	86%	45.484.900			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Rapat seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	353	17.346.000	253	12.599.900			
7.01.03.2.01.03				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta rapat kegiatan PKK	363	70.619.000	363	32.885.000	Kesalahan kode rekening belanja	Menempatkan kode rekening yang benar pada rincian belanja pada tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	199.753.200	100%	194.035.000			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	199.753.200	100%	194.035.000			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	- Jumlah bulan pembayaran honorarium Banpol PP (7 Orang) - Jumlah tamu undangan upacara dan pasukan pengibar bendera	12	199.753.200	12	194.035.000	Kegiatan sudah selesai dilaksanakan sesuai kebutuhan	Nihil	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN BANGSALSARI		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.712.665.412	89%	2.211.874.288			
7.01.01.2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.426.987.812	80%	1.945.838.236			
7.01.01.2.02.01				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN	100	2.426.987.812	80	1.945.838.236	Kegiatan sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja dan Penyesuaian Anggaran di tahun berikutnya	
7.01.01.2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	93.212.600	92%	86.169.450			
7.01.01.2.08.04				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor	100	93.212.600	92	86.169.450	Kegiatan sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja dan Penyesuaian Anggaran di tahun berikutnya	
7.01.01.2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	192.465.000	94%	179.866.602			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala	100	192.465.0 00	94	179.866.6 02	Kegiatan terlaksana sesuai targetKegiatan terlaksana sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja dan Penyesuaian Anggaran di tahun berikutnya	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	866.074.0 00	98%	857.633.8 00			
7.01.02 2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	856.784.0 00	99%	848.688.2 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terbayarnya honorarium RT/RW	100	856.784.000	99	848.688.200	Kegiatan terlaksana sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja	
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	9.290.000	97%	8.945.600			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	100	9.290.000	97	8.945.600	Kegiatan terlaksana sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja dan Penyesuaian Anggaran di tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	18.815.000	97%	18.294.850			
7.01.03.2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	18.815.000	97%	18.294.850			
7.01.03.2.01.01				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	18.815.000	97	18.294.850	Kegiatan terlaksana sesuai target	Berusaha memaksimalkan Kinerja dan Penyesuaian Anggaran di tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	268.724.100	97%	260.797.100			
7.01.04.2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	268.724.100	97%	260.797.100			
7.01.04.2.02.01				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase terselenggaraanya koordinasi ketertiban dan keamanan umum dan Prosentase terbayarnya Honorarium Banpol PP	100	268.724.100	97	260.797.100	Kegiatan terlaksana sesuai target	Memaksimalkan Kinerja di Tahun anggaran berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN GUMUKMAS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.693.418 .154	100%	2.316.388 .980			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.111.343 .854	100%	1.772.501 .108			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.023.643 .854	100	1.684.801 .108	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase terpenuhinya honor penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	100	87.700.00 0	100	87.700.00 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	499.716.3 00	100%	476.457.4 61			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar kantor	100	499.716.3 00	100	476.457.4 61	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	82.358.00 0	100%	67.430.41 1			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	100	29.093.00 0	100	24.655.91 1	NIHIL	NIHIL	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	100	25.219.50 0	100	18.955.00 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.01 2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor & Lingkungan Kantor	100	28.045.50 0	100	23.819.50 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	748.153.0 00	100%	743.543.4 00			
7.01.02 2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	734.400.0 00	100%	730.300.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 2.01.0 2				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terpenuhi Honor Rt/Rw	100	734.400.0 00	100	730.300.0 00	NIHIL	NIHIL	
7.01.02 2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	13.753.00 0	100%	13.243.40 0			
7.01.02 2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Gumukmas	100	13.753.00 0	100	13.243.40 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	54.844.50 0	100%	47.519.00 0			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	54.844.50 0	100%	47.519.00 0			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentasi Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terfasilitasi	100	3.805.000	100	3.145.000	NIHIL	NIHIL	
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat yang terfasilitasi	100	51.039.50 0	100	44.374.00 0	NIHIL	NIHIL	
7.01.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		100%	10.552.00 0	100%	8.725.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.05 .2.01				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%	10.552.00 0	100%	8.725.000			
7.01.05 .2.01.0 8				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah peserta rapat dengan muspika. dinas instansi sektoral dan tokoh masyarakat	100	10.552.00 0	100	8.725.000	NIHIL	NIHIL	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN JELBUK		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.646.409 .394	94%	2.131.058 .165			
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.402.167 .994	93%	1.960.164 .486			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	100	2.233.368 .694	80	1.824.236 .286	Kurangnya Anggaran Gaji pokok di bulan Desember tahun 2021	masih proses dalam penambahan anggaran kekurangan tahun berikutnya	
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	terpenuhinya kebutuhan rutin dan administrasi perkantoran	95	165.199.3 00	95	132.508.2 00	dikarenakan masa pandemi covid-19 yang mengurangi beberapa kegiatan	menyesuaikan dengan kegiatan yang ada	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 5				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	100	3.600.000	100	3.420.000	-	-	
7.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	127.095.000	83%	72.450.000			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kantor	12	127.095.000	10	72.450.000	dikarenakan ada pergeseran DPA tahun 2021 sehingga merubah anggaran yang sudah di tetapkan sebelumnya	menyesuaikan dengan kegiatan yang ada	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	56.988.500	90%	46.832.813			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terbayarnya Listrik dan internet dan jumlah peralatan dan gedung yang terawat	100	56.988.500	90	46.832.813	Nihil	menyesuaikan dengan belanja barang yang sudah berjalan dengan kegiatan yang ada	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	60.157.900	100%	51.610.866			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan jabatan yang terpelihara dengan baik	100	33.098.90 0	100	31.491.50 0	-	menyesuaikan dengan belanja yang sudah direncanakan dengan kegiatan yang ada sesuai DPA/RKA	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara dengan baik	100	10.059.00 0	100	8.045.500	-	menyesuaikan dengan belanja yang sudah direncanakan dengan kegiatan yang ada sesuai DPA/RKA	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara dengan baik	100	17.000.00 0	100	12.073.86 6	Nihil	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	381.394.500	94%	377.684.000			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	373.834.800	100%	370.180.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya rakor tingkat kecamatan dan sosialisasi	100	373.834.800	100	370.180.000	dikarenakan ada pergeseran DPA tahun 2021 sehingga merubah anggaran yang sudah di tetapkan sebelumnya	menyesuaikan dengan kegiatan yang ada	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	7.559.700	89%	7.504.000			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase terwujudnya pelayanan umum di masyarakat	90	7.559.700	80	7.504.000	Nihil	dilaksanakan sesuai protokol kesehatan saat tertentu namun menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di RKA	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	197.664.800	100%	170.307.845			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	197.664.8 00	100%	170.307.8 45			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan	100	3.695.000	100	1.849.500	-	-	
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tercukupinya kebutuhan operasional tanggap bencana alam dan penanganan Covid 19 Terlaksananya pelatihan kader PKK	100	193.969.8 00	100	168.458.3 45	dikarenakan masa pandemi covid-19 yang mengurangi beberapa kegiatan	dilaksanakan sesuai protokol kesehatan saat tertentu namun menyesuaikan dengan jadwal kegiatan di RKA	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN JENGGAWAH		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.432.205 .248	81%	2.149.120 .392			
7.01.01 .2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	5.608.000	95%	5.608.000			
7.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah laporan yang tepat waktu	100	5.608.000	95	5.608.000	-	-	
7.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	2.237.641 .254	100%	1.964.897 .277			
7.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Telah Dibayarkan	100	2.052.461 .254	100	1.779.717 .277	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor	100	185.180.000	100	185.180.000	-	-	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	148.549.244	95%	143.960.064			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor	100	148.549.244	95	143.960.064	Terdapat pemangkasan anggaran tahun 2021	Disesuaikan sesuai petunjuk lebih lanjut	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	40.406.750	60%	34.655.051			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100	30.156.750	90	25.789.745	Adanya pemangkasan anggaran tahun 2021	Disesuaikan sesuai petunjuk lebih lanjut	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100	10.250.000	90	8.865.306	Adanya pemangkasan anggaran tahun 2021	Disesuaikan sesuai petunjuk lebih lanjut	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana	100	0	0	0	Gedung tidak ada (kondisi rusak)	Anggaran di alokasikan untuk kegiatan lain	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	757.139.800	98%	757.139.800			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	754.800.000	100%	754.800.000			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan	100	754.800.000	100	754.800.000	-	-	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	2.339.800	95%	2.339.800			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses	100	2.339.800	95	2.339.800	-	-	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	34.374.000	88%	34.332.664			
7.01.03 .2.01				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	34.374.000	88%	34.332.664			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	2.335.000	95	2.335.000	-	-	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100	32.039.00 0	80	31.997.66 4	Tidak ada ketersediaan anggaran	Akan diupayakan pada tahun anggaran berikutnya	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	315.405.500	100%	315.331.210			
7.01.04 2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	315.405.500	100%	315.331.210			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Prosentase terselenggaraanya koordinasi ketertiban dan keamanan umum	100	315.405.500	100	315.331.210	-	-	
7.01.01	KECAMATAN	KECAMATAN JOMBANG		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	2.291.119.125	100%	1.495.363.269			
7.01.01 2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	1.895.522.125	100%	1.293.261.321			
7.01.01 2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	100	1.838.122.125	100	1.244.591.321	-	Ditingkatkannya Kinerja ASN	
7.01.01 2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pengelola Keuangan Yang diberi Honor	100	57.400.000	100	48.670.000	-	Akan Memaksimalakan Fungsi PPTK	
7.01.01 2.05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	19.795.500	100%	0			
7.01.01 2.05.0 2				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Belanja Pakian Dinas di Rofocusing	100	19.795.500	100	0	PAK	-	
7.01.01 2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	84.971.000	100%	83.005.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.01 .2.06.0 2				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	84.971.00 0	100	83.005.00 0	-	Penghematan peralatan dan Perlengkapan Kantor	
7.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	82.927.75 0	100%	50.119.47 6			
7.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya jasa Pelayanan Prima di Kantor	100	82.927.75 0	100	50.119.47 6	-	Kinerja Pelayan Umum ditingkatkan	
7.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	207.902.7 50	100%	68.977.47 2			
7.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Prasarana Mobil dinas yang Layak	100	37.163.50 0	100	33.936.67 2	-	Perawatan Mobil Dinas di tingkatkan	
7.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Mobil dinas Operasional yang Layak Pakai	100	9.880.750	100	9.564.500	-	Kinerja ASN lebih ditingkatkan	
7.01.01 .2.09.0 9				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan rumah dinas	100	160.858.5 00	100	25.476.30 0	-	Kinerja ASN lebih ditingkatkan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		100%	676.496.000	95%	664.071.825			
7.01.02.2.01				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	651.597.000	100%	646.697.500			
7.01.02.2.01.02				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah hasil koordinasi kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	651.597.000	100	646.697.500	-	Kinerja ASN lebih ditingkatkan	
7.01.02.2.02				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		100%	24.899.000	90%	17.374.325			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.02 .2.02.0 3				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Prosentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Jombang	100	24.899.000	90	17.374.325	-	Kinerja Pelayanan Umum ditingkatkan	
7.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		100%	209.044.000	100%	50.714.000			
7.01.03 .2.01				Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		100%	209.044.000	100%	50.714.000			
7.01.03 .2.01.0 1				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan yang terfasilitasi	100	2.706.000	100	1.879.000	-	Akan ditingkatkan tahun berikutnya	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.03 .2.01.0 3				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Penurunan AKI,AKB,Stanting dan Covid-19	100	206.338.0 00	100	48.835.00 0	-	Kinerja Pegawai Lebih ditingkatkan	
7.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		100%	315.165.0 00	100%	314.415.0 00			
7.01.04 .2.02				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		100%	315.165.0 00	100%	314.415.0 00			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
7.01.04 2.02.0 1				Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Honor Anggota BANPOL PP Terbayarkan	100	315.165.000	100	314.415.000	-	Kinerja BANPOL PP ditingkatkan	

3.1.8 Pelaksanaan Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Unsur Pemerintahan Umum Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
8.01.01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%	4.908.940.916	83%	3.558.685.574			
8.01.01 2.01				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	269.222.000	71%	187.526.500			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.01 .2.01.0 1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Kapasitas Kinerja Lembaga Aparatur Pemerintah	100	269.222.0 00	71	187.526.5 00	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	3.993.893 .880	77%	2.918.356 .334			
8.01.01 .2.02.0 1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	100	3.847.356 .032	54	2.766.899 .054	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.02.0 3				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya tenaga operasional/operator perkantoran	100	151.537.8 48	100	151.457.2 80	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.06				Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	144.396.8 00	93%	139.817.4 92			
8.01.01 .2.06.0 1				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Lancarnya dalam penanganan instalasi/penerangan kantor	0	3.202.500	100	3.197.500	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.06.0 4				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	terpenuhinya bahan logistik kantor	100	65.406.00 0	93	60.960.58 1	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.06.0 5				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	17.900.30 0	100	17.900.14 1	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.06.0 6				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Terbayarnya surat kabar/majalah	100	3.000.000	98	2.950.000	sudah sesuai dengan anggaran		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.01 .2.06.0 9				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	terpenuhinya rapat koordinasi dan konsultasi skpd dalam dan luar kota	100	49.608.000	76	49.574.450	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.06.0 8				Fasilitasi Kunjungan Tamu	tersedianya fasilitas tamu	100	5.280.000	99	5.234.820	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	216.087.736	86%	178.530.299			
8.01.01 .2.08.0 2				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa Telpon, Air dan Listrik kantor	100	88.710.000	59	52.675.779	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.08.0 3				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100	32.373.600	98	31.924.047	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.08.0 4				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa kebersihan/Penjaga malam/Tenaga Lipos/operator/Keamanan/Pendukung Administrasi/Sopir dll	100	95.004.136	100	93.930.473	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	138.805.500	100%	134.454.949			
8.01.01 .2.09.0 1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	tercukupinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100	26.373.500	100	25.691.250			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.01 .2.09.0 2				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tercukupinya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100	91.342.00 0	100	88.873.69 9	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.09.1 2				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	0	0	1.200.000	0	0			
8.01.01 .2.09.0 9				pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	0	100	19.890.00 0	100	19.890.00 0	sudah sesuai dengan anggaran		
8.01.01 .2.7				PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH								
8.01.01 .2.07.0 6				Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	terpenuhinya peralatan kantor	100	141.535.0 00	0	0	karena penggunaan perkada pada papbd peruntukannya hanya belanja rutin wajib dan mengikat	kedepan untuk menyesuaikan dengan perencanaan program dan kegiatan	



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.02			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		100%	335.482.500	93%	312.652.500			
8.01.02.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	335.482.500	93%	312.652.500			
8.01.02.2.01.02				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terselenggaranya kegiatan Kader Bela Negara , Forum Pembauran Kebangsaan	100	335.482.500	93	312.652.500	sudah sesuai dengan anggaran		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.03			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		100%	3.113.442.500	99%	3.107.595.000			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.03 .2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		100%	3.113.442 .500	99%	3.107.595 .000			
8.01.03 .2.01.0 2				Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	memberikan bantuan keuangan kepada 11 partai politik , terselenggaranya Forum silaturahmi bagi fungsionaris parpol dan terselenggaranya sosialisasi peraturan tentang politik	100	3.113.442 .500	99	3.107.595 .000	Masih ada konflik internal partai sehingga bantuan diserahkan pada bulan desember		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.04			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		100%	141.812.000	98%	141.282.055			
8.01.04.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat		100%	141.812.000	98%	141.282.055			
8.01.04.2.01.03				Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terselenggaranya silaturahmi Ormas di kabupaten Jember	100	141.812.000	98	141.282.055	sudah sesuai dengan anggaran		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.05			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		100%	109.599.700	52%	84.336.300			
8.01.05.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		100%	109.599.700	52%	84.336.300			
8.01.05.2.01.01				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	0	100	109.599.700	52	84.336.300	sudah sesuai dengan anggaran		



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.06			MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, MELALUI SINERGI DENGAN SELURUH ELEMEN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		100%	327.983.300	94%	301.408.772			
8.01.06.2.01				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		100%	327.983.300	94%	301.408.772			



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.06 .2.01.0 4				Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi Tim Wasdin dan terselenggaranya Sosialisasi Penguatan Wawasan Kebangsaan dalam menangkal ancaman tantangan hambatan gangguan di Kabupaten Jember	100	146.566.500	87	127.312.500	sudah sesuai dengan anggaran		1. memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban. 2. mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, dalam rangka pencegahan konflik sosial.



Kode	Bidang Urusan	OPD	Kebijakan	Program/ Kegiatan/ SubKegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahun 2021		Realisasi Tahun 2021		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
						Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
8.01.06 .2.01.0 5				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terselenggaranya rapat koordinasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	181.416.8 00	100	174.096.2 72	sudah sesuai dengan anggaran		1. memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban. 2. mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, dalam rangka pencegahan konflik sosial.



3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

No.	KEBIJAKAN STRATEGIS (Peraturan/Keputusan Bupati)	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
1.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 62 / 1.12 / 2020 tentang Tim Penyusunan Keputusan Bupati di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Keputusan Kepala Daerah
2.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 75 / 1.12 / 2020 tentang Tim Penyusunan Peraturan Bupati di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Produk Hukum Daerah Berupa Peraturan Kepala Daerah
3.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 72 / 1.12 / 2020 tentang Tim Program Pembentukan Peraturan Daerah	Permendagri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.	Penyusunan Propemperda Kabupaten Jember Tahun 2021
4.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 71 / 1.12 / 2020 tentang Tim Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Mensosialisasikan produk hukum daerah Kabupaten Jember
5.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 76 / 1.12 / 2020 tentang Tim Verifikasi dan Pelaporan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dan Kelompok Rentan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020	Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.	Verifikasi dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum Kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan di Kabupaten Jember.
6.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 77 / 1.12 / 2020 tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional	Pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum kepada masyarakat dan



No.	KEBIJAKAN STRATEGIS (Peraturan/Keputusan Bupati)	DASAR HUKUM	TUJUAN / MASALAH YANG DISELESAIKAN
	Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2020		perangkat daerah.
7.	Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45 / 77 / 1.12 / 2020 tentang Tim Rencana Aksi HAM Kabupaten Jember Periode Tahun 2020	Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018	Pelaksanaan RANHAM Kabupaten Jember Tahun 2020



3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

A. Urusan Pendidikan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus menyiapkan kurikulum dan program penekanan pendidikan informal terutama pada pendidikan karakter / keagamaan dengan menjalin kolaborasi atau kerjasama dengan ormas (NU, Muhammadiyah) serta lembaga pondok pesantren dan lembaga lainnya yang mempunyai konsen dan perhatian terhadap masalah tersebut.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar (Baca Tulis Al Quran)	Dilaksanakan pada tahun anggaran 2022	Dinas Pendidikan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk beasiswa dengan memperhatikan kriteria seleksi beasiswa yang mendasarkan pada prestasi dan mahasiswa kurang mampu.	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa		Dinas Pendidikan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera merealisasikan peningkatan kesejahteraan GTT/PTT dengan merevisi kebijakan honor agar lebih sesuai dengan UMK dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Dinas Pendidikan
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memikirkan nasib GIT yang melebihi batas usia 35 tahun dengan mempertimbangkan masa pengabdian untuk prioritas dimasukkan dalam formasi ASN dengan P3K				Di usulkan melalui BKPSDM untuk diusulkan ke Pemerintah Pusat	BKSDM
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera mengoptimalkan fungsi dan peran dewan pendidikan dalam menyusun konsep pendidikan berkualitas dan bermutu kedepan.				Dewan Pendidikan dilibatkan pada pengambilan keputusan tentang rekomendasi calon Kepala Sekolah	Dinas Pendidikan
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di era pandemi diharapkan memiliki terobosan untuk segera membuka pembelajaran tatap muka.				Dinas Pendidikan melaksanakan pembelajaran daring maupun luring	Dinas Pendidikan



B. Urusan Kesehatan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera melakukan dan menyampaikan pemetaan kebutuhan ideal tenaga kesehatan dan sekaligus segera menyusun program atau formasi untuk penentuannya.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Pemenuhan kebutuhan SDM Kesehatan	Dikes dan BKPSDM
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menghitung alokasi honor yang ideal bagi tenaga kesehatan dan sesuai dengan standart UMK dengan menyesuaikan pada kemampuan keuangan daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Penerapan standar honor sesuai UMK	Dikes



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menyiapkan program untuk pelatihan Tim Uji Kompetensi (UKOM) dan pelaksanaan Uji kompetensi perawat yang diadakan di kabupaten Jember	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Terbentuknya Tim UKOM Perawat	Dikes dan BKPSDM
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus menyiapkan program untuk jabatan fungsional bagi Bidan.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Tercukupinya Jumlah Bidan	Dikes dan BKPSDM



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menyiapkan dukungan anggaran dalam rangka untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).	Program Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan Ibu dan Anak dengan kegiatan upaya Program Persalinan Aman dan Pencegahan Komplikasi, ANC dan PNC berkualitas, Jaminan Biaya Persalinan dan Perawatan Bayi Resti, Penyelenggaraan sistem dan logistik rujukan, Penanganan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal	Koordinasi dan sosialisasi dukungan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan peran masyarakat dalam penurunan AKI dan AKB	Penurunan AKI dan AKB	Dikes, Dinas Pendidikan, DP3AKB, Kemenag, TP-PKK, Ormas, Organisasi Profesi



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial) agar warga mendapatkan fasilitas jaminan layanan kesehatan secara berkesinambungan serta mengoptimalkan perbaikan layanan kesehatan baik di puskesmas atau rumah sakit rujukan milik pemerintah sebagai prioritas untuk pemberian pelayanan pasien rujukan atas pendanaan dari sistem jaminan kesehatan yang bersumberkan dari APBD Kabupaten atau APBD Provinsi.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan cakupan masyarakat miskin untuk mendapatkan Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit yang ditunjuk maupun di Rumah Sakit Rujukan	Dikes, Dinsos dan Disdukcapil
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keikutsertaan masyarakat dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan secara Mandiri	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Masyarakat kabupaten jember menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional 98% pada Tahun 2024	Dikes, Dinsos dan Disdukcapil
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan kajian terhadap aset mobil ambulans desa agar peruntukannya bisa lebih optimal efektif dan efisien.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Kejelasan status aset Ambulance Desa apakah tetap ada di Dinas Kesehatan atau ada di desa	BPKAD dan DPMD



C. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera merealisasikan Peraturan Daerah tentang RDTR (Rencana Detail Tata Ruang).	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	DPRKP DAN CIPTA KARYA
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus disiplin dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek agar tepat waktu sehingga pembayarannya juga bisa dipastikan tepat waktu.				Membuat Kontrak dan Surat Perintah Kerja yang mengisyaratkan tentang waktu pelaksanaan Pekerjaan sehingga Pembayaran Keuangan disesuaikan dengan Progres fisik	DPRKP DAN CIPTA KARYA
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan pembangunan jalan dan jembatan terutama pada kondisi jalan yang sudah tidak layak.	Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	1. Pembangunan Jalan	Kegiatan Pembangunan Jalan 57 Paket	DPU BMSDA
				2. Pemeliharaan Rutin Jalan	Kegiatan Pemeliharaan rutin Jalan atau tutup lubang jalan untuk mengembalikan kondisi jalan	DPU BMSDA
				3. Rehabilitasi Jembatan	Terehabilitasinya Jembatan	DPU BMSDA



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
				4. Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan secara rutin	DPU BMSDA
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Meningkatkan aksesibilitas jalan dari jalan tanah menjadi jalan paving	DPRKP DAN CIPTA KARYA
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus fokus program antisipasi wilayah yang rawan dan berlangganan banjir.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	1. Kegiatan normalisasi di bendung dan saluran irigasi guna mencegah meluapnya air ketika hujan 2. Kegiatan piket banjir guna berjaga dalam mengatur pintu air atau laporan debit sungai/genangan di lapangan apabila diperlukan jika terjadi banjir	DPU BMSDA



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Pelatihan kepada petugas penakar hujan guna kesiapan petugas lapangan dalam melaporkan kejadian hujan dengan baik dan tepat setiap saat dalam keadaan darurat (bencana) maupun tidak.	DPU BMSDA
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Pengerukan dan pembersihan waled/ sampah di drainase/ gorong- gorong guna mengembalikan kapasitas saluran drainase semula	DPU BMSDA
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember diminta hadir dalam rangka melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaku usaha jasa konstruksi.				Pembinaan terhadap usaha jasa konstruksi pada tahun 2021 dalam proses pendataan	DPRKP DAN CIPTA KARYA



D. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Program pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) harus tetap dijalankan dengan penentuan sasaran dan pendataan harus mengoptimalkan fungsi Tim fasilitator Lapangan (TFL), RW/RT, dan pemerintahan desa, serta membubarkan keberadaan tim yang pembentukannya tidak diatur dalam ketentuan dan menjadikan inefisiensi anggaran.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1. Meminimalisir rumah yang tidak layak huni 2. Meningkatkan Kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masalah yang diselesaikan yaitu : Masyarakat Kabupaten Jember terbebas dari Rumah yang kurang sehat dan membahayakan	DPRKP DAN CIPTA KARYA
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera menerbitkan ketentuan pedoman, juklak, juknis untuk pelaksanaan program RTLH.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pedoman Umum Tahun 2021	DPRKP DAN CIPTA KARYA



E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus segera melakukan harus segera merealisasikan penataan PKL guna menciptakan kondisi lingkungan perkotaan yang asri terutama di kawasan kampus.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	a. Penataan PKL sesuai Perda PKL Kab. Jember dan Perda Trantibum b. Permasalahan belum adanya RDTR dan Relokasi	Satpol PP
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan bencana serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas bencana.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan koordinasi hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Penyusunan perda telah di tindak lanjuti tahun 2021 sampai saat ini dalam proses harmonisasi dari kemenkumham kemudian di terbitkan pengesahan yang selanjutnya akan dibahas di DPRD.	BPBD dan Bagian Hukum
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memetakan daerah rawan sosial, konflik dan keamanan serta merumuskan dan mengoptimalkan program mitigasi atas terjadinya konflik sosial serta gangguan keamanan dan ketertiban.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta	a. Terciptanya koordinasi antar Instansi/kesatuan terkait b. Terwujudnya Fasilitasi terkait permasalahan yang terjadi dan berkembang secara koordinatif	Bakesbang dan Politik



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
				Penanganan Konflik di Daerah		
				Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih mengintensifkan komunikasi dengan berbagai pihak yang terkait, dalam rangka pencegahan konflik sosial.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	a. Terciptanya koordinasi antar Instansi/kesatuan terkait b. Terwujudnya Fasilitasi terkait permasalahan yang terjadi dan berkembang secara koordinatif	Bakesbang dan Politik



F. Urusan Sosial

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menjalankan pendataan dan updating data kemiskinan daerah secara berkala (6 bulan sekali) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah Pusat.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial Updating data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data yang awalnya 6 bulan sekali menjadi 3 bulan sekali, dan dilakukan usulan, perbaikan yang harus sesuai prosedur	Dinas Sosial Kab Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus transparan dan berbasis kebutuhan dan data dalam pemberian saran dan prasarana terkait pemberdayaan warga miskin serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dalam memberikan bantuan kepada PMKS, Dinas Sosial terlebih dahulu melaksanakan asesment pada calon penerima bantuan/PMKS dengan tujuan bantuan tersebut tepat sasaran. Untuk PMKS yang belum masuk di DTKS akan diusulkan untuk masuk di DTKS tentunya harus sesuai prosedur	Dinas Sosial Kab Jember



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah daerah kabupaten Jember lebih serius dalam penanganan dan kepedulian terhadap disabilitas dengan mengimplementasikan secara maksimal pelaksanaan perda disabilitas serta peraturan bupati terkait disabilitas.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Dinas Sosial secara maksimal melaksanakan kegiatan penanganan Disabilitas , untuk Tahun 2022 antara lain : memfasilitasi kegiatan pengiriman disabilitas ke UPT Propinsi untuk melaksanakan pelatihan, memfasilitasi kegiatan program kaki dan tangan palsuProgram RS Sumber Glagah Mojoketo (Anggaran APBD Propinsi) bantuan alat kesehatan : 61 unit kursi roda (APBD Kab), dan pelayanan sosial lainnya pada disabilitas	Dinas Sosial Kab Jember



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial Kab Jember mulai Tahun 2021 telah membentuk Tim Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Kabupaten, yang terdiri dari Instansi terkait, Polres, Kejaksaan, Danramil, Koramil, Kecamatan, Himbara , dimana Tim tersebut bertugas memantau secara langsung permasalahan di tingkat bawah kelurahan/desa tentang permasalahan pendistribusian bantuan sosial pangan/BPNT, dan kemudian mencari solusi untuk pemecahan masalah di lapangan	Dinas Sosial Kab Jember



G. Urusan Ketenagakerjaan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong dan memfasilitasi berkembangnya industri kreatif dan digital dalam rangka untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mengatasi pengangguran.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Bertujuan meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan wirausaha bagi tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja	DISNAKER
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengoptimalkan <i>tripartit</i> dalam rangka untuk mencegah dan mengatasi persoalan perburuhan di Jember.	Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten Jember	Menjaga kondisi Hubungan Industrial yang Harmonis dan Dinamis dalam tataran masyarakat industri	DISNAKER
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan / industri terutama yang memperkerjakan tenaga kerja asing.				Kewenangan Pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur	



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran yang berkerja di luar negeri serta menjamin perlindungan baik pada pekerja migran maupun keluarganya	Program Penempatan Tenaga Kerja	Perlindungan PMI (Pekerja Migran Indonesia) baik yang pra maupun purna penempatan di daerah Kab/ Kota	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Perlindungan terhadap CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia)/ Pekerja Migran Indonesia baik yang melalui jalur prosedural (legal) maupun non prosedural (ilegal)	DISNAKER

H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus serius dalam melakukan pangarusutamaan gender disetiap OPD baik untuk pendataan, perencanaan program, serta anggaran.	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Bimtek PUG PPRG bagi Tim focal point OPD dan sosialisasi PUG PPRG bagi Tim Pokja PUG	DP3AKB
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Bimtek sekolah perempuan dan Pelatihan Peningkatan Keterampilan Perempuan	DP3AKB



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan kekerasan terhadap perempuan	DP3AKB
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan penanganan serius dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Jember	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Penanganan kekerasan terhadap anak	DP3AKB



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun perda kabupaten layak anak untuk mewujudkan Jember menjadi kabupaten layak anak.	Program Perlindungan Khusus Anak	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak dalam rangka Perlindungan anak	DP3AKB

I. Urusan Kependudukan dan Capil

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan kebijakan desentralisasi pelayanan kependudukan di kecamatan untuk mempercepat pelayanan ADMINDUK	Program Penunjang Urusan Daerah Kab/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan Aset Tak berwujud	1. Pelayanan WA online 2. SIP (masyarakat ke Dispenduk) 3. LAHBAKO Kecamatan (masyarakat pengajuan ke kecamatan) 4. LAHBAKO Desa (semua pengurusan melalui Desa ± 76 dan cetak dokumen kecuali KIA & KTP)	Dispendukcapil



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pelayanan ADMINDUK mudah, cepat dan gratis.	Program Penunjang Urusan Daerah Kab/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Melakukan pelayanan online 2. Dengan J. Monalisa mempermudah pelayanan kepada masyarakat 3.ADM 4. Pelayanan mudah, cepat, gratis 5. Jemput Bola OTS (On The Spot), Jempol Disko (Jemput Bola di Sekolah)	Dispendukcapil
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun perda kabupaten layak anak untuk mewujudkan Jember menjadi kabupaten layak anak.	Program Penunjang Urusan Daerah Kab/Kota	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), bagi anak usia 0- 17 tahun kurang 1 hari	Dispendukcapil



J. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan undang-undang tentang Desa termasuk pengalokasian anggaran penanganan Covid-19.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Penyusunan perbup untuk pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan BGH telah dilaksanakan pada TW I, dan telah difasilitasi dan disosialisasikan ke 226 desa di Kabupaten Jember	DPMD
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong berkembangnya BUMDes dalam rangka untuk peningkatan PAD desa dan menstimulus perekonomian masyarakat desa.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDES dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	226 desa di Kabupaten jember telah difasilitasi dan telah terbentuk total 226 BUMDesa aktif di Kabupaten Jember. Di Tahun 2021 juga telah dilaksanakan pendampingan untuk 8 BUMDesa terpilih berdasarkan status BUMDesa sebagai <i>pilot project</i> Pendampingan BUMDesa di Kabupaten Jember.	DPMD



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mengalokasikan anggaran pilkades dalam APBD dalam rangka mewujudkan demokrasi yang sehat dan memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kegiatan Pilkades serentak di 59 Desa di Kabupaten Jember telah dilaksanakan , dan 59 Orang Kades terpilih telah selesai dilantik pada bulan Desember Tahun 2021.	DPMD
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong lahirnya desa mandiri sebagai desa percontohan untuk desa-desa yang lain di kabupaten Jember.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kegiatan pendampingan kepada desa yang menerima dana bergulir perempuan eks-PNPM di 211 desa yang menerima, kegiatan permodalan untuk usaha perempuan ini secara langsung membantu meningkatkan penilaian IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) desa.	DPMD



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan BKK Provinsi, Jatim Puspa, dan Kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan TP PKK di Kabupaten Jember telah dilaksanakan, kegiatan ini secara langsung membantu meningkatkan penilaian desa dalam meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun (IDM).	DPMD



K. Urusan Perhubungan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong keberlanjutan operasional bandara dengan melakukan langkah-langkah inovasi guna meningkatkan jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan udara.	Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	• Tujuan : Dalam rangka menjamin keberlangsungan operasional Airline di Bandara Notohadi Negoro untuk rute di beberapa daerah baik di dalam maupun di luar provinsi Jawa Timur.	Dinas Perhubungan
					• Masalah yang diselesaikan : a. Orientasi kerja antara Airline dan Pemkab Jember yang berbeda bahkan cenderung bertolak belakang. Adapun orientasi Pemkab Jember adalah memberikan pelayanan transportasi yang efektif dan efisien kepada masyarakat, sedangkan Airline sebagai perusahaan penerbangan memiliki orientasi bisnis / Profit Oriented. b. Pemkab Jember harus dapat meyakinkan bahwa Airline tidak akan mengalami	



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					kerugian apabila memberi pelayanan di Kabupaten Jember. c. Diperlukan usaha dan inovasi nyata yang dapat menjamin ketersediaan penumpang dan barang untuk diangkut oleh Airline, sehingga Airline tersebut tidak mengalami kerugian dan terus berlanjut untuk memberikan pelayanan di Kabupaten Jember (tanpa mengabaikan regulasi yang berlaku).	



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember menjalin kembali komunikasi dengan Pemerintah Pusat, Angkasa Pura dan PTPNXII dalam rangka perluasan dan peningkatan layanan bandara.	Pengelolaan Penerbangan	Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	• Tujuan : Peningkatan mutu, kualitas, jenis dan cakupan penerbangan di Bandara Notohadi Negoro Jember. • Masalah yang diselesaikan :a. Terkait lahan yang ditempati oleh Bandara hingga saat ini belum adanya kesamaan visi, misi maupun aksi yang dapat menunjang peningkatan pelayanan penerbangan di Bandara. Hal ini dikarenakan terbentur dengan beberapa regulasi pada masing – masing pihak.b. Terkait dengan rencana pengembangan Operator atau Pengelola Bandara, permasalahannya adalah belum adanya program / rencana dari pihak Investor Operator Bandara terkait pengelolaan dan pengembangan Bandara Jember. Hal ini disebabkan karena adanya dampak Pandemi Covid-19 dan perubahan Manajemen serta kebijakan dari pihak Investor Operator Bandara.	Dinas Perhubungan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap pelaku transportasi umum konvensional akibat dari berkembangnya sistem transportasi online.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan /atau Barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Dilakukan pelatihan terhadap pelaku transportasi umum konvensional dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap pelaku transportasi umum konvensional , sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan dapat bersaing dengan pelaku transportasi online. Melakukan pelatihan terhadap pelaku transportasi umum konvensional dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pelatihan terhadap pelaku transportasi umum konvensional , sehingga dapat memberikan pelayanan secara maksimal dan dapat bersaing dengan pelaku transportasi online.● Melaksanakan kegiatan sertifikasi bagi sopir VVIP, sehingga dapat meningkatkan kecakapan dan kapasitas dari sopir VVIP tersebut	Dinas Perhubungan



L. Urusan Komunikasi dan Informasi

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan percepatan dan langkah-langkah untuk implementasi <i>E-Government</i> terutama dalam mendukung pelayanan.	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pembuatan dan pengembangan aplikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Penyediaan jaringan internet seluruh OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera meningkatkan manajemen keterbukaan informasi publik dengan ditunjang sistem informasi digital.	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	Pembuatan website PPID (Pejabat Pengelola Informasi Daerah) terlaksana pada Tahun 2021 dan PPID Pembantu sudah mengupload seluruh informasi yang ada pada OPD	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera menjalin kerjasama dengan pihak terkait penyediaan data dan informasi publik, salah satunya dengan BPS (Badan Pusat Statistik) dalam	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Bimbingan Teknis untuk petugas data statistik pada OPD bekerjasama dengan BPS	Dinas Komunikasi dan Informatika



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
	rangka mewujudkan program satu data.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Kependudukan	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	PKS dengan Dinas Pendidikan, PKS dengan BPJS, PKS dengan Dinsos, PKS dengan Bank, PKS dengan Dinkes, PKS dengan Diskominfo PKS dengan PA, dan Kemenag terkait Its bat Nikah	Dispendukcapil



M. Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih senus dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan UMKM serta wirausaha baru yang terdampak Pandemi Covid-19.	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Peningkatan, Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Melaksanakan Sosialisasi pasca Sertifikat Hak Atas Tanah (SHAT). Untuk pemberdayaan usaha mikro terhadap lembaga keuangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	1. Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
				Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1. Melaksanakan Bintek Perusahaan Industri Rumah Tangga (PIRT) 2. Melaksanakan Bintek Kemasan produk makanan olahan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
		Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Melaksanakan pelatihan pengolahan produk, promosi dan pemasaran bagi UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih serius dan konkrit dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan koperasi	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Pelatihan Sistem Pengendalian Internal (SPI)2. Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi (PenKes)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
		Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Melaksanakan Diklat SKKNI I dan II, 2. Melaksanakan Diklat Akuntansi Dasar I dan II, 3. Melaksanakan Pelatihan Pemasaran Hasil Produk Usaha Mikro I dan II	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk segera memfungsikan bangunan dan menetapkan pengelolaan Pusat Layanan Usaha KUMKM (PLUT KUMKM).	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Menerima konsultasi dan melaksanakan Bimbingan terhadap UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



N. Urusan Penanaman Modal

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan fungsi PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) agar terwujud kemudahan perijinan dengan menyederhakan pelayanan perijinan	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Mengoptimalkan Kegiatan Pelayanan Perizinan dan memberi Kemudahan Persyaratan Perizinan dengan menyesuaikan Peraturan Perundangan terbaru.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Meningkatkan Profesionalitas Kerja dan Etos Kerja dalam memberikan pelayanan Perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong penyelenggaraan pelayanan melalui Mall Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Pemeliharaan Barang Milik Daerah	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Melaksanakan Kegiatan Pindah Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember - Kantor Baru Dinas Penanaman modal dan PTSP memberikan Space / ruang untuk dinas/instansi vertical yang akan melaksanakan kegiatan cabangnya pada Dinas PM dan PTSP seperti : BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim , KPP dan Lain lain	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali keberadaan Forum CSR (Corporate Social Responsibility) dan membuat regulasi tentang CSR.	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	mengoptimalkan kembali keberadaan forum CSR (Corporate Social Responsibility)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Jember



O. Urusan Kepemudaan dan OR

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kembali kejayaan dan prestasi olah raga ditingkat regional maupun nasional	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Melaksanakan TC (training center) pada atlit-atlit Jember pada beberapa cabang olahraga dlm rangka persiapan menghadapi PORPROV Jatim ke VII pd thn 2022	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan anggaran dan program pembinaan prestasi untuk cabang olahraga potensial guna membantu promosi daerah.	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Mengefektifkan anggaran TC (training center) guna meningkatkan prestasi OR	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan reward dan fasilitas untuk atlet berprestasi baik regional maupun nasional	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Pemberian penghargaan untuk atlet Jember yang berprestasi dlm kejuaraan tingkat kabupaten, propinsi dan nasional sebanyak 222 atlit di tahun 2021	Dinas Kepemudaan dan Olahraga



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan fungsi Stadion JSG dan manajemen, kalau memungkinkan didorong pembinaan prestasi olah raga dan menghasilkan PAD.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Perawatan venue-venue milik Dispora untuk menjadi layak disewakan dan meningkatkan PAD, tidak hanya JSG tetapi juga GOR Argopuro, GOR PKPSO, Stadion Notohadinegoro, lapangan Talangsari & lapangan tenis	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

P. Urusan Kebudayaan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan pendataan dan program pembinaan pada kelompok dan pekerja seni dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Jember.	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Dalam rangka mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data. Pada tahun anggaran 2021 DISPARBUD Kab Jember bidang kebudayaan mengalokasi belanja kegiatan berupa nguri2 budoyo dan Wajib kepemilikan Kartu induk Kesenian bagi semua	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
					pekerja seni budaya yang ada di Kabupaten Jember. Adapun terkait pembinaan pada kelompok/pekerja seni budaya selain memberikan fasilitasi secara intens berupa workshop, peningkatan kompetensi maupun pelatihan/bintek baik pelaksanaannya di dalam dan luar kabupaten juga pencaangan oleh Bupat dengan tajuk “Jember Wayahe Fest 2021” dimana wujud konkretnya DISPARBUD Kabupaten Jember menggelar Atraksi Akbar berupa Pergelaran SPECTRUM FEST 2021 (Spektakuler Cerita, Tari Rupa dan Musik Festival 2021) dan diakhiri pergelaran Jember Nusantara (Sendratasik Arjasa-Roro Mangli” Antara Harga Diri dan Cinta Mati” yang dilaksanakan di TMII Jakarta	



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk merealisasikan pembangunan fasilitas berupa gedung atau arena pertunjukan seni dan budaya.	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Memberikan ruang seluas-luasnya bagi keberagaman ekspresi, nilai dan praktek seni budaya secara berkelanjutan. Sesuai petunjuk Bupati Jember nantinya Gedung Ex GNI akan dipergunakan antara lain sebagai Gedung Pertunjukan Kesenian dan Laboratorium pekerja Ekonomi kreatif , sembari menunggu pembangunan dilaksanakan untuk gedung pertunjukan sementara bisa dilakukan di Kantor Ex Dinas Sosial. Dimana Untuk Penganggaranya akan diusulkan di P APBD TA. 2022	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menyusun kalender event seni dan budaya unggulan Jember.	Program Pengembangan Kebudayaan	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Konsekuensi masih ditengah pandemi covid disamping pembatasan pemanfaatan ruang publik untuk semua atraksi seni budaya, juga refocusing anggaran yang besarnya cukup signifikan untuk kegiatan fasilitasi atraksi seni budaya. Terkait dengan hal tersebut diatas Tahun 2021 DISPARBUD Kabupaten Jember belum dapat melaunching kalender event seni budaya unggulan	Dinas Pariwisata Kebudayaan
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merealisasikan museum daerah untuk mengumpulkan, merawat dan mengamankan benda-benda bersejarah sekaligus sebagai sarana wisata edukasi	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	Membangun ruang/tempat yang lebih representatif dalam rangka melestarikan warisan budaya bersifat bendawi. Sesuai petunjuk Bupati Jember Gedung Ex Dinas Sosial nantinya ditetapkan sebagai Museum Daerah, dan diupayakan untuk Eskavasi Benda Cagar Budaya dan pembangunan interiornya diusulkan anggarannya di P APBD TA 2022	Dinas Pariwisata Kebudayaan



Q. Urusan Perpustakaan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong budaya literasi pada masyarakat dengan kolaborasi dan pemberdayaan pada komunitas literasi yang ada di Jember.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Mengadakan kegiatan bimtek pengelola perpustakaan sekolah, desa dan TBM (Taman Baca Masyarakat) untuk meningkatkan SDM dalam mengelola perpustakaan di wilayahnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan daerah (koleksi buku, gedung, serta perpustakaan digital, perpustakaan mobile).	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Mengembangkan koleksi buku perpustakaan dan koleksi e-book sebagai sarana perpustakaan digital melalui belanja pengadaan buku sebanyak 2.300 eksemplar dan e-book sebanyak 1.300 eksemplar	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mendorong pembinaan perpustakaan di fasilitas publik, kantor-kantor pemerintah serta di desa.	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan melaksanakan gelar pustaka dengan kendaraan perpustakaan keliling bagi masyarakat	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Jember



R. Urusan Perikanan dan Kelautan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan kembali potensi perikanan yang dimiliki Jember	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan potensi ikan hias terutama ikan koi melalui kegiatan kontes	Dinas Perikanan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan Nelayan.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Fisibility Study alur pelayaran nelayan Puger, untuk menurunkan angka kecelakaan laut dan melancarkan lalu lintas perahu nelayan di Puger	Dinas Perikanan
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk meningkatkan perlindungan dan keselamatan Nelayan					
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk memanfaatkan keberadaan TPI (tempat pelelangan ikan) dan Cold Storage milik daerah untuk menjaga stabilitas harga hasil tangkapan nelayan.	Pengelolaan Perikanan Tangkap	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dibentuknya UPTD TPI untuk meningkatkan pelayanan TPI	Dinas Perikanan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember melakukan pembinaan dan pendampingan kepada kelompok pelaku usaha di bidang perikanan air tawar.	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan SDM perikanan , bantuan sarpras dan pendampingan bagi 13 pokdakan	Dinas Perikanan

S. Urusan Pariwisata

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus lebih meningkatkan promosi dan perbaikan fasilitas pendukung untuk meningkatkan kunjungan dan PAD dari sektor wisata.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	Peningkatan promosi melalui kegiatan pameran pariwisata dan perbaikan fasilitas promosi melalui kegiatan branding wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan destinasi aset daerah dengan melakukan penjajakan dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga secara profesional.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib menyusun <i>Calender of Event</i> tahunan dengan melibatkan semua pelaku pariwisata.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk lebih meningkatkan kolaborasi antara pilar pendukung dan pelaku wisata yaitu Hotel, Restoran, Lemabagabiro perjalanan, pengelola destinasi serta desa wisata, pelaku budaya dalam mengembangkan sektor wisata unggulan daerah.	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Focus Group Discussion Pengembangan pemasaran pariwisata dengan tema semangat bersepakat saling menghidupi	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mendorong terbentuknya desa wisata di beberapa desa yang potensial untuk menambah jumlah dan variasi destinasi wisata.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten / Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten / kota	Pengenalan potensi desa wisata melalui Jelajah Desa Wisata (Kemiri, Kamal dan tanoker)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



T. Urusan Pertanian

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus hadir dan melakukan pendampingan kepada petani melalui kelompok tani untuk melakukan langkah-langkah peningkatan produktifitas petani menuju petani sejahtera.	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	- Pelatihan teknis kopi bagi petani bagi petani	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				2. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	- Sekolah Lapang	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus melakukan edukasi dan pendampingan lebih intensif untuk mengurangi ketergantungan petani kepada pupuk bersubsidi sekaligus meningkatkan kesadaran penggunaan pupuk organik.	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus menjamin ketersediaan pupuk sepanjang tahun dan menjaga stabilitas harga panen.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung	Bantuan Pupuk NPK Non Subsidi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi dan teknologi pertanian (alsintan).	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bantuan Alsintan berupa : Hand Traktor dan Cultivator, Kendaraan Roda 3, dll.	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus mendorong kelompok tani atau GAPOKTAN untuk memiliki dan mengembangkan sektor hilir yaitu penggilingan dan pengemasan hasil panen.	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Bantuan Mesin Sangrai Kopi	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
6	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera menyusun lahan kebijakan penetapan pertanian berkelanjutan untuk mengantisipasi banyaknya pengalihan lahan pertanian produktif menjadi pemukiman dan industri	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1. LP2B dan Kesuburan Tanah	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
				Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Lainnya	2. Pemetaan Lokasi (Hortikultura) dan Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan
7	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan peran Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian sesuai dengan tupoksinya dilapangan	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	- Pelatihan teknis kopi bagi petani bagi petugas	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
8	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus memfungsikan RMU (rice milling unit/unit penggilingan padi) dan resi gudang yang dimiliki beberapa OPD untuk membantu menjaga stabilitas harga panen	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan bantuan infrastruktur lumbung pangan beserta sarprasnya.	Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan

U. Urusan Perdagangan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera merealisasikan terbentuknya BUMD Pasar guna mewujudkan manajemen pengelolaan pasar lebih profesional sekaligus sebagai penambah PAD	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Revitalisasi pasar sudah dilaksanakan dengan mengacu atau dengan pendekatan pada SNI Pasar Rakyat yaitu SNI 8152:2015 dan Permendag nomor 37 tahun 2017 untuk pembentukan BUMD masih dalam proses pengkajian.	Disperindag



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program sinergi pemasaran produk UMKM dengan pasar berjangkauan	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota	Pembinaan Pelaku usaha Ekpor	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember membuat kebijakan dan program sinergi pemasaran produk IKM dengan melakukan pembinaan sehingga mereka dapat memenuhi standar yang di butuhkan pasar global	Disperindag

V. Urusan Industri

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera membuat perencanaan dan program dalam menumbuhkan kluster industri berbasis pertanian.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri	Untuk membuat kluster industri sebelumnya harus menyesuaikan dengan RTRW, RDTR dan KHLS dan ada Perda tentang RPIK, sampai saat ini Perda RPIK belum selesai dan masih dalam tahap studi kelayakan, untuk tahun 2021 sudah dilakukan studi kelayakan di Bappeda, dan akan ditinda lanjuti dengan usulan rancangan pembuatan perda dan Disperindag sendiri telah melakukan upaya pembentukan KIHT dengan melakukan studi banding ke kudu dan melakukan FGD	Disperindag



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mendorong terbentuknya wirausaha baru sektor industri berbasis potensi unggulan daerah.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Menumbuhkan Wira Usaha Baru Berdasarkan potensi unggulan daerah	Disperindag
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2003 Tentang Pengusahaan Pertembakauan di Jember untuk memberikan perlindungan kepentingan petani dan pengusaha tembakau di Jember.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Untuk melindungi kepentingan petani dan pengusaha tembakau perlu adanya sosialisasi peraturan perundangan kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai tembakau kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialisasi itu diharapkan terjadi penurunan terhadap rokok ilegal	Disperindag



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih mengoptimalkan dana DBHCHT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Untuk melindungi kepentingan petani dan pengusaha tembakau perlu adanya sosialisasi peraturan perundangan kaitannya dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai tembakau kepada masyarakat. Sehingga dengan adanya sosialisasi itu diharapkan terjadi penurunan terhadap rokok illegal	Disperindag
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember mengoptimalkan program untuk peningkatan peran dan fungsi Komisi Urusan Tembakau Jember (KUTJ)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2003 perlu untuk dioptimalkan atau perlu dilakukan amandemen agar bisa mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan antara petani tembakau dan pengusaha tembakau	Disperindag



W. Urusan Administrasi Pemerintahan

No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
1	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember lebih tertib lagi dalam perencanaan program dan anggaran dengan didasarkan fungsi, indicator program dan jenis belanja sebagaimana yang diatur dalam undang-undang keuangan negara.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan:Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Merencanakan Program dan Kegiatan di bagian tata pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Jember
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah		
2	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember segera mengisi kekosongan jabatan yang ada sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Penataan Administrasi Pemerintahan	Koordinasi, sinkronisasi kebijakan kepegawaian, administrasi pemerintahan (lintas OPD)	Bagian Tata Pemerintahan Setdakab Jember/ Bagian Organisasi/ BKPSDM
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi		
		Program Kepegawaian Daerah	Mutasi dan Promosi ASN	- Pengelolaan Mutasi ASN - Pengelolaan Promosi ASN	-	BKPSDM



No	Rekomendasi Tahun 2020	Tindak Lanjut			Tujuan/Masalah yang diselesaikan	OPD
		Program	Kegiatan	Sub-Kegiatan		
3	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan capaian kinerja pengelolaan anggaran dengan meningkatkan status <i>Disclaimer</i> menjadi WTP serta peningkatan kinerja program melalui peningkatan nilai SAKIP.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Penataan Organisasi	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Peningkatan kinerja pengelolaan anggaran, kinerja pemerintahan melalui penyusunan LPPD (lintas OPD)	Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Organisasi
4	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember harus meningkatkan kinerja birokrasi yang lebih profesional dan mampu menjalin kerjasama baik vertikal maupun horisontal.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan fasilitasi Kerjasama Daerah	Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	Peningkatan kinerja birokrasi melalui kerjasama antar daerah dan kerjasama dengan pihak ketiga	Bagian Tata Pemerintahan
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Jember wajib meningkatkan clean <i>government</i> sebagaimana dijanjikan dalam RPJMD dengan kuantitas OPD yang sudah menjalankan Zona Integritas wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas melayani.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	Sub Kegiatan: Penataan Administrasi Pemerintahan	Meningkatkan integritas pegawai utamanya di kecamatan dan kelurahan melalui disiplin kerja dan pelayanan prima kepada masyarakat	Bagian Tata Pemerintahan
				Sub Kegiatan: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatkan pelayanan di kecamatan melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Bagian Tata Pemerintahan

4

Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan



Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan merupakan kinerja atas Tugas Pembantuan Daerah dan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat (11) bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi sehingga pemberian tugas pembantuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum serta ditujukan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, membantu penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Sedangkan Tugas Umum Pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang



didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan, Hambatan/ Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian dan Tugas Umum Pemerintahan Kabupaten Jember Tahun 2021:

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas Pembantuan

Tugas pembantuan pada dasarnya merupakan keikutsertaan Daerah atau Desa termasuk masyarakatnya dalam rangka mendukung kebijakan nasional, provinsi ataupun kebijakan pemerintah kabupaten dengan pendekatan efisiensi, yaitu dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya untuk mendapatkan ketepatan, kepastian, dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan urusan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan anggaran-anggaran dalam bentuk Dana Tugas Pembantuan kepada daerah untuk penyelenggaraan tugas tersebut.

Pelaksanaan tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau disebut juga dengan tugas pembantuan, urusan bersama dan kantor pusat diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta percepatan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa yang dimaksud dengan dana tugas pembantuan memiliki pengertian sebagai berikut : (1) Merupakan belanja kementerian/lembaga pusat yang alokasinya berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga pusat; (2) Digunakan untuk membiayai



pelimpahan tugas pembantuan kepada kepala daerah dan/atau desa; (3) Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan RAPBD; (4) Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah; (5) OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah yang selanjutnya dilaporkan ke kementerian/lembaga yang menugaskan; (6) Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik negara namun dapat dihibahkan kepada daerah; (7) Dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik; (8) Tidak memerlukan dana pendamping; (9) Penerimaan dan saldo kas disetorkan ke kas umum negara.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi”*. Sedangkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, bahwa yang dimaksud Tugas Pembantuan adalah *“Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”*.

Landasan hukum kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan) Tahun 2020 di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan.
11. Peraturan Menteri Keuangan 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
12. Peraturan Menteri Keuangan 156 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan 248 Tahun 2010.

Berikut dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2021 ini meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember untuk melaksanakan tugas tertentu.

4.1.1 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan mengenai dana tugas pembantuan diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang berisikan penjelasan umum dana tugas pembantuan, penganggaran dana tugas pembantuan, penyaluran dana tugas pembantuan serta pertanggungjawaban dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan.

Dana Tugas Pembantuan untuk Kabupaten Jember pada Tahun 2021 sebesar Rp. 127.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.1
Alokasi Dana Tugas Pembantuan Tahun 2021 Kabupaten Jember

No.	Instansi	Alokasi
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	127.000.000
	Jumlah	127.000.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Jember Tahun 2021

4.1.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Secara keseluruhan ada 1 (satu) program Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total anggaran Rp.127.000.000,- sedangkan dari APBD Kabupaten Jember tidak ada penambahan, sehingga total anggaran sebesar Rp.127.000.000,-. Dari total anggaran tersebut yang bisa diserap sebesar Rp.79.497.500,- untuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi atau seluruhnya terserap 62,60%. Adapun program yang dimaksud adalah sebagai berikut:



A. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Dasar Hukum

- a. BKK Provinsi : Surat Pemprov Jatim Sekretariat Daerah Tanggal 15 Januari 2021, Nomor : 412.2/278/112.3/2021, Perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim Tahun 2021.

2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jatim.

3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember

4. Program dan Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya

Anggaran Tugas Pembantuan yang dialokasikan dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan Sub Kegiatan Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana tertuang sebagai berikut:

1. Kegiatan BKK Provinsi sebesar Rp127.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Honor Panitia Pelaksana PNS Kegiatan sebesar Rp15.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Honor Panitia Pelaksana PNS Kegiatan sebesar Rp15.000.000,-

- b. Honor Panitia Pelaksana NON PNS Kegiatan sebesar Rp4.500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Honor Panitia Pelaksana NON PNS Kegiatan sebesar Rp4.500.000,-

- c. Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos sebesar Rp1.200.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:

- Belanja Materai sebesar Rp500.000,-



- d. Belanja Penggandaan sebesar Rp600.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Penggandaan sebesar Rp0,-
- e. Belanja Seragam sebesar Rp16.117.500,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Penggandaan sebesar Rp15.875.000,-
- f. Belanja ATK sebesar Rp4.282.500,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja ATK sebesar Rp4.282.500,-
- g. Belanja ATK Bimtek sebesar Rp3.500.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja ATK sebesar Rp1.000.000,-
- h. Belanja Mamin sebesar Rp13.400.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Mamin sebesar Rp4.020.000,-
- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp48.000.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp27.520.000,-
- j. Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp20.400.000,- yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Honor Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp6.800.000,-

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Anggaran berasal dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA. 2021 sebesar Rp127.000.000,-

6. Realisasi

Dana Anggaran Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa sebesar Rp127.000.000,-, dapat terealisasi sebesar Rp79.497.500,- atau dalam capaian persentase sebesar 62.60% dengan rincian:



1. BKK Provinsi dari pagu anggaran sebesar Rp 127.000.000,- terealisasi sebesar Rp79.497.500,- atau dengan capaian 62.60% yang terdiri:
 - a. Honor Panitia Pelaksana PNS kegiatan output kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp15.000.000,- terealisasi sebesar Rp15.000.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Honor Panitia Pelaksana PNS Kegiatan sebesar Rp15.000.000,- terealisasi sebesar Rp15.000.000,-
 - b. Honor Panitia Pelaksana Non PNS kegiatan output kegiatan dari pagu anggaran sebesar Rp4.500.000 terealisasi sebesar Rp4.500.000,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - honor Panitia Pelaksana Non PNS Kegiatan sebesar Rp4.500.000,- terealisasi sebesar Rp4.500.000,-
 - c. Belanja Perangko, Materai dan Benda pos lainnya dari pagu anggaran sebesar Rp1.200.000,- terealisasi sebesar Rp500.000,- atau dengan capaian 41.67% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Materai dari pagu anggaran sebesar Rp1.200.000,- terealisasi sebesar Rp500.000,-.
 - d. Belanja Penggandaan dari pagu anggaran sebesar Rp600.000,- tidak terealisasi atau 0% karena beberapa kegiatan yang direncanakan secara luring, diputuskan dilaksanakan secara daring karena situasi pandemi, sehingga kebutuhan berupa penggandaan materi tidak diperlukan.
 - e. Belanja Seragam dari pagu anggaran sebesar Rp16.117.500,- terealisasi sebesar Rp15.875.000,- atau dengan capaian 98,50% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
 - Belanja Seragam dari pagu anggaran sebesar Rp16.117.500,- terealisasi sebesar Rp15.875.000,-



- f. Belanja ATK dari pagu anggaran sebesar Rp4.282.500,- terealisasi sebesar Rp4.282.500,- atau dengan capaian 100% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Belanja ATK dari pagu anggaran sebesar Rp4.282.500,- terealisasi sebesar Rp4.282.500,-
- g. Belanja ATK Bimtek dari pagu anggaran sebesar Rp3.500.000,- terealisasi sebesar Rp1.000.000,- atau dengan capaian 28,57% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Belanja ATK Bimtek dari pagu anggaran sebesar Rp3.500.000,- terealisasi sebesar Rp1.000.000,-
- h. Belanja Mamin dari pagu anggaran sebesar Rp13.400.000,- terealisasi sebesar Rp4.020.000,- atau dengan capaian 30,00% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Belanja Mamin dari pagu anggaran sebesar Rp13.400.000,- terealisasi sebesar Rp4.020.000,-
- i. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp48.000.000,- terealisasi sebesar Rp27.520.000,- atau dengan capaian 57,33% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dari pagu anggaran sebesar Rp48.000.000,- terealisasi sebesar Rp27.520.000,-
- j. Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi pagu anggaran sebesar Rp20.400.000,-, terealisasi sebesar Rp6.800.000,- atau dengan capaian 33,33% yang memiliki rincian keluaran (*output*) sebagai berikut:
- Belanja Honorarium Narasumber BKK Provinsi sebesar Rp20.400.000,- terealisasi sebesar Rp6.800.000,-



4.1.2 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan di Bawahnya

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Jember tidak memberikan dana bantuan untuk Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Desa.

4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

Hambatan/Permasalahan Tugas pembantuan Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi dalam perencanaan pelaksanaan kedepan dan berikut Hambatan/Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya.

4.2.1 Hambatan/Permasalahan Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang Diterima dari Pemerintah tingkat Atasnya

Tugas pembantuan yang telah diterima Kabupaten Jember diantaranya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari pelaksanaan tersebut terangkum permasalahan dan solusi yang dihadapi serta evaluasi dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan Kabupaten Jember. Berikut hambatan/permasalahan dan solusi OPD, diantaranya:

4.2.1.1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Pembantuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya terdapat 1 Program diantaranya:

A. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Dari Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat terdiri dari 1 Kegiatan, diantaranya: (1) Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi.

Dalam satu program diatas dapat disimpulkan permasalahan dan solusi adalah:



Permasalahan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi:

- Keterlambatan pencairan dana BKK untuk beberapa Desa, sehingga proses realisasi mendekati akhir tahun anggaran.
- Adanya keterlambatan pengajuan dokumen administrasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) di beberapa Desa.

Solusi:

- Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Telah dilakukan pengarah dan pendampingan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) untuk segera diselesaikan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.

4.3 Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan

Sebagai pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menyelenggarakan tugas umum pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Pelaksanaan tugas tersebut menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan sebuah pemerintahan yang mampu menerapkan asas-asas hukum yang dapat menciptakan ketertiban umum dan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 363 ayat (2) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, dan saling menguntungkan. Selanjutnya, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan tersebut dilaksanakan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, yang dituangkan dalam bentuk pelaporan yang meliputi tugas sebagai berikut:



1. Kerjasama Antar Daerah
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
4. Pembinaan Batas Wilayah
5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
6. Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
8. Tugas-tugas Umum Pemerintahan Lainnya yang dilaksanakan oleh Daerah

Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2021 hanya menyelenggarakan 6 (enam) Tugas Umum Pemerintahan karena Pemerintah Kabupaten Jember tidak memiliki kawasan khusus yang dikelola dan tidak melaksanakan tugas umum pemerintahan daerah lainnya.

Prinsip-prinsip yang dianut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, yaitu efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional, serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam berbagai bidang pembangunan daerah menghasilkan aliran dana pembangunan, baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hasil dari dana tersebut dapat mendukung pencapaian sasaran program / kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Sedangkan kerjasama dengan pihak ketiga diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat. Guna menciptakan situasi ketenteraman, keamanan dan ketertiban yang kondusif.

Pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah yang



ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja sama Daerah.

Adapun penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2021 dapat dilaporkan sebagai berikut:

4.3.1 Kerja Sama Antar Daerah

Dalam tahap implementasi, kerja sama antar daerah didasarkan atas asas saling menguntungkan. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya membangun kerja sama yang baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kerja sama Daerah Kabupaten Jember maka pada Tahun 2021 dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Jember Nomor: 188.4/22/SEKDA/1.12/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021. Tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mengkoordinasikan kerja sama daerah;
2. Menyusun pemetaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah (KSDD) dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
3. Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergiantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;



6. Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDBK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;
7. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDBK serta Nota Kesepakatan Sinergi;
8. Mengkoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDBK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDBK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan daerah; dan
10. Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDBK, serta Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada Tahun 2021, melalui TKKSD Kabupaten Jember telah difasilitasi pelaksanaan kerja sama daerah sebagai berikut:

1. Kerja Sama dengan Pemerintah Provinsi Jatim tentang Pembangunan Daerah.
2. Kerja Sama dengan Pengadilan Negeri Jember kelas IA tentang Sinergi Pelaksanaan Program Tilik Desa/Kelurahan dalam rangka mendekatkan pelayanan PN Jember kelas IA kepada masyarakat desa/kelurahan di Kabupaten Jember.
3. Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Jember tentang Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Kerja Sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik Badan Cyber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.



5. Kerja Sama dengan PTPN XII tentang Pengembangan Pembangunan Bandar Udara Notohadinegoro.
6. Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan/Atau Kelurahan di Kabupaten Jember.
7. Kerja Sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
8. Kerja Sama dengan Pengadilan Agama Jember tentang Sinergi Dalam Bidang Penegakan Hukum Keluarga di Kabupaten Jember.
9. Kerja Sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta tentang Peningkatan Kompetensi ASN dalam Mendukung Transformasi Digital di Pemerintah Kabupaten Jember.
10. Kerja Sama dengan Pemkab Blitar tentang Pembangunan Daerah.
11. Kerja Sama dengan Perpustakaan Nasional RI tentang Kerja Sama Perpustakaan dalam rangka Peningkatan Gerakan Membaca dan Gerakan Literasi Untuk Kesejahteraan.
12. Addendum Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Jember tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember.
13. Kerja Sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi guru ngaji dan mudin nikah di Kabupaten Jember.
14. Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Jember tentang Bantuan Selisih Iuran Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan



Pekerja Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III di wilayah Kabupaten Jember.

15. Kerja Sama dengan BPJS Kesehatan tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

4.3.2 Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Dalam melaksanakan pembangunan di daerah, pemerintah daerah terkadang dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan yang tidak hanya terpenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan seperti keterbatasan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi, serta anggaran yang dimiliki maka dilakukan Kerja Sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dalam upaya meningkatkan efisiensi, pendapatan asli daerah dan pengelolaan potensi daerah serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sepanjang Tahun 2021 kebijakan dan kegiatan-kegiatan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Kerja Sama dengan Puslitkoka tentang Pengembangan Kluster Agribisnis Berbasis Komoditas Kopi dan Kakao.
2. Kerja Sama dengan Universitas Negeri Surabaya tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Pengabdian Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
3. Kerja Sama dengan gerakan OK OCE (*One Kecamatan One Center Entrepreneur*) tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.
4. Kerja Sama dengan PT. Merpati Training Center tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sektor Penerbangan di wilayah Jember dan sekitarnya.
5. Kerja Sama dengan PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.



6. Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
7. Kerja Sama dengan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. tentang Pengembangan Teknologi Infomasi dan Komunikasi untuk implementasi Jember *Smart City*.
8. Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Jember tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
9. Kerja Sama dengan PT. Magna Karsa Mulya tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.
10. Kerja Sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.
11. Kerja Sama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Tbk. tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.
12. Kerja Sama dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jember tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah Dengan Sistem Online di Kabupaten Jember.
13. Kerja Sama dengan PT. Bank Central Asia Tbk. tentang Layanan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Jember.
14. Kerja Sama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Jember tentang Pelayanan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dengan Sistem Online.
15. Kerja Sama dengan Universitas Jember tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



16. Kerja Sama dengan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Sinergi Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
17. Kerja Sama dengan Ikatan Alumni Universitas Airlangga dan Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Jember tentang Kerja Sama Peningkatan Sinergi, Kolaborasi dan Akselerasi Dalam Rangka Penguatan Kapasitas Satgas COVID-19 Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember sebagai upaya peningkatan kepatuhan protokol kesehatan.
18. Kerja Sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember, Politeknik Negeri Jember, PT. Bank Negara Indonesia KCU Jember dan PT. Permodalan Nasional Madani Cabang Jember.
19. Kerja Sama dengan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka Peningkatan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Jember.
20. Kerja Sama dengan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. tentang Kerja Sama Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Guru Ngaji dan Mudin (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) di Kabupaten Jember.
21. Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
22. Kerja Sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
23. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Al Qodiri Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



24. Kerja Sama dengan STIKES Bhakti Al Qodiri dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
25. Kerja Sama dengan Universitas Islam Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
26. Kerja Sama dengan Universitas dr. Soebandi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
27. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Bangsa dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
28. Kerja Sama dengan Universitas Moch. Sroedji Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
29. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Al Fallah As Sunniyyah Kencong Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
30. Kerja Sama dengan Universitas PGRI Argopuro Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
31. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Al Qodiri Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
32. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Negeri Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
33. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nurul Qarnain dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



34. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mandala Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
35. Kerja Sama dengan Ma'had Aly Nurul Qarnain dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
36. Kerja Sama dengan Ma'had Aly PP. Assunniyah Kencong Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
37. Kerja Sama dengan Universitas Katolik Darma Cendika dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
38. Kerja Sama dengan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Di Kabupaten Jember.
39. Addendum Kerja Sama dengan Universitas Jember tentang sinergi dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
40. Addendum Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Jember tentang sinergi dalam Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
41. Kerja Sama dengan Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
42. Kerja Sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
43. Kerja Sama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



44. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Al Muhsin Yogyakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
45. Kerja Sama dengan Universitas Ahmad Dahlan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
46. Kerja Sama dengan Universitas Telkom dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
47. Kerja Sama dengan Institut Pertanian Bogor dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
48. Kerja Sama dengan Universitas Islam Indonesia dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
49. Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
50. Kerja Sama dengan Politeknik Negeri Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
51. Kerja Sama dengan Universitas Islam Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
52. Kerja Sama dengan Universitas Merdeka Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
53. Kerja Sama dengan Institut Pesantren KH. Abdul Chalim dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



54. Kerja Sama dengan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan (ITSK) RS dr. Soepraoen dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
55. Kerja Sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
56. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Darussalam Blok Agung Banyuwangi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
57. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
58. Kerja Sama dengan Akademi Kesehatan Rustida dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
59. Kerja Sama dengan Akademi Kebidanan Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
60. Kerja Sama dengan Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
61. Kerja Sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
62. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
63. Kerja Sama dengan Universitas Ibrahimy Situbondo dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



64. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Miftahul Ulum Lumajang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
65. Kerja Sama dengan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
66. Kerja Sama dengan Universitas Nurul Jadid dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
67. Addendum Kerja Sama dengan Universitas Negeri Surabaya tentang sinergi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
68. Kerja Sama dengan DPP ASITA (*Association Of The Indonesian Tours And Travel Agencies*) tentang Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember.
69. Kerja Sama dengan DPP ITLA (*Indonesian Tour Leaders Association*) tentang Pengembangan Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember.
70. Kerja Sama dengan Politeknik Pariwisata (POLTEKPAR) Lombok tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Sektor Pariwisata Di Kabupaten Jember.
71. Kerja Sama dengan Akademi Farmasi Jember dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
72. Kerja Sama dengan STIKES Banyuwangi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
73. Kerja Sama dengan STKIP PGRI Lumajang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



74. Kerja Sama dengan Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
75. Kerja Sama dengan Institut Dirosat Islamiyah Al Amien Prenduan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
76. Kerja Sama dengan Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
77. Kerja Sama dengan Institut Teknologi Bandung dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
78. Kerja Sama dengan Institut Seni Indonesia Yogyakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
79. Kerja Sama dengan Universitas Yudharta Pasuruan dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
80. Kerja Sama dengan Politeknik LPP Yogyakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
81. Kerja Sama dengan Ma'had Aly Nurul Jadid dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
82. Kerja Sama dengan Universitas PGRI Banyuwangi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
83. Kerja Sama dengan Universitas Sebelas Maret dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



84. Kerja Sama antara Sekretariat Daerah Kabupaten Jember dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Unej tentang Sinkronisasi Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap Produk Hukum Daerah.
85. Kerja Sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
86. Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
87. Kerja Sama dengan Universitas Gadjah Mada dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
88. Kerja Sama dengan STIKES Hafshawaty Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
89. Kerja Sama dengan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STIBA) Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
90. Addendum Kerja Sama dengan Universitas Brawijaya tentang sinergi dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
91. Kerja Sama dengan Universitas Airlangga dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
92. Kerja Sama dengan Universitas Indonesia dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.



93. Kerja Sama dengan Universitas Udayana dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
94. Kerja Sama dengan Universitas Negeri Malang dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.
95. Kerja Sama dengan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya.

4.3.3 Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Upaya peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan, serta penciptaan situasi ketentraman, keamanan dan ketertiban yang dilakukan dengan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi vertikal, diantaranya adalah:

1. Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Jember dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Survey dan Pemetaan serta Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah, berkoordinasi dengan TOPDAM V Brawijaya guna menginventarisir nama-nama pulau dan unsur rupa bumi serta menginventarisir batas kecamatan dan Desa di Kabupaten Jember.

4.3.4 Pembinaan Batas Wilayah

Kabupaten Jember berbatasan dengan wilayah Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di sebelah utara serta Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur. Dalam rangka optimalisasi pengelolaan potensi daerah serta untuk menegaskan wilayah administratif Kabupaten sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah,



maka Kabupaten Jember pada tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pembinaan batas wilayah sebagai berikut:

1. Koordinasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Daerah

Meliputi 1 (satu) segmen batas yaitu segmen batas dengan Kabupaten Probolinggo dengan hasil bahwa segmen batas dengan Kabupaten Probolinggo telah rampung dan menunggu tahap pengundangan Permendagri tentang Batas Wilayah Antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Probolinggo oleh Kementrian Dalam Negeri. Pada tahun 2021 telah diterbitkan Permendagri nomor 23 Tahun 2021 mengenai batas wilayah antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Probolinggo.

2. Fasilitasi penegasan batas wilayah desa

Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Gumukmas dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di 8 (delapan) desa yakni Desa Karangrejo, Desa Purwoasri, Desa Tembokrejo, Desa Kepanjen, Desa Bagorejo, Desa Gumukmas, Desa Mayangan, dan Desa Menampu.
- b. Diwujudkan dalam bentuk peta batas standar nasional yang tersebar di 8 (delapan) desa di wilayah Kecamatan Gumukmas.

Dilaksanakan di wilayah Kecamatan Silo dengan hasil sebagai berikut:

- a. Dilaksanakan di 9 (sembilan) desa yakni Desa Garahan, Desa Karangharjo, Desa Mulyorejo, Desa Harjomulyo, Desa Pace, Desa Sumberjati, Desa Silo, Desa Sidomulyo, dan Desa Sempolan.
- b. Diwujudkan dalam bentuk peta batas standar nasional yang tersebar di 9 (sembilan) desa di wilayah Kecamatan Silo.

Penegasan batas wilayah desa ini dilaksanakan oleh tim teknis Kabupaten Jember bekerja sama dengan Topografi Daerah Militer V/Brawijaya yang diwujudkan dalam kegiatan pemasangan tugu batas serta penerbitan Peta Batas Desa.

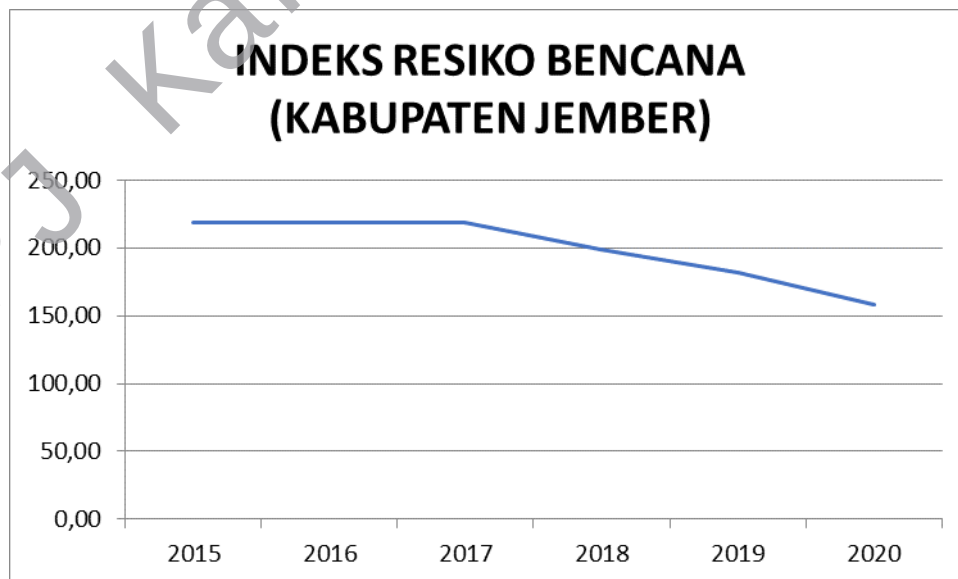
Adapun proses yang dilaksanakan untuk pemasangan dan penerbitan peta batas dimaksud antara lain orientasi lapangan, pemeriksaan lapang bersama penduduk lokal, pengukuran dengan GPS, pengolahan data ukur serta penyajian dalam peta.

4.3.5 Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan dengan potensi bencana (hazard potency) yang sangat tinggi. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Timur bahwa pada Tahun 2020 Jember menempati posisi ke-4 sebagai kabupaten/kota yang memiliki resiko bencana tinggi, dengan nilai indeks sebesar 158,19. Meskipun terdapat trend penurunan Indeks Risiko Bencana, namun Jember masih menjadi wilayah yang sangat rawan. Hal ini dikarenakan potensi bencana yang ada diantaranya gempa bumi, tsunami, likuifaksi, gunung meletus, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan lain sebagainya, yang berimplikasi terhadap perlunya pengamanan warga Jember dari dampak yang diakibatkan oleh bencana.

Gambar 4.1

Nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2020



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah



Pada sisi utara dan timur, kondisi topografi wilayah Jember sebagian besar didominasi oleh pegunungan dan perbukitan, dengan tingkat kelerengan mulai sedang hingga tinggi. Pada wilayah ini berpotensi terjadi bencana tanah longsor dan banjir bandang saat curah hujan sangat tinggi. Wilayah tersebut adalah lereng Argopuro yang meliputi Kecamatan Sumberbaru, Tanggul, Bangsalsari, Panti, Sukorambi, Patrang, Arjasa hingga Jelbuk; Jember bagian Timur yakni di lereng barat Gunung Raung wilayah kecamatan Sumberjambe, Ledokombo, dan Silo; dan Gugusan Mandigu yang berada di Kecamatan Tempurejo dan Mumbulsari.

Pada bagian selatan Kabupaten Jember berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia, dan berada pada pinggiran tumbukan lempengan besar, yaitu lempeng Eurasia dan Hindia-Australia. Tumbukan lempeng ini berpotensi besar menimbulkan gempa tektonik yang diikuti dengan bencana tsunami. Wilayah ini mencakup Kecamatan Kencong, Gumukmas, Puger, Wuluhan, Ambulu dan Tempurejo. Pada wilayah ini juga terdapat kawasan likuifaksi yang membentang antara Puger dan Kencong.

Selain itu, di Kabupaten Jember terdapat 2 gunung aktif, yaitu Gunung Raung dan Gunung Lamongan, yang keduanya masih aktif dan berpotensi menyebabkan bencana erupsi gunung berapi. Wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Raung diantaranya Kecamatan Sumberjambe, Ledokombo, Sukowono, Mayang, Kalisat dan Silo. Sedangkan wilayah yang berpotensi terdampak erupsi Gunung Lamongan adalah Kecamatan Sumberbaru. Pada wilayah-wilayah ini juga sering terjadi tanah longsor dan banjir bandang.

Sedangkan di wilayah tengah atau Perkotaan Jember merupakan kawasan yang rawan bencana angin puting beliung dan banjir genangan. Hal ini mengingat Perkotaan Jember merupakan wilayah cekungan yang dikelilingi pegunungan dan perbukitan.



1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya

Mengacu kepada pengertian bencana, maka ada 2 jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Jember, yaitu Bencana Alam dan Bencana Non Alam.

Bencana alam yang terjadi di tahun 2021 sebanyak 155 kejadian yang tersebar di 31 kecamatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Banjir sebanyak 46 kali
- b. Tanah longsor 27 kali
- c. Angin Puting Beliung sebanyak 64 kali
- d. Kebakaran sebanyak 13 kali
- e. Erupsi Gunung Api sebanyak 0 kali
- f. Kekeringan sebanyak 0 kali
- g. Gempa bumi sebanyak 5 kali

Bencana non alam yang terjadi di tahun 2021 adalah wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang tidak hanya terjadi di Jember, namun telah menjangkiti seluruh negara di dunia. Pandemi ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020.

Virus SARS-CoV-2 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan (droplet) yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Penyakit Covid-19 paling menular saat orang yang menderitanya memiliki gejala, meskipun penyebaran mungkin saja terjadi sebelum gejala muncul. Langkah-langkah pencegahan yang direkomendasikan di antaranya mencuci tangan, menggunakan masker, menutup mulut saat batuk, menjaga jarak dari orang



lain, serta pemantauan dan isolasi diri untuk orang yang mencurigai bahwa mereka terinfeksi.

Pandemi ini telah menyebabkan gangguan sosioekonomi global. Di Kabupaten Jember, sampai dengan akhir Tahun 2021 Covid-19 telah menjangkiti 16.226 orang. Dari jumlah tersebut 14.768 orang sudah sembuh, 1.456 orang diantaranya meninggal dunia, dan sisanya masih dirawat atau isolasi mandiri.

Tabel 4.2
Perkembangan Hasil Pencapaian Pelaksanaan Program Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Tahun 2017 – 2021

Uraian Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Terciptanya penanggulangan bencana yang cepat dan akurat sehingga mengurangi beban masyarakat yang tertimpa bencana dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam, koordinasi secara rutin, penyuluhan dan simulasi tentang bencana, pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi pengungsi korban bencana alam meliputi :					
1. Banjir Kec. Ambulu, Bangsalsari, Gumukmas, Jelbuk, Kalisat, Kaliwates, Mumbulsari, Patrang, Puger, Rambipuji, Sukorambi, Tempurejo, dan Wuluhan	20 x	40 x	15 x	17 x	46 x
2. Banjir Rob/Abrasi Kec. Puger	-	1 x	1 x	-	-
3. Tanah Longsor Kec. Arjasa, Jelbuk, Kaliwates, Ledokombo, Patrang, Puger, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, Tanggul dan Tempurejo	33 x	51 x	22 x	16 x	27 x
4. Angin Puting Beliung Kec. Ajung, Arjasa, Balung, Bangsalsari, Jenggawah, Jombang, Kalisat, Kaliwates, Ledokombo, Mayang, Mumbulsari, Pakusari, Panti, Patrang, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sumberbaru, Summersari, Tempurejo, dan Wuluhan	49 x	58 x	86 x	57 x	64 x
5. Kebakaran Kec. Ajung, Ambulu, Arjasa, Balung, Gumukmas, Kalisat, Kaliwates, Ledokombo, Mayang, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Semboro, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumberjambe, Summersari dan, Wuluhan	19 x	54 x	67 x	26 x	13 x
6. Kebakaran Hutan dan Lahan Kec. Ajung, Ambulu, Gumukmas, Jelbuk, Kalisat, Ledokombo, Pakusari, Panti, Patrang, Silo, Sumberjambe, Summersari,	2 x	9 x	35 x	-	-



Uraian Indikator	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
Tempurejo, dan Wuluhan					
7. Kekeringan	-	3 x	39 x	2 x	-
Kec. Ajung, Ambulu, Arjasa, Jelbuk, Jenggawah, Ledokombo, Pakusari, Panti, Patrang, Puger, Rambipuji, Silo, Sukorambi, Sukowono, Sumberbaru, Sumbersari, dan Wuluhan					
8. Gempa Bumi	8 x	8 x	21 x	1 x	5 x
Kec. Ambulu, Kencong, Ledokombo dan Patrang					
9. Erupsi Gunung Api	-	-	-	1 x	-
Kec. Sumberjambe, Ledokombo					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Melihat kondisi bencana di Kabupaten Jember pada tahun 2021 bila dibandingkan dengan Tahun 2020, terjadi pergeseran jenis bencana. Jumlah kejadian bencana alam berkurang sampai dengan 28%, yaitu dari 121 kali menjadi 155 kali, dan tidak ada korban meninggal dunia. Namun, kejadian bencana non alam, yaitu pandemi Covid-19 telah mengakibatkan 1.456 orang meninggal dunia.

Kejadian bencana alam pada Tahun 2021 didominasi oleh angin puting beliung (64 kali) diikuti banjir (46 kali), dan tanah longsor (27 kali).

Upaya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jember, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Penanggulangan bencana merupakan gerak terpadu antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Membentuk masyarakat yang tangguh, sekaligus siaga menghadapi bencana adalah kerja bersama yang harus diinisiasi, didukung dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Upaya-upaya yang dilakukan BPBD dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana diantaranya:

- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai wilayah (perhutani, BKSDA, Perkebunan) di Jember untuk melakukan kegiatan penghijauan/vegetasi untuk mengurangi daya tekanan air hujan pada tanah yang mudah bergerak (bahaya bencana hidrometeorologi).



- b. Melakukan langkah-langkah pengurangan resiko bencana diantaranya adalah:
 - 1) Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
 - 2) Bekerjasama dengan kelompok masyarakat/ relawan dan dunia usaha untuk memberikan inisiasi peningkatan kapasitas masyarakat.
 - 3) Melakukan kooordinasi dengan wilayah Kecamatan rawan bencana untuk menentukan tempat aman sementara dan melakukan simulasi.
- c. Memasang rambu bencana sebanyak 130 unit dan papan informasi bencana sebanyak 45 unit pada lokasi-lokasi yang rawan bencana, seperti kawasan rawan longsor, zona tsunami, zona erupsi dan larangan mandi/berenang di pantai selatan.
- d. Membentuk 9 Desa Tangguh Bencana pada daerah-daerah kawasan rawan bencana, seperti lereng gunung, pesisir laut, dataran rendah dan sebagainya, dengan rincian 5 desa melalui APBD, 1 desa melalui APBD Provinsi dan 3 desa melalui Dana Desa.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan melalui media cetak (brosur, surat kabar, spanduk, baliho) maupun media elektronik (radio dan televisi).
- f. Melakukan simulasi dan gladi kebencanaan pada instansi-instansi perkantoran, sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
- g. Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mengadakan kerja bakti, perbaikan secara gotong royong dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.
- h. Pendistribusian bantuan berupa:
 - i) Bantuan Sembako
 - ii) Bantuan Sandang dan Papan
 - iii) Bantuan peralatan rumah tangga dan kebersihan



- i. Pemulihan rumah terdampak pasca bencana melalui bantuan stimulan bahan bangunan dan gotong royong memperbaiki rumah.
- j. Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 berupa:
 - 1) Pendirian Posko Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 di Pendopo Wahya Wibawagraha dan Jember Sport Garden
 - 2) Penyemprotan disinfektan pada rumah atau lingkungan warga terdampak.
 - 3) Pemakaman terhadap jenazah yang terinfeksi atau terduga Covid-19.
 - 4) Melaksanakan pengawasan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum di seluruh wilayah bersama dengan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan.
 - 5) Melaksanakan operasi yustisi penggunaan masker untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Jember selama Tahun 2021 dikategorikan merupakan bencana lokal dan nasional, dimana penanganan bencana dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Jember. Status darurat bencana yang diterbitkan diantaranya:

- a. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/494/1.12/2021 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung dan Banjir Rob di Kabupaten Jember;
- b. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/548/1.12/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Jember;
- c. Keputusan Bupati Jember Nomor : 188.45/548.1/1.12/2021 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Angin Kencang di Kabupaten Jember.



3. Sumber dan Jumlah Anggaran

- a. Anggaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 mencapai Rp. 9.131.900.446,- (Sembilan milyar seratus tiga puluh satu juta sembilan ratus ribu empat ratus empat puluh enam rupiah) dengan realisasi persentase capaian sebesar 41,27% atau sebesar Rp. 3.768.812.969,- (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah) yang digunakan untuk pelaksanaan 2 Program, 9 Kegiatan dan 36 Sub Kegiatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Jember, dan pengecekan daerah berisiko bencana dengan memanfaatkan aplikasi inaRISK dari BNPB.
- b. Sosialisasi dan pelatihan kebencanaan kepada seluruh lapisan masyarakat dan relawan yang ada di wilayah rawan bencana.
- c. Mendorong gerakan partisipatif bersama masyarakat seperti memangkas cabang dahan pohon atau menebang pohon yang rawan tumbang.
- d. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan informasi awal mengenai bahaya bencana alam di lokasi-lokasi rawan bencana dan tanda-tanda peringatan bencana seperti pemasangan rambu dan papan informasi bencana pada jalur regional dan kawasan wisata, pemasangan spanduk dan baliho menjelang musim kemarau dan musim penghujan, pemasangan Flood Early Warning System (untuk banjir) di lokasi Kali Tanggul, pemeliharaan EWS Tsunami dan EWS Gerakan Tanah.



- e. Menyiapkan/memutakhirkan dan mensimulasikan Rencana Kontijensi Bencana dan menyusun Rencana Operasi atau SOPnya dengan melibatkan seluruh stakeholder setempat termasuk TNI dan Polri.
- f. Aktif dalam memantau informasi prakiraan cuaca yang diterbitkan oleh BMKG, terutama cuaca di daerah beresiko bencana.
- g. Menyiapkan stok bantuan pangan untuk korban bencana dan bantuan peralatan rumah tangga lainnya.
- h. Menyiapkan stok bantuan material bahan bangunan untuk perbaikan rumah warga terdampak bencana.
- i. Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) untuk seluruh kecamatan, yang keanggotaannya terdiri Muspika, Desa, Destana, tokoh masyarakat, dan pemuda relawan bencana.
- j. Mendirikan Posko Siaga Darurat Bencana Alam di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dan seluruh kantor Kecamatan.

5. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

- a. Banjir, retakan tanah daratan tinggi dan tanah langsor sebagai akibat penggundulan hutan terutama di wilayah utara.
- b. Erupsi Gunung Api Raung di Kabupaten Jember bagian timur.
- c. Gelombang pasang dan tsunami, rawan terjadi di daerah pantai selatan Kabupaten Jember.
- d. Angin puting beliung, rawan terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Jember
- e. Kebakaran lahan dan hutan di lereng Gunung Argopuro, Gunung Watangan dan Gunung Manggar.

4.3.6 Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan ketertiban Umum merupakan prasyarat mutlak bagi kenyamanan hidup penduduk, sekaligus menjadi landasan utama bagi pembangunan wilayah. Sesuai dengan Pasal 12 ayat 1 huruf e Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan unsur Pemerintahan Wajib dan menjadi Pelayanan Dasar. Pada tahun 2020 terlihat bahwa kondisi keamanan dan ketertiban Kabupaten Jember relatif stabil atau terkendali. namun kerap juga masih terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berpotensi meningkatkan keresahan dan menimbulkan rasa tidak aman masyarakat, seperti konflik horisontal, aksi premanisme, unjuk rasa yang anarkis, dan tindakan kejahatan.

1. Gangguan Yang Terjadi

Gangguan yang seringkali terjadi bagi terciptanya ketertiban, kenyamanan serta ketentraman umum antara lain adalah kondisi masyarakat Jember yang heterogen dan cenderung mencari jalan pintas yang seringkali mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta tuntutan masyarakat akan gaya hidup yang tinggi. Namun demikian selama Tahun 2021 tidak terjadi gangguan yang sifatnya menonjol, tidak terdapat gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis SARA, anarkisme, separatisme ataupun konflik lainnya.

Disisi lain Sosialisasi peraturan daerah yang masih belum menyentuh pada semua lapisan masyarakat, seringkali dijadikan alat pembenar untuk melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan daerah, padahal sebagian besar peraturan daerah yang ada sudah dapat dipahami dan dimengerti oleh sebagian besar masyarakat dan seringkali para pelanggar peraturan daerah maupun kebijakan Bupati lainnya adalah orang-orang yang sama dan seringkali melakukan gangguan terhadap ketertiban umum.



Disadari bahwa Kabupaten Jember merupakan salah satu Kabupaten dengan jumlah penduduk besar dan heterogenitas budaya yang memiliki banyak varian. Selain itu, letak geografis yang sangat strategis dan banyaknya potensi pariwisata menarik para investor lokal maupun manca negara untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten Jember. Selain memberikan dampak positif, juga dapat berpotensi memberikan dampak negatif, diantaranya mudah masuknya budaya luar yang kurang baik, heterogenitas masyarakat yang tinggi cenderung menimbulkan persoalan tersendiri dalam melakukan penertiban dan menjaga ketentraman lingkungan. Persinggungan antar budaya dan kebiasaan, tuntutan pola hidup modernitas tinggi, dan keberanekaragaman kepentingan cenderung akan melahirkan kondisi lingkungan berpotensi mengganggu terjaganya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Jember yang memiliki tupoksi mencegah gangguan, menangani gangguan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Hal ini juga berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Situasi dan kondisi yang kondusif merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi terselenggaranya pelaksanaan pemerintahan di daerah. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember selalu dituntut untuk bertindak



responsif dan lebih profesional. Demi tercapainya profesionalisme tersebut, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah pegawai yang berada di bawah kendali Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah 496 orang pegawai. Di MAKO sejumlah 154 pegawai, dan di Kecamatan se-Kab. Jember 342 pegawai dengan rincian:

a. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Golongan

- Golongan I : 11 orang
- Golongan II : 102 orang
- Golongan III : 40 orang
- Golongan IV : 6 orang
- Non Golongan : 337 orang

b. Distribusi Pegawai Satpol PP berdasarkan Pendidikan Terakhir

- SD/Sederajat : 6 orang
- SMP/Sederajat : 29 orang
- SMA/Sederajat : 425 orang
- Diploma : 1 orang
- Strata I (S1) : 30 orang
- Strata II (S2) : 6 orang

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan keteriban umum diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2021 pada pos DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember sejumlah Rp.18.399.664.160,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh



sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) yang terdiri dari Rp.12.465.396.120,- (duabelas milyar empat ratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh rupiah) digunakan untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai berupa gaji dan tunjangan), sedangkan sisanya digunakan untuk Belanja Langsung (Program dan Kegiatan SKPD) sebesar Rp 5.934.268.050,- (lima milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima puluh rupiah).

5. Penanggulangan dan Kendala

Guna melakukan penanggulangan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum, selalu dilakukan upaya-upaya persuasif dan sosialisasi menyeluruh kepada segenap lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Penanggulangan dalam hal ini hanya bersifat pencegahan. Adapun beberapa hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum antara lain dengan mengadakan patroli rutin, penjagaan serta pembentukan dan pembinaan Satuan Linmas di tiap desa/kelurahan, bekerjasama dengan pihak-pihak lain dalam usaha menjaga situasi tetap kondusif, beberapa diantaranya adalah kerjasama dengan pihak aparat keamanan, dan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum tidak ditemui kendala yang berarti, karena usaha dan kerjasama penanggulangan secara simultan terus dilaksanakan. Namun apabila diperlukan langkah-langkah represif dilakukan agar sesuai dengan peraturan yang ada dengan memperhatikan asas-asas kemanusiaan.

6. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam setiap penanggulangan dan penindakan dalam rangka menertiban dan menjaga ketentraman lingkungan, Satuan Polisi Pamong



Praja bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya seperti pihak Kepolisian maupun TNI yang juga senantiasa berperan serta secara aktif dalam usaha penanggulangan tersebut. Paduan antara 3 unsur aparat keamanan dan ketertiban dengan dibantu masyarakat merupakan satu kekuatan yang sangat kokoh dalam usaha mewujudkan ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat.

Meskipun belum terlaksana secara maksimal, namun dari beberapa hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dijadikan pelajaran dan pedoman bagi Polisi Pamong Praja agar ke depan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara lebih baik, proposional dan profesional demi mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya berujung pangkal pada tercapainya kemakmuran bersama.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kabupaten Jember Akhir Tahun Anggaran 2021, sebagai bentuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam kurun waktu satu tahun, sebagaimana telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2021 ini, merupakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati periode tahun 2021-2024 tahun pertama yang disampaikan oleh Bupati periode tahun 2021-2024.

Pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 telah dilakukan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Kinerja pembangunan yang telah dilakukan menunjukkan hasil optimal, di sisi lain masih ada kinerja pembangunan yang menunjukkan kenyataan kurang optimal dan membutuhkan perhatian kita bersama. Hal itu perlu dimaklumi karena pada hakikatnya pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang meliputi dimensi waktu, ekonomi, sosial budaya politik serta keamanan dan ketertiban.

Pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya telah dicapai selama ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi dari semua pihak (*stakeholder*) dan diharapkan dapat terus berjalan dengan baik sesuai dengan kewenangan tugas dan kompetensi masing-masing, sehingga seluruh



program pembangunan telah disepakati dan menjadi tujuan bersama dapat terwujud.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Kabupaten Jember pada Tahun 2021 masih perlu mendapat masukan, saran dan koreksi dalam bentuk Rekomendasi DPRD agar menjadi sempurna. Saya berharap semua yang telah kita laksanakan dapat membawa manfaat bagi masyarakat Kabupaten Jember.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan, perlindungan serta ridhlo-Nya kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Jember, Maret 2022

BUPATI JEMBER

Ir. H.HENDY S, ST. IPU